

**SHARI'ATE NET FARM INCOME – KONSEP INCOME BIDANG
PERTANIAN: PENDEKATAN POLITIK EKONOMI
AKUNTANSI
(STUDI KASUS: PT BISI INTERNATIONAL)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian

Persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Vaisal Amir

0810230152

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

***Shari'ate Net Farm Income* – Konsep *Income* Bidang Pertanian: Pendekatan
Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus: PT BISI International)**

Yang disusun oleh:

Nama : Vaisal Amir
NIM : 0810230152
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Akuntansi

telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk dijadikan sebagai syarat
ujian skripsi

Dosen Pembimbing,

Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

NIP. 19691231 200912 1 002

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Skripsi dengan judul:

***Shari'ate Net Farm Income* – Konsep *Income* Bidang Pertanian: Pendekatan
Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus: PT BISI International)**

Yang disusun oleh:

Nama : Vaisal Amir
NIM : 0810230152
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Akuntansi

telah melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data secara studi literature dan wawancara sebagai syarat ujian skripsi

Dosen Pembimbing,

Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

NIP. 19691231 200912 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Vaisal Amir
NIM : 0810230152
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Shari'ate Net Farm Income – Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus: PT BISI International)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Juli
2012

Yang membuat pernyataan,

Vaisal Amir
NIM.0810230152

CURRICULUM VITAE

1 Data Pribadi

Nama	Vaisal Amir
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status	Belum Menikah
Tempat Tanggal Lahir	Nganjuk, 3 April 1988
Umur	24
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Bahasa	Indonesia dan Bahasa Inggris (Pasif)
Alamat	



1.1.1 Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Nganjuk 64416

2 Pendidikan

Universitas (2008 – 2012)	Universitas Brawijaya, Malang-Jawa Timur Jurusan : Akuntansi IPK : 3,58 / 4,00
SMA (2003 – 2006)	SMAN 2 Nganjuk, Jawa Timur Jurusan : IPS
SMP (2000–2003)	SMPN 1 Nganjuk, Jawa Timur
SD (1994–2000)	SDN Kartoharjo 1 Nganjuk, Jawa Timur

3 Pengalaman Kerja

Finance Manager
2010 – 2012

Jobdesc

- Mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan.
- Membuat rancangan harga penjualan.
- Bersama general manager, marketing manager dan creative director membuat rencana pemasaran serta analisis pasar.
- Membantu marketing manager memasarkan produk kepada klien.

**EnviroFive Creative Advertising,
Malang-Jawa Timur.**

Tentang Perusahaan

- Merupakan perusahaan *advertising* yang didirikan oleh lima orang mahasiswa dari berbagai universitas dan jurusan pada tahun 2010. EnviroFive Creative Advertising berlokasi di Kota Malang. Produk dari Enviro diantaranya yaitu: magazine, concept & idea , advertising, clothing. Visi Enviro adalah Menjadikan Envirofive Creative sebagai perusahaan *advertising* terkemuka nasional yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. <http://www.fiveenviro.com/>

KKN-P PTPN X (Persero) Pabrik Gula Ngadiredjo
2011

Jobdesc

- Memahami operasional perusahaan (terutama proses produksi).
- Memahami dan mengevaluasi siklus pengeluaran perusahaan.

Tentang Perusahaan

- Pabrik Gula Ngadiredjo Kediri merupakan salah satu unit usaha dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bergerak di bidang usaha pengolahan bahan baku tebu menjadi produksi utama gula pasir dengan hasil samping tetes yang digunakan sebagai bahan baku Alkohol, Spiritus untuk keperluan medis.

4 Pengalaman Organisasi

Departemen
(2008-2009)

- Staf HRD CIES FE-UB 2008/2009

Kepanitiaan

- Anggota Panitia PK2 MABA Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Divisi Trainer 2010/2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan selengkapny dan sebenar-benarnya, guna memberikan gambaran informasi tentang kemampuan serta kualifikasi, kompetensi, dan kredibilitas.

Hormat Saya,

Vaisal Amir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segenap limpahan rahmat, karunia, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Shari'ate Net Farm Income – Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus: PT BISI International)*** untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Selama pelaksanaan kegiatan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari kendala yang dihadapi seperti keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Akan tetapi kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya kepada-Nya hamba menyembah dan hanya kepada-Nya pula hamba meminta pertolongan.
2. Bapak Gugus Irianto, SE., MSA., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang serta selaku Dosen Penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran bagi skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., MSA., Ak., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran bagi skripsi ini.
6. Mas Zaky, terima kasih telah memberikan motivasi serta pencerahan kepada penulis ketika penulis mengalami kebuntuan ide dalam menyusun skripsi.
7. Bapak Aries Musnandar, terima kasih telah memberikan motivasi serta target menyelesaikan skripsi, karena Alhamdulillah berkat target yang Bapak

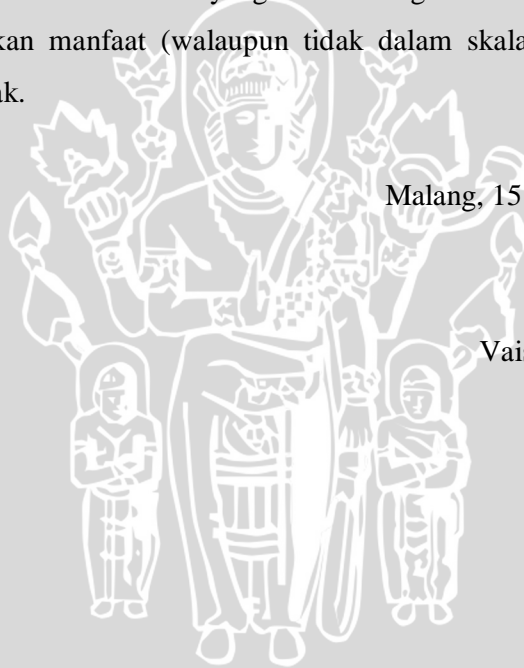
- berikan dan dengan seijin Allah tentunya, penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tanggal 17 Ramadhan 1433H (6 Agustus 2012).
8. Seluruh pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data serta segala informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Pak Tukirin, Bu Aminah dan Pak Muji.
 9. Ayahanda Kusrin dan Ibunda Suhartini, serta adikku Bayu Viantoro yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan.
 10. Teman-teman Genk Asoy: Rio, Yanuar Salih, Sugeng, Ahim, Hafidz, Sofi, Winda, Vega, Rima, Ridha Rochma, Fina, terima kasih telah berkenan menjadi sahabat terbaikku dari susah hingga senang.
 11. Fibrian Rahma Putra, terima kasih sudah menemani penulis mengajukan penelitian di PT BISI International, walaupun pada akhirnya tidak diijinkan melakukan penelitian di sana oleh pihak perusahaan.
 12. Teman susah dan senang ketika penulis masih belum dapat menikmati masa kuliah (masa transisi/2006-2008): Fibrian, Kukuh, Dona, Doni, Anang, Rahman, Galih.
 13. Teman-teman kuliah: Wahyu Aji, Tri Anton, Reza Andre, Yanuar Rakhmat, Reza Arizona, Teguh Suprianto, Taufiq Tri, Rio Malintan dan seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya.
 14. Segenap Dosen Pengajar JAFEB UB terima kasih atas ilmu pengetahuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
 15. Teman-teman di Jl. Sumbersari Gang IV, 280A Malang, Dodo, Mas sulis, Alvian, Aris, Tara, Mirza, dan yang lainnya, yang sudah menjadi keluarga, sahabat, teman curhat, bercanda, teman *sharing* dari awal penulis kuliah hingga penulis menyelesaikan studi selama empat tahun.
 16. Teman-teman di Perumahan Griya Shanta, Andris, Punjung, alfin, Dheka, Bagus yang telah memberikan ijin tinggal serta berbagai fasilitas untuk menyiapkan ujian skripsi.

17. Teman-teman di EnviroFive Creative Advertising, Galih, Tara, Ave, Rahman yang telah memberi masukan, saran, arahan serta motivasi. Terima kasih juga atas pengertiannya karena saya sering ijin.
18. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segenap bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena pada dasarnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sedangkan penulis hanya manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, keterbatasan, dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap datangnya masukan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat menghadirkan manfaat (walaupun tidak dalam skala yang besar) bagi segenap pembaca kelak.

Malang, 15 September 2012

Vaisal Amir



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II POLITIK EKONOMI AKUNTANSI: PERETAS JALAN KONSEP DISTRIBUSI <i>INCOME</i>	16
2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2.1.1. Jenis Penelitian	16
2.1.2. Pendekatan Penelitian	20
2.2. Rerangka <i>Political Economy of Accounting</i>	22
2.2.1. Perkembangan Ekonomi Neoklasik.....	22
2.2.2. Kritik Terhadap Ekonomi Neoklasik.....	26
2.2.3. Teori Ekonomi Politik Klasik	30

2.2.3. <i>Political Ekonomy of Accounting</i>	32
2.3. Sumber dan Jenis Data	39
2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	41
2.4.1. Teknik Pengumpulan Data	41
2.4.2. Teknik AnalisisData	42
2.5. Instrumen Penelitian.....	43
2.6. Refleksi	43
BAB III PENCARIAN KONSEP DITRIBUSI <i>INCOME</i> YANG SESUAI	
DENGAN USAHA TANI.....	44
3.1. Konseptualisasi <i>Net Farm Income</i>	44
3.1.1. <i>Net Farm Income</i> Ala Agromisa Foundation	48
3.1.1. Penggunaan <i>Fair Value</i>	51
3.2. Konsep Laba Akuntansi.....	53
3.3. Konsep Laba Ekonomi	55
3.4. Konsep <i>Value Added</i>	58
3.5. Konsep <i>Shari'ate Value Added</i>	64
3.5. Refleksi.....	72
BAB IV PT BISI INTERNATIONAL	75
4.1. PT Benihinti Sumberintani (PT BISI International)	75
4.2. Lokasi Kantor Pusat dan Anak Perusahaan	77
4.3. Struktur Organisasi.....	77
4.4. Kegiatan Usaha	81
4.4.1. Proses Produksi Terpadu.....	82

4.4.2. Pengawasan dan Pengendalian Mutu.....	85
4.4.3. Pengawasan dan Distribusi.....	86
4.4.4. Unit Pendukung	88
4.5. Penelitian dan Pengembangan	88
4.6. Lain-lain.....	91
4.7. Refleksi.....	92
BAB V EKSPLOITASI: REFLEKSI ATAS PEROLEHAN PENDAPATAN	
PERUSAHAAN	95
5.1. Pendahuluan.....	95
5.2. Celah Distorsi pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	96
5.2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?.....	97
5.2.2. Meningkatkan Pendapatan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	102
5.3. Tafakur terhadap Produk Pertanian PT BISI International.....	114
5.3.1. Kontribusi Jagung Hibrida	114
5.3.2. Dilematik Pestisida	121
5.3.2. <i>Net Farm Income</i> (NFI) dan <i>Value Added</i> (VA) tidak Berpihak kepada Lingkungan	129
5.4. Menguasai Benih.....	136
5.5. Subsidi Pemerintah.....	141
5.6. Refleksi.....	146

BAB VI NEOLIBERALISME: HEGEMONI KORPORASI UNTUK Menguasai Dunia..... 149

- 6.1. Pendahuluan..... 149
- 6.2. Politik Ekonomi Pangan dan Globalisasi: Proses Penyerahan “kekuasaan” oleh Negara kepada Korporasi..... 154
- 6.3. *Bretton Woods Institutions* (BWIs): Jalan Kesengsaraan bagi para Petani 170
- 6.4. PT BISI International dan Perusahaan Pertanian lainnya: VOC di Jaman Modern..... 182
- 6.5. Harga Pasar dalam *Fair Value*: Alat Legalisasi “Perampokan” oleh Korporasi..... 190
- 6.1. Refleksi 201

BAB VII MEWUJUDKAN TRILOGI PERTANIAN: PERTANIAN MANDIRI, PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN AKUNTANSI YANG AKOMODATIF 205

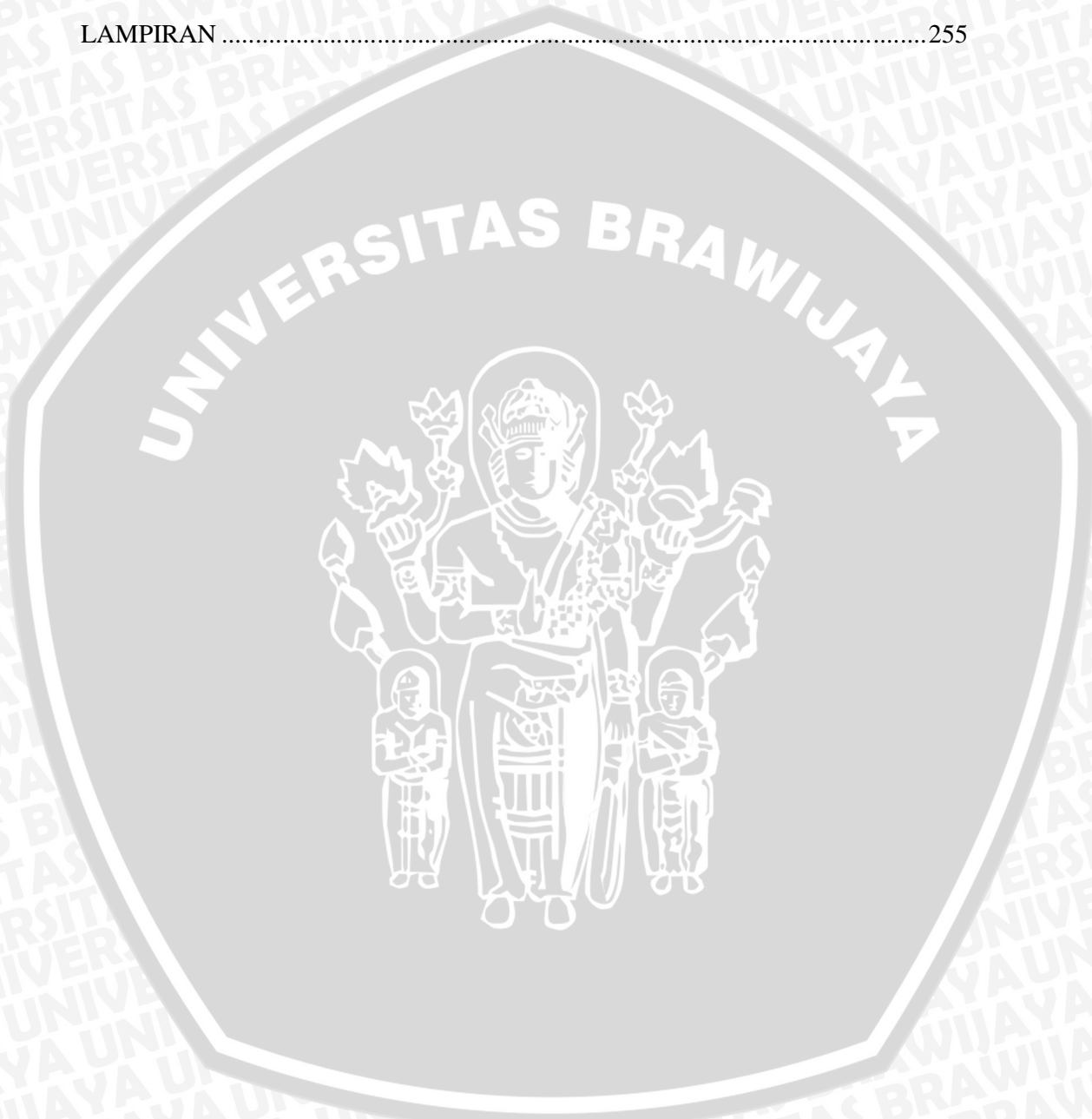
- 7.1 Kesimpulan. 205
- 7.2. Membangun Pertanian yang Mandiri: Institusi Penyokong Pertanian..... 209
- 7.3. Kedaulatan Tanah, Air dan Benih bagi Petani..... 219
- 7.4. Pertanian Berkelanjutan: Kehidupan untuk Generasi Selanjutnya 228
- 7.5. Akomodasi Kemandirian Petani dan Pertanian Berkelanjutan ke dalam Akuntansi..... 234
- 7.6. Refleksi..... 242



7.7. Batasan Penelitian..... 244

DAFTAR PUSTAKA..... 245

LAMPIRAN..... 255



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Total Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	3
Tabel 2.1. Daftar Informan.....	40
Tabel 3.1. Akun Laba Rugi NFI versi Agromisa Foundation	50
Tabel 3.2. Perbedaan Laporan Laba Rugi dan VAS.....	61
Tabel 3.3. <i>Value Added Statement</i>	62
Tabel 3.4. Bentuk dan Sifat Akuntabilitas	67
Tabel 3.5. Laporan <i>Shari'ate Value Added Statement</i>	70
Tabel 4.1. Perjalanan Sejarah PT BISI International	76
Tabel 5.1. Penjualan Benih Induk PT BISI International kepada Petani.....	112
Tabel 5.2. Penjualan Benih Komersial PT BISI International	118
Tabel 5.3. Persentase Penjualan Pestisida atas Penjualan Bersih PT BISI International.....	124
Tabel 5.4. Persentase Penjualan Pestisida atas Benih PT BISI International.....	125
Tabel 5.5. Laba Bersih PT BISI International.....	133
Tabel 5.6. Biaya Tenaga Ahli PT BISI International.....	137
Tabel 5.7. Pendapatan PT BISI International dari Pembelian oleh Pemerintah....	142
Tabel 6.1. Daftar sepuluh negara Importir Pangan Dunia.....	156
Tabel 6.2. Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia.....	161
Tabel 6.3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit Tahun 2005-2010	165
Tabel 6.4. Nilai Aset PT BISI International.....	166
Tabel 6.5. Pajak Penghasilan Bersih PT BISI International.....	167

Tabel 6.6. Nilai Pembayaran Royalti PT BISI International..... 177

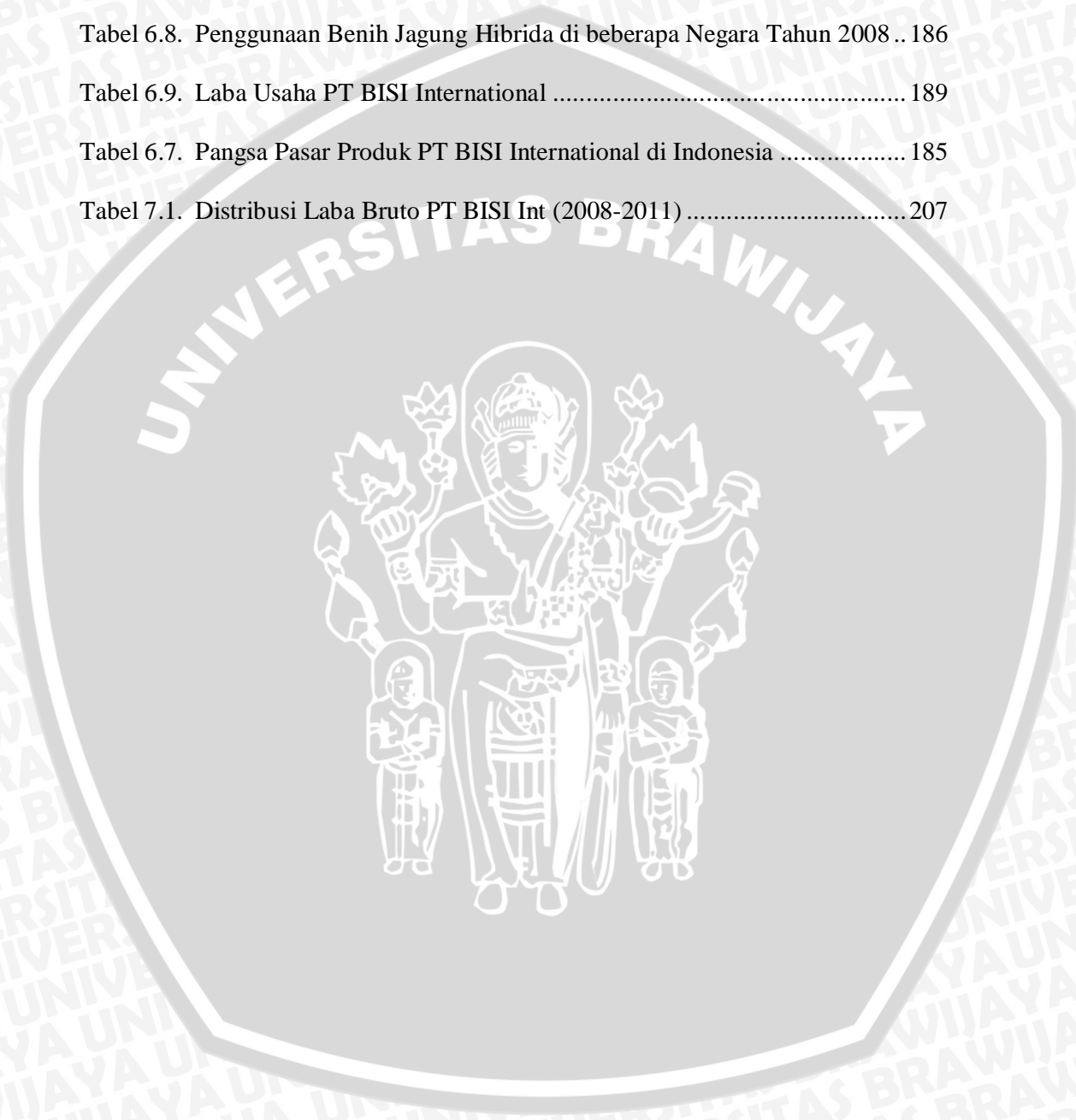
Tabel 6.7. Pangsa Pasar Produk PT BISI International di Indonesia 185

Tabel 6.8. Penggunaan Benih Jagung Hibrida di beberapa Negara Tahun 2008 .. 186

Tabel 6.9. Laba Usaha PT BISI International 189

Tabel 6.7. Pangsa Pasar Produk PT BISI International di Indonesia 185

Tabel 7.1. Distribusi Laba Bruto PT BISI Int (2008-2011) 207



DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1.	Estimasi Kebutuhan Nasional Benih Jagung Hibrida	117
Grafik 5.2.	Jumlah Ekuitas Perusahaan (2006-2010)	119
Kurva 6.1.	Pembentukan Harga Keseimbangan (sebagai dasar penilaian <i>fair value</i> yang sempurna).....	195
Kurva 6.2.	Kondisi Ideal Pembentukan <i>Fair Value</i> Sempurna	196
Grafik 7.1.	Kue Distribusi Laba Bruto (2008-2011)	208



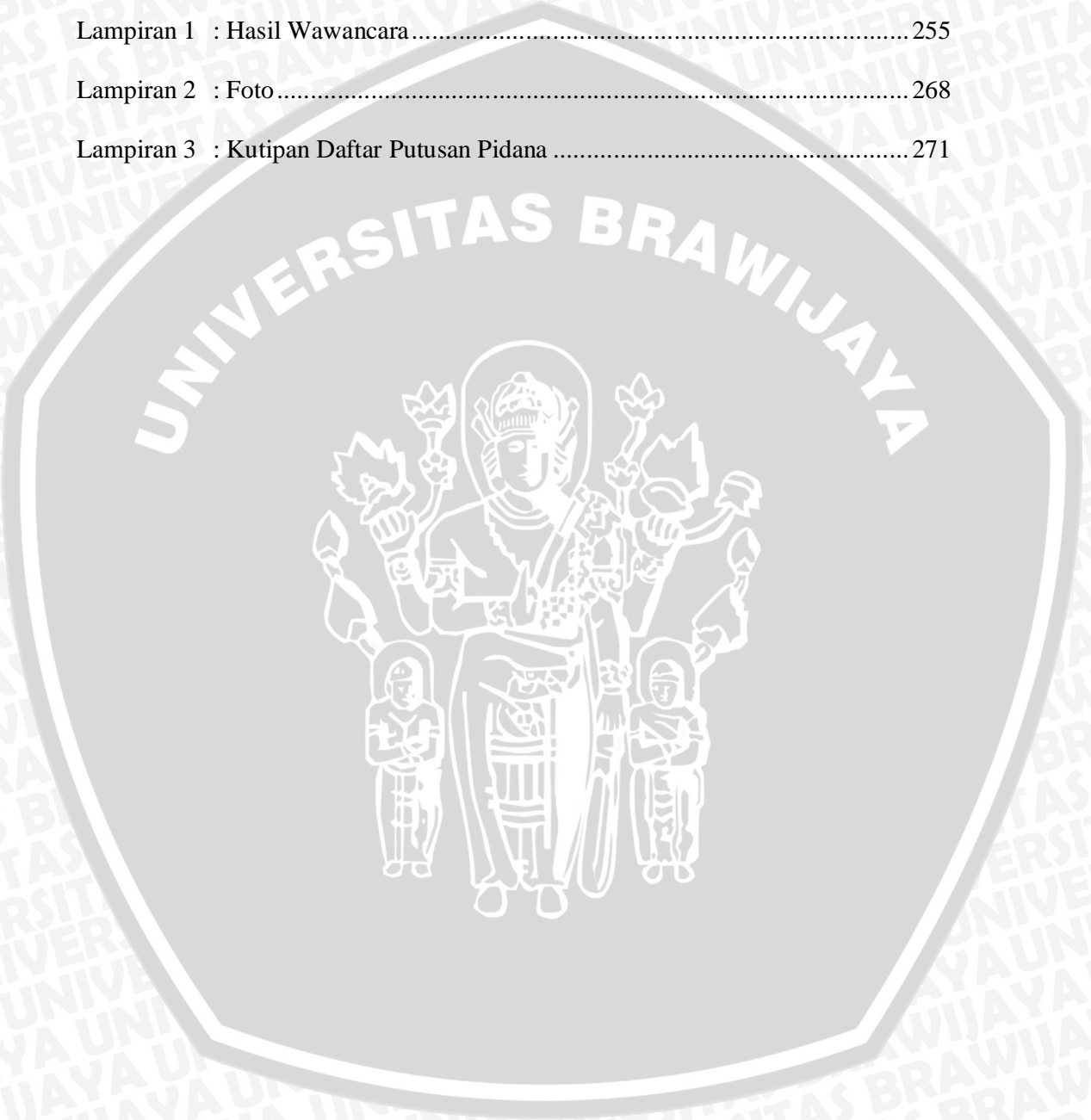
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsentrasi Perusahaan MNC.....	8
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi PT BISI International.....	78
Gambar 4.2.	Proses Produksi Benih.....	84
Gambar 4.3.	Fasilitas Penelitian & Pengembangan.....	90
Gambar 5.1.	Bagan Alir Produksi Benih PT BISI International.....	109
Gambar 5.2.	Bagan Alir Proses <i>Quality Control</i> Benih.....	111
Gambar 7.1.	Strategi Program Pemuliaan Benih.....	227
Gambar 7.2.	Invitasi Laba-Lingkarang Degradasi Lingkungan.....	231



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara.....	255
Lampiran 2 : Foto.....	268
Lampiran 3 : Kutipan Daftar Putusan Pidana	271



***Shari'ate Net Farm Income – Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan
Politik Ekonomi Akuntansi
(Studi Kasus: PT BISI International)***

Oleh:

**Vaisal Amir
0810230152**

**Dosen Pembimbing:
Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *income* yang ideal dan kebijakan bidang pertanian yang tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam serta mendukung berjalannya konsep *income* tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kritis dimana salah satu alat analisis yang digunakan yaitu politik ekonomi akuntansi dalam perspektif *syari'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *income* yang saat ini telah ada belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder*, karena konsep *income* yang saat ini ada cenderung mengeksploitasi manusia lain dan juga lingkungan, serta konsep tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk mendukung keberhasilan konsep *income* yang ada diperlukan adanya kebijakan-kebijakan non akuntansi. Hal tersebut juga mempertegas pernyataan beberapa peneliti yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu ilmu yang tidak bebas nilai, dimana akuntansi dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam mendorong terbentuknya akuntansi pertanian yang sesuai dengan *syari'at* Islam yang berorientasi pada lingkungan agar keberlanjutan lingkungan (masyarakat dan alam) dapat terjaga.

Kata Kunci: politik ekonomi akuntansi islam, akuntansi pertanian *syari'ah*, nilai wajar, perolehan dan distribusi *income*, IAS 41.

***Shari'ate Net Farm Income - The Concept Of Income In Agriculture: Political
Economy Of Accounting Approach***

(Case Study: PT BISI International)

Arranged by:

Vaisal Amir

0810230152

Advisory Lecturer:

Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA

Abstract

This study aims to find out the ideal concept of income and policy in the agricultural sector which do not conflict with shari'ate as well as supporting the concept of the income. This research was conducted at Nganjuk, East Java. The approach used in this research is critical theory by which one instrument used: political economy of accounting in perspective shari'ate. The results of this research show that the concept of income which currently have no yet can accommodate the interests of all stakeholders, since the concept of income that currently exist have tended to exploit other humans and the environment, as well as the concept is also contrary to the Islamic values. The result of this research also shows that to support the success of the concept of income that is required the presence of non accounting policies. It also reaffirms the statements of several researchers who stated that accounting is a science that does not value-free, where accounting can be influenced and influencing their environment. The implications of research is relevant for the practitioners and policy makers in push the formation of accounting farm in accordance with shari'ate that is oriented toward the environmental from continued environment (society and nature) could be maintained.

Keywords: islamic political economy of accounting, shari'ate agriculture accounting, fair value, IAS 41.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kita melihat berbagai macam ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Ketidakadilan tersebut telah terjadi di berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah ketidakadilan di bidang sosial ekonomi dan pemanfaatan alam. Ketidakadilan terjadi karena manusia lebih mengutamakan nafsu dan berpola pikir ekonomi kapitalis dalam mengelola sumber daya (baik manusia maupun alam) yang pada akhirnya tata kelola kehidupan menjadi tidak seimbang dan cenderung menyimpang dari tujuan penciptaan manusia di bumi, yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah untuk memakmurkan bumi).

Dampak dari ketidakadilan tersebut diantaranya adalah pengangguran, kemiskinan, bencana alam dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia dampak dari ketidakadilan tersebut sudah begitu parah. Banyak dari masyarakat miskin di Indonesia adalah petani dan nelayan. Pertanian pada umumnya dilakukan di wilayah pedesaan dimana hamparan tanah yang luas masih dapat dengan mudah ditemui. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi

pertanian(<http://www.wikipedia.co.id>). Kebudayaan masyarakat yang tergantung pada aspek pertanian diistilahkan sebagai kebudayaan agraris. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Melihat begitu pentingnya bidang pertanian dalam kehidupan, Allah SWT bahkan mengabadikan bidang pertanian tersebut ke dalam Al Quran Surat Ar Rahman ayat 10-13.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Al Qardawi dalam Muhammad dan Fauroni (2002, 135) juga menyebutkan hadis berikut ini untuk mendukung pentingnya pekerjaan di bidang pertanian:

Rasulullah SAW (semoga rahmat terlimpah kepadanya) berkata, "Tak seorangpun diantara kaum Muslim yang menanam sebuah pohon atau menyebarkan benih-benih, dan kemudian seekor burung, atau seorang manusia atau binatang apapun memakannya, kecuali hal itu merupakan hadiah yang murah hati baginya.

Sedangkan berdasarkan data BPS, bidang pertanian di Indonesia merupakan bidang yang paling banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan bahkan mencapai 43,97 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2005. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, sektor pertanian menyumbangkan jumlah angkatan kerja paling besar yaitu sekitar 46,7 juta jiwa (44% dari total seluruh angkatan kerja).

Tabel 1.1 Total Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Tenaga Kerja (Orang)		Total Tenaga Kerja (Orang)	Pangsa Pertanian terhadap Total (%)	Tidak Bekerja (orang)	Angkatan Kerja Nasional (orang)
	Pertanian**	Non Pertanian				
2005	41,309,776	52,648,611	93,958,387	43,97	11,899,266	105,857,653
2006	40,136,242	55,320,693	95,456,935	42,05	10,932,000	106,388,935
2007	41,206,474	58,723,743	99,930,217	43,66	10,011,142	109,941,359
2008	41,331,706	61,221,044	102,552,750	40,30	9,394,515	111,947,265
2009*	43,029,493	61,455,951	104,485,444	41,18	9,258,964	113,744,408

Keterangan : * angka sementara (februari 2009), ** mencakup pertanian, perikanan, dan kehutanan

Sumber : BPS dalam Rancangan Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 (2009)

Namun pada kenyataannya penyediaan lapangan kerja oleh bidang pertanian tidak diimbangi dengan taraf hidup para petani. Keadaan petani di Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan kebanyakan petani di Indonesia merupakan petani gurem dan sebagian dari mereka juga dapat dianggap sebagai petani miskin karena pendapatan mereka yang sangat kecil serta tidak memiliki tanah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No.45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Indonesia (64,65 persen) bekerja di Sektor Pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun sampai saat ini upaya-upaya tersebut belum terlalu merubah keadaan masyarakat pertanian. Lebih parahnya lagi pertanian di Indonesia akan digiring masuk pada korporatisasi pertanian.

Kemiskinan yang dialami oleh petani pada umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari ketiadaan modal dan kepemilikan lahan yang sempit sampai “pembodohan” petani oleh perusahaan melalui kontrak kerja. Selama ini petani juga hanya dijadikan komoditas politik oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang justru menyudutkan posisi petani. Penindasan terhadap petani dan

lingkungan ternyata tidak hanya sampai disitu saja, penindasan gaya baru terhadap petani juga dilakukan melalui doktrinisasi akuntansi pertanian kapitalistik. Hal tersebut dapat dilihat dari konsep *Net Farm Income* dan pengukuran serta pengakuan aset.

Konsep *net farm income*, pengukuran serta pengakuan aset merupakan beberapa alat yang dapat digunakan oleh korporasi untuk menguasai sektor peranian melalui rasionalisasi petani. Pertanian sebagai sektor yang memberikan *supply* pangan tentu memiliki peran penting dalam upaya menjaga kelangsungan hidup manusia. Sehingga dengan menguasai sektor pertanian para pelaku bisnis dapat dengan mudah mengendalikan ekonomi dunia. Wacana penyerahan sistem ekonomi pada mekanisme pasar (*free market*) menjadi “senjata” ampuh para pemilik *Multinational Company* yang memiliki pola pikir kapitalis dalam upaya pencapaian tujuan tersebut (mengendalikan ekonomi dunia). Jika hal tersebut terus dibiarkan maka kerusakan alam dan lingkungan manusia tidak dapat dihindari lagi, karena tujuan mereka hanyalah pencapaian laba yang tinggi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Suseno (1993, 198):

Tujuan produksi adalah laba perusahaan. Hanya laba itulah yang menjamin bahwa sebuah perusahaan dapat mempertahankan diri dalam alam persaingan bisnis. Untuk meningkatkan laba, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin. Oleh karena itu ekonomi modern condong untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan semurah mungkin, dengan sekadar mengambil, dengan menggali dan membongkar apa yang diperlukan tanpa memikirkan akibat bagi alam itu sendiri dan tanpa usaha untuk memulihkan keadaan semula. Begitu pula asap, berbagai substansi kimia yang beracun dan segala bentuk sampah lain dibuang dengan semurah mungkin, dibuang ke tempat pembuangan sampah, dialirkan ke dalam air sungai, dihembuskan melalui cerobong-cerobong ke dalam atmosfer. Mengolah sampai racunnya hilang sehingga dapat dipergunakan lagi hanya menambah biaya.

Apa yang dijelaskan oleh Suseno (1993) sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah SWT di dalam Al Quran. Dimana di dalam Al-Quran Allah memperingatkan manusia bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam (Q.S. Ar-Ruum: 41). Perilaku ini bertentangan dengan tugas dan fungsi manusia sebagai hamba Allah (*abdullah*) dan *khalifatullah fil ardh*, yang berkewajiban untuk melakukan proses pengelolaan dan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagai media untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan fungsi kekhalifahan. Manusia dilarang berbuat kerusakan sedikit pun di muka bumi setelah Allah memperbaikinya (Q.S. Al-A'raf: 56) (Miftahulhaq, 2012).

Negara sebagai regulator dan pembuat kebijakan yang berhubungan dengan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini petani) menjadi tidak berdaya terhadap tekanan ekonomi akibat posisi tawar yang lemah, hingga pada akhirnya negara memberikan berbagai “kemudahan” bagi korporasi dan cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan konsep *Al Hisbah* yang telah ada sejak jaman *Rasulullah* SWT, masa pemerintahan empat *khalifah* hingga masa kebangkitan kolonialisme Barat, dimana dalam konsep tersebut kedudukan antara pembeli-penjual maupun perusahaan-pekerja adalah sama, sehingga perlu dilakukan pengawasan etika moral dan ekonomi terhadap kedua belah pihak agar tercapai suatu keadilan dan kesetaraan (Muhammad dan Fauroni, 2002:175). Hasil dari penyimpangan tersebut salah satunya adalah seperti yang dijelaskan oleh Saragih (2010) dalam catatan pembangunan pertanian dan pedesaan SPI yang menyatakan bahwa berkenaan

dengan kebijakan penanaman modal, pemerintah menurunkan beberapa kebijakan, diantaranya penyusunan PP tentang Pertanian Pangan Skala Luas (*Food Estate*) setelah pada tahun 2008 hanya dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka. Program lainnya ialah Pencanangan *Food Estate* di Merauke, program ini terkait dengan investasi Ladin Group sebesar US\$ 4,37 miliar pada proyek pembukaan lahan pertanian pangan seluas 500.000 hektare di Merauke, Papua serta investasi Medco Energi, Sinar Mas Group, dan Artha Graha yang memutuskan terjun dalam bisnis pangan dengan membuka *food estate* seluas 585.000 hektar masih di daerah Merauke. Dan sejumlah investor asing yang sudah berencana membuka *food estate* di Indonesia seperti Daewoo Logistics, Mitsubishi dan KS Oil. Kebijakan tersebut merupakan program prioritas dari menteri pertanian yang merupakan bagian dari program 100 hari pemerintahan SBY. Hal tersebut juga cenderung meminggirkan kepentingan petani dalam hal kedaulatan untuk melakukan kegiatan usaha tani.

Penjelasan Saragih (2010) tersebut juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh *The Land Matrix Partnership*. *The Land Matrix* membagi investor tersebut menjadi empat macam, yaitu *private companies* yang menguasai sekitar 442 proyek (tanah seluas 30,3 juta hektar), *state-owned companies* sekitar 172 proyek (tanah seluas 11,5 juta hektar), *investment fund* sekitar 32 proyek (tanah seluas 3,3 juta hektar), dan *private-public partnership* sekitar 12 proyek (tanah seluas 0,6 juta hektar). Dari data tersebut 84 negara menjadi bidikan pemodal asing, 70 persen lahan yang diincar berada di 11 negara. Dari 11 negara itu, tujuh di antaranya merupakan negara-negara yang mendiami Benua Afrika. Sedangkan empat negara

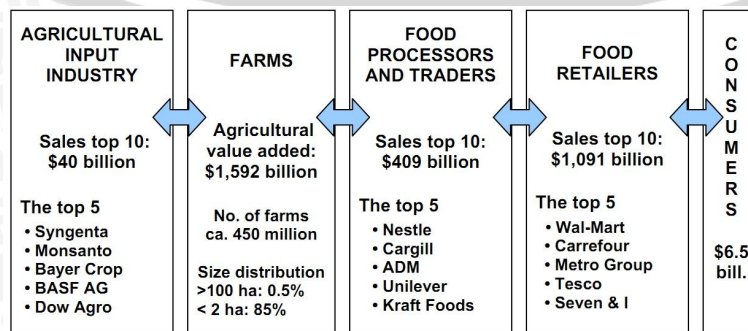
berada di wilayah Asia, dan salah satu dari keempat negara tersebut adalah Indonesia.

Penggiringan pertanian Indonesia ke arah korporatokrasi sebenarnya disebabkan oleh ketidak mampuan negara dalam mengatasi permasalahan pangan yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Saat ini berbagai negara di belahan dunia sedang disibukkan dengan urusan pangan. Mulai dari negara maju seperti Eropa dan Amerika, sampai Negara miskin seperti Somalia dipusingkan dengan masalah pangan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Andrei D. Sakharov:

Hunger and overpopulation: What is involved is prognosticated deterioration of the average food balance in which localized food crises merge into a sea of hunger, intolerable suffering and desperation, the grief and fury of millions people. This is a tragic threat to all mankind. (Andrei D. Sakharov, Soviet physicist and “father” of the Russian hydrogen bomb, 1968; Hartley, 1972:105).

PBB sebagai lembaga tertinggi di dunia juga merilis data tentang ancaman krisis pangan dunia. Berbagai cara untuk memenuhi pangan dunia telah dilakukan mulai dari bantuan pangan sampai dengan komersialisasi pangan. Namun, sayangnya komersialisasi pangan tersebut ternyata justru membuka pintu lebar-lebar kepada korporasi untuk terlibat jauh dalam urusan pangan, terutama untuk meningkatkan laba mereka. Akibatnya, *multinational company* dibidang pertanian menguasai pasar dunia, termasuk Indonesia.

Gambar 1.1 Konsentrasi Perusahaan MNC



Sumber: Braun (2008)

Hal ini berarti *multinational company* tersebut dapat mengendalikan ketersediaan pangan Indonesia. Selain itu, keterlibatan korporasi yang terlampau jauh tersebut pada akhirnya juga merubah dimensi pertanian, dari pertanian yang menjaga nilai-nilai lokal menjadi pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Hal tersebut juga diperparah dengan distorsi orientasi perusahaan bidang pertanian milik negara yang lebih mengutamakan laba daripada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Lebih jauh lagi Andrianto dan Irianto (2008, 13-14) menjelaskan bahwa akuntansi dengan segala kapasitas yang dimilikinya telah mendistribusikan secara legal pendapatan maksimal yang diperoleh korporasi kepada pemilik modal.

Arus pemikiran globalisasi yang melanda dunia juga tidak dapat dihindari. Saat ini dunia berkembang secara dinamis, terus berubah tanpa ada yang bisa mengontrol gerak lajunya. Perkembangan yang dimaksud kini memasuki era dimana dunia terasa menjadi semakin kecil, dunia menjadi sebuah desa global, dimana segala macam informasi, modal, dan kebudayaan bergerak secara cepat, tanpa halangan batas-batas kedaulatan. Kemajuan tersebut dinamakan sebagai globalisasi. Salah satu bentuk dari globalisasi dalam bidang ekonomi adalah pasar bebas. Dalam perspektif Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan, tetapi menggunakan istilah pasar sempurna (Muhammad dan Fauroni, 2002:111). Menurut Ibnu Taimiyah dalam pasar bebas (pasar sempurna) harga dipertimbangkan oleh kekuatan

permintaan dan penawaran bukan manusia yang membentuk harga tersebut. Namun, Ibnu Taimiyah juga tidak menolak adanya anggapan bahwa kenaikan dan penurunan harga dapat diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Pada konteks tersebut, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah kezhaliman yang menampakkan adanya kenaikan harga pada masa yang disebabkan oleh akibat ketidakadilan atau malpraktik yang dilakukan oleh penjual dalam pengertian manipulasi yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar (Muhammad dan Fauroni, 2002:113) yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada besarnya *fair value*.

Banyak orang melihat secara optimis kapitalisme global yang bernaung di bawah panji globalisasi, menganggapnya sebagai sebuah tatanan yang menyatukan segala masyarakat dalam berperang melawan kemiskinan dan kemelaratan (Kushendrawati, 2006). Akan tetapi pada kenyataannya saat ini jurang pemisah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin besar. Hingga pada akhirnya kita mengenal negara utara dan negara selatan. Negara utara beranggotakan negara-negara kaya yang memiliki modal yang besar, sedangkan negara selatan diisi oleh negara-negara miskin dan peminjam modal. Pertanian sebagai sektor yang menghasilkan produk pangan yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan pangan saat ini juga telah diserang oleh arus globalisasi. Bersama korporasi besar bidang pangan negara-negara utara semakin gencar menguasai negara selatan melalui modal yang mereka miliki. Mereka juga terbantu dengan adanya Institusi Bretton Woods (IMF, World Bank, WTO).

Berbagai “peralatan pendukung” mereka ciptakan untuk melancarkan agenda (mengendalikan ekonomi dunia) mereka. Salah satu diantara alat tersebut adalah

kebijakan akuntansi pertanian (IAS 41 *Agriculture*), disamping aturan-aturan lain yang membatasi campur tangan pemerintah dalam upaya melindungi warganya dari cengkeraman kaum kapitalis. Dimana pada ranah pemerintahan mereka melakukan diseminasi dan “pemaksaan” kehendak atas kebijakan ekonomi di negara-negara selatan oleh institusi tersebut. Sedangkan di ranah akuntansi khususnya dalam IAS 41 mereka mengatur mengenai pengakuan, pengungkapan dan pengukuran aset biologi dan produk agrikultur yang merupakan hasil dari aset biologi tersebut, serta perumusan *net farm income* yang pada akhirnya akan menyebabkan petani menjadi berfikir rasional (hanya bertujuan mencetak laba).

Aset biologi menurut IAS 41 diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selisih perubahan nilai wajar dikurangi biaya menjual yang belum terealisasi ini diakui di laporan laba rugi. Pengakuan (akualisasi) tersebut pada akhirnya mengakibatkan volatilitas kinerja keuangan yang disebabkan oleh pengakuan laba yang sebetulnya belum terealisasi. Selain itu, pengakuan tersebut juga dekat dengan nilai riba serta mengandung unsur *gharar* dikarenakan pada sistem *accrual basis* telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang. Lebih parahnya lagi *fair value* yang didasarkan harga pasar (terutama ketika petani menjual hasil panen) didasarkan pada harga pasar yang diinformasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (ketika petani melakukan kontrak kerjasama maupun jual beli hasil panen mereka), sehingga petani tidak tahu apakah harga tersebut benar-benar merepresentasikan harga pasar yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain harga pasar yang terbentuk merupakan harga pasar yang telah terdeviasi akibat kooptasi oleh perusahaan maupun tengkulak. Selain itu dikarenakan

konsep *net farm income* bertujuan untuk membukukan dan melaporkan laba/rugi, pada akhirnya pihak manajemen akan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai laba yang maksimal. Perusahaan akan mengeksploitasi petani, sedangkan petani akan mengeksploitasi lingkungan. Konsep *net farm income* juga melegalkan produksi dan penjualan berbagai produk yang notabene berbahaya bagi petani, kelestarian lingkungan maupun konsumen.

Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang tak bebas nilai tentunya dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akuntansi juga dapat mempengaruhi budaya, cara pandang dan perilaku masyarakat (pengguna akuntansi) dalam usahanya untuk mendapatkan *net farm income* yang maksimal. Dari penjelasan tersebut tampak begitu jelas hasrat para pemangku kepentingan (MNC's bidang pertanian) untuk meningkatkan nilai laba mereka di dalam laporan laba/rugi melalui kontrak kerja sama dan doktrinisasi akuntansi konvensional kepada petani. Mereka juga menggunakan *capital power* yang terefleksi dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait operasional bisnis mereka. Menurut Andrianto dan Irianto (2008, 23) hal tersebut dapat terjadi karena bagi negara berkembang (baca: Indonesia), investasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian yang tidak hanya berguna sebagai instrument yang bisa menawarkan tenaga kerja tetapi juga efek penggandaanya (*multiplier effect*) dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

Selain memperkuat pendapat bahwa akuntansi konvensional hanya bertujuan untuk memperoleh laba setinggi mungkin dan hanya berpihak kepada kepentingan pemilik modal, pengakuan tersebut juga tidak memperhitungkan resiko yang

mungkin terjadi ketika aset belum sempat dijual. Misalnya, ketika terjadi kerusakan atau kehilangan namun aset belum sempat dijual. Hal tersebut mengakibatkan laba yang diakui di periode sebelumnya tidak dapat direalisasikan dan mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat tidak lagi *reliable* (handal) dikarenakan adanya *gharar*. Lebih parahnya lagi dalam menggunakan nilai wajar, IAS 41 tidak membedakan antara aset biologi yang tidak untuk dijual atau hanya digunakan untuk memproduksi aset biologi lain, sehingga nilai aset tetap menjadi tidak *reliable*. Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas seakan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam tetakehidupan, terutama berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk Allah lainnya, serta manusia dengan Allah SWT.

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Setiap wilayah di Indonesia juga memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan pertanian. Sehingga pertanian yang dibangun haruslah pertanian yang mandiri yang menempatkan petani sebagai subyek pembangunan. Tujuan dari itu semua adalah kemandirian pertanian yang pada akhirnya membawa Indonesia pada kemandirian pangan, dimana dengan kemandirian tersebut nilai-nilai sosial-budaya-religi dalam pertanian masih tetap terjaga.

Akuntansi sebagai sarana pencatatan dan pelaporan atas kekayaan yang dimiliki haruslah disajikan secara *kaffah* (menyeluruh) dan jujur agar akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kepatuhan dan ketundukan manusia kepada *stakeholders* dan Tuhan Sang Pencipta alam beserta segala isinya.

Mulawarman (2012) membagi bentuk akuntabilitas manusia menjadi dua, yaitu akuntabilitas ketundukan dan akuntabilitas kreativitas. Akuntabilitas ketundukan berkenaan dengan kepasrahan dan ketundukan manusia melaksanakan ketentuan syariah (*abd' Allah*). Sedangkan akuntabilitas kreativitas berkenaan dengan implementasi dan realisasi sikap ketundukan untuk menjalankan kreativitas sebagai wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*) (Mulawarman, 2012:28-29). Melihat begitu besarnya peranan pertanian dalam perekonomian dunia, maka penulis mencoba untuk meneliti konsep akuntansi pertanian yang telah ada terutama penentuan dan representasi (secara luas) posisi petani di dalam *net farm income* kemudian mencari konsep laba yang sesuai dengan konsep syariah melalui pendekatan *Political Economy of Accounting* untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat pertanian serta menjaga nilai-nilai sosial, alam maupun religi yang ada di lingkungan masyarakat pertanian. Oleh karena itu penulis melakukan peninjauan dan penelitian dengan judul "***Shari'ate Net Farm Income – Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan Politik Ekonomi Akuntansi (Studi Kasus: PT BISI International)***".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *net farm income* berdasarkan konsep syariah?
2. Apa saja kebijakan bidang pertanian yang ideal untuk mewujudkan tata kehidupan yang seimbang berdasarkan konsep syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami peran akuntansi pertanian khususnya konsep *net farm income* dalam menjaga nilai-nilai sosial maupun religi yang ada di masyarakat berdasarkan teori-teori yang selama ini penulis terima dari perkuliahan dan sumber lainnya.
2. Untuk memahami distribusi *income* dan posisi petani dalam lingkup usaha tani berdasarkan konsep *net farm income*.
3. Untuk memahami konsep *net farm income* yang ideal dan kebijakan bidang pertanian yang tidak bertentangan dengan syariat islam serta mendukung berjalannya konsep *net farm income*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

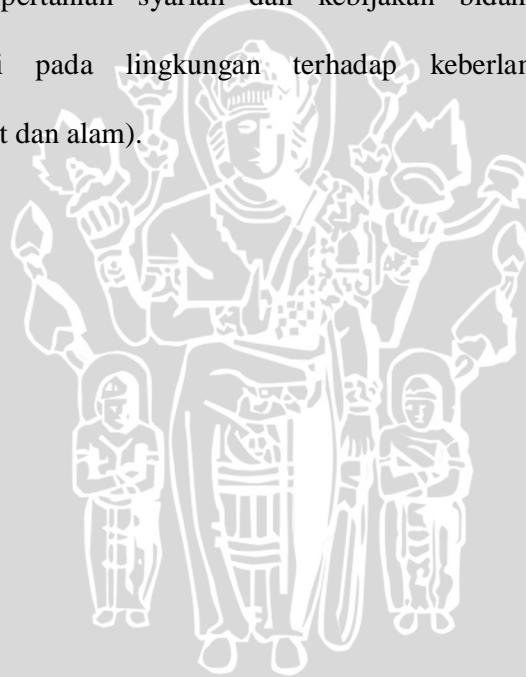
1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti.
- b) Sebagai latihan dan pengalaman dalam memahami teori yang diterima di bangku kuliah.
- c) Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan teori akuntansi pertanian khususnya konsep *Net Farm Income* dalam menghadapi era

perkembangan, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti turut berkontribusi mendorong terbentuknya akuntansi pertanian yang sesuai dengan syariat islam.
- b) Memberikan gambaran dan kontribusi pada praktisi mengenai pentingnya akuntansi pertanian syariah dan kebijakan bidang pertanian yang berorientasi pada lingkungan terhadap keberlanjutan lingkungan (masyarakat dan alam).



BAB II

POLITIK EKONOMI AKUNTANSI: PERETAS JALAN KONSEP

SHARI'ATE NET FARM INCOME

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Indriantoro dan Supomo (2002, 2) menyatakan bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Sedangkan Sekaran (2003, 4) menyatakan bahwa penelitian adalah suatu investigasi atau keingintahuan ilmiah seseorang yang terorganisasi, sistematis, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi.

Buckley dalam Indriantoro dan Supomo (2002, 3) berpendapat bahwa penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian merupakan suatu tindakan sistematis dan ilmiah seseorang yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin dia pecahkan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, proses penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik (metode-metode) (Indriantoro dan Supomo (2002, 3).

Metodologi penelitian menurut Muhadjir (2000:6) merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Selanjutnya Muhadjir (2000:3) mengatakan metodologi penelitian berbeda dengan metode penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan, sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Pemilihan metode penelitian tersebut tergantung pada paradigma yang akan digunakan dalam penelitian.

Indriantoro dan Supomo (2002, 12) menjelaskan bahwa paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Terdapat dua paradigma yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul sebagai sebuah fenomena yang harus dicari solusinya. Paradigma tersebut yaitu paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif.

Paradigma kuantitatif disebut juga dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, atau empiris. Paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik. Sedangkan paradigma kualitatif disebut juga dengan pendekatan konstruktifis, naturalistis, atau *postmodern*. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan pada kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan mendasar pada kedua paradigma tersebut. Perbedaan antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif terletak pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian. Paradigma kuantitatif (*scientific paradigm*) memandang bahwa realitas itu bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Sedangkan paradigma kualitatif (*naturalistic paradigm*) memandang bahwa realitas itu bersifat subjektif dan berdimensi banyak (Indriantoro dan Supomo, 2002:13).

Menurut paradigma kuantitatif hubungan peneliti dengan fakta yang diteliti bersifat independen sehingga peneliti dapat menguji realitas fakta secara objektif, terbatas pada dimensi tunggal, bebas nilai dan tidak bias. Sebaliknya menurut asumsi paradigma kualitatif, peneliti berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga lebih bersifat subjektif, tidak bebas nilai dan bias. Paradigma kualitatif melihat realitas sosial dalam berbagai dimensi (Indriantoro dan Supomo, 2002:13). Lebih lanjut, Indriantoro dan Supomo (2002, 13) menjelaskan bahwa proses penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif, sedang penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Paradigma kuantitatif juga lebih menekankan pengujian teori dengan analisis kuantitatif dibandingkan pendekatan kualitatif yang memberikan tekanan pada penyusunan teori melalui pengungkapan fakta dengan analisis kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengungkap hubungan antara kekuasaan (*power*), laba/rugi perusahaan bidang pertanian dan NFI

(*net farm income*) yang diperoleh oleh petani yang pada akhirnya juga mempengaruhi kesejahteraan petani. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai keadilan dan kebebasan ekonomi (materi dan non materi). Pada ranah pembentukan dan penghitungan NFI penulis berusaha untuk melihat secara mendalam dan langsung (dalam perspektif syriah) pada sumbernya (petani) akun-akun yang menjadi komponen serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan dan perhitungan NFI. Oleh karena itu, penelitian paradigma kuantitatif diyakini tidak cukup mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif, hal ini karena menurut Moleong (2002:4), penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).

Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai objek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Sifat humanis dari aliran penelitian tersebut terlihat dari pandangan manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Paradigma tersebut dilandasi oleh pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Oleh karena itu, pendekatan penelitian tersebut juga mampu menelusuri data secara lebih mendalam sampai ke akar permasalahan.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif realitas sosial yang terjadi tidak cukup dicari sampai menyebabkan realitas tersebut, tetapi dicari sampai kepada makna dibalik terjadinya realitas sosial yang tampak. Sehingga untuk memperoleh makna dari realitas sosial yang terjadi, pada tahap pengumpulan data perlu dilakukan

secara tatap muka langsung dengan individu atau kelompok yang dipilih sebagai responden atau informan yang dianggap mengetahui atau paham tentang entitas tertentu seperti kejadian, orang, proses, atau objek, berdasarkan cara pandang, persepsi, dan sistem keyakinan yang mereka miliki. Hal tersebut berarti membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan sebagian waktunya apakah di sawah, masyarakat, entitas yang diteliti dan lokasi lainnya. Moleong (2002:5) mengistilahkan cara pengumpulan data yang demikian “pengamatan berperan serta” atau *participant-observation*

2.1.2 Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kritis. Teori kritis berupaya mencari makna dibalik yang empiris dan menolak adanya konsep *value free*. Menurut Muhadjir (2000, 197) teori kritis memiliki keterikatan moral untuk mengkritik *status quo* dan membangun masyarakat yang lebih adil. Teori kritis memiliki komitmen yang tinggi pada tata sosial yang lebih adil. Asumsi dasarnya adalah bahwa ilmu sosial bukan sekedar memahami ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi sumber daya, melainkan berupaya untuk membantu menciptakan kesamaan dan emansipasi dalam kehidupan.

Teori kritis merupakan sebuah metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam ketegangan tersebut, teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif sebagaimana dalam positivisme. Teori kritis hendak menembus realita sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transedental yang melampaui data empiris. Dari kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa teori kritis bersifat historis dan tidak

meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Teori ini merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transedental dan yang bersifat empiris (Muhadjir, 2000).

Pada dasarnya, esensi teori kritis adalah konstruktivisme, yaitu memahami keberadaan struktur-struktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari intersubektivitas dan pengetahuan secara alamiah memiliki karakter politis, terkait dengan kehidupan sosial dan politik. Tujuan pendekatan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan.

Salah satu alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Political Economy of Accounting* (PEA). PEA merupakan salah satu alat analisis dari pendekatan teori kritis (*critical theoretical approach*). PEA pertama kali diperkenalkan oleh Tinker (1980) dalam artikelnya yang berjudul "*Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the cambridge controversies*". Di Indonesia salah satu peneliti PEA adalah Andrianto dan Irianto dimana salah satu tulisannya berjudul *Akuntansi & Kekuasaan: [dalam konteks] Bank BUMN Indonesia*.

2.2 Rerangka *Political Economy Of Accounting*

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Neoklasik

Sekitar tahun 1870-an terjadi pergeseran dalam aliran ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Alasan adanya pergeseran ini disamping pada waktu itu terlihat pentingnya kemajuan teknologi dan adanya penemuan-penemuan sumber produksi baru, juga dikarenakan adanya

kemungkinan-kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran neoklasik. Alasan lain dari lahirnya teori ini adalah munculnya kesadaran akan peran gereja yang terlalu intervensi dan bahkan berlebihan terhadap aktivitas individu di Eropa pada waktu itu. Kondisi tersebut semakin menyadarkan masyarakat pada waktu itu untuk lebih mengurangi intervensi gereja, karena lambat laun akan menekan kebebasan individu dalam berekonomi (Clark, 1998 dalam Haryadi, 2011:41).

Pada waktu itu masyarakat Eropa berjuang untuk lepas dari intervensi gereja. Dengan lepas dari intervensi gereja, maka setiap individu akan dapat mewujudkan keinginan dan tujuan mereka, termasuk dalam memperoleh tingkat kesejahteraan. Perkembangan atas kegagalan negara dalam mengatur ekonomi masyarakat selanjutnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi neoklasik. Clark dalam Haryadi (2011, 41) menjelaskan bahwa pemerintah tidak mampu membuat regulasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama kepada pedagang dan pemilik industri. Bahkan yang lebih ekstrem ada anggapan bahwa pemerintah adalah pihak yang membatasi atau bahkan menjadi penghalang bagi para pengusaha dalam meningkatkan kekayaan.

Esensi pemikiran ekonomi neoklasik adalah keyakinan akan bekerjanya mekanisme pasar secara sempurna sehingga tidak perlu ada campur tangan pemerintah (*laissez faire*) dan bahwa kegiatan produksi akan selalu menciptakan permintaan pada level yang sama sehingga tidak mungkin terjadi kelebihan produksi dan pengangguran permanen (Sugiyanto, 2007). Sama seperti Sugiyanto (2007), Wibowo (2011) menjelaskan bahwa para ekonom beraliran neoklasik menjadikan

mekanisme pasar (*market mechanism*) sebagai “Tuhan” mereka, dimana *invisible hand* cukup membuat lancar produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kerangka dasar analisis pemikiran neoklasik, dengan tokoh puncaknya Alfred Marshall (1842-1924) adalah *supply side management* yang merupakan pengembangan dan sintesis pemikiran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Jean-Baptiste Say (Mahzab Klasik) dengan William Stanley Jevons, Carl Menger dan Leoan Walras (Mahzab Marginalis).

Sedangkan menurut Mubyarto (2002) dalam Santosa (2008) ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II, pertama kali dirintis oleh Paul Samuelson dalam bukunya yang berjudul *Economic an Introductory Analysis* (MIT, 1946). Inti ajaran dari Samuelson dikenal sebagai teori ekonomi neoklasik. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik (*homo economicus* dan *invisible hand* Adam Smith), dan ajaran *marginal utility* dan keseimbangan umum neoklasik. Penekanan ajaran neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*pareto optimal*). Asumsi-asumsi tersebut merupakan asumsi dasar kapitalisme Smithian, yaitu bahwa (1) kebutuhan manusia yang tidak terbatas, (2) sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas dan (3) pengejaran pemenuhan maksimal kebutuhan individual (*utility maximization of self interest*) yang relatif tidak terbatas (Swasono, 2003:2).

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Caporaso dan Levine (1994, 46) dalam Haryadi (2011, 42) dimana mekanisme pasar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara alamiah. Dalam mekanisme pasar hukum penawaran dan permintaan menjadi penentu harga yang relatif. Artinya jika harga yang ada dianggap lebih tinggi daripada biaya produksi dan laba yang didapatkan, maka hal tersebut merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke dalam pasar untuk meningkatkan sisi penawaran, agar dapat menurunkan harga. Dengan perubahan menuju mekanisme pasar seperti itu, maka hal tersebut akan menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Ilmu ekonomi neoklasik lebih dekat dengan karakteristik metodologi positivisme dan saintisme Caporaso dan Levine (1994, 49) dalam Haryadi (2011, 42). Dimana cara pandang yang digunakan lebih memusatkan pada persoalan materiil yang empirik dan kasat mata serta lebih mengutamakan variabel yang bisa diukur. Sehingga variabel yang tidak terukur dan tidak bisa dianalisis tidak bisa dimasukkan ke dalam bagiannya. Akibatnya banyak persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Peneliti-peneliti yang mendukung metodologi ini cenderung bersifat netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan.

Dalam perkembangannya, teori ekonomi neoklasik menurut Hoogvelt dan Tinker (1978) dalam Haryadi (2011, 43) telah banyak mempengaruhi praktek akuntansi terutama dalam menilai laba keuangan perusahaan. Laba/rugi semata-mata hanya dinilai dari aspek keuangan saja, dan mengenyampingkan faktor non keuangan. Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neoklasik

(marginalisme) pemilik modal akan memperoleh porsi distribusi pendapatan yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja. Artinya bahwa teori dan juga praktik akuntansi saat itu sarat dengan nilai-nilai marginalisme. Dalam praktik akuntansi, ekonomi neoklasik lebih mengedepankan laba sebagai aspek utama (*the bottom line*) atau tujuan utama dari kegiatan bisnis perusahaan. Laba digunakan oleh perusahaan sebagai tolok ukur dalam menilai efisiensi perusahaan atas penggunaan *input* menjadi *output* (Tinker, 1980:147).

2.2.2 Kritik Terhadap Ekonomi Neoklasik

Meskipun teori ekonomi neoklasik menggambarkan suatu mekanisme pasar (otomatis) yang sangat bagus, namun pada kenyataannya masih banyak kelemahan mendasar pada teori tersebut. Salah satu kritik tajam terhadap para ekonom neoklasik datang dari seorang pakar ilmu ekonomi *institusional* asal Amerika, Thorstein Veblen (1857-1929). Kritik Veblen yang paling penting adalah, bahwa menurutnya Adam Smith terlalu jauh menggunakan “animasi” di dalam pengembangan teori ekonominya (Karseno, 2004). Adam Smith menganggap bahwa semua manusia memiliki sikap rasional seperti sebuah kalkulator elektronik yang mampu menghitung secara tepat dan benar semua pertimbangan biaya dan manfaat dari semua aktivitas yang dilakukannya. Menurut Veblen, asumsi rasionalitas tersebut sangat tidak masuk akal. Dalam tulisannya tersebut dia mengatakan:

“People aren’t lightning fast calculators of pleasures and pain but rather are curious being who, by nature, hit upon new ways of doing things. In sum, people are creatively curious and are creatures of propensities and habits.”

(Manusia bukanlah komputer yang selalu menghitung kepuasan dan pengorbanan, tetapi manusia adalah makhluk yang penuh dengan rasa ingin tahu sehingga dia selalu ingin mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk kreatif yang selalu ingin tahu dan makhluk yang selalu membangun hasrat dan kebiasaannya (Veblen, T; Ekelun R.B (1983, 404) dalam Karseno (2004)).

Umer Capra dalam Swasono (2003, 11) juga mengkritik teori ekonomi neoklasik, Capra menyebut ekonomi neoklasik sebagai ilmu ekonomi konvensional, yang terlalu berlandaskan pada maksimisasi kepuasan kebendaan dan kepentingan pribadi, kurang memperhatikan kesejahteraan manusia dan kepentingan sosial. Padahal dimensi ilmu ekonomi sebagai ilmu moral tentulah menyentuh nilai-nilai agama.

Bahkan pasca Perang Dunia II, Mohammad Hatta (1934) dalam Swasono (2003, 12-13) menegaskan perihal *self-interest* (individualisme) sebagai berikut:

*“...teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian dia sama kuat dan sama paham dengan lawannya (sebagai ‘manusia rasional’, pen). Akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran, sebagai dasar bekerja bagi penyelidik ilmu, dan tidak ada dalam masyarakat yang lahir, yang menyatakan satu golongan kecil yang aktif dan bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi, dan satu golongan besar, orang banyak, yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi, yang penghidupannya terserah kepada keputusan golongan yang pertama...sebab itu dalam praktik *laisser-faire* stelsel-*

persaingan merdeka-dll-tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith... Ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah... (Mohammad Hatta, 1934 dalam Swasono (2003, 12-13)."

Douglas C. North; Harris, *et al* (1995) dalam Karseno (2004) menyatakan bahwa para ekonom neoklasik telah membangun suatu model yang bebas dari unsur budaya dan pranata (*institutional free*). Pengabaian tersebut telah menjadikan teori ekonomi neoklasik menyimpang terlalu jauh dari kenyataan kehidupan ekonomi dunia. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia di dunia ini yang bertindak terlalu rasional sehingga mengabaikan kebiasaan historis yang ada di benak mereka. Setiap manusia di dunia memiliki tata cara dan etika perdagangan yang telah mereka terima dan jalankan sebagai norma kehidupan yang baik dan wajar.

J.H. Boeke peneliti Belanda dalam disertasinya pada tahun 1910, telah menyatakan terdapatnya dualisme sosial-ekonomi pada masyarakat di Hindia Belanda (Indonesia). Pada satu sisi pada masyarakat yang maju (perkebunan yang dikuasai oleh Belanda) berlaku prinsip ekonomi yang berujung pada pengejaran keuntungan, akan tetapi pada masyarakat kebanyakan (petani) masih berpola subsistem dimana prinsip ekonomi boleh dikatakan tidak berlaku. Pada akhirnya, menurut Boeke di negara-negara sedang berkembang memang perlu dikembangkan teori ekonomi tersendiri, yang berlainan dengan negara maju (Barat).

Sedangkan Gunnar Myrdal dalam Santosa (2008) menyatakan bahwa teori ekonomi neoklasik tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang (sedang berkembang), sehingga bagi negara sedang berkembang diperlukan teori lain yang berbeda dengan dari negara maju

karena perbedaan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Lebih lanjut Omerod (1994) menulis buku tentang matinya ilmu ekonomi (*the death of economics*) (Santosa, 2008). Yang dimaksud ilmu ekonomi yang mati adalah aliran neoklasik, dimana dalam realitanya aliran ini tidak cocok karena banyak menyesatkan dan menyusahkan rakyat banyak. Campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneterinya tetap diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata.

Sedangkan Stiglitz (2002); Perkins (2005) dalam Santosa (2008) menyatakan akan adanya bahaya dari globalisasi, yang tidak lain adalah penggunaan teori neoklasik yang diperkuat neoliberalisme. Menurutnya resep-resep yang dipakai oleh IMF dan Bank Dunia semuanya pro pasar yang tercermin pada tujuan terciptanya perdagangan bebas dan globalisasi, hanya menguntungkan sekelompok kecil negara maju dan banyak merugikan negara berkembang.

Sementara Tinker (1980) melakukan kritik atas penerapan ekonomi neoklasik berkenaan dengan praktik akuntansi. Tinker menyimpulkan bahwa teori ekonomi neoklasik dan praktik akuntansi khususnya sarat dengan nilai-nilai marginalisme, sehingga distribusi pendapatan atas terjadinya aktivitas ekonomi di suatu negara yang disokong oleh korporasi terbukti lebih banyak menguntungkan pihak pemilik modal (*shareholder*) daripada tenaga kerja. Analisis fungsi produksi dalam perekonomian negara menurut pengamatan Tinker (1980;151) kombinasi yang setara antara tenaga kerja (L) dengan modal (C) dalam menghasilkan pendapatan negara hanya berlaku pada saat proses menghasilkan *output* nasional. Oleh karena itu, kesetaraan tersebut tidak berlaku pada saat dilakukan distribusi

pendapatan nasional. Berdasarkan fungsi produksi dalam teori neoklasik tersebut, pemilik modal (C) memperoleh porsi distribusi pendapatan nasional yang lebih banyak daripada yang didapatkan oleh tenaga kerja (L).

2.2.3 Teori Ekonomi Politik Klasik

Sebagai sebuah konsep untuk menganalisa dan menjelaskan prinsip-prinsip dalam mengatur *production, distribution and change of wealth*, harus diakui bahwa perspektif Ekonomi Politik bukanlah sebuah perspektif baru, karena ia telah eksis sejak abad ke-15. Ekonomi politik pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615, yang diperkenalkan oleh *Physiocrats* Perancis bernama Antoine de Montchretien. Selanjutnya diterangkan oleh beberapa ekonom politik, diantaranya yaitu Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx serta ekonom-ekonom lainnya. Ekonomi politik klasik pada awalnya merupakan studi tentang kondisi dimana produksi atau konsumsi dalam parameter terbatas diselenggarakan oleh negara serta bangsa. Kemudian dalam perkembangannya, ekonomi politik dimaknai sebagai pendekatan untuk mempelajari perilaku ekonomi dan politik, mulai dari kombinasi ekonomi dengan bidang lain untuk penggunaan yang berbeda, asumsi dasar yang menantang asumsi ekonomi ortodok.

Hal tersebut terbukti dari karya Adam Smith yang muncul pada tahun 1775, dimana pada tahun tersebut secara transparan Adam Smith telah memperkenalkan dasar-dasar pemikiran Ekonomi Politik, yang kemudian hari dikenal sebagai konsep *The Wealth of Nation*. Pada perkembangan berikutnya, John S. Mill (1874), dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy*, mencoba untuk membahas secara lebih spesifik tentang prinsip-prinsip dasar dari *production*,

distribution and the exchange of wealth, serta aplikasinya dalam kehidupan bernegara. Hal serupa juga dilakukan oleh Hendry Fawcett (1883) dalam bukunya yang berjudul *Manual of Political Economy*.

Sejalan dengan tahap-tahap perkembangan teori dalam disiplin ilmu ekonomi itu sendiri, sehingga dapat dimengerti jika perspektif Ekonomi Politik pada saat itu sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar pemikiran dari mazhab Ekonomi Klasik, yang antara lain menekankan pada pentingnya meminimalkan peran negara dalam mengatur mekanisme perekonomian sehingga pada konteks ini kita sampai pada pemahaman dan penjelasan mengapa konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith (1775), John S. Mill (1874), dan Hendry Fawcett (1883) telah dikategorikan sebagai perspektif ekonomi politik klasik. Dan pada akhirnya teori ekonomi politik klasik dijadikan landasan dari pengembangan *Political Economy of Accounting* (PEA).

Ekonomi politik lebih sering merujuk pada studi interdisipliner ekonomi, hukum, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi (kapitalis maupun sosialis) saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam arti sempit tafsirannya mengacu pada masalah ekonomi yang berimplikasi pada kebijakan publik, seperti monopoli, perlindungan pasar, sampai kebijakan fiskal pemerintah (Andre, 2011 dalam Haryadi, 2011:47).

Pendekatan ekonomi politik memiliki fokus perhatian bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan “*who get what, when, how and how much*” (Mas’oed, 2002 dalam Haryadi, 2011:48). Berbeda dengan pendekatan neoklasik,

ekonomi ekonomi politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode interpretasi dan intropektif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat supradisiplin (*supradisciplinary approach*) atau melampaui batas-batas disiplin, ekonomi politik memiliki fokus analisis pada setiap isu ataupun kebijakan, baik yang langsung maupun tidak langsung melibatkan kepentingan publik (umum). Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik dapat pula ditelusuri apa yang menjadi alasan atau latar belakang pemikiran (rasionalitas) dan apa agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) atau rejim yang berkuasa, sejauh ini menyangkut perhitungan biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) dari kebijakan tertentu atau keputusan-keputusan yang telah diambil terhadap masalah atau sektor pembangunan tertentu (Uphoof dan Iichman, 1972 dalam Haryadi, 2011: 48).

2.2.4 Political Economy of Accounting

Salah satu kerangka teori (*theoretical framework*) dalam studi akuntansi kritis adalah *Political Economy of Accounting* (PEA). *Political Economy of Accounting* (PEA) pada awalnya diintroduksi oleh Tinker (1980) dalam artikelnya yang berjudul “*Towards a political economy of accounting: an empirical illustration of the cambridge controversies*”, serta Cooper dan Sherer (1984) dan penulis-penulis lain dalam ranah akuntansi kritis, yang dapat diakses melalui jurnal internasional

terutama *Critical Perspectives on Accounting* (CPA) dan *Accounting, organisation, and Society* (AOS) (Andrianto dan Irianto, 2008).

PEA berpijak pada mazhab ekonomi politik yang radikal dengan tokoh Jean Jacques Rosseau, David Ricardo serta Karl Marx. Mazhab ini beranggapan bahwa kontrol umum atas produksi merupakan hal yang signifikan keberadaannya untuk mencapai tujuan pencerahan (*enlightment*), yaitu kebebasan, kesetaraan pendapatan (*equality*) dan keadilan (Clark 1988:55 dalam Haryadi, 2011:49). Pendekatan PEA mencoba untuk memahami dan mengevaluasi fungsi akuntansi dalam konteks lingkungan ekonomi, sosial dan politik di dalam operasionalnya (Cooper dan Sherer, 1984:207).

Akuntansi sebagai bagian dari lingkungan bisnis sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan eksternal operasional bisnis atau dengan kata lain akuntansi merupakan cerminan dari kehidupan sosial, ekonomi bahkan spiritual penggunanya. Sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai akuntansi tentu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Didalam akuntansi terdapat beberapa informasi yang dapat digunakan untuk menemukan konsep, prinsip atau teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembebasan dari praktik-praktik kapitalis yang sangat eksploitatif. Studi akuntansi dalam ranah kritis juga memiliki ciri *self-reflexive*. Karakteristik tersebut memberikan ruang dan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan diri dan keyakinannya dalam proses eksplorasi menuju tercapainya hasil atau temuan studi yang merefleksikan diri dan keyakinan peneliti tersebut (Andrianto dan Irianto, 2008).

Sedangkan sebagai penggagas PEA, Tinker memiliki pandangan bahwa teori dan praktik akuntansi senantiasa akan dipengaruhi oleh teori tersebut. Namun pada kenyataannya, teori dan praktik akuntansi tersebut hanya dipandang dari aspek ekonomi saja sedangkan aspek yang lain tidak dilibatkan di dalamnya. Padahal menurut pandangan Tinker (1980), laba/rugi akuntansi sebagai cermin kinerja keuangan perusahaan merupakan refleksi dari situasi dan kondisi saat mulai disusun hingga berakhirnya penyusunan laporan keuangan. Situasi dan kondisi tidak hanya yang terjadi di dalam internal perusahaan tetapi juga yang terjadi di eksternal perusahaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cooper dan Sherer (1984:218-219) dijelaskan bahwa PEA memiliki beberapa karakteristik antara lain: pertama, dalam studi akuntansi perlu mengakui keberadaan kekuasaan dan konflik dalam masyarakat berkenaan dengan penilaian laba/rugi perusahaan (akuntansi). Dengan demikian maka dapat dipahami bagaimana distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan di dalam masyarakat bisa terjadi. Kedua, PEA juga mendorong penelitian-penelitian di bidang akuntansi sesuai dengan konteksnya. Dengan kata lain PEA berusaha menganalisis bagaimana sejarah dan proses yang berjalan hingga suatu kegiatan perusahaan bisa muncul. PEA akan memperlakukan nilai sebagai bagian yang sangat esensial, dimana laporan akuntansi diterapkan dalam kepentingan tertentu (misalnya kelompok elit atau kelas tertentu). Ketiga, PEA akan lebih mendorong pemahaman fungsi akuntansi yang lebih dinamis dalam masyarakat dan menganggap bahwa terjadi saling mempengaruhi antara akuntansi dan lingkungannya.

Sedangkan di dalam negeri Rosser (1999) dalam Haryadi (2011, 53) menggunakan PEA untuk menelaah reformasi akuntansi. Hasil analisis yang dilakukannya menyatakan bahwa di Indonesia sistem akuntansi cenderung diasumsikan tidak bisa lepas dari karakter dan kepentingan dunia barat. Dikarenakan negara berkembang menduduki posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, maka realitasnya perusahaan-perusahaan hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang mampu melayani kepentingan dari perusahaan-perusahaan negara barat dan MNC. Sedangkan pilihan-pilihan untuk kepentingan nasional relatif lebih banyak. Oeh karena itu pilihan atau langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan adopsi kebijakan akuntansi barat daripada mengembangkan kebijakan yang ada.

Adapun tujuan dari studi akuntansi menggunakan rerangka PEA adalah untuk memahami sekaligus melakukan evaluasi atas peran akuntansi dalam konteks ekonomi, sosial dan politik, atau mengkaji bagaimana peran akuntansi dalam konteks tertentu, baik organisasional maupun lingkungan yang lebih luas. Dengan menggunakan rerangka PEA penulis dapat mengeksplorasi pemikirannya dalam usaha untuk memperbaiki konsep yang telah ada. Penggunaan akuntansi kritis sangat penting bagi perkembangan ilmu akuntansi. Karena dengan menggunakan akuntansi kritis penulis dapat mengetahui dampak secara luas (bagi korporasi, lingkungan sosial masyarakat maupun alam) yang mungkin timbul akibat penggunaan standar atau pemahaman atas definisi akun dalam akuntansi. Pada dasarnya penggunaan PEA dalam lingkungan akuntansi sangat diperlukan bagi peneliti-peneliti bidang sosial. Karena dengan menggunakan PEA mereka dapat melihat dan mengevaluasi

standar akuntansi serta kebijakan yang ada saat ini apakah sudah tepat atau masih perlu penambahan atau bahkan perbaikan.

Namun PEA saja menurut penulis belum cukup untuk melihat peran akuntansi, terutama jika dihubungkan dengan tujuan penciptaan manusia di bumi (*khalifatullah fil ardh*). Sehingga perlu dimasukkan nilai-nilai Islam dalam proses analisisnya. Karena dalam melakukan operasional bisnis secara syariah pengakuan pendapatan dan biaya realisasi harus berdasarkan pada prinsip *halal* dan *thoyib*, dimana *halal* dan *thoyib* tersebut tidak hanya menyentuh hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*) tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan-nya (*habluminallah*) serta lingkungan alam. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari *output* primer yang proses pembentukannya menghilangkan unsur *riba* dan konsep penandingannya harus memenuhi aspek keadilan (Mulawarman, 2006:248).

Kegiatan ekonomi pertanian merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat kompleks, karena dalam kegiatan ekonomi pertanian hubungan yang terjalin bukan hanya hubungan *muammalah* (ekonomi) dengan manusia saja tetapi juga menyentuh hubungan manusia dengan alam sebagai pengimplementasian *khalifatullah fil ardh* untuk *isti'mar* (memakmurkan bumi). Dimana menurut Miftahulhaq (2012) hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi, yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan,

karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang Menciptakan alam.

2. Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan atau boros). Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang.
3. Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (*haram*) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah SWT.

Lebih jauh lagi dengan digunakannya syariat dalam proses analisis terutama dalam pencatatan laporan keuangan, maka akuntabilitas kepasrahan dan ketundukan pada entitas dapat kita lihat apakah sudah dilaksanakan atau belum. Bentuk akuntabilitas berkenaan dengan kepasrahan dan ketundukan manusia dalam melaksanakan ketentuan syariah (*abd' Allah*) disebut dengan akuntabilitas ketundukan. Sedangkan ketundukan untuk menjalankan kreativitas sebagai wakil Allah di bumi disebut akuntabilitas kreativitas (Mulawarman, 2012:28-29). Dimana penjelasan yang lebih mendetail mengenai prinsip *halal* dan *thoyib* serta bentuk akuntabilitas manusia akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Penggunaan nilai-nilai Islam dalam analisis juga dikarenakan Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi Islam juga merupakan sebuah sistem nilai, ilmu, tata cara ritual, dan sistem kehidupan (*way of life*). Dimana dalam konteks akuntansi, Harahap (2003, 312) menggunakan istilah Islam sebagai tata cara kehidupan. Dalam pengertian tersebut Islam bukan hanya tata cara ritual khusus, bukan hanya persiapan mati, tetapi ia menyatu dalam kehidupan yang terintegrasi dan holistik tanpa ada garis demarkasi antara persoalan dunia dan akherat dan tanpa ada dikotomi antara keduanya. Artinya masalah ekonomi, manajemen, akuntansi pun ada dalam Islam. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1989) tentang Islam sebagai berikut:

“Pengertian agama dalam Islam sama dengan istilah “*din*” yang berarti bukan saja semata suatu konsep, tetapi suatu yang harus dijabarkan ke dalam realitas kehidupan secara mendalam dan kental daam pengalaman hidup manusia”.

Selain itu penggunaan nilai-nilai Islam juga dikarenakan penyifatan Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin* (Rahmat untuk sekalian alam). Kalau sebelumnya agama, kitab, atau kepercayaan yang dibawa oleh para nabi dan tokoh agama lainnya adalah bersifat lokal, bangsa, atau primordial. Misalnya Nabi Daud AS., Musa AS. dan Isa (Yesus) AS., semuanya hanya untuk kaumnya. Islam mengayomi semua makhluk tersebut. Kalau kapitalisme memiliki kaum pemilik modal dan komunis memayungi kaum buruh, maka Islam memayungi keduanya bahkan semuanya termasuk segala makhluk yang ada di bumi (Harahap, 2003:312). Sehingga penggunaan *Islamic Political Economy of Accounting* menurut penulis sangat relevan untuk menganalisis perolehan dan distribusi *income* dalam lingkup usaha tani, karena dalam lingkup usaha tani hubungan antara manusia, alam, budaya dan Tuhan-nya sangat erat. *Islamic Political Economy of Accounting* adalah sebuah metodologi yang menggabungkan antara *Political Economy of Accounting* yang diintrodusir oleh peneliti-peneliti kritis bidang akuntansi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, nilai-nilai Islam tersebut diantaranya adalah prinsip *halal* dan *thoyib*. Penggunaan *Islamic Political Economy of Accounting* ini juga berkaitan dengan usaha untuk menegakkan posisi manusia sebagai *khalifah* untuk *isti'mar* (memakmurkan bumi).

2.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau diskusi dengan narasumber. Sedangkan data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa data statistik, laporan keuangan perusahaan, peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nganjuk, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap enam orang petani yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Diantaranya yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Informan

Nama	Profesi
Tukirin	Petani
Aminah (Istri Tukirin)	Petani
Supardi	Petani dan PNS (Dinas Pengairan)
Mujianto	Petani
Imam	Buruh Tani
Sarim	Petani

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa jurnal-jurnal penelitian dan buku. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

2.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data berdasarkan pendekatan PEA. Hal ini dilakukan untuk memetakan realitas konflik antara petani dan perusahaan. Selain itu pengumpulan data berdasarkan pendekatan PEA juga dilakukan untuk melihat konflik utama dalam kesetaraan *income*. Prosedur pengumpulan data dengan pendekatan PEA dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Dalam pelaksanaannya studi ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data/informasi dan mempelajari serta menelaah materi-materi dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Survey Lapangan

Yaitu survey lanjutan yang dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada entitas yang menjadi subjek penelitian, salah satunya adalah melihat secara langsung proses usaha tani.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan entitas.

Sedangkan tahap kedua prosedur pengumpulan data dengan pendekatan PEA adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah para petani.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan tentang masalah penelitian, dalam hal ini mengenai proses produksi usaha tani serta teknik pencatatan biaya yang dilakukan oleh petani.

2.4.2 Teknik Analisis Data

Dalam mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi mengenai topik penelitian, peneliti menggunakan metode analisa kritis deskriptif. Dimana alat analisis yang digunakan adalah IPEA. Dengan menggunakan alat analisis IPEA diharapkan akan dapat memberikan *enlightment* (pencerahan) atas *income* yang berkeadilan. Pencerahan tersebut diperoleh dari pengapdosian nilai-nilai dalam ajaran agama Islam, seperti *halal* dan *thoyib*. Selain itu alat analisis IPEA diharapkan juga akan dapat menjadi *self reflexivity* atas konsep NFI, *self reflexivity* ini terkait dengan keyakinan penulis tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam melakukan kegiatan usaha tani agar tercipta keseimbangan dalam tata kehidupan. *Enlightment* dan *self reflexivity* tersebut terutama berhubungan dengan akuntabilitas ketundukan manusia serta akuntabilitas kreativitas manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah* untuk *isti'mar* (memakmurkan bumi), seperti yang tercantum dalam Q.S Hud Ayat 61.

2.5 Instrumen Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan permasalahannya, untuk itu metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dan yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri.

2.6 Refleksi

Pembangunan perekonomian suatu bangsa merupakan sebuah pembangunan yang menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utamanya. Begitu pula dalam hal pengembangan dan pembangunan sebuah bisnis, seluruh kepentingan

stakeholder harus dapat diakomodasi, karena dalam perjalanannya pengembangan dan pembangunan bisnis tidak hanya dilakukan oleh pemilik modal saja. Politik dan ekonomi yang dibangun juga haruslah selaras dengan tujuan pembangunan tersebut agar keadilan dan keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan dapat tercapai. Dimana pencapaian tersebut dapat dilihat dari “kemakmuran” yang dicapai oleh pelaku-pelaku ekonomi yang direfleksikan dalam sebuah laporan keuangan. Karena secara sadar atau tidak, laporan keuangan yang ada saat ini merupakan sebuah gambaran atas entitas yang dapat dipandang sebagai institusi sosial dimana yang ditetapkan di dalamnya adalah atribut ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika dalam laporan keuangan terdapat klasifikasi kelompok yang dalam konteks ekonomi marjinalis dapat dikelompokkan menjadi pemilik, manajer, pegawai, maupun buruh.

Penggunaan *Islamic Political Economy of Accounting* dalam menganalisis realita ekonomi politik yang ada merupakan sebuah usaha pengembangan metode penelitian yang diintrodusir oleh peneliti-peneliti sebelumnya. *Islamic Political Economy of Accounting* ini berusaha memandang keadilan bukan hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek spiritual sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) manusia sebagai *khalifah Allah* di bumi. Penggunaan nilai-nilai Islam ini juga merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan sebuah tata kehidupan yang seimbang (dalam artian kehidupan di dunia dan di akherat kelak). Penggunaan nilai-nilai Islam dalam analisis ini juga tidak dapat dipisahkan dari anggapan bahwa *syari'ah* adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni *tauhid, khilafah, amanah, halal* dan *haram* (Miftahulhaq, 2012). Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran

(konsep) atau pandangan Islam tentang lingkunganpun pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar *syari'ah* tersebut yakni: 1) *tauhid*; 2) *khilafah*; 3) *amanah*; 4) keseimbangan (*i'tidal*) dan 5) kemashlahatan (*istishlah*). Untuk menjaga agar manusia dapat berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima pilar *syari'ah* ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni: 1) *halal* dan 2) *haram*. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah “bangunan“ untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam.

Secara sederhana penggunaan *Islamic Political Economy of Accounting* dalam menganalisis perolehan dan distribusi *income* dalam lingkup usaha tani merupakan sebuah usaha memandangi realita ekonomi dalam berbagai sudut pandang. Baik dari sudut pandang keilmuan, praktik di lapangan, maupun sudut pandang agama agar dapat memberikan *enlightment* (pencerahan) atas *income* yang berkeadilan serta dapat menjadi *self reflexivity* atas konsep NFI yang ada. Penggunaan *Islamic Political Economy of Accounting* juga dapat dianggap sebagai pengimplementasian penggunaan sifat Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin*.

BAB III

PENCARIAN KONSEP *NET FARM INCOME* YANG SESUAI SYARIAT

3.1 **Konseptualisasi *Net Farm Income***

Keuntungan atau laba menurut PSAK No. 1 (2009) adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan SFAC No. 6 mendefinisikan keuntungan sebagai peningkatan ekuitas atau aset bersih dari transaksi pengeluaran atas entitas dan dari seluruh transaksi dan kejadian lain serta pengaruh keadaan entitas kecuali hasil dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Berdasarkan beberapa pengertian tentang keuntungan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa keuntungan merupakan hasil atas operasional perusahaan (produksi dan atau penjualan) setelah dikurangi biaya untuk membuat dan atau menjual produk tersebut.

Keuntungan juga merupakan bagian yang diharapkan oleh setiap orang yang menjalankan kegiatan bisnis termasuk dalam menjalankan proses usaha tani. Namun keuntungan juga tidak serta merta menjadi tujuan utama dalam melakukan kegiatan pertanian di Indonesia. Meskipun dimensi ekonomi menjadi basis pengukuran keberhasilan dan harapan terbesar bagi keluarga tani, namun pada umumnya dalam melakukan kegiatan pertanian di Indonesia setidaknya ada tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan spiritual (Mulawarman, 2012). Dalam pertanian modern perhitungan laba pertanian disebut sebagai *Net Farm Income*. *Net Farm Income* adalah penghasilan bersih atau keuntungan bersih (Gietema, 2006).

Menurut Mubyarto (1995, 70) keuntungan atas usaha tani disebut dengan hasil bersih atau hasil *netto*. Hasil bersih tersebut diperoleh ketika petani memanen tanamannya. Dimana setiap akhir panen petani akan menghitung berapa hasil bruto produksinya yaitu luas tanah dikalikan dengan hasil per satuan luas. Berikut adalah persamaan matematika hasil bruto produksi pertanian:

$$\left[Y_b = (LT \times H_s) \times P \right]$$

Dimana : Y_b adalah hasil bruto (dalam rupiah)

LT adalah luas tanah

H_s adalah hasil per satuan luas

P adalah harga per kg (dalam rupiah)

Setelah hasil bruto diketahui langkah selanjutnya adalah melakukan penjumlahan atas biaya yang telah dikeluarkan. Misalnya biaya pupuk dan bibit, biaya pengolahan tanah, upah menanam, upah membersihkan rumput dan biaya pemanenan yang biasanya berupa bagi hasil (*in-natura*). Selain itu untuk petani penyakap masih ada lagi biaya yang harus dikeluarkan, yaitu bagi hasil kepada pemilik tanah (sekitar 50% dari hasil *netto* tergantung perjanjian yang telah dibuat) (Mubyarto, 1995:70). Jika dibuat persamaan matematika adalah sebagai berikut:

$$\left[TC = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) \right]$$

Dimana: TC adalah total biaya (dalam rupiah)

C adalah biaya variabel (dalam rupiah)

Langkah terakhir adalah menghitung hasil *netto* tersebut. Persamaan yang

dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$\left[Y_n = (Y_b - TC) \times 50\% \right]$$

Dimana: Y_n adalah hasil *netto* (dalam rupiah)

Y_b adalah hasil bruto (dalam rupiah)

TC adalah total biaya (dalam rupiah)

50% adalah bagian petani setelah dikurangi persentase untuk pemilik tanah (tergantung perjanjian)

Konseptualisasi *Net Farm Income* juga dilakukan oleh beberapa lembaga internasional salah satunya yaitu Agromisa Foundation. Gietema (2006) dalam buku panduan *Farm Accounting* yang diterbitkan oleh Agromisa Foundation juga membuat perhitungan *Net Farm Income* yang secara keseluruhan hampir sama dengan apa yang telah dikonseptkan oleh Mubyarto, yang membedakan adalah bentuk perhitungan dan posisi akun. *Net Farm Income* yang dibuat oleh Mubyarto lebih cenderung mendekati perhitungan ekonomi, dimana perhitungan *Net Farm Income* hanya berdasarkan perhitungan matematis dalam bentuk persamaan sedangkan *Net Farm Income* yang dikeluarkan oleh Agromisa Foundation lebih dalam bentuk persamaan akuntansi.

3.1.1 *Net Farm Income* Ala Agromisa Foundation

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *Net Farm Income* menurut Gietema (2006) dalam buku panduan *Farm Accounting* adalah penghasilan bersih atau keuntungan bersih. *Net Farm Income* diperoleh dari akun laba atau rugi. Dan hal tersebut merupakan bagian dari informasi penting yang harus diketahui oleh petani. *Net Farm Income* tersebut dimasukkan di sisi kiri dari akun laba rugi tepatnya di dalam akun biaya, hal tersebut dilakukan agar akun laba rugi menjadi seimbang. Jelasnya NFI dicatat sebagai biaya, karena sebenarnya NFI adalah pembayaran atau upah yang diterima oleh petani dan para pekerja untuk tenaga mereka, manajemen dan modal pribadi. Secara umum rumus NFI (*Net Farm Income*) adalah sebagai berikut:

$$\left[\text{NFI} = \text{Total (atau Gross) Output} - \text{Total Biaya Riil} \right]$$

NFI yang dihasilkan dari perhitungan akun laba rugi tidak sama seperti kas yang diterima oleh petani dari operasional usaha tani. *Net Farm Income* pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dalam bentuk non-kas, dan tabungan atau investasi. Pendapatan dalam bentuk kas berupa uang yang diterima oleh petani dari usaha tani mereka disebut sebagai *private drawings*. *Private Drawings* sebenarnya adalah uang muka yang diberikan kepada petani dan para pekerja dan pengelola (manajemen). Semua pemasukan pribadi yang dianggap sebagai tabungan yang didapatkan dari luar usaha tani dan ditaruh kedalam usaha tani harus dikurangkan dari pengeluaran pribadi sehingga diperoleh *private drawings*.

Pendapatan non-kas terdiri dari hasil produksi yang dikonsumsi oleh keluarga petani tanpa melakukan pembayaran. Produk pertanian yang dikonsumsi oleh petani diukur berdasarkan harga pasar dan disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Produk pertanian yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga tersebut menjadi bagian utama dari NFI melalui konsumsi rumah tangga. Sedangkan tabungan adalah bagian dari NFI yang tidak dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga mereka melainkan hanya untuk berjaga-jaga. Tabungan tersebut akan menyebabkan kenaikan modal bersih selama periode akuntansi. Oleh karena itu bagian dari NFI ini sama dengan selisih antara modal bersih di awal dan di akhir periode akuntansi. Jika modal bersih di akhir periode akuntansi lebih kecil daripada modal bersih di awal periode akuntansi kemudian petani juga mengkonsumsi bagian dari modalnya maka jumlah hutang akan meningkat atau jumlah aset mereka akan turun. Persamaan matematikanya adalah sebagai berikut:

$$\left[\text{NFI} = \text{Net Private Drawing} + \text{Home Consumption} + \text{Increase of Net} \right]$$

Dan jika dimasukkan ke dalam laporan laba rugi maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Akun Laba/Rugi NFI versi Agromisa Foundation

<i>Profit and Loss Account</i>			
<i>Mr. John Pasture, Greenhill, 1st of January to 31st December 2006</i>			
<i>Output</i>	<i>US\$</i>	<i>Costs</i>	<i>US\$</i>
<i>Crops</i>	6,461	<i>Crops</i>	1,315
<i>Milk</i>	5,070	<i>Cattle costs</i>	1,020
<i>Net Sales & Growth of Livestock</i>	5,315	<i>Overhead</i>	4,837
<i>Home consumption</i>	2,215	<i>Depreciation of:</i>	
		<i>farm buildings</i>	500
		<i>tractor</i>	3,000
		<i>livestock equipment</i>	50
		<i>Net Farm Income</i>	8,339
<i>Gross Output</i>	19,061	<i>Total Costs</i>	19,061

Sumber: Gietema (2006)

3.1.2 Penggunaan *Fair Value*

Seiring perkembangan jaman, penggunaan *historical cost* oleh banyak pihak dianggap tidak lagi relevan. Hal tersebut berarti penggunaan *historical cost* keluar dari salah satu kualitas akuntansi, dimana menurut SFAC No. 2 kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan adalah relevansi dan *reliability*. Namun jika dilihat dari kualitas kehandalan *historical cost* lebih handal dibandingkan dengan *fair value*. Tidak terlepas dari hal tersebut banyak orang berpendapat dan yakin bahwa standar akuntansi yang menggunakan *historical cost* berperan penting dalam kerusakan perekonomian, terutama lembaga simpan pinjam tahun 1980-an dan masalah perbankan tahun 1990-an (Nawangasasi *et al*, 2010). Karena pada waktu itu banyak laporan keuangan yang tidak mengungkapkan

kerugian segera pada saat terjadi. Sehingga terdapat kesepakatan bahwa standard akuntansi yang ada perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa laporan keuangan bermanfaat, relevan, dan terpercaya. Dan pada akhirnya dibuat laporan keuangan berbasis *Fair Value*.

Menurut PSAK No. 16 (2007) *Fair Value* (Nilai Wajar) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). Secara umum nilai wajar diukur dengan menggunakan harga di pasar utama bagi aktiva atau kewajiban (yaitu pasar dengan volume terbesar dan tingkat aktivitas untuk aktiva atau kewajiban) atau jika tidak ada pasar utama maka yang dipakai adalah pasar yang paling menguntungkan bagi aktiva atau kewajiban tersebut dimana biasanya menggunakan jasa penilai.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perubahan tingkat harga akan berpengaruh kepada stabilitas satuan keuangan. Hal ini selanjutnya menimbulkan kesulitan apabila pengukuran didasarkan kepada *historical costs* dan dalam membandingkan prestasi perusahaan selama beberapa tahun. Karena tidak dapat menggambarkan posisi keuangan sesungguhnya. Dimana pada saat inflasi, daya beli uang semakin melemah sedangkan harga barang relatif meningkat, sehingga diperlukan informasi tambahan yang menjelaskan perubahan harga agar tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan diungkapkannya pengaruh perubahan harga, para pemakai laporan keuangan akan dapat menaksir dengan lebih realistis mengenai arus kas dimasa mendatang, prestasi perusahaan, kemampuan operasi, dan daya beli umum modal perusahaan.

Berdasarkan ketentuan IAS 41 *Agriculture* maka pengukuran aset biologi juga dilakukan menggunakan nilai wajar. Segala perubahan nilai aset yang terjadi melalui pengukuran *fair value* dikurangi dengan biaya untuk menjual harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Hal tersebut sesuai dengan konsep pengakuan akrual yang ada di dalam IAS 41 *Agriculture* yaitu aset biologi, produk pertanian dan aset produk pertanian yang telah diolah dapat diakui sebagai laba ketika terdapat peningkatan nilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kesimpulannya adalah nilai wajar merupakan pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan harga di pasar utama bagi aktiva atau kewajiban (yaitu pasar dengan volume terbesar dan tingkat aktivitas untuk aktiva atau kewajiban) atau jika tidak ada pasar utama maka yang dipakai adalah pasar yang paling menguntungkan bagi aktiva atau kewajiban tersebut dimana biasanya menggunakan jasa penilai atau *appraisal*.

3.2 Konsep Laba Akuntansi

Penentuan laba atau profit merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi konvensional bahkan Karl Marx menyebutkan bahwa bertambahnya nilai atau laba merupakan tujuan dari kapitalis. Transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan juga ditentukan oleh besarnya laba yang diperoleh. Bonus karyawan dan deviden kepada para investor banyak dibagikan atas dasar besarnya laba yang dapat dihasilkan. Operasional usaha serta prestasi manajemen juga diukur melalui perolehan laba. Lebih jauh lagi laba juga merupakan penunjuk untuk melakukan investasi terutama laba dalam pandangan ekonomi bagi pelaku usaha. Sedangkan bagi para investor keputusan untuk membeli, menjual, atau tetap akan

mempertahankan investasinya biasanya dilihat dan diukur dari besarnya laba per saham (*earning per share*) yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di awal bab, dimana secara sintaktis terdapat beberapa aturan yang mendefinisikan tentang laba salah satunya yaitu SFAC No. 6 dan PSAK No. 1 (2009). Keuntungan atau laba menurut PSAK No. 1 (2009) adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan SFAC No. 6 mendefinisikan keuntungan sebagai peningkatan ekuitas atau aset bersih dari transaksi pengeluaran atas entitas dan dari seluruh transaksi dan kejadian lain serta pengaruh keadaan entitas kecuali hasil dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

Laba bisnis (*business profit*) menurut Salvatore dalam Budi (2005, 15) adalah penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit (*explicit cost*) adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kas perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi diantaranya adalah biaya tenaga kerja, bunga untuk hutang modal, sewa tanah dan bangunan, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Sedangkan Belkoui (2001, 127) mendefinisikan laba sebagai perbedaan antara *revenue* realisasian (*realized revenues*) yang berasal dari transaksi suatu periode berhubungan dengan *cost* historis.

Dari beberapa definisi tentang laba tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laba berdasarkan konsep akuntansi dapat diartikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Menurut Belkaoui dalam Harahap (1995, 147) definisi tentang laba mengandung lima sifat, yaitu:

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba itu artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang masuk hasil.
4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.
5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “*matching*” artinya hasil dikurangi biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama.

Konsep laba juga menjadi pokok penafsiran dari aliran pemikiran yang berbeda-beda, yang masing-masing melontarkan keunggulan konseptual dan praktisnya masing-masing. Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha (Harahap 1995, 146), yaitu :

1. Aliran klasik yang dicirikan terutama oleh kepatuhan pada postulate unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik menganggap “laba akuntansi” sebagai laba usaha.
2. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangannya terhadap postulate unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, konsep laba aliran neo-klasik ialah “laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum”.
3. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *historical cost* lagi. Konsep ini dikenal dengan *current value accounting*, sedang perhitungan labanya disebut *current income*.
4. Aliran neo-radikal yang menggunakan *current value* tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini dikenal dengan *general price level adjusted current value accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *adjusted current income*.

3.3 Konsep Laba Ekonomi

Keuntungan sebagai sesuatu yang mendasar dari sebuah kegiatan ekonomi tentunya juga memiliki konsep tersendiri yang mungkin berbeda dengan konsep laba dalam pandangan akuntansi. Cara pandang yang berbeda telah menyebabkan perbedaan konsep tersebut, walaupun inti dari keduanya sama yaitu peningkatan kekayaan. Beberapa ahli ekonomi telah membahas masalah konsep laba menurut ilmu ekonomi. Adam Smith menjelaskan bahwa *income* adalah kenaikan dalam kekayaan. Pengertian tersebut kemudian diikuti oleh Marshall dan menghubungkannya dalam konsep praktik bisnis (Harahap, 1995:148).

Von Bohm Bawerk pada akhir abad XIX berpendapat bahwa laba bukan saja unsur kas, dia memperkenalkan konsep laba non moneter yang kemudian pada awal abad XX Fischer, Lindahl, dan Hick menjelaskan sifat-sifat laba ekonomi. Fischer dalam Harahap (1995, 148) menyebutkan laba ekonomi mencakup tiga tahap. Tahap pertama, *Physical Income* yaitu, konsumsi barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan, laba jenis ini tidak bisa diukur.

Tahap kedua adalah *Real Income* yaitu, ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk *real income* ini adalah “biaya hidup” (*cost of living*). Dengan kata lain kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum atau sesudah dikonsumsi.

Sedangkan tahap ketiga *Money Income* merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fischer *real income* lebih dekat pada pengertian akuntansi tentang *income*. Sedangkan Lindahl menganggap konsep laba ekonomi sebagai kepentingan (*interest*) yaitu merupakan penghargaan yang terus menerus terhadap barang modal sepanjang waktu. Perbedaan antara *interest* dengan konsumsi yang diharapkan pada periode tertentu dianggap sebagai “*saving*”, sehingga laba dianggap sebagai konsumsi ditambah *saving*. Ide tersebut mendorong pada konsep laba ekonomi berterima umum sebagai konsumsi ditambah dengan simpanan yang diharapkan dilakukan selama periode tertentu, simpanan sama dengan perubahan dalam modal ekonomi (Ikhsan dan Suprasto, 2008:213). Hal tersebut dapat dinyatakan dengan rumus:

$$Y_e = C + (K_t - K_{t-1})$$

Dimana: Y_e adalah laba ekonomi
 C adalah konsumsi
 K_t adalah modal pada periode t
 K_{t-1} adalah modal pada periode $t-1$

Kemudian Hick mengembangkan teori Fischer dan Lindahl tentang *economic income*. Ia mendefinisikan *personal income* sebagai jumlah yang paling tinggi yang dapat dikonsumsi seseorang selama satu minggu dan dia masih mengharapkan seperti itu pada akhir minggu sebagaimana pada keadaan awalnya. Pernyataan Hick tersebut jika disederhanakan menjadi jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi pada periode tertentu dan dia masih tetap dapat mempertahankan modalnya tidak berkurang.

Pengertian lain tentang laba ekonomi adalah sama dengan penerimaan perusahaan yang dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit (*implicit cost*) mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan dipergunakan untuk proses produksinya sendiri (Salvatore dalam Budi, 2005:15). Biaya implisit meliputi gaji pengusaha yang diperoleh bila dia bekerja untuk orang lain dalam kapasitas yang sama (misalnya, sebagai manajer perusahaan lain) dan hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewakan lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Input yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan untuk proses produksinya sendiri tidak gratis dipakai oleh perusahaan, meskipun perusahaan meskipun perusahaan dapat mempergunakan input tersebut tanpa ada pengeluaran yang aktual atau eksplisit. Biaya implisit dari input tersebut dipergunakan pada alternatif yang terbaik diluar perusahaan.

Sedangkan Harahap (2002, 211) menjelaskan laba dalam ekonomi adalah perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera (*well being*) atau istilah yang lebih populer adalah *better offness* yang terjadi pada periode jangka waktu tertentu. Laba suatu periode merupakan perubahan *present value* arus kas akan datang, disiskontokan dengan tingkat bunga tertentu.

3.4 Konsep Value Added

Seiring dengan terus berkembangnya jaman, kesadaran para ekonom dan akuntan akan pentingnya konsep distribusi pendapatan mulai tumbuh dan berkembang. Salah satu konsep yang mereka rumuskan adalah konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah tersebut dinilai dapat membantu manajer dalam rangka memenuhi tugas akuntansinya kepada beberapa kelompok kepentingan. Hal tersebut

seperti yang diungkapkan oleh Mulawarman (2006, 129) dimana konsep *value added* merupakan pengukuran *income*, dan dapat mengarahkan pada informasi yang lebih luas daripada yang telah ada pada *income statement* dan *balance sheet*.

Ruggles dan Ruggles; Staden (2002) dalam Mulawarman (2006, 124) juga memberi penjelasan tentang *Value Added*:

...sebagai nilai tambah perusahaan, seperti penciptaan nilai dari aktivitas perusahaan dan para karyawannya, yang adapat diukur dengan membedakan antara nilai pasar dari barang yang diputar oleh perusahaan dan biaya dari barang dan material yang dibeli dari perusahaan (*producer*) lainnya. Pengukuran ini akan mengeluarkan kontribusi yang dibuat oleh perusahaan lain pada nilai total produksi perusahaan, sehingga sebenarnya *Value Added* secara esensial sama dengan penciptaan nilai pasar oleh perusahaan.

Sedangkan Belkaoui (2000, 222) menjelaskan bahwa nilai tambah merupakan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya perusahaan yang produktif sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi, pegawai dan pemerintah. Nilai tambah yang dijelaskan oleh Belkaoui merupakan modifikasi yang dilakukan pada laporan laba rugi perusahaan. Ada dua tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung nilai tambah. Pada tahap pertama *users* menghitung laba ditahan, persamaan yang dapat dibuat adalah:

$$\left(S - B = R + DP + W + I + DD - T \right)$$

Dimana : R adalah laba ditahan

S adalah *revenue* penjualan

B adalah material dan jasa yang dibeli

DP adalah depresiasi

W adalah gaji

I adalah bunga

DD adalah deviden
T adalah pajak

Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai tambah bruto, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\left(R = S - B - DP - W - I - DD - T \right)$$

Sedangkan tahap terakhir yaitu menghitung nilai tambah neto, persamaan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$\left(S - B - DP = R + W + I + DD - T \right)$$

Pada persamaan perhitungan nilai tambah bruto dan neto posisi akun menunjukkan kelompok yang terlibat dan yang berhak atas nilai tambah. Pada sisi kiri (sisi kanan pembaca) persamaan menunjukkan nilai tambah bagi kelompok yang terlibat dalam tim produksi manajerial. Kelompok tersebut antara lain meliputi pegawai perusahaan, pemegang saham dan obligasi, serta pemerintah. Sisi kanan merupakan kelompok laba kotor, atau disebut juga sebagai metode penambah (*additive method*). Sedangkan sisi kiri disebut sebagai metode pengurang (*subtractive*).

Pendapat lain tentang penghitungan atau pengukuran *value added* dalam konteks akuntansi perusahaan adalah pendapat dari Haller dan Stolowy (1995) dalam Mulawarman (2006, 133). Menurut Haller dan Stolowy penghitungan atau pengukuran *value added* dapat dilakukan dalam dua cara yang disebut dengan *The Dichotomy of Value Added*. Cara pertama disebut dengan *subtractive* atau *indirect*

method. *Subtractive* atau *indirect method* menunjukkan *performance aspect*, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$VA = O - I$$

Dimana: O adalah *output*
I adalah *input*

Sedangkan cara yang kedua adalah *additive* atau *direct method* yang menunjukkan aspek sosial dan direpresentasikan sebagai penjumlahan dari penciptaan kekayaan (Staler dan Holowy, 1995 dalam Mulawarman, 2006:133). Adapun persamaan matematika yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$VA = RE + RG + RCP + NAP$$

Dimana: RE adalah *Remuneration of Employees*
RG adalah *Remuneration of Government*
RCP adalah *Remuneration of Capital Providers*
NAP adalah *Not Appropriated Income (Retained Earning)*

Tabel 3.2 Perbedaan Laporan Laba Rugi dan VAS

Kriteria	Laporan Laba Rugi	VAS
Proses perolehan hasil	Pendapatan – biaya	Output – input
Hasil antara	Laba kotor	VA
Hasil akhir	Laba bersih	Distribusi
Penerima hasil utama	<i>Stockholders</i>	<i>Stakeholders</i>
Pencipta kekayaan	<i>Income</i> akuntansi	<i>Income</i> ekonomi

Sumber: Mulawarman (2006, 226)

Dua karakteristik pengukuran penciptaan kekayaan tersebut, lanjut Mulawarman (2006, 134) dapat dilihat sebagai bentuk estimasi produktivitas entitas ekonomi, termasuk efisiensi entitas dalam menggunakan faktor-faktor produktif,

seperti kemampuan kerja dan modal. Belkaoui (2000, 223-224) menjabarkan *value added* dalam format laporan laba rugi, berikut adalah laporan nilai tambah yang dibuat oleh Belkaoui.

Tabel 3.3 Value Added Statement

A. Laporan laba rugi konvensional perusahaan pada tahun 19X8		\$	\$
Penjualan			4,000,000
Dikurangi : Material yang digunakan	400,000		
Gaji	800,000		
Jasa yang dibeli	1,200,000		
Bunga yang dibayarkan	240,000		
Depresiasi	160,000		
Profit sebelum pajak		1,200,000	
Pajak pendapatan (diasumsikan tarif 50%)		600,000	
Profit setelah pajak		600,000	
Dikurangi : Dividen yang dibayarkan		200,000	
Laba ditahan		400,000	
B. Laporan nilai tambah untuk tahun yang sama			
Penjualan		4,000,000	
Dikurangi: Material dan jasa yang dibeli serta depresiasi		1,760,000	
Nilai tambah yang tersedia untuk distribusi atau simpanan		2,240,000	
Digunakan sebagai:			
Untuk karyawan		800,000	
Untuk penyedia modal			
Bunga		240,000	

Dividen	200,000	440,000
Untuk pemerintah		600,000
Laba ditahan		400,000
Nilai tambah		2,240,000

Sumber: Belkaoui (2000, 223-224)

Meskipun pada tingkatan pemikiran konsep nilai tambah dirasa lebih dekat dengan nilai-nilai islam, namun tidak sedikit yang mengkritik penggunaan konsep nilai tambah tersebut. Mereka berpendapat bahwa konsep nilai tambah dibangun dari konversi konsep laba/rugi konvensional, padahal konsep laba/rugi konvensional telah menyatu dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu konsep nilai tambah juga dinilai memiliki potensi laten kembalinya nilai kapitalisme melalui etika utilitarianisme (Triyuwono, 2006:61). Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Triyuwono (2006, 60) dimana etika utilitarianisme adalah suatu teori yang beranggapan bahwa suatu tindakan secara moral dapat dikatakan benar atau salah bila hasil dari tindakan tersebut bisa memberikan manfaat atau tidak. Sebenarnya dalam taraf dan kadar tertentu, karakter utilitarian tersebut diperlukan dalam kehidupan manusia. Namun ketika karakter tersebut melampaui batas yang normal, karakter tersebut menjadi destruktif bagi kehidupan manusia dan alam, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran penyeimbang (Triyuwono, 2006:22).

Pemikiran-pemikiran penyeimbang tersebut sebenarnya telah disematkan oleh Allah dalam berbagai media, mulai dari alam hingga kitab suci Al Quran:

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujurat 49:13).

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai etis sebuah tindakan tidak hanya dilihat dari manfaat dan niat. Triyuwono (2006, 61) menjelaskan adanya nilai lain yang lebih transendental dan teleologikal, yaitu *taqwa*. Tanpa adanya nilai-nilai ketakwaan, sebuah tindakan tidak akan bernilai dihadapan Allah.

3.5 Konsep *Shari'ate Value Added*

Dalam melakukan operasional bisnis secara *syari'ah* pengakuan pendapatan dan biaya realisasi harus berdasarkan pada prinsip *halal* dan *thoyib*. Hal tersebut merupakan bentuk dari *output* primer yang proses pembentukannya menghilangkan unsur *riba* dan konsep penandingannya harus memenuhi aspek keadilan (Mulawarman, 2006:248). Terkait dengan prinsip *halal* dan *thoyib* dalam Al Quran Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. An Nisaa':29).

Serta pada QS. Al Baqarah Ayat 275:

... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Pada dasarnya pelarangan Allah atas segala sesuatu baik zat/benda (*haram dzaty*), proses mendapatkan/menggunakannya (*haram hukmy*), waktu penggunaannya (*haram zamany*) maupun tempat penggunaannya (*haram makany*) sebenarnya mendekatkan kita pada pemberian manfaat yang seimbang dan kemaslahatan (Mulawarman, 2006:252-253).

Konsep lainnya yang tidak kalah penting dari prinsip *halal* dan *thoyib* adalah konsep pendistribusian pendapatan. Pada dasarnya konseptualisasi distribusi pendapatan dalam pandangan Islam terutama bagi perusahaan haruslah sesuai dengan syariat Islam. Penyimpangan terhadap syariat Islam dikhawatirkan akan menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak adil. Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

“...Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...”

Lebih jauh lagi Triyuwono (2006, 180) menjelaskan bahwa informasi akuntansi mempunyai kekuatan (*power*) untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga bentuk akuntansi yang dijadikan pedoman haruslah bentuk akuntansi yang dapat memancarkan nilai-nilai keadilan. Penulis menganggap keadilan yang dijelaskan oleh Triyuwono merupakan keadilan yang sifatnya multidimensi, yaitu adil terhadap sesama manusia, adil terhadap lingkungan dan alam, serta adil terhadap Tuhan. Maksud dari adil terhadap Tuhan adalah manusia tidak lalai akan kewajibannya kepada Tuhan, salah satu diantaranya adalah ibadah (dalam hal bermuamalah keadilan kepada Tuhan dilakukan dengan melakukan muamalah sesuai dengan syariat Islam). Karena pada dasarnya tujuan penciptaan manusia di bumi adalah sebagai *khalifatullah fil ardh*.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah: 30)

Surat di atas menegaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah sebagai *khalifah* sehingga setiap perbuatan yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat, termasuk dalam hal pencatatan laporan keuangan. Dengan digunakannya syariat sebagai dasar pelaksanaan muamalah terutama dalam pencatatan laporan keuangan, maka akuntabilitas kepasrahan dan ketundukan pada entitas dapat diwujudkan. Bentuk akuntabilitas berkenaan dengan kepasrahan dan ketundukan manusia dalam melaksanakan ketentuan *syari'ah* (*abd' Allah*) disebut dengan akuntabilitas ketundukan. Sedangkan ketundukan untuk menjalankan kreativitas sebagai wakil Allah di bumi disebut akuntabilitas kreativitas (Mulawarman, 2012:28-29). Akuntabilitas ketundukan dan akuntabilitas kreativitas oleh Mulawarman (2012, 28-30) masing-masing dibagi menjadi dua kategori, yaitu ketundukan primer dan sekunder serta kreativitas primer dan sekunder. Berikut adalah tabelisasi ketundukan dan kreativitas yang telah diolah oleh penulis dari Mulawarman (2012, 28-30).

Tabel 3.4 Bentuk dan Sifat Akuntabilitas

	Primer	Sekunder
Ketundukan	Penyucian atas segala yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara <i>halal</i> (<i>halal dzaty, zamany, makany</i> dan <i>halal hukmy</i>)	Kepatuhan melakukan penyucian atas segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan yang bebas dari <i>riba</i>
	Memfokuskan pada proses perolehan pendapatan yang <i>halal</i>	Memfokuskan pada pembebasan pendapatan dari aktivitas <i>riba</i> ekonomi dan <i>riba</i> sosial-lingkungan
	Pendapatan belum diterima	Pendapatan sudah diterima
Kreativitas	Pertanggungjawaban ditujukan kepada: pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan.	Pertanggungjawaban ditujukan kepada: masyarakat umum (terutama <i>mustahiq</i>) dan lingkungan alam
	Lebih dekat dengan kegiatan finansial	Lebih dekat dengan kegiatan sosial
	Sifatnya lebih khusus (hanya terbatas pada entitas yang terlibat dalam proses produksi)	Sifatnya lebih umum (melibatkan seluruh entitas, baik yang terlibat langsung dengan proses produksi maupun yang tidak ikut terlibat)

Sumber: Mulwarman (2012, 28-30) diolah

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, Mulwarman (2006) mengkonstruksi konsep nilai tambah *syari'ah* (*Shari'ate Value Added*). Konsep nilai tambah *syari'ah* (*shari'ate value added*) merupakan konsep penyajian informasi tentang laporan nilai tambah yang diproses melalui nilai-nilai *syari'ah*. Triyuwono dalam Mulwarman (2006, xvi) menjelaskan bahwa konsep nilai tambah *syari'ah* merupakan sebuah kontribusi yang diberikan oleh Mulwarman di bidang akuntansi *syari'ah*. Dimana dalam penghitungan dan atau pengukuran nilai tambah, tidak hanya aspek materi saja yang terkandung di dalamnya, tetapi dalam

penghitungannya juga terdapat aspek non-materi. Dalam konsep nilai tambah *syari'ah* yang ditawarkan oleh Mulawarman aspek non-materi ditunjukkan melalui zakat sebagai alat untuk menyucikan nilai tambah materi. Dalam Surat Asy Syams ayat 7-10 Allah berfirman:

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Mulawarman (2006, 292) menjelaskan bahwa *shari'ate value added* (SVA) adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual atau non-material. Selanjutnya Mulawarman (2006, 292) menjelaskan bahwa prinsip *tazkiyah* adalah bentuk keseimbangan dari substansi SVA, yaitu *zakat*. Sehingga *zakat* menjadi simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. *Tazkiyah* merupakan konsep yang ditawarkan Islam yang tidak hanya dipahami secara normatif sebagai proses penyucian diri manusia secara terus menerus. *Tazkiyah* sebagaimana yang dijelaskan Sardar dalam Mulawarman (2012, 22) merupakan konsep antitesis sifat perkembangan yang menjadi dasar semua nilai kapitalisme untuk mewujudkan keinginan dan hasrat egosentris manusia serta memuaskan sifat *selfish* manusia. Sehingga dengan melakukan penyucian tersebut manusia diharapkan akan menjadi lebih baik (dalam hal akhlak maupun perbuatan).

Tazkiyah, lanjut Mulawarman (2012, 23) mempunyai sifat menyeluruh dan mencakup aspek moral, rohani dan material yang terkait satu sama lainnya. Semuanya berorientasi pada cita-cita dan nilai kesejahteraan manusia dalam semua

dimensi, baik dunia maupun akherat. Sedangkan Triyuwono dan As'udi (2001, 3) berpendapat bahwa *zakat* merupakan sarana untuk mencari ke-ridha-an Allah dan merupakan sarana pertanggungjawaban yang utama kepada Allah. Selain itu lanjut Triyuwono dan As'udi (2001, 3), *zakat* akan memberikan motivasi bagi yang membayarnya karena pembayar *zakat* mengetahui bahwa penggunaan (alokasi) *zakat* diperuntukkan bagi orang miskin dan tidak mampu. Sehingga dengan memasukkan *zakat* ke dalam konsep nilai tambah, keseimbangan pelaporan yang akan disajikan tidak hanya bersifat materi tetapi juga spiritual.

Berikut adalah bentuk laporan nilai tambah *syari'ah* yang diintrodusir oleh Mulawarman.



Tabel 3.5 Laporan *Shari'ate Value Added Statement*

Penciptaan VA		Finansial	Sosial & Lingkungan	Combined
Output	Ketundukan Primer	Xa	-	Xa
	Ketundukan Primer	Xb	-	Xb
	Kreativitas Primer	-	Ya	Ya
	Kreativitas Sekunder	-	Yb	Yb
	Jumlah <i>Output</i>	Xc	Yc	Za
Input	Ketundukan Sekunder	Xd	-	Xd
Revaluation	Kreativitas Primer	Xe	-	Xe
	VA Kotor	Xf	Yd	Zb
TAZKIYAH (Zc)				
Pembayaran Zakat kepada 8 asnaf (Zd)				
VA HALAL DAN THOYIB				
Distribusi VA		Finansial	Sosial & Lingkungan	Combined
Internal				
Karyawan	Ketundukan Sekunder	Xg	-	Xg
	Ketundukan Primer	Xh	-	Xh
Owner	Kreativitas Primer	Xi	-	Xi
Reinvestment Fund	Kreativitas Sekunder	Xj	-	Xj
Eksternal				
Pemerintah	Ketundukan Primer	-	Ye	Ye
	Kreativitas Sekunder	-	Yf	Yf
Residents	Ketundukan Sekunder	-	Yg	Yg
Masyarakat	Kreativitas Sekunder	-	Yh	Yh

Sumber: Mulawarman (2006, 299)

Dimana: Xa = Produk Halal (Misal Produk yang telah mendapat sertifikasi halal)

Xb = Peningkatan Internal Perusahaan (Misal kemampuan, keahlian dan pengetahuan karyawan)

Xc = *Output* Finansial yang memenuhi Halal *Dzaty* + Halal *Hukmy* (Hasil Penjumlahan Xa dan Xb)

Xd = *Input* Finansial yang berupa proses produksi (misal sistem jaminan halal produk perusahaan)

Xe = Revaluasi dengan mekanisme *current value* dari aktivitas *Bai'* atau *PLS/ Profit Loss Sharing System* yang dilakukan perusahaan

- Xf = Hasil perhitungan dari *output*, *input* dan revaluasi finansial (perhitungan Xc, Xd, dan Xe)
- Ya = Bantuan perusahaan kepada masyarakat (misal, pendidikan, peningkatan keahlian, kursus)
- Yb = Dampak pengelolaan lingkungan (misal, pengolahan limbah)
- Yc = Jumlah *output* sosial/lingkungan
- Yd = Hasil perhitungan dari *output*, *input* dan revaluasi sosial/lingkungan (perhitungan Yc dan lainnya bila ada komponen tambahan)
- Za = Penjumlahan *output* finansial dan *output* sosial/lingkungan
- Zb = Hasil akhir dari pembentukan VA (perhitungan *output*, *input* dan revaluasi dari VA finansial dan sosial/lingkungan)
- Zc = Penyucian VA melalui *zakat*
- Zd = Pembayaran *zakat* sesuai nisab kepada 8 asnaf (kelompok). Dapat diberikan sebagai bagian dari manajemen yang memakai model organisasi berbasis manajemen '*amil*, mendapatkan bagian dari *zakat* nisab, sebagai hak atas pengelolaan organisasinya. Sedangkan manajemen yang memakai model organisasi berbasis manajemen *khalifah*, tidak mendapatkan haknya dalam *zakat* nisab, tetapi mendapatkan haknya dari *zakat* non nisab, dalam bentuk *account* karyawan. Dapat juga dalam bentuk lain, seperti saham, atau kepemilikan yang ditentukan berdasarkan kontraknya dengan pemilik saham mayoritas
- Ze = VA yang telah tersucikan dan halal didistribusikan
- Xg = Distribusi internal kepada auditor internal (bentuk ketundukan sekunder)
- Xh = Distribusi internal kepada karyawan (bentuk ketundukan sekunder)
- Xi = Distribusi internal kepada pemilik dan pemegang saham (berdasarkan konsep *bai'* dan atau PLS/*Profit Loss Sharing System* (bentuk kreativitas primer)
- Xj = Distribusi internal berdasarkan untuk reinvestasi (*operating surplus*) dan disesuaikan dengan metode *current value* (bentuk kreativitas sekunder)
- Ye = Distribusi eksternal kepada pemerintah yang berbentuk ketundukan primer (seperti sertifikasi dan labelisasi halal)
- Yf = Distribusi eksternal kepada pemerintah yang berbentuk ketundukan sekunder (seperti pajak)

Y_g = Distribusi eksternal kepada *residents* yang berbentuk ketundukan sekunder (seperti auditor halal eksternal maupun Akuntan Publik atau Dewan Pengawas *Syari'ah*)

Y_h = Distribusi eksternal kepada masyarakat yang berbentuk kreativitas sekunder (seperti biaya lingkungan)

3.6 Refleksi

Income (laba) merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam operasional sebuah bisnis. Dalam praktiknya terdapat beberapa pengertian *income* (laba), baik dari segi ekonomi, akuntansi, *value added*, maupun *shariate value added* yang diintrodusir oleh Mulawarman (2006). Dari segi ekonomi *income* (laba) tidak hanya dipandang sebagai kenaikan secara eksplisit, tetapi juga dipandang sebagai kenaikan secara implisit. Kenaikan implisit meliputi gaji pengusaha yang diperoleh bila dia bekerja untuk orang lain dalam kapasitas yang sama (misalnya, sebagai manajer perusahaan lain) dan hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewakan lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Sehingga dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa laba secara ekonomi cenderung memperhitungkan segala kemampuan dan modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba secara maksimal, dalam hal ini pemilik cenderung memaksimalkan perolehan laba atas modal dan kemampuannya secara terpisah, dalam artian kemampuan manajemen pemilik tidak digunakan untuk mengelola modal.

Sedangkan laba akuntansi dapat diartikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Atau dengan kata lain laba akuntansi lebih menitik beratkan perolehan laba dari efisiensi

operasional perusahaan bukan maksimisasi kemampuan (baik modal maupun manajerial) yang dimiliki. Bagi sebuah perusahaan efisiensi merupakan sebuah kata kunci untuk memperoleh laba akuntansi yang maksimal, karena dengan melakukan efisiensi tersebut perusahaan akan dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk.

Sedangkan konsep nilai tambah merupakan sebuah konsep yang dikembangkan dari konsep laba ekonomi dan laba akuntansi yang telah ada. Konsep nilai tambah merupakan peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya perusahaan yang produktif sebelum dialokasikan kepada pemegang saham, pemegang obligasi, pegawai dan pemerintah. Dalam beberapa hal konsep nilai tambah juga dianggap lebih humanis, karena dalam konsep nilai tambah segala sesuatu yang diperoleh oleh entitas akan didistribusikan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan perhitungan nilai tambah yang dijelaskan oleh Belkaoui, dimana pada nilai tambah bruto dan neto posisi akun menunjukkan kelompok yang terlibat dan yang berhak atas nilai tambah. Pada sisi kiri (sisi kanan pembaca) persamaan menunjukkan nilai tambah bagi kelompok yang terlibat dalam tim produksi manajerial. Kelompok tersebut antara lain meliputi pegawai perusahaan, pemegang saham dan obligasi, serta pemerintah. Sisi kanan merupakan kelompok laba kotor, atau disebut juga sebagai metode penambah (*additive method*). Sedangkan sisi kiri disebut sebagai metode pengurang (*subtractive*).

Pengembangan konsep *income* selanjutnya adalah konsep *income* yang diperkenalkan oleh Mulawarman. Dimana Mulawarman menawarkan alternatif

konsep *income* yang didasarkan pada nilai-nilai *syari'ah*, yang pada akhirnya Mulawarman menyebutnya sebagai konsep nilai tambah *syari'ah*. Dalam konsep nilai tambah *syari'ah* ini Mulawarman tidak hanya menekankan pada proses distribusi *income* yang diperoleh oleh entitas, tetapi juga menekankan bagaimana *income* tersebut diperoleh oleh entitas. Karena dalam operasional bisnis secara *syari'ah* pengakuan pendapatan dan biaya realisasi harus berdasarkan pada prinsip *halal* dan *thoyib*. Dalam penghitungan dan atau pengukuran nilai tambah, tidak hanya aspek materi saja yang terkandung di dalamnya, tetapi dalam penghitungannya juga terdapat aspek non-materi. Dalam konsep nilai tambah *syari'ah* yang ditawarkan oleh Mulawarman aspek non-materi ditunjukkan melalui zakat sebagai alat untuk menyucikan nilai tambah materi. Aspek non-materi lainnya yang terkandung dalam konsep nilai tambah adalah adanya syarat *halal* dan *thoyib*. Aspek-aspek non-materi tersebut pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk menunjukkan akuntabilitas manusia secara menyeluruh kepada seluruh *stakeholder* dalam bentuk laporan nilai tambah *syari'ah*.

BAB IV

PT. BISI INTERNATIONAL

4.1 PT Benihinti Sumberintani (PT BISI International)

PT BISI International merupakan perusahaan penghasil benih hibrida terbesar di Indonesia untuk komoditas jagung, padi, buah-buahan serta sayuran, sekaligus salah satu penghasil utama pestisida di Indonesia serta pemasar berbagai jenis pupuk. PT BISI International didirikan pada tanggal 22 Juni 1983 oleh Charoen Pokphand Group dengan nama PT Benihinti Suburintani. Adapun visi dan misi PT BISI International adalah sebagai berikut:

Visi

Memberi Pangan bagi Dunia yang Berkembang

Misi

Dengan meningkatnya permintaan dunia akan pangan, pakan dan bahan bakar dan serat, kami memberikan produk, teknologi dan dukungan inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitas

Selama lebih dari 25 tahun PT BISI International telah mengalami beberapa peristiwa yang menjadi perjalanan sejarah PT BISI International. Perjalanan dari waktu ke waktu, perkembangan pengelolaan dan kondisi PT BISI Internatioal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perjalanan Sejarah PT BISI International

No.	Tanggal	Keterangan
1	22 Juni 1983	Berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. , No. 35. PT BISI International Tbk. (BISI/Perseroan) didirikan dengan nama PT Benihinti Suburintani.
2	27 September 1984	Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5415-HT.01.01.TH.84
3	23 November 1990	Pengumuman pengesahan pendirian melalui Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tambahan No. 4731.

4	3 Oktober 2006	Berdasarkan Akta Notaris No. 17, pemegang saham menyetujui perubahan nama perusahaan dari PT Benihinti Sumberintani menjadi PT BISI International.
5	6 November 2006	Melalui Surat Keputusan No. W7-02215.HT.01.04-TH.2006 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar PT Benihinti Sumberintani/ pergantian nama dari PT Benihinti Sumberintani menjadi PT BISI International.
6	21 November 2006	Berdasarkan Akta Notaris No. 89 terjadi perubahan susunan pemegang saham.
7	7 Desember 2006	Melalui Surat Persetujuan No. 219/V/PMA/2006, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyetujui perubahan status perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing.
8	11 Mei 2007	Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-2238/BL/2007 dari Ketua BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 900.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (Rupiah penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp 200 (Rupiah penuh) per saham. Seluruh saham perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.000.000.000 telah dicatat di BEI.
9	30 Juni 2008	Melalui Akta Notaris No. 97, PT BISI International melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-179/BL/2008 tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik."
10	19 September 2008	Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66444.AHA.01.02.TH.2008.

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT BISI International 2010

4.2 Lokasi Kantor Pusat dan Anak Perusahaan

Kantor pusat PT BISI International berada di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara pusat pengolahannya berlokasi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ploso Klaten dan Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hingga tahun 2010 PT BISI memiliki tiga anak perusahaan, yaitu PT Multi Sarana Indotani (MSI) sebagai perusahaan penghasil pestisida, PT Tanindo Subur Prima (TSP) sebagai perusahaan importir dan distributor benih hortikultura, dan PT Tanindo (Tinco) sebagai perusahaan yang memasarkan dan mendistribusikan produk

MSI dan Perseroan. Alamat anak perusahaan PT BISI International adalah sebagai berikut:

1. PT Multi Sarana Indotani

Alamat: Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

2. PT Tanindo Intertraco

Alamat: Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

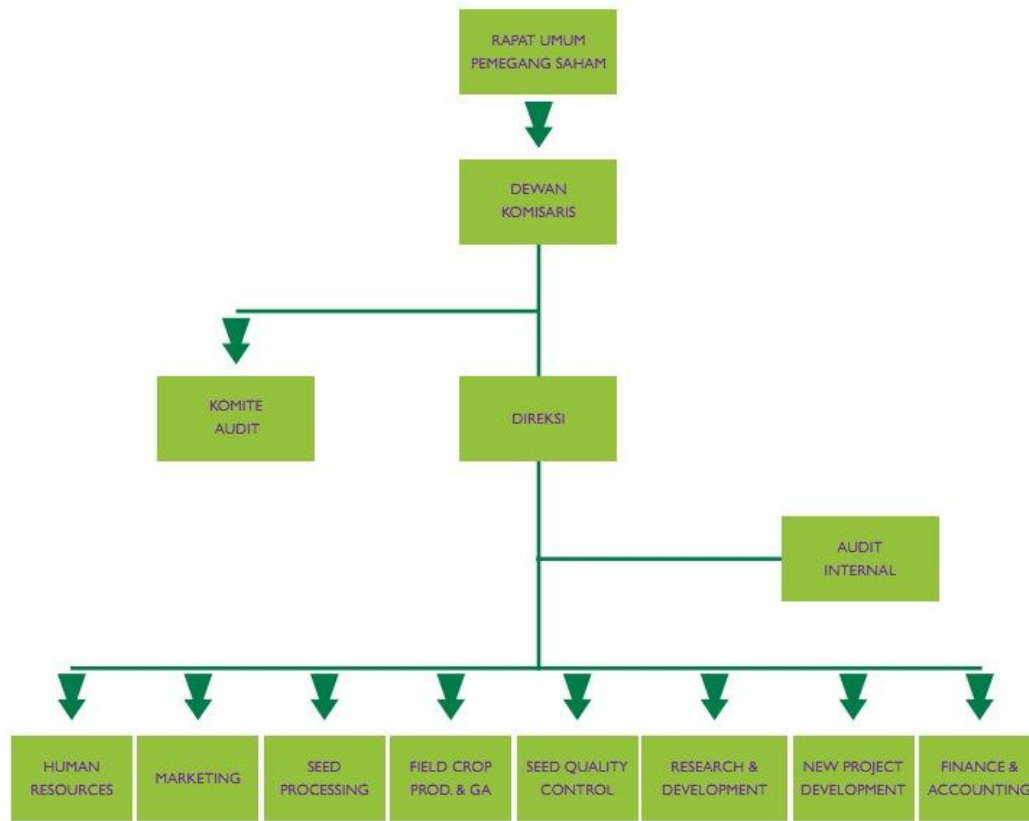
3. PT Tanindo Subur Prima

Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting bagi setiap organisasi maupun perusahaan. Hal ini disebabkan dengan adanya struktur organisasi akan diketahui secara jelas dan rinci mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan begitu tidak akan terjadi ketimpangan tugas dalam menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, dengan adanya stuktur organisasi dalam perusahaan maka, *moral hazard* yang mungkin dilakukan oleh manajemen dapat diminimalisir. Adapun struktur organisasi di PT BISI International dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BISI International



sanam. Segenap tugas dan tanggung jawab pokok dewan komisaris secara umum ditetapkan secara menyeluruh dalam anggaran dasar perseroan, diantaranya adalah:

- Melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan oleh direksi serta memberikan nasehat kepada direksi.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tertentu.

Per tanggal 31 Desember 2010, dewan komisaris perseroan beranggotakan tiga orang, yang terdiri dari komisaris utama dan dua komisaris.

ii. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola perseroan secara keseluruhan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam upaya pencapaian sasaran perseroan. Tugas dan tanggung jawab direktur ditetapkan secara menyeluruh dalam anggaran dasar perseroan. Tugas pokok direksi adalah:

- a) Mengatur perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam kepengurusan tersebut.
- b) Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

Per tanggal 1 Desember 2010, direksi terdiri dari lima orang, yaitu satu orang direktur utama dan empat direktur. Pada tanggal 1 Maret 2011, Menas Tjonger's telah mengundurkan diri dari direksi perseroan.

iii. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka mengevaluasi sasaran bisnis dan mendiskusikan masalah tertentu berkenaan dengan perkembangan perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat. Rapat tersebut bisa merupakan pertemuan internal Dewan Komisaris, internal Direksi, atau pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi dengan pihak-pihak terkait.

Rapat Dewan Komisaris diadakan minimal setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Komisaris Utama, seorang atau lebih anggota Komisaris, permintaan tertulis Direksi dan permintaan tertulis seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan yang beredar.

Sedangkan rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris dengan menyampaikan materi yang akan dibahas sebelum rapat.

iv. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan dan kinerja dari Direksi.

v. Unit Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bekerja dengan Internal Audit Charter, yang mana telah dirumuskan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

vi. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, serta bertanggung jawab atas ketersediaan dan penyampaian informasi mengenai perseroan yang material kepada pemegang saham, otoritas pasar modal, media massa dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. kegiatan sekretaris perusahaan antara lain memperbaharui informasi seputar

perkembangan perseroan dan menyampaikannya kepada pihak berkepentingan seperti BEI dan Bapepam.

4.4 Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan besar bidang pertanian PT BISI International beserta anak perusahaannya tidak hanya memusatkan kegiatan usahanya pada pemroduksian benih hibrida tanaman pangan, namun juga melakukan beberapa kegiatan pendukung lainnya, usaha-usaha tersebut diantaranya adalah:

- Produksi benih tanaman keras utama, termasuk jagung hibrida dan benih padi yang mampu memberikan petani hasil panen yang jauh lebih tinggi.
- Produksi berbagai benih tanaman, termasuk benih sayuran dan buah, seperti: cabai, mentimun, terung, tomat, labu, kol, kol Cina (bok choy), kacang panjang, bayam, melon, semangka dan banyak lagi.
- Produksi pestisida dan juga pemasaran pupuk.

4.4.1 Proses Produksi Terpadu

PT BISI International mengoperasikan suatu proses produksi terpadu secara vertikal dari pembenihan hingga mengkomersialkannya. Hal ini untuk memperoleh kualitas terbaik di setiap tahap produksi. Selain itu, Perseroan juga memasok pestisida dan pupuk, untuk operasional internal terpadu dan untuk untuk pasokan petani tanaman pangan komersial. Benih hibrida yang diproduksi PT BISI International adalah nemih generasi pertama dari dua induk yang berbeda dari spesies yang sama. Dalam memproduksi hibrida unggul dengan skala besar

memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian operasional di setiap tingkat operasional terpadu. Proses tersebut memberikan benih kualitas tinggi. Khusus untuk benih hibrida, benih induk tersebut dihasilkan oleh Perseroan atas kerjasama dengan Monsanto Company (“Monsanto”), suatu perusahaan pembenihan global terkemuka, sedangkan untuk benih induk tanaman yang lain seperti padi hibrida dan hortikultur lainnya merupakan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Perseroan sendiri.

Benih induk diproduksi dari pembiakan tanaman alami, dimana garis pembiakan dihasilkan oleh polinasi-diri berulang selama tujuh generasi. Setelah semua pembiakan selesai, hasil-hasil benih dilakukan perkawinan silang dan diuji coba untuk mendapat potensi unggul. Varietas benih yang berhasil di pasar dipilih sebagai benih pembiakan. Sedangkan kuantitas benih-benih tersebut sangat terbatas, dan dinamakan sebagai benih induk (*Foundation Seed*). Pembiakan yang dipilih, benih induk, disilang melalui program pembiakan untuk memproduksi generasi pertama benih hibrida (F1). Supaya persilangan dalam benih induk menghasilkan benih komersial, PT BISI International menggunakan program petani kontrak. Di masa puncak, program ini dikembangkan di lebih dari 33.000 hektar tanah dan memanfaatkan sekitar 108.000 petani. PT BISI International menjual benih induk kepada petani kontrak tersebut dan memberikan pelatihan, dukungan dan monitoring. Para petani memiliki kewajiban kontrak untuk menjual kembali panen mereka kepada PT BISI International. Hasil panen tersebut dibawa ke fasilitas pemrosesan PT BISI International dimana benih-benih tersebut dipisahkan dari jongsol, kemudian melalui dua tahap pengeringan, diberi pestisida, dan kemudian

dibungkus dan didistribusikan kepada para konsumen. Benih-benih hibrida tersebut memproduksi tanaman yang seragam, yang dimanfaatkan dari efek yang disebut sebagai vigor hibrida. Hasil heterosis dalam skala besar meningkatkan hasil atas lini pembiakan sendiri atau sama dengan lini yang bersilang. Perseroan memiliki 2 fasilitas produksi yang berada di Kediri, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 50.000 ton untuk benih hibrida dan 20.000 ton untuk benih padi hibrida.

Gambar 4.2 Proses Produksi Benih



oleh perusahaan berasal dari Chia Tai Seed Co. Ltd., perusahaan afiliasi perseroan. Benih sayur-sayuran yang diproduksi perseroan antara lain cabai, mentimun, terong, tomat, labu, kol, sawi putih, paria, kangkung, kacang panjang bayam, melon, semangka dan sebagainya. Perseroan memiliki fasilitas yang berada di Kediri, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 3.000 ton per tahun. Sedangkan untuk pestisida dan pupuk pabrik pengolahan berada di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 6.750 metrik ton pestisida kimia cair. Bahan dasar utama dalam memproduksi pestisida adalah *glyphosate*, *paraquat dichlorine* dan *generol*. Mayoritas produk-produk tersebut dipasok dari China selain memproduksi pestisida tersebut perusahaan juga mengimpor pestisida dan pupuk dari China.

4.4.2 Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Perseroan selalu berusaha menjaga mutu dari produk-produk yang dihasilkan karena keberhasilan perseroan tergantung dari kemampuan produk-produknya dalam memberikan hasil yang maksimal. Untuk benih perseroan memiliki Departemen Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang bekerja di setiap tahapan proses dan distribusi benih. Tahap awal pengawasan mutu dimulai dengan inspeksi lahan (*Field Inspection*) yaitu pemeriksaan secara berkala pada saat *Foundation Seed* ditanam ditanam untuk *Filed Production*, tahap selanjutnya inspeksi bahan mentah yaitu pemeriksaan benih komersial untuk memisahkan benih-benih yang rusak, inspeksi proses produksi (*Processing Inspection*) yaitu meliputi pengeringan, *grading* dan perawatan benih. Tes analisa benih (*Seed Testing Analisis*) yaitu tes daya tumbuh dan daya vigor benih. *Purity Test* yaitu tes kemurnian benih baik dari campuran bahan lain maupun kemurnian secara genetiknya. *Labeling Finished Good* yaitu memberikan keterangan benih sesuai dengan kondisi benih.

Untuk menguji daya tumbuh benih komersial, perseroan juga melakukan pengawasan atas benih yang dihasilkan dengan melakukan pengujian daya tahan tumbuh yang menggunakan peralatan canggih yang dapat mensimulasikan berbagai macam kondisi cuaca, suhu udara dan tempat tumbuh. Demi sitem pengawasan dan pengendalian mutu, sejak tahun 2000 hingga sekarang perseroan telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi terakhir yaitu Sertifikat No. 03/LSSM-BTPH/SSMM/02/2010 yang menyatakan bahwa perseroan

sebagai produsen benih yang telah melakukan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar SNI 19-9001:2001/ISO 9001:2000 dengan ruang lingkup benih bermutu yang diproduksi yaitu benih padi, jagung dan benih hortikultura.

Sedangkan untuk petisida dan pupuk yang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman perusahaan selalu berusaha agar produk pestisida yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat diterapkan dari tahap penerimaan bahan baku, tahap formulasi dan tahap pengemasan. Sistem pengawasan dan pengendalian mutu ini diterapkan agar produk yang dihasilkan merupakan produk pestisida yang efektif dalam melindungi dan membantu perkembangan tanaman.

4.4.3 Pemasaran dan Distribusi

Perseroan memiliki jaringan pemasaran dan distribusi di seluruh negeri, untuk benih hibrida dan produk pestisida. Perseroan menjual produknya kepada 914 agen di seluruh pelosok negeri, yang kemudian menjual produknya ke sub-agen atau langsung ke toko-toko pertanian. PT BISI International adalah pemimpin pasar dalam penjualan benih hibrida jagung, padi dan hortikultura di Indonesia, karena unggulnya kualitas merek dagang dan produk perseroan. PT BISI International menjual berbagai produk dengan berbagai merek dagang yang dikenal di seluruh negeri, yaitu “Cap Kapal terbang”, BISI-2, BISI-12, BISI-16, BISI-816, BISI-222, Intani-2, Rambo, Ranger, dan Noxone adalah produk yang paling dikenal oleh para petani.

Untuk memperkenalkan produk-produk ke para petani dan meningkatkan tingkat adopsi, perseroan menggunakan beberapa bentuk kegiatan pemasaran, termasuk:

➤ Demo Plot

PT BISI International menyewa beberapa plot tanah di daerah target pertanian untuk mendemonstrasikan hasil superior yang dapat diraih melalui benih hibrida. Petani yang dilatih dengan teknik pembajakan dan menggunakan pestisida PT BISI International untuk benih hibrida.

➤ Penyuluhan

Dukungan teknis PT BISI International dan tim asisten pertanian akan mengunjungi komunitas pertanian dan mengadakan pelatihan untuk mendiskusikan manfaat produk, teknik pembajakan dan memberikan pertanyaan.

➤ Studi Banding

Para petani diundang untuk secara fisik mengobservasi dan mempelajari keberhasilan yang dialami para petani di lokasi lain.

➤ *Farm Fieled Day*

Kegiatan untuk melakukan panen produk perseroan bersama-sama dengan para petani agar para petani dapat melihat dan merasakan secara langsung keunggulan produk perseroan.

➤ Promosi

Kampanye pemasaran nasional dan lokal dilakukan melalui media-media sebagai berikut: televisi, radio, papan reklame, spanduk, brosur, leaflet, editorial dan brosur.

Melalui fasilitas penelitian dan pengembangan maka perseroan akan mampu secara berkesinambungan menghasilkan dan menjual benih-benih baru di pasar. Benih-benih baru diperkenalkan ke pasar, untuk tetap unggul dalam kompetisi dan membawa perubahan pada kondisi pasar. Melalui fasilitas penelitian dan pengembangan, PT BISI International memperkenalkan satu atau dua varietas benih baru setia tahun. Selain memasarkan benih hortikultura sebagai “*packed seed*”, perseroan juga sedang berupaya untuk mengembangkan penjualan beberapa varietas benih hortikultura ke luar negeri. Saat ini perseroan telah memasarkan beberapa

jenis varietas benih tanaman hortikultura ke China, Malaysia dan Philipina. Perseroan menjual produk kepada konsumen secara kredit dengan jangka waktu dari dua sampai tiga bulan.

4.4.4 Unit Pendukung

Aset manusia PT BISI International terdiri dari petani kontrak yang memproduksi benih komersial perseroan dibawah panduan yang ketat dan *Standar Operating Procedures* perseroan. Di akhir tahun 2010, program *contract farming* perseroan melibatkan 45.000 petani. Selama lebih dari 25 tahun, perseroan telah mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan para petani kontrak perseroan dan perseroan terus mempererat hubungan dimana perseroan berencana untuk terus maju dimasa depan. Para petani kontrak perseroan dilatih di setiap aspek produksi benih komersial untuk memastikan keberhasilan produksi benih hibrida perseroan.

4.5 Penelitian dan Pengembangan

Perseroan memiliki 12 fasilitas penelitian dan pengembangan di dalam negeri dengan jumlah lahan 231 hektar yang mendukung kegiatan operasional. Untuk dapat memperkenalkan benih hibrida varietas unggul yang dihasilkannya ke seluruh pelosok, pusat pengembangan Perseroan didirikan di daerah-daerah yang merupakan pusat kegiatan pertanian utama di Indonesia. Lokasi pusat penelitian PT BISI International tersebut diantaranya berada di: Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Kediri, Mojokerto, Malang, Sidoarjo dan Lombok. Diversifikasi dalam pemilihan wilayah fasilitas penelitian dan pengembangan sangatlah penting untuk mempelajari ketahanan tanaman terhadap berbagai macam suhu, toleransi terhadap serangan hama dan penyakit, curah hujan

dan tingkat ketinggian dataran. Disetiap lokasi fasilitas penelitian dan pengembangan, dilakukan penelitian dan pengembangan benih-benih tanaman unggul yang dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat produktivitas yang tinggi, mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dalam menghadapi hama dan penyakit serta dapat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi tanah di banyak daerah atau daya adaptasinya luas.

Perseroan juga telah memiliki Laboratorium dan Penelitian dan Biotechnology yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas teknologi penelitian dan pengembangan benih tanaman. Fasilitas tersebut antara lain:

➤ *Laboratorium Plant Protection*

Laboratorium ini digunakan untuk menyeleksi ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit serta memeriksa kesehatan benih.

➤ *Laboratorium Molecular Breeding*

Laboratorium ini digunakan untuk pemetaan gen tanaman sehingga mempercepat proses pemuliaan tanaman dan pemeriksaan kemurnian benih.

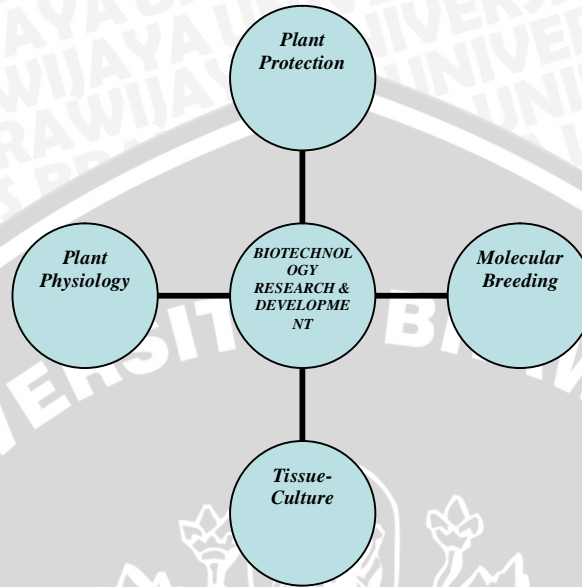
➤ *Laboratorium Tissue-Culture*

Laboratorium ini digunakan untuk membiakkan tanaman melalui kultur embrio atau anther sehingga mempercepat proses pemuliaan tanaman.

➤ *Laboratorium Plant Physiology*

Laboratorium ini digunakan untuk menyeleksi adaptasi tanaman terhadap kekurangan air, unsur hara, kemasaman tanah, salinitas tanah.

Gambar 4.3 Fasilitas Penelitian & Pengembangan



Sumber: Laporan tahunan PT BISI Int, 2010: 21

Keberhasilan Perseroan selama ini didukung oleh kemampuannya untuk menghasilkan benih hibrida yang melampaui empat tolok ukur produk pertanian, yaitu, hasil, keamanan pangan, kualitas serta kemampuan beradaptasi dan ketahanan terhadap penyakit. Faktor lain yang mendorong keberhasilan varietas hibrida ini di pasaran adalah daya tahannya terhadap serangan hama, masa panen yang lebih singkat dan dapat berkembang tanpa memerlukan banyak pupuk. PT BISI International Tbk merupakan perusahaan penghasil benih pertama yang terakreditasi dari pemerintah untuk memberikan label sendiri pada produk-produk benih yang dihasilkannya. Hal tersebut berarti memungkinkan bagi PT BISI International Tbk untuk menjual benih produksinya langsung ke pasar tanpa perlu menunggu hasil pengujian dari pemerintah.



4.6 Lain-lain

Dalam upayanya untuk mengembangkan benih lokal berkualitas tinggi, perseroan mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1997. Sedangkan pada tanggal 20 Maret 2000 perseroan menjadi produsen benih pertama yang memperoleh akreditasi pemerintah dari Institute of Certification on Quality System untuk melakukan *self-labeling* pada produknya. Terdapat peluang berskala besar dalam bisnis benih hibrida dan bisnis produktivitas pertanian di Indonesia. Pada tingkat makro, hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan komoditas global, dipicu oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan *grain fed animal protein*, dan produksi bio diesel. Populasi Indonesia sebesar 237 juta terus berkembang sebesar 1,49% per tahun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% per tahun. Kekurangan permintaan pangan, menekan pertumbuhan permintaan akan hasil benih lebih besar.

Saat ini Indonesia sedang berada dalam perubahan dari pertanian benih konvensional ke benih hibrida, dan PT BISI International memiliki posisi terbaik untuk memanfaatkan perubahan tersebut. PT BISI International memproses teknologi benih hibrida superior, pangsa pasar dominan, pengalaman lebih dari 25 tahun dan PT BISI International memiliki landasan produksi, pemasaran, distribusi dan penjualan. PT BISI International mempunyai strategi pertumbuhan yang menarik terdiri dari 3 kunci elemen:

- a) Meningkatkan produksi benih tanaman hibrida untuk memenuhi meningkatnya permintaan.
- b) Meningkatkan margin benih hibrida melalui pengembangan hibrida dengan hasil lebih baik.

- c) Mengembangkan bisnis pestisida dan pupuk yang berkorelasi dengan pertumbuhan produksi tanaman dengan mengikat penjualan benih dengan produk-produk dukungan.

4.7 Refleksi

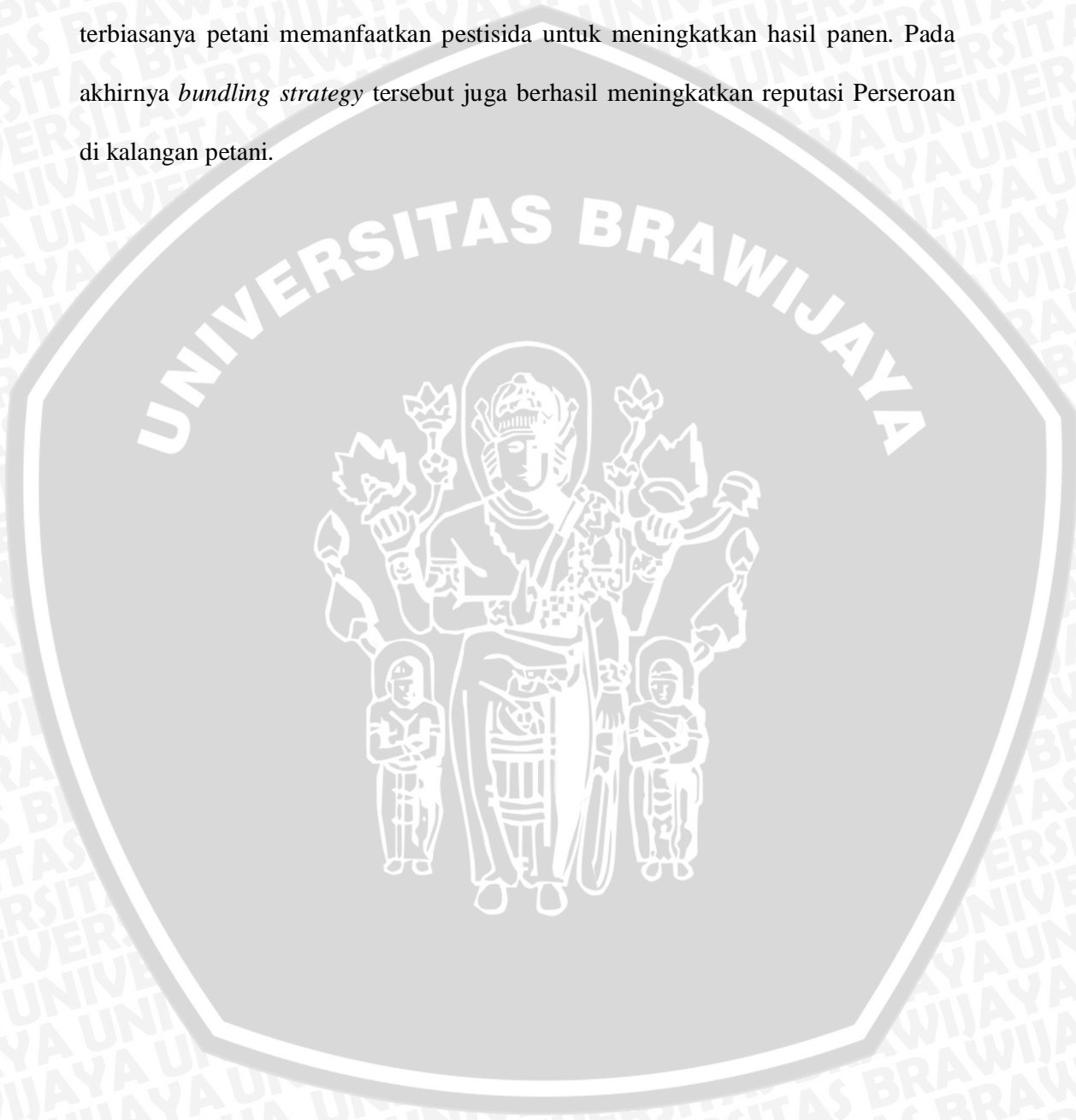
PT BISI International merupakan perusahaan penghasil benih hibrida terbesar di Indonesia untuk komoditas jagung, padi, buah-buahan serta sayuran, sekaligus salah satu penghasil utama pestisida di Indonesia serta pemasar berbagai jenis pupuk. PT BISI International didirikan pada tanggal 22 Juni 1983 oleh Charoen Pokphand Group dengan nama PT Benihinti Suburintani. Hingga tahun 2010 PT BISI memiliki tiga anak perusahaan, yaitu PT Multi Sarana Indotani (MSI) sebagai perusahaan penghasil pestisida, PT Tanindo Subur Prima (TSP) sebagai perusahaan importir dan distributor benih hortikultura, dan PT Tanindo (Tinco) sebagai perusahaan yang memasarkan dan mendistribusikan produk MSI dan Perseroan.

Khusus untuk benih hibrida, benih induk tersebut dihasilkan oleh PT BISI International atas kerjasama dengan Monsanto Company (“Monsanto”), suatu perusahaan pembenihan global terkemuka. Sedangkan untuk benih hortikultura sebagian besar impor yang dilakukan oleh perusahaan berasal dari Chia Tai Seed Co. Ltd., perusahaan afiliasi perseroan. Dan untuk pestisida serta pupuk, pabrik pengolahan berada di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 6.750 metrik ton pestisida kimia cair. Bahan dasar utama dalam memproduksi pestisida adalah *glyphosate*, *paraquat dichlorine* dan *generol*. Mayoritas produk-produk tersebut dipasok dari China selain memproduksi pestisida tersebut perusahaan juga mengimpor pestisida dan pupuk dari China.

Perseroan selalu berusaha menjaga mutu dari produk-produk yang dihasilkan karena keberhasilan perseroan tergantung dari kemampuan produk-produknya dalam memberikan hasil yang maksimal. Untuk benih perseroan memiliki Departemen Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang bekerja di setiap tahapan proses dan distribusi benih. Sedangkan untuk petisida dan pupuk yang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman perusahaan selalu berusaha agar produk pestisida yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat diterapkan dari tahap penerimaan bahan baku, tahap formulasi dan tahap pengemasan. Sistem pengawasan dan pengendalian mutu ini diterapkan agar produk yang dihasilkan merupakan produk pestisida yang efektif dalam melindungi dan membantu perkembangan tanaman.

Menurut PT BISI International, aset manusia PT BISI International terdiri dari petani kontrak yang memproduksi benih komersial perseroan dibawah panduan yang ketat dan *Standar Operating Procedures* perseroan. Petani kontrak tersebut bagi PT BISI International memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam hal pencapaian target produksi benih komersial perseroan. PT BISI International Tbk merupakan perusahaan penghasil benih pertama yang terakreditasi dari pemerintah untuk memberikan label sendiri pada produk-produk benih yang dihasilkannya. Hal tersebut berarti memungkinkan bagi PT BISI International Tbk untuk menjual benih produksinya langsung ke pasar tanpa perlu menunggu hasil pengujian dari pemerintah. Dalam menjalankan aktivitas produksinya manajemen PT BISI International juga melakukan *bundling strategy*, dimana *bundling strategy* yang

dilakukan oleh manajemen melalui penggabungan benih dengan pestisida pendukung terus memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan, seiring dengan terbiasanya petani memanfaatkan pestisida untuk meningkatkan hasil panen. Pada akhirnya *bundling strategy* tersebut juga berhasil meningkatkan reputasi Perseroan di kalangan petani.



BAB V

EKSPLOITASI: REFLEKSI ATAS PEROLEHAN PENDAPATAN PERUSAHAAN

5.1 Pendahuluan

Di dalam perekonomian neoklasik, pendapatan merupakan salah satu indikator dari kinerja yang dihasilkan perusahaan (Hariyadi, 2011:56). Pendapatan memiliki porsi penting karena merupakan sumber utama pendanaan perusahaan selama proses operasi perusahaan. Angka pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan diyakini mampu menggambarkan kondisi perusahaan baik di masa lalu dan dimasa yang akan datang. Pendapatan yang cenderung tinggi menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya angka pendapatan yang cenderung rendah menjadi indikasi buruknya kinerja perusahaan. Melihat begitu pentingnya pendapatan bagi perusahaan hingga manajemen perusahaan melakukan segala cara untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi.

PT BISI International merupakan salah satu perusahaan besar bidang pertanian di Indonesia. Pendapatan PT BISI International setiap tahunnya menunjukkan nilai yang cukup besar. Pendapatan tersebut didapat dari penjualan produk-produk yang dihasilkannya, mulai dari benih hingga pestisida. Sehingga tidak mengejutkan jika PT BISI International terus berusaha meningkatkan kapasitas produksinya dengan memperluas unit produksi yang telah ada. Peningkatan kapasitas produksi tersebut merupakan usaha PT BISI International untuk memenuhi kebutuhan pasar akan benih dan bahan penunjang pertanian lainnya yang setiap

tahunnya meningkat. PT BISI International juga gencar melakukan kerjasama dengan petani sebagai bagian dari usahanya untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut.

5.2 Celah Distorsi pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* tanpa ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Sehingga jika tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama tersebut seharusnya menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, ungkapan makna dan kepentingan di balik tanggung jawab sosial perusahaan akan dianalisis menggunakan alat analisis *Islamic Political Economy of Accounting* (PEA).

Tahap awal yang dilakukan penulis adalah mengungkapkan makna dan kepentingan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis akan menggunakan pendekatan *net farm income* untuk memahami makna tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kontrak kerjasama yang dilakukan antara petani dengan perusahaan. Selain itu penulis juga akan berusaha melihat posisi petani di dalam laporan keuangan perusahaan dan alur produksi benih dalam kontrak kerjasama. Kemudian penulis akan menganalisis keterkaitan antara kekuatan (*power*) dengan pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing pihak.

5.2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 74. Di dalam pasal 74 ayat 1 dan 2 UU RI No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa, ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (ayat 2).

Dengan adanya Undang-undang tersebut, industri atau korporasi-korporasi (terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam) wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan, karena pada dasarnya pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat (Siregar, 2007). Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953. Konsep yang digagas oleh Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis atas dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam (Siregar, 2007). Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban sosial atau disebut akuntansi sosial muncul di awal tahun 1970-an.

Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) di luar batas-batas akuntansi keuangan

tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham. Dengan ikut berperan sertanya industri atau korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup, maka industri atau korporasi tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan, atau biasa disebut sebagai *triple bottom line*, dimana sinergi dari ketiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007). Namun dalam pelaksanaannya, penulis merasa bahwa untuk beberapa kondisi tanggung jawab sosial perusahaan tersebut masih sangat rancu dan ambigu, serta belum menunjukkan sifat sosial malah cenderung bersifat eksploitasi. Mungkin hal tersebut terjadi karena belum adanya satu kesepakatan atau definisi tunggal tentang pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Akibat dari belum adanya satu kesamaan atau kesepakatan tersebut, pada akhirnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak perusahaan.

Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh atau pun tujuan suatu perusahaan membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian besar studi empiris yang menganalisis pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan berfokus pada laporan tahunan (*annual report*), dimana *annual report* dianggap sebagai alat yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk

berkomunikasi dengan *stakeholder* perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006 dalam Chariri dan Nugroho, 2009). Dalam perspektif konstruksi sosial sebagaimana diklaim oleh Hines (1988), praktik pelaporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi kuantitatif, tetapi juga menyajikan informasi lain seperti *narrative text*, foto, tabel, dan grafik (David, 2002 dalam Chariri dan Nugroho, 2009). Salah satunya adalah pelaporan CSR atau *sustainability reporting*.

Di dalam *sustainability reporting* terdapat *narrative text*, foto, tabel, dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan *sustainability* perusahaan. *Sustainability reporting* dapat didesain oleh manajemen sebagai cerita retorik untuk membentuk *image* (pencitraan) pemakainya melalui pemakaian *narrative text* (Chariri dan Nugroho, 2009). Melalui teks naratif, perusahaan secara aktif berusaha membentuk *image* positif dan menghindari *image* negatif (Gardner and Martinko, 1988 dalam Chariri dan Nugroho, 2009). Cara yang digunakan perusahaan untuk mengirimkan pesan melalui *sustainability reporting* merupakan strategi komunikasi perusahaan yang digunakan untuk membangun kepercayaan publik. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Chariri dan Nugroho (2009), pada penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis, analisis penelitiannya juga didasarkan pada laporan tahunan (*annual report*) PT BISI International Tbk. Dimana melalui pendekatan *net farm income* (NFI) peneliti akan menguraikan posisi petani dalam kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT BISI International dengan petani.

Di dalam laporan tahunannya, PT BISI International menyebutkan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah menciptakan nilai tambah melalui penguatan potensi lahan bagi perekonomian setempat, dimana

diperlukan peningkatan keterampilan serta pembukaan peluang memperoleh penghasilan, sehingga memberikan keuntungan bagi semua. Menurut PT BISI International hal tersebut berarti di lapangan PT BISI International menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dengan memperkuat agronomis ekonomi lokal dimana terdapat kekurangan keterampilan dan peluang terbatas untuk memperoleh pendapatan, yang dapat memberikan keuntungan bagi semuanya. Salah satu contoh dari upaya tersebut lanjut PT BISI International adalah dengan penerapan sistem pertanian kontrak dalam memproduksi benih. Manajemen pertanian kontrak sebenarnya sudah lama ada, yakni sebagai media dalam pengelolaan produksi pertanian komersial, baik yang berskala besar maupun kecil. Manajemen ini terus berkembang, khususnya di negara-negara yang sebelumnya menerapkan kebijakan sentralistik dan di negara-negara yang mengikuti paham liberalisme (Rusten dan Key, 1996 dalam Iqbal, 2008).

Setelah melalui tahap pengujian di lahan percobaan milik perseroan, benih induk dijual ke lebih dari 31.000 petani kontak (pada tahun 2007), lebih dari 55.000 petani kontrak (pada tahun 2009), dan lebih dari 45.000 petani kontrak (pada tahun 2010). Petani kontrak kemudian menanam dan menjual kembali benih hasil panen ke PT BISI International. Menurut PT BISI International, hal utama yang hendak dicapai dari kemitraan tersebut adalah beralihnya para petani dari pola bertani tradisional ke kegiatan produksi benih yang beragam dan memiliki nilai tambah yang lebih besar. Selanjutnya menurut PT BISI International, dalam kerjasama tersebut perseroan membantu para petani dalam hal alih kemampuan teknis dan pengawasan berkala di sepanjang proses produksi. Berbeda dari pola bertani

tradisional, dimana para petani harus menanggung sendiri kerugian, pola yang diterapkan oleh PT BISI International menggariskan bahwa segala risiko yang mungkin terjadi merupakan tanggungan bersama antara perseroan dan para petani plasma.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh PT BISI International didasarkan atas peningkatan kemampuan teknis para petani melalui kegiatan kerjasama kontrak antara petani dan perseroan. PT BISI International juga menganggap bahwa melalui kerjasama tersebut para petani maupun pihak perusahaan akan sama-sama diuntungkan. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa, para petani mendapatkan keterampilan teknis dalam hal proses produksi benih sedangkan perusahaan tidak perlu berinvestasi lagi (membeli lahan pertanian) dan melakukan perekrutan tenaga kerja langsung. Selain itu, menurut PT BISI International dengan melakukan kerjasama tersebut pendapatan petani akan meningkat dikarenakan adanya kepastian pembelian hasil panen oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya apakah hal tersebut benar-benar menguntungkan kedua belah pihak atau lebih menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini yaitu perusahaan? Jawaban atas pertanyaan ini akan dibahas pada anak sub bab 5.2.2.

5.2.2 Meningkatkan Pendapatan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pendapatan dan laba bagi pihak manajemen tentunya mempunyai arti yang sangat penting dalam usahanya menjalankan amanat yang diberikan oleh dewan komisaris perusahaan. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) Nomor 1* menyatakan bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama

dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen serta membantu pemilik atau pihak-pihak lain untuk melakukan penaksiran atas *earning power* perusahaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi pendapatan yang diterima dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan, berarti laba yang akan diterima oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan terjadi efisiensi dan efektifitas dalam operasional perusahaan. Dalam konsep laba akuntansi, efisiensi operasi suatu perusahaan akan berpengaruh pada aliran dividen saat ini dan penggunaan modal yang diinvestasikan (Subiyantoro dan Triyuwono, 2004:142).

Dengan demikian, semua pemegang saham khususnya pemegang saham biasa sangat memperhatikan efisiensi manajemen. Jika terjadi efisiensi seperti yang telah dijelaskan di atas maka, para pemangku kepentingan dalam hal ini *stockholder* akan tetap mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen tersebut, selain itu manajemen juga akan kebanjiran bonus dari *stockholder* atas kinerja mereka. Dan jika manajemen tidak bekerja secara efisien maka, *stockholder* akan menunjuk manajemen baru untuk mengelola perusahaan. Namun celakanya, pola pikir seperti itu menyebabkan manajemen dan *stockholder* hanya melihat pendapatan dari segi materi saja dan cenderung mengabaikan pendapatan yang sifatnya non-materi. Padahal pendapatan yang sifatnya non-materi nilainya lebih tinggi dari pendapatan materi, bahkan terkadang tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Karena pendapatan non-materi lebih bersifat psikologis, emosional, ekologis, bahkan religius.

Dampak dari “pincangnya” manajemen dan *stockholder* dalam memaknai pendapatan dan laba sangatlah fatal. Karena hal tersebut hanya akan menguntungkan

salah satu pihak saja, yaitu pihak yang mempunyai kekuatan modal (*capital power*) lebih besar dan cenderung merugikan pihak lain yang mempunyai kekuatan modal lebih kecil. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada bab V, pendapatan bagi manajemen adalah kenaikan penjualan bersih. Dengan menaikkan penjualan bersih maka manajemen dapat mengantongi keuntungan (laba) bersih yang sangat besar, tentunya diimbangi dengan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Atas dasar dalil tersebut, maka manajemen akan melakukan langkah-langkah sistematis yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai penjualan bersih maupun laba bersih mereka. Langkah-langkah yang dapat mereka lakukan ada bermacam-macam. Mulai dari promosi penjualan hingga minimalisasi pengeluaran atau biaya. Dari berbagai langkah yang mereka lakukan pada umumnya hanya akan menguntungkan mereka (sebagai produsen) dan cenderung memberatkan konsumen, bahkan terkadang merugikan konsumen dan lingkungan.

Dalam hubungannya dengan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh manajemen PT BISI International dengan petani, pihak manajemen tentunya harus berfikir keras untuk mendapatkan rumus yang “pas” agar biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar. Hal itu berarti biaya (*cost*) yang dibayarkan oleh perusahaan kepada petani harus dapat ditekan serendah mungkin, padahal sebagai mitra kerja kedudukan petani dengan perusahaan seharusnya sama. Petani dan perusahaan seharusnya merumuskan persentase harga secara bersama-sama, namun pada kenyataannya persentase harga yang telah disepakati adalah persentase harga yang dibuat oleh pihak perusahaan. Posisi petani menjadi semakin lemah dikala semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dipengaruhi

oleh entitas (perusahaan) yang melakukan kerjasama dengan petani maupun perusahaan lain yang tidak melakukan kerjasama dengan petani. Posisi petani yang semakin lemah dapat kita lihat secara jelas melalui pendekatan *net farm income* (NFI) dalam bentuk sederhana maupun NFI dalam bentuk yang lebih kompleks yang diintrodusir oleh Agromisa Foundation. Dalam bentuk sederhana NFI yang diintrodusir oleh Agromisa Foundation dan IASB dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\left[\text{NFI} = \text{Total (atau Gross) Output} - \text{Total Biaya Riil} \right]$$

Pada saat kita melakukan perhitungan menggunakan pendekatan NFI yang sederhana akan diketahui posisi petani yang hanya menjadi objek dari kontrak kerjasama. Namun sayangnya, petani tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi situasi yang seperti itu dikarenakan posisi petani di dalam kontrak sangat lemah. Posisi petani yang sangat lemah tersebut dapat kita lihat di dalam persamaan dibawah ini:

$$\text{NFI} = \text{Gross Output} - \text{Input}$$

Jika, NFI adalah petani (rakyat)

Gross output adalah perusahaan (karena persentase harga beli hasil panen ditentukan oleh perusahaan)

Input adalah perusahaan (karena harga jual bahan pertanian: benih induk, pupuk, pestisida ditentukan oleh perusahaan)

Maka, persamaan selanjutnya adalah:

$$\text{Petani} = \text{PT BISI International} - (\text{PT BISI International} + \text{PT BISI International/Entitas lain})$$

$$\text{Petani} = \text{Sisa perusahaan}$$

$$\text{Petani} = \text{Buruh Perusahaan} \neq \text{Agribisnis}$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa posisi petani dalam kontrak hanyalah sebagai pegawai yang tidak mempunyai tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, gaji tetap maupun bonus tahunan. Para petani juga jauh dari konsep agribisnis karena dalam konsep agribisnis mulai dari penanaman, pemanenan, pengolahan, sampai dengan penjualan dilakukan sendiri oleh petani, harga jual hasil panen juga terbentuk oleh kesepakatan bersama karena dalam agribisnis posisi tawar (*bargaining position*) petani seimbang bahkan lebih kuat. Bagi manajemen perusahaan mungkin salah satu cara untuk menjalankan operasional bisnis dan meningkatkan laba mereka adalah dengan menjalin kerjasama dengan petani. Karena dengan menjalin kerjasama dengan petani mereka dapat mengatur pengeluaran yang menjadi biaya produksi benih komersial bagi perusahaan. Namun, bagi petani besaran laba yang diterima oleh mereka dalam menjalankan kontrak kerjasama dipengaruhi oleh dua hal yaitu, alam yang berpihak kepada mereka dan kebaikan perusahaan dalam memberikan harga beli hasil panen mereka dan juga kebaikan perusahaan dalam memberikan harga jual bahan-bahan pertanian kepada petani secara murah. Jika alam tidak berpihak kepada mereka kemungkinan jumlah panen yang dihasilkan tidak seperti harapan mereka. Dan jika perusahaan tidak bersikap baik kepada mereka maka laba mereka akan semakin kecil, dikarenakan harga beli hasil panen pertanian oleh perusahaan yang relatif rendah dan harga jual bahan pertanian yang dijual kepada petani relatif cukup tinggi.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui makna pertama dari tanggung jawab sosial perusahaan bagi manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan bagi manajemen adalah meminimalisasi biaya produksi (*production*

cost) benih komersial melalui penetapan harga (harga jual benih induk maupun harga beli benih hasil panen petani) dalam kontrak kerjasama dengan petani. Dengan melakukan kontrak kerjasama, mereka bisa menghemat biaya investasi, karena mereka tidak perlu membeli atau menyewa lahan untuk media penanaman benih induk mereka. Dengan melakukan kontrak kerjasama, mereka juga bisa menghemat biaya tenaga kerja, karena mereka tidak perlu merekrut karyawan baru untuk memproduksi benih komersial yang akan mereka jual. Selain itu dengan melakukan kontrak kerjasama dengan petani mereka juga tidak perlu memikirkan biaya variabel lainnya dalam proses penanaman seperti, biaya pemupukan dan biaya pengairan. Mereka juga tidak perlu membayar gaji kepada petani ketika terjadi gagal panen.

Poin lain yang didapatkan dari kontrak kerjasama antara petani dan manajemen PT BISI International adalah secara implisit benih induk maupun pupuk yang mereka jual kepada petani tetap menjadi milik PT BISI International. Karena meskipun petani membeli sendiri benih induk dan pupuk tersebut, tetapi proses penanaman sampai dengan proses panen tetap dalam pengawasan pihak manajemen PT BISI International. Pembelian benih oleh petani juga diperkuat oleh pernyataan Pak Tukirin:

Benih ngoteniku nggih tumbas piyambak mas, mangke wonten dua pilihan. Seupami petani mboten gadhah modal, petani saget ngutang benih dateng perusahaan mangke pas panen yatra ingkang dipun terima petani dikurangi kalihan utang benih niku wau. Nanging seupami petani gadhah modal, petani saget langsung tumbas benih niku wau secara kas.

(Benih yang didapat dari pabrik itu dibeli petani mas, nanti ada dua pilihan. Seupama petani tidak mempunyai modal, petani dapat hutang benih kepada perusahaan nanti ketika panen uang yang diterima petani akan dikurangi dengan hutang benih tadi.

Tetapi jika petani mempunyai modal sendiri, petani bisa langsung membeli benih tersebut secara kas).

Kalaupun sekarang benih induk diberikan secara gratis ketika melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan, hal tersebut lebih disebabkan oleh persaingan usaha. Karena saat ini banyak perusahaan yang menawarkan benih gratis ketika melakukan kerjasama dengan para petani. Namun hal tersebut tidak mengubah esensi kepemilikan benih, yaitu pihak perusahaanlah pihak yang menguasai benih tersebut. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Muji.

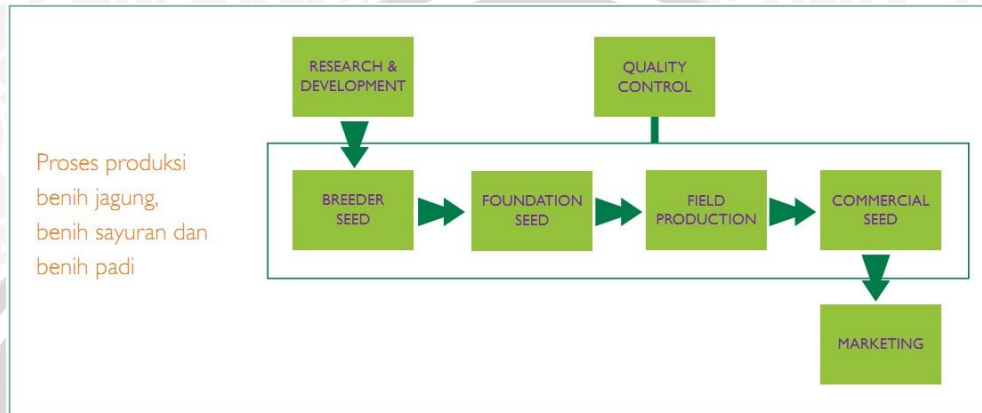
Riyen benih niku dikengken tumbas kalihan perusahaan, tapi sejak dua tahun niki benih niku disukai kalihan perusahaan (gratis). Amergi sakniki niku persaingan antar perusahaan ketat mas, damel contoh pihak pioneer niku sakniki gratis dadose PT BISI sakniki nggih tumut gratis damel narik petani. Sak lintune niku petani nggih dipun sukani obat mamigro gratis kalihan perusahaan.

(Dulu itu benih disuruh beli oleh perusahaan, tetapi sejak dua tahun ini benih diberikan secara gratis oleh perusahaan. Karena sekarang ini persaingan antar perusahaan ketat mas, sebagai contoh pihak pioneer itu sekarang memberi benih gratis sehingga PT BISI sekarang juga ikut memebrikan benih gratis untuk menarik petani. Petani juga diberi obat mamigro gratis oleh perusahaan).

Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada di dalam laporan tahunan PT BISI International (laporan tahunan 2007, 2009, maupun 2010) dan penjelasan penulis pada bagian sebelumnya, yaitu pada anak sub bab **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?** Dimana di dalam laporan tahunan PT BISI International (laporan tahunan tahun 2009) tersebut dijelaskan bahwa tujuan PT BISI International dalam kerjasama tersebut adalah untuk membantu para petani dalam hal alih kemampuan teknis dan pengawasan berkala di sepanjang proses produksi. Hal tersebut dilakukan agar benih yang dihasilkan dari kerjasama antara petani dengan pihak manajemen PT BISI International sesuai dengan standard yang telah

ditentukan oleh pihak perusahaan. Gambar 5.1 berikut akan menjelaskan alur produksi benih PT BISI International.

Gambar 5.1 Bagan Alir Produksi Benih PT BISI International



Sumber: Laporan tahunan PT BISI International 2009, halaman 32

Breeder seed adalah benih induk yang mempunyai sifat individual yang baik dan unggul yang ditanam di fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan. Khusus untuk benih induk jagung hibrida dihasilkan oleh perseroan atas kerjasama dengan Monsanto Company (“Monsanto”). Setelah mendapatkan benih induk departemen penelitian dan pengembangan perseroan kemudian akan melakukan perkawinan silang dan pemuliaan antar tanaman induk serta pembiakan dalam *green house* maupun di lapangan terbuka, serta pengujian di sentra-sentra produksi dan kemudian ditanam untuk menghasilkan benih dasar/induk (*Foundation Seed*).

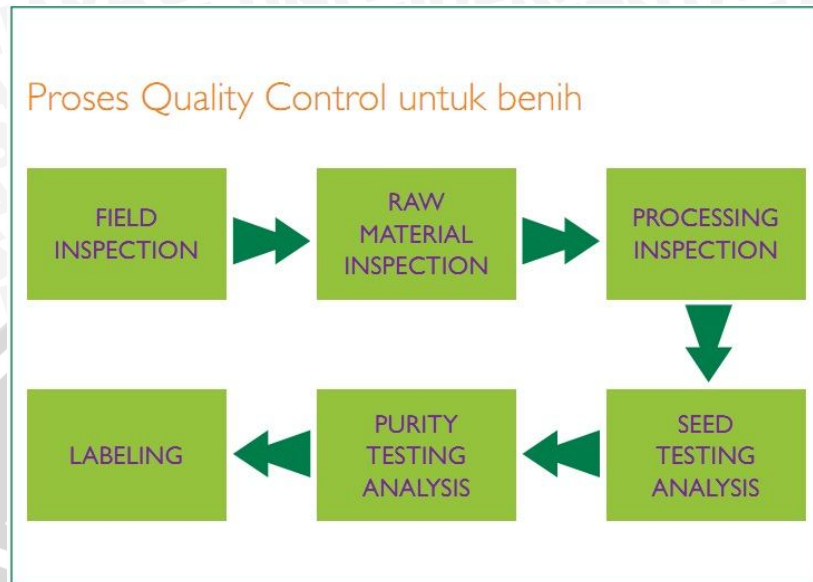
Tahap selanjutnya adalah memperbanyak benih induk (*Field Production*) dengan cara mengadakan kerjasama dengan para petani dalam bentuk tanam kontrak, dimana perseroan akan menjual benih dasar (induk) kepada para petani untuk ditanam dengan perjanjian bahwa petani harus menjual seluruh hasil panen tersebut kepada perseroan (PT BISI International). Sehingga melalui pemahaman

alur produksi benih PT BISI International tersebut dapat diketahui bahwa, petani berada pada wilayah *Field Production*. Pada wilayah tersebut proses produksi yang dilakukan oleh petani dikontrol langsung oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut dapat kita lihat pada bagan alir di atas, dimana *Field Production* sejajar dengan tiga proses produksi yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan yaitu, proses *Breeder Seed*, *Foundation Seed*, dan proses *Commercial Seed* dimana semuanya masuk dalam *quality control* manajemen perusahaan.

Proses kontrol *field production* oleh perusahaan dilakukan melalui kegiatan *field inspection*. Melalui *field inspection* inilah perusahaan mengawasi setiap langkah yang harus dilakukan oleh petani, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pengairan, pemupukan, bahkan pemanenan agar dihasilkan *commercial seed* yang sesuai dengan standard perusahaan. Jika hasil panen tersebut tidak sesuai dengan yang distandardkan oleh manajemen PT BISI International, misalnya saja ketika dalam proses penangkaran dan pembuatan benih petani tidak melakukan pemotongan benang sari, maka harga beli hasil panen tersebut akan dikurangi sebesar Rp 500,- (Ashadi, 2007:14). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Tukirin:

Nek soal jabut bunga memang seupami kasep utawi tledor ingkang jabut niku pancen wonten kerugian. Timbangane mangke petani mboten dipundut utawi dirugikan, mangke dipendet pete nanging radi dirugikan ngoteniku.

(Kalau soal jabut bunga, memang kalau terlambat mencabut atau petani teledor mencabut bunga itu memang ada kerugian. Daripada nanti tidak dibeli oleh perusahaan dan petani mengalami kerugian yang cukup besar, maka hasil panen tetap dibeli tetapi petani sedikit dirugikan (ada pemotongan harga).

Gambar 5.2 Bagan Alir Proses *Quality Control* Benih

Sedangkan tahap terakhir dari proses produksi benih adalah proses pemasaran *Commercial Seed*. *Commercial seed* merupakan hasil panen dari memperbanyak benih dasar yang kemudian menjalani proses produksi menjadi benih komersial/benih sebar dan dimasukkan ke dalam kemasan tertentu untuk selanjutnya dipasarkan. Dari alur produksi benih yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun secara eksplisit benih induk (*foundation seed*) yang dijual oleh perusahaan kepada petani dalam laporan keuangan masuk dalam akun penjualan dan akan meningkatkan pendapatan perusahaan, namun secara implisit benih induk (*foundation seed*) tetap dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut berarti secara implisit persediaan benih induk milik perusahaan jumlahnya tetap, hanya tempat penyimpanannya saja yang berubah.

Tabel 5.1 Penjualan Benih Induk PT BISI International kepada Petani

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Benih Jagung Induk (juta rupiah)	2.752	7.832	3.757	4.311
Benih Sayuran Induk (juta rupiah)	750	1.158	1.018	938
Benih Padi Induk (juta rupiah)	991	3.238	1.994	543

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna kedua dari tanggung jawab sosial perusahaan bagi manajemen PT BISI International adalah penguasaan aset, dalam hal ini yaitu benih induk (*foundation seed*). Dengan “menguasai” aset (benih induk/*foundation seed*) maka kapasitas produksi benih komersial (*commercial seed*) yang dihasilkan dari memperbanyak benih induk melalui *field production* juga akan meningkat. Selain itu dengan melakukan pembelian hasil panen petani berarti PT BISI International telah melindungi benih agar tidak bisa dijual bebas oleh petani. Yang pada akhirnya juga akan meningkatkan persediaan benih komersial (*commercial seed*) perusahaan. Hal tersebut berarti perusahaan telah berupaya keras untuk memenuhi kapasitas produksi benih komersial mereka. Dengan pencapaian target produksi benih komersial seperti itu diharapkan target penjualan dimasa mendatang tidak akan terganggu dan bahkan akan semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, laba perusahaan diharapkan juga akan meningkat.

Berbeda dengan perusahaan, bagi para petani pendapatan berarti mendapatkan hasil panen yang maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Disamping itu bagi petani bertani itu merupakan bagian dari ibadah manusia. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Supardi.

yang pertama kita itu kan bekerja, bekerja itu niatnya dengan ibadah, kalau prasarana petani untuk mencari keuntungan yang lebih

banyak itu hanya untuk menunjang ibadah. Kalau kita bertani hasilnya banyak akhirnya beribadahnya akan tenang karena hasilnya juga banyak, tapi kalau hasilnya itu tidak banyak kan ibadahnya juga kacau kalau kita itu belum beriman. Tapi kalau kita sudah beriman kita kan sudah berpasrah kepada Allah.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Pak Tukirin. Namun terdapat sedikit perbedaan anggapan tentang pertanian dari yang telah diungkapkan oleh Pak Supardi, perbedaan tersebut terletak pada sifat ibadahnya, jika Pak Supardi menitikberatkan pertanian pada ibadah yang sifatnya *habluminallah*, Pak Tukirin lebih seimbang dalam memandang kegiatan usah tani tersebut. Pak Tukirin menganggap kegiatan pertanian itu sebagai kegiatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) dan juga kegiatan yang menghubungkan manusia dengan manusia (*habluminannas*). Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Tukirin.

Lak kanggene kula niku sedaya niku umpaminipun berjalan lancar, sae niku bersyukuripun datheng Gusti Alloh nggih malah langkung sae, langkung nemen ngoten niku kanggene kula niku, mboten koke namung bertani berhasil mpun cekap mboten ngoten. Pokokipun umpami tanduran kanan kirinipun sae napa malih lak kalih tangga tepalih niku mungkin kurang berhasil niku saget omong-omongan amrih apike dos pundi ngoten kula malak langkung sae. Dadi syukuripun datheng Gusti Alloh luweh nemen malahan.

(Kalau untuk saya semua itu seupama berjalan lancar, bagus itu bersyukurnya kepada Allah tambah bagus, tambah meningkat rasa syukur saya kepada Allah, tidak hanya cukup bertani saja. Yang pasti seupama tanaman kanan kirinya bagus apa lagi kalau tanaman tetangga ada yang kurang bagus itu sesama tetangga bisa saling berdiskusi. Sehingga rasa syukur kepada Allah itu lebih meningkat).

5.3 Tafakur terhadap Produk Pertanian PT BISI International

Tafakur dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perenungan, memikirkan, menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh, mengheningkan cipta. Tafakur yang dimaksud oleh penulis adalah mempelajari secara mendalam sebab serta akibat dari suatu keadaan (penjualan produk pertanian). Pada sub bab ini

penulis akan melakukan kontemplasi atas penjualan produk PT BISI International, serta dampak penjualan produk tersebut bagi pendapatan PT BISI International dan bagi lingkungan. Dengan melakukan kontemplasi, penulis berharap dapat memahami secara penuh dan menarik sebuah kesimpulan atas kegiatan penjualan dan penggunaan produk pertanian PT BISI International. Melalui hal tersebut diharapkan penulis menjadi paham, keuntungan ataukah kerugian yang berperan besar dalam penjualan produk pertanian tersebut, serta pihak mana yang akan diuntungkan dan pihak mana yang akan dirugikan.

5.3.1 Kontribusi Jagung Hibrida

Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan jaman, benih-benih hibrida menjadi pilihan utama untuk ketersediaan pangan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya permintaan pangan akibat jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak dan semakin banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi serta keyakinan masyarakat serta bukti empiris yang memperlihatkan akan tingginya produktifitas hasil panen benih hibrida. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Supardi:

Lak hibrida niku kan regane mahal tapi sudah maksimal hasilnya.

(Kalau hibrida itu harga benihnya mahal, tapi hasilnya banyak (maksimal)).

Ditaksir, sekitar 100 ribu hektar sawah per tahun telah berubah fungsi, sehingga beberapa kelompok yakin bahwa pertanian konvensional bukan jawaban atas permintaan pangan yang semakin meningkat. Oleh karena itu teknologi harus dilibatkan, agar makanan untuk penduduk tetap dapat terpenuhi (Sukahar, 2012:7). Sehingga alternatif lain adalah menanam bahan makanan alternatif selain padi untuk

konsumsi pangan. Dalam perekonomian nasional, jagung merupakan komoditas kedua terpenting setelah padi. Walaupun produksi jagung meningkat dengan laju rata-rata 7,6% selama kurun waktu 2004-2008, tetapi produksi jagung masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman yang meningkat sekitar 10% per tahun. Dengan demikian, produksi jagung mempengaruhi kinerja industri peternakan yang merupakan sumber utama protein masyarakat (AD dan Zaini, 2010).

Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Penggunaan jagung untuk pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2000-2004), kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman meningkat 10-15% per tahun. Dengan demikian, produksi jagung mempengaruhi kinerja industri peternakan yang merupakan sumber utama protein masyarakat. Dalam perekonomian nasional, jagung adalah kontributor terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Sumbangan jagung terhadap PDB terus meningkat setiap tahun, sekalipun pada saat krisis ekonomi. Pada tahun 2000, kontribusi jagung dalam perekonomian Indonesia Rp 9,4 trilyun dan pada tahun 2003 meningkat tajam menjadi Rp 18,2 trilyun (www.litbang.deptan.go.id). Kondisi ini mengindikasikan besarnya peranan jagung dalam memacu pertumbuhan subsektor tanaman pangan dan perekonomian nasional pada umumnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa bisnis jagung merupakan bisnis yang

menjanjikan, karena selain menjadi bahan pangan alternatif selain padi, jagung juga menjadi sumber bahan baku industri.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan “*Road Map* Perbenihan Tanaman Pangan” yang menjelaskan sasaran tanam benih jagung dan padi hibrida dari tahun 2010 sampai 2014 (Laporan Tahunan PT BISI International, 2010:35). Dalam *road map* tersebut disebutkan bahwa kebutuhan benih jagung hibrida akan meningkat dari 38.132 ton pada tahun 2010 naik sampai dengan 59.172 ton ditahun 2014. Sehingga di Indonesia peluang untuk mendapatkan pasar masih terbuka lebar, hal tersebut dapat dilihat dari grafik estimasi penggunaan benih hibrida di Indonesia yang dibuat oleh PT BISI International pada tahun 2010 berikut ini.

Grafik 5.1 Estimasi Kebutuhan Nasional Benih Jagung Hibrida Dalam juta ton



Sumber: Laporan Tahunan PT BISI International, 2010:36

Sebagai perusahaan bidang pertanian yang menjual berbagai macam produk pertanian, seperti benih hibrida (benih jagung hibrida, benih padi hibrida, dan benih tanaman hortikultura) dan bahan peningkat produktifitas tanaman (pestisida dan pupuk kimia) PT BISI International seperti halnya perusahaan-perusahaan bidang

pertanian lainnya tentu tidak akan menya-nyiaikan peluang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai penjualan benih jagung hibrida PT BISI international dan upaya PT BISI International dalam mengembangkan benih jagung hibrida tersebut melalui kerja sama penelitian dengan Monsanto Company. Bahkan berdasarkan laporan keuangan PT BISI International, pendapatan terbesar PT BISI International diperoleh dari penjualan benih jagung hibrida. Penjualan benih hibrida PT BISI International tersebut dapat kita lihat dalam tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Penjualan Benih Komersial PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Benih Jagung Komersial (juta rupiah)	469.564	999.930	230.956	303.795
Benih Sayuran Komersial (juta rupiah)	131.813	150.113	195.742	199.130
Benih Padi Komersial (juta rupiah)	13.662	94.489	72.807	51.050
Total Penjualan Bersih (juta rupiah)	889.588	1.627.821	782.125	894.865
% Penjualan Benih Jagung Komersial atas Penjualan Bersih	52.78%	61.43%	29.53%	33.95%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penjualan benih jagung hibrida rata-rata per tahun dalam jangka waktu 2007 sampai dengan 2010 adalah 44,42% dari total penjualan bersih, mengalahkan penjualan rata-rata benih sayuran hibrida yang sebesar 17,83% dan penjualan rata-rata benih padi hibrida sebesar 5,59% dari total penjualan bersih. Bahkan pada tahun 2008 PT BISI International yang menjadi bagian dari Charoen Pokphand Group menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar di atas 71%. Pada tahun 2008 pangsa pasar PT BISI International untuk benih jagung hibrida dan padi hibrida adalah masing-masing sebesar 71% dan 40%. Hal tersebut tentu memperkuat indikasi bahwa PT BISI International ingin menjadi salah satu pelaku utama dalam bisnis perbenihan hibrida

di Indonesia. Benih hibrida merupakan benih favorit yang dijual oleh perusahaan bidang pertanian, terutama perusahaan-perusahaan multinasional besar (Kuyek, 1999:7).

Benih hibrida diciptakan melalui perkawinan silang antar varietas atas tanaman-tanaman khusus. Perusahaan besar bidang pertanian mengklaim bahwa benih hibrida mampu memproduksi panen yang lebih banyak dan lebih baik. Perbedaan terbesar antara benih hibrida dan non-hibrida adalah benih yang diproduksi dari tanaman hibrida inferior terhadap benih hibrida asli. Benih hasil dari tanaman hibrida tidak benar-benar kawin, karenanya tanaman tidak akan *uniform*/seragam dan memiliki kualitas sama seperti tanaman induknya. Benih hasil dari tanaman hibrida mendesak petani untuk membeli benih baru dari perusahaan setiap tahunnya (Kuyek, 1999:7).

Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menjual benih hibrida berarti menjadikan petani tergantung pada benih-benih yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya adalah PT BISI International. Jadi tidak mengherankan jika perusahaan seperti PT BISI International akan selalu membukukan tren pendapatan dan laba usaha yang positif dan tidak pernah merugi. Walaupun besaran laba usaha mengalami kenaikan dan penurunan, namun pada akhirnya laba usaha tersebut tetap akan meningkatkan ekuitas mereka dikarenakan perolehan laba usaha mereka yang bernilai positif. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 5.2 berikut ini.

Grafik 5.2 Jumlah Ekuitas Perusahaan (2006-2010)
Dalam jutaan rupiah



Sumber: Laporan Tahunan PT BISI Int, 2010:2

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Niswar Syafa'at, Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Sang Hyang Seri (Persero), Syafa'at mengatakan seandainya boleh memilih, SHS lebih senang memproduksi benih padi atau jagung hibrida. Benih hibrida menciptakan ketergantungan pada penggunaanya (petani). Petani atau penangkar kecil-kecilan tidak akan mampu memproduksi benih padi hibrida. Selain proses penyilangannya rumit, butuh ketelitian tinggi, juga harus dilakukan sinkronisasi untuk mendapat produktivitas yang optimal. Ketergantungan inilah yang mendatangkan keuntungan besar bagi produsen benih. Maka tidak heran bila sejak satu dekade terakhir banyak investor swasta menanamkan modal untuk membangun industri benih. Syngenta, produsen benih dunia asal Eropa, misalnya, pada 2007 mengalokasikan 830 juta dollar AS untuk penelitian benih hibrida. Dupont, produsen benih jagung hibrida, dengan merek dagang Pioneer, berinvestasi besar-besaran. PT Bisi International Tbk, produsen benih jagung hibrida merek Bisi, tahun 2008 menganggarkan miliaran rupiah untuk meningkatkan kapasitas produksi benih hingga 60.000 ton per tahun (<http://www.infogoue.com>).

Lebih jauh lagi, agar petani tetap membeli benih yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional bidang pertanian, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan teknologi terminator (*Terminator Technology*), salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi ini adalah Monsanto Company (rekan kerja dari PT BISI International). Teknologi tersebut dapat menghancurkan kemampuan alamiah benih untuk tumbuh kembali. Sehingga benih yang sudah ditanam, hasil panennya tidak dapat dijadikan indukan lagi. Terminator dapat memiliki dampak disaster kalau gen tersebar ke tanaman lain, tanaman ini juga bisa kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi (Kuyek, 1999:8).

Dampak dari globalisasi teknologi sudah dirasakan melalui revolusi hijau dan akan diperparah dengan revolusi gen (Manzilati, 2010:15). Hanya saja, seperti biasa, pemerintah menginginkan bukti terlebih dahulu sebelum percaya akan dampak negatif yang akan ditimbulkan, organisasi non-pemerintah belum mampu melihat dampaknya di masa mendatang, dan petani tidak mempunyai akses pada informasi. Hasil akhirnya dapat diterka, pengusuran petani kecil, ketergantungan akan benih (bahkan pada tingkat nasional) pada perusahaan asing, serta pengurasan devisa untuk membeli benih.

Kadang-kadang benih hibrida memproduksi panen yang tinggi, tetapi mereka juga mensyaratkan banyak input bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Bertani dengan menggunakan benih hibrida selalu lebih “mahal” daripada bertani dengan menggunakan benih tradisional atau lokal (Kuyek, 1999:8). Untuk menjelaskan pernyataan tersebut dibutuhkan pembahasan tersendiri. Sehingga dilematik penggunaan pestisida tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

5.3.2 Dilematik Pestisida

Ekosistem pertanian (agroekosistem) memegang faktor kunci dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu bangsa, sehingga tidak mengherankan jika banyak perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Company*) bidang pertanian seperti PT BISI International yang bekerjasama dengan Monsanto Company berusaha dengan keras untuk membuat produk yang sesuai dan diminati oleh petani dalam mengembangkan usaha tani mereka, terutama untuk meningkatkan hasil panen para petani. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa usaha untuk menggiring para petani agar memakai produk hasil penelitian korporasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui produk hasil penelitian tetapi juga dilakukan melalui proses akuntansi, diantaranya yaitu penggunaan perhitungan *net farm income* (NFI), serta konsep *fair value*. Khusus penggunaan konsep *fair value* akan dijelaskan pada bab VI. Dengan menggunakan perhitungan *net farm income* petani dapat membuat perhitungan dan meminimalisasi besarnya biaya (*cost*) untuk meraih hasil yang setinggi-tingginya, hal tersebut serupa dengan prinsip ekonomi yang selama ini kita kenal dan menempatkan manusia hanya sebagai *homo economicus*, dan menjauhkan manusia dari sifat *homo socius* dan *homo religius*. Selain itu konsep NFI juga akan merasionalkan penggunaan benih hibrida dan pestisida, karena adanya anggapan bahwa benih hibrida dan pestisida dapat meningkatkan hasil panen mereka. Penulis melihat hal tersebut sebagai usaha kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan bidang pertanian dan pangan sebagai bidang perdagangan/komersial yang hanya melihat untung/rugi yang pada akhirnya menguntungkan kelompok tersebut dan mengabaikan budaya yang melekat

dalam usaha tani serta lingkungan sosial masyarakat pertanian yang kental dengan sifat kekeluargaan. Padahal di dalam Al Quran Allah berfirman:

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS. Muhammad: 22)

Dalam konteks usaha tani, usaha untuk “menggiring” pola pikir petani dari sebuah cara hidup (*way of life* atau *livelihood*) kepada pola pikir komersial merupakan sikap yang tidak hati-hati, gegabah, atau bahkan keliru dan berbahaya (Abar, 2002 dalam Mulawarman, 2012:19). Karena komersialisasi petani di Indonesia terjadi atas paksaan dari luar dan bukan tumbuh karena proses sosiologi dan ekonomis secara internal dalam masyarakat petani. Dampak dari “penggiringan” pola pikir tersebut sangat fatal, karena petani hanya akan berfikir untuk memaksimalkan hasil panen mereka dan cenderung mengabaikan lingkungan sekitar. Contoh konkrit dari hal tersebut adalah penggunaan pestisida dalam melakukan kegiatan usaha tani.

Seperti yang kita semua ketahui bahwa, PT BISI International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam produk pertanian, dimana penyumbang pendapatan terbesar kedua berasal dari penjualan pestisida. Pada tanggal 26 Desember 2006, perusahaan dan PT Multi Sarana Indotani (anak perusahaan PT BISI International) menandatangani lisensi dengan CPIGCL, pihak hubungan istimewa. Berdasarkan perjanjian tersebut, perusahaan dan PT Multi Sarana Indotani diberi hak untuk menggunakan *Intellectual Proprietary Rights* (IPR) dan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk yang dihasilkan dari penggunaan IPR tersebut. Perjanjian tersebut meliputi penjualan benih sayuran, padi dan pestisida. Perjanjian tersebut hanya berlangsung selama satu tahun (tahun 2007) dari lama perjanjian awal, yaitu lima tahun.

Penghentian perjanjian tersebut dilakukan oleh perusahaan, PT Multi Sarana Indotani dan CPIGCL pada tanggal 1 April 2008 dan efektif mulai tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PT BISI International pada tahun 2010, kabar terbaru memberitakan bahwa untuk mengembangkan pupuk dan pestisida perusahaan menjalin kerjasama dengan Sanonda International China dan beberapa perusahaan luar negeri lainnya.

Masih di dalam laporan keuangan PT BISI International, dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011, nilai penjualan pestisida rata-rata menyumbang 29,49% dari total keseluruhan penjualan bersih PT BISI International dan rata-rata 44,21% dari total penjualan benih. Nilai penjualan pestisida dan persentase penjualan pestisida dari total penjualan bersih akan disajikan dalam Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Persentase Penjualan Pestisida atas Penjualan Bersih PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Penjualan Pestisida (juta rupiah)	235.227	349.011	245.732	317.096	326.471
Penjualan Bersih (juta rupiah)	889.588	1.627.821	782.125	894.865	998.656
% Dari Penjualan Bersih	26,44%	21,44%	31,42%	35,44%	32,69%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Jika kita membuat sebuah analisa berdasarkan laporan keuangan PT BISI International, hal tersebut berarti ketergantungan pestisida kepada PT BISI International oleh bidang pertanian cukup tinggi. Dimana setiap memperoleh pendapatan sebesar Rp 1 atas penjualan benih, PT BISI International juga melakukan penjualan pestisida rata-rata sebesar Rp 0,4421(hampir 50% dari total penjualan benih) kepada petani. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pernyataan Sutanto (2006) dalam Taba *et al* (2007), dimana Sutanto (2006) menjelaskan bahwa teknologi modern mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap bahan kimia

seperti pupuk kimia, pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya yang lebih diminati oleh petani daripada pertanian yang ramah lingkungan.

Tabel 5.4 Persentase Penjualan Pestisida atas Benih PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Penjualan Benih (juta rupiah)	619.532	1.256.760	506.274	559.767	651.348
Penjualan Pestisida (juta rupiah)	235.227	349.011	245.732	317.096	326.471
% penjualan Pestisida atas Benih	37,97%	27,77%	48,54%	56,65%	50,12%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan kimia pertanian menjadi sebuah tren sejak revolusi hijau diperkenalkan beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu hama tanaman merupakan perhatian utama atas keberlangsungan revolusi hijau tersebut (Loekman S, 2002 dalam Taba *et al*, 2007). Untuk mengatasi kendala hama (terutama hama wereng) sejak dahulu telah dilakukan berbagai cara termasuk diantaranya adalah teknik budidaya, penggunaan varietas tahan hama dan penggunaan pestisida sintetis. Namun seiring berjalannya waktu penggunaan pestisida meningkat dengan pesat, karena pestisida dianggap sebagai suatu cara mudah untuk meningkatkan produksi pertanian (Taba *et al*, 2007). Dampak negatif dari penggunaan pestisida juga tampak semakin jelas. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berupa masukan agrokimia (terutama pestisida dan pupuk) telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak dikehendaki (Altieri, 1999 dalam Tobing, 2009). Dimana pada kenyataannya, dari waktu ke waktu penggunaan pestisida malah membuat hama menjadi kebal terhadap pestisida (Taba *et al*, 2007). Pestisida juga tidak hanya membunuh organisme yang menyebabkan kerusakan pada tanaman, namun juga membunuh organisme yang berguna seperti musuh alami hama (*predator*). Serangan hama dan hama sekunder bisa meningkat setelah pestisida sintetis membunuh musuh alami hama tersebut

(*resurgensi*). Hanya sebagian kecil pestisida yang dipakai di lahan pertanian yang seharusnya dikendalikan. Sebagian besar pestisida tersebut justru masuk ke udara, air, atau tanah yang pada akhirnya membahayakan organisme lain, dikarenakan pestisida sintesis yang tidak terurai akan terserap dalam rantai makanan dan sangat membahayakan serangga, hewan pemakan serangga, burung pemangsa dan pada akhirnya lingkungan serta manusia (Taba *et al*, 2007).

Suseno (1993, 197) juga menyatakan hal yang sama, dia menyatakan bahwa penggunaan pestisida secara besar-besaran mengakibatkan merajalelanya hama seperti wereng coklat yang kebal terhadap obat pemberantasnya, penyakit malaria di seluruh dunia tropis dan lain-lain. Apa yang telah dijelaskan oleh Taba *et al* (2007) dan Suseno (1993, 197) sejalan dengan pendapat Karl Marx yang dinyatakan oleh Bertens (2000, 310). Dalam konteks lain, Karl Marx menyatakan bahwa perubahan kuantitas bisa mengakibatkan perubahan kualitas. Pada penjelasan tersebut Bertens mencontohkan proses produksi pabrik, dimana jika satu cerobong pabrik memuntahkan asap hitam pekat ke dalam udara, dengan itu kualitas udara hampir tidak dipengaruhi. Tetapi jika jutaan cerobong melakukan hal yang sama, udara sudah menjadi lain dan pemakaiannya untuk bernafas bisa menyebabkan kesulitan. Jika penulis boleh meminjam analogi yang diutarakan oleh Bertens (2000, 310), maka penulis menilai penggunaan pestisida pada satu bidang sawah mungkin tidak akan berpengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan. Namun, jika sawah yang menggunakan pestisida jumlahnya lebih dari seribu bidang dan dilakukan penggunaan pestisida secara berkelanjutan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kerusakan lingkungan akan lebih cepat terjadi.

Penjelasan di atas juga diperkuat oleh pernyataan para petani, salah satunya yaitu Bapak Supardi, petani berusia 43 tahun yang berasal dari Kelurahan Kartoharjo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kuantitas dan kualitas hama di awal pelaksanaan revolusi hijau dengan tahun-tahun sekarang ini.

Nek bentene nek tahun-tahun sakniki niku luwih parah luwih angel, hama niku luwih kathah, kathah obat tapi nggih kathah hama utawi penyakit, lak riyen niku obat niku namung murah-murah niku mawon sampun selesai, tapi lak sakniki mboten. Sampek atusan, pitung puluh, satus, satus rong puluh, satus selawe niku obat damel menanggulangi hama napa penyakit niku.

(Bedanya kalau tahun-tahun sekarang itu, lebih parah lebih sulit (penanganan hama), hama itu lebih banyak sekali, banyak obat tetapi juga banyak hama atau penyakit, kalau dulu diberi obat yang murah-murah gitu saja sudah selesai, kalau sekarang tidak. Sampai ratusan ribu, tujuh puluh ribu, seratus ribu, seratus dua puluh ribu, seratus dua puluh lima ribu, itu obat untuk menanggulangi hama atau penyakit itu).

Pernyataan beberapa peneliti pada pembahasan sebelumnya, seakan menepis pernyataan Kuyek pada paragraf terakhir sub bab sebelumnya yang menyatakan bahwa bertani dengan menggunakan benih hibrida selalu lebih “mahal” daripada bertani dengan menggunakan benih tradisional atau lokal. Karena pada kenyataannya, keadaan yang sekarang ini lebih parah dari apa yang telah dinyatakan oleh Kuyek pada tahun 1999, karena pada saat ini biaya tanam benih hibrida dan benih lokal hampir sama, yang membedakan hanya harga benihnya saja, tetapi hal tersebut (harga benih yang mahal) juga diimbangi dengan hasil panen yang maksimal sehingga banyak petani yang menggunakan benih hibrida. Penyebab tingginya biaya tanam benih hibrida dan benih lokal disebabkan oleh penanganan hama menggunakan pestisida. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Supardi

dan Bapak Tukirin mengenai biaya usaha tani yang dikeluarkan oleh petani benih hibrida hampir sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani benih lokal. Berikut pernyataan Bapak Supardi:

Nggih ragate sami, cuma bentene hanya rego bibit. Lak hibrida niku kan regane mahal tapi sudah maksimal hasilnya. Pokoke mboten diserang kalih hama, wereng trus keputihan ngoteniku.

(Ya...biayanya sama, hanya bedanya harga bibit saja. Kalau hibrida itu kan harganya mahal tapi hasilnya sudah maksimal. Yang penting tidak diserang hama, wereng terus keputihan seperti itu).

Sedangkan Bapak Tukirin ketika ditanya oleh penulis mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menanam jagung hibrida untuk keperluan konsumsi dengan jagung lokal untuk keperluan konsumsi, Pak Tukirin mengatakan bahwa:

Lak hibrida damel konsumsi niku meh sami mawon,....

(Kalau penanaman benih hibrida dan benih lokal untuk konsumsi itu biayanya sama saja).

Pernyataan Bapak Supardi dan Bapak Tukirin selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Untung, K (2004) dalam Kruniasih dan Paramita (2006), dimana Untung, K menyatakan bahwa petani harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pengendalian hama karena takaran dan frekuensi penggunaan pestisida yang telah diaplikasikan sebelumnya tidak lagi dapat mengatasi masalah hama yang menyerang tanaman. Pernyataan tersebut juga memperkuat anggapan bahwa usaha tani modern memiliki ketergantungan yang tinggi kepada perusahaan. PT BISI International sebagai salah satu produsen pestisida tentunya juga ikut berkontribusi atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Apalagi pendapatan terbesar kedua PT BISI International diperoleh dari penjualan pestisida. Pendapatan dari penjualan pestisida yang cukup tinggi oleh PT BISI International ternyata juga berkaitan dengan *bundling strategy*

yang dilakukan oleh manajemen PT BISI International. Jemmy Eka Putra, direktur utama PT BISI International dalam laporan direksi yang disampaikan pada tahun 2009 menyatakan bahwa *bundling strategy* yang dilakukan oleh manajemen melalui penggabungan benih dengan pestisida pendukung terus memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan, seiring dengan terbiasanya petani memanfaatkan pestisida untuk meningkatkan hasil panen (Laporan Tahunan PT BISI International, 2009:23). *Bundling strategy* tersebut juga berhasil meningkatkan reputasi perseroan di kalangan petani. Oleh karenanya, PT BISI International mempersiapkan diri untuk pertumbuhan pasar pestisida selaras dengan peningkatan hasil pertanian.

5.3.3 *Net Farm Income* (NFI) dan *Value Added* (VA) tidak Berpihak kepada Lingkungan

Tingginya ketergantungan pertanian modern kepada perusahaan mengindikasikan bahwa tingkat kerusakan lingkungan pertanian selaras dengan pendapatan perusahaan. Jika dalam perbenihan hibrida kita mengenal F1 sebagai benih hibrida turunan dari benih induk yang tidak bisa diturunkan lagi menjadi benih komersial, dan F2 sebagai benih hibrida turunan F1 yang tidak akan memberikan hasil panen sebanyak yang dihasilkan oleh F1. Maka, dalam lingkup usaha tani kita juga mengenal F1 yaitu, perusahaan yang menghasilkan benih hibrida yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada pestisida dan pupuk kimia dan sebagai pihak yang melakukan eksploitasi secara langsung kepada petani, serta petani sebagai F2, yaitu pihak yang melakukan eksploitasi kepada lingkungan alam (secara tidak langsung perusahaan sebagai F1 melakukan eksploitasi kepada lingkungan).

Upaya rasionalisasi pertanian menggunakan *net farm income* kepada petani merupakan hal yang sangat berbahaya. Karena jika pola pikir petani dirasionalisasikan menuju pertanian komersial, dikhawatirkan kerusakan lingkungan akan semakin bertambah parah. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kita melakukan visualisasi proses kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pestisida. Untuk mendapatkan NFI yang tinggi, maka petani harus memperbesar total (atau *gross*) output dan memperkecil biaya yang dikeluarkan. Dikarenakan bertani menggunakan benih lokal menghasilkan panen yang sedikit dibandingkan dengan bertani menggunakan benih hibrida, seperti ungkapan Bapak Tukirin:

Hasile niku kathah benih hibrida, lemah sak hektar niku lak damel benih hibrida saget menghasilkan panen jagung kalih ton (2 Ton), lak damel benih lokal niku namung setunggal seprapat ton (1,25 Ton).

(Hasilnya itu banyak benih hibrida, tanah satu hektar itu kalau ditanami benih hibrida bisa menghasilkan panen jagung dua ton (2 Ton), kalau memakai benih lokal itu hanya satu seperempat ton (1,25 Ton).

Maka, para petani akan menggunakan benih hibrida untuk usaha taninya. Untuk mengetahui NFI yang diterima oleh petani, maka penulis akan membuat perbandingan besarnya NFI menggunakan benih hibrida dan NFI menggunakan benih lokal. Jika harga benih hibrida setiap kilogramnya adalah Rp 50.000,- dan untuk tanah seluas 0,5 hektar diperlukan benih sebanyak 10 kilogram. Maka total biaya pembelian benih yang dikeluarkan oleh petani setiap satu kali tanam adalah:

$$\text{Rp } 50.000,00 \times 10 = \text{Rp } 500.000,00$$

Dan jika kita melakukan perhitungan secara kasar dengan mengasumsikan konsumsi pestisida tersebut berdasarkan penjualan rata-rata pestisida (mengabaikan penjualan pupuk kimia) PT BISI International selama lima tahun (2007-2011)

sebesar Rp 0,4421(hampir 50% dari total penjualan benih) kepada petani maka, konsumsi pestisida oleh petani setiap 0,5 hektar adalah:

$$\text{Rp } 500.000,00 \times 0,4421 = \text{Rp } 221.050$$

Dari perhitungan di atas kita dapat melihat bahwa kelestarian ekologi dijual dengan harga Rp 442.100,- setiap hektarnya. Seperti yang kita ketahui, benih hibrida memerlukan asupan pupuk kimia. Selain itu saat ini petani juga lebih suka menggunakan pestisida dalam mengusir hama dan mengobati penyakit pada tanaman. Sehingga hubungan antara penggunaan benih, pupuk dan pestisida berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan. Jika kita cermati, konsep NFI ternyata hanya akan menguntungkan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan NFI, dengan melakukan perhitungan NFI petani yang sudah digiring menjadi petani komersial cenderung akan memilih membeli benih hibrida daripada benih lokal dikarenakan hasil panen benih hibrida yang maksimal. Misalnya, harga jual panen per kilogramnya adalah Rp 3.000,- dan total panen yang diperoleh setiap 0,25 hektar adalah sekitar 2 ton, maka total pendapatan yang diterima oleh petani dengan menggunakan benih hibrida adalah:

a) *Gross output*

$$\text{Rp } 3.000 \times 2.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

NFI = Total (atau *Gross*) Output – Total Biaya Riil

$$\text{NFI} = (\text{Rp } 3.000 \times 2.000\text{kg}) - (\text{Rp } 250.000 + \text{Rp } 221.050)$$

$$\text{NFI} = \text{Rp } 6.000.000 - \text{Rp } 471.050$$

$$\text{NFI} = \text{Rp } 5.528.950$$

Jika harga benih lokal adalah Rp 6.000,- per kg dan hasil panen benih lokal adalah 1,25 ton dan misalkan petani tidak menggunakan pestisida. Maka NFI yang diterima petani adalah:

b) *Gross output*

$$\text{Rp } 3.000 \times 1.250 = \text{Rp } 3.750.000$$

$$\text{NFI} = \text{Total (atau Gross) Output} - \text{Total Biaya Riil}$$

$$\text{NFI} = (\text{Rp } 3.000 \times 1.250\text{kg}) - (\text{Rp } 30.000)$$

$$\text{NFI} = \text{Rp } 3.750.000 - \text{Rp } 30.000$$

$$\text{NFI} = \text{Rp } 3.720.000$$

Perhitungan kasar tersebut masih belum dikurangi dengan biaya irigasi, pemupukan, biaya tenaga kerja, sewa lahan (jika petani tidak punya tanah sendiri) dan bagi hasil ketika panen. Hasil panen tersebut juga diperoleh setiap empat bulan sekali, sehingga pendapatan perbulan jika petani menggunakan benih hibrida dan pestisida adalah sekitar Rp 1.382.238,-. Bandingkan dengan laba bersih yang diperoleh PT BISI International yang tersaji dalam tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 Laba Bersih PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Laba Bersih (juta rupiah)	150.192	398.401	75.780	143.489	146.127
Rata-rata Laba Bersih per Bulan (juta rupiah)	12.516	33.200,08	6.315	11.957,42	12.177,25

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Jika kita adalah seorang petani yang hanya berfikir pada pendapatan dan untung rugi, tentunya bertani menggunakan benih hibrida merupakan sebuah pilihan yang tepat. Sehingga dari perhitungan menggunakan pendekatan *net farm income* (NFI) tersebut kita dapat melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani dan perusahaan dari “perusakan” lingkungan. Hal yang sama juga terjadi pada konsep *value added* (VA). Bahkan penulis merasa *value added* belum mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholder*, serta cenderung mirip dengan *net farm income*. Menurut penulis *value added* cenderung mengabaikan lingkungan bahkan cenderung mengeksploitasi lingkungan, hal tersebut dapat dilihat dari *value added* (VA) yang diintrodukir oleh Haller dan Stolowy (1995) dalam Mulawarman (2006, 133).

Dalam melakukan usaha tani, lingkungan merupakan bagian utama kegiatan pertanian selain benih dan tenaga kerja, sehingga apa yang akan dilakukan oleh petani dan apa yang akan ditanam oleh petani akan berpengaruh besar terhadap lingkungan. Melalui pendekatan *value added* yang pertama (*subtractive* atau *indirect method*), penulis melihat eksploitasi terhadap lingkungan terjadi. Dimana, seperti halnya *net farm income*, *value added* juga melegalkan penggunaan pestisida maupun cara-cara lain yang dapat merusak ekosistem dalam usahanya untuk memaksimalkan pendapatan.

$$\text{NFI} = \text{Total (atau Gross) Output} - \text{Total Biaya}$$

$$\text{VA} = \text{O} - \text{I}$$

$$\text{NFI/VA} = \text{Output dari Lingkungan} - \text{Input kepada Lingkungan}$$

Jika VA merupakan pendapatan bersih yang didapatkan oleh petani (NFI), O (*output*) adalah hasil penjualan yang didapatkan oleh petani, dan I (*input*) adalah biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh petani maka besarnya NFI dipengaruhi oleh besarnya *output* dan *input*. Semakin besar *output* yang dihasilkan dan semakin kecil *input* yang dikeluarkan oleh petani maka, NFI yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah sama seperti visualisasi perhitungan NFI pada pembahasan sebelumnya. Mungkin VA dalam pendistribusian pendapatannya lebih bersifat humanistik terhadap manusia dan lebih bagus daripada NFI, namun pada pelaksanaannya, NFI maupun VA cenderung mengeksploitasi alam. Walaupun kita memasukkan alam ke dalam perhitungan VA pada cara yang kedua (*additive* atau *direct method*), yang dianggap sebagai penunjuk aspek sosial dan direpresentasikan sebagai penjumlahan dari penciptaan kekayaan, hal tersebut menurut penulis tidak dapat membayar kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Karena berapapun nominal uang yang dikeluarkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan/petani kepada lingkungan, namun perusahaan masih tetap memproduksi bahan kimia dan petani masih menggunakan bahan kimia serta cara-cara lain yang dapat membahayakan kelangsungan ekosistem wilayah sekitarnya, eksploitasi dan kerusakan lingkungan masih akan tetap terjadi.

Eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia menunjukkan bahwa manusia belum sepenuhnya melaksanakan tugas *kekhalifahan*-nya. Karena dalam peranannya sebagai *khalifah*, seorang pengusaha diharapkan memelihara lingkungan alamnya (Muhammad dan Fauroni, 2002:190). Di dalam Al Qura'an Surat Al Baqarah Ayat 30, Allah juga telah menekankan peranan manusia

atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggungjawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai *khalifah* Allah SWT.

5.4 Menguasai Benih

Seiring dengan perkembangan jaman, teknik budidaya tanaman pangan sudah mengarah kepada penggunaan teknologi modern. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan berbagai macam teknologi untuk menghasilkan benih sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Jhamtani (2009) dalam Manzilati (2011:14) menyatakan bahwa teknologi pertanian modern adalah alat untuk menguasai benih, sarana produksi dan pasar pangan. Pada masa lalu teknologi revolusi hijau digunakan untuk melakukan hal tersebut dan sudah banyak dibahas. Tetapi pada intinya, benih hasil teknologi dikuasai perusahaan, sarana produksi juga dikuasai perusahaan. Sehingga walaupun jutaan petani melakukan kegiatan cocok tanam, tetapi kebebasannya sudah dirampas. Petani sudah tidak lagi menentukan varietas yang ditanamnya, karena pasar sudah dibentuk agar para petani hanya menerima varietas tertentu.

Perusahaan-perusahaan besar bidang pertanian mengeluarkan banyak biaya untuk membangun berbagai pusat penelitian, mereka juga tidak segan-segan untuk membayar mahal para tenaga ahli untuk melakukan penelitian agar didapatkan benih, pupuk maupun pestisida yang sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak peduli dengan dampak negatif yang mungkin timbul atas penggunaan teknologi modern tersebut, mereka hanya berfikir mendapatkan keuntungan atas penjualan produk yang dihasilkan karena biaya yang mereka keluarkan sudah terlanjur besar.

Tabel 5.6 Biaya Tenaga Ahli PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Upah buruh langsung (juta rupiah)	3.561	7.711	5.907	4.828	4.190
Biaya tenaga ahli (juta rupiah)	2.105	2.661	2.924	2.903	3.234

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT BISI International untuk tenaga ahli per tahunnya rata-rata mencapai Rp 2.765.400.000,-. Pengeluaran tersebut mencapai 53% dari pengeluaran rata-rata per tahun (2007-2011) untuk upah buruh langsung (belum termasuk biaya perawatan dan pembelian peralatan di 12 pusat penelitian yang dimiliki). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya penelitian bagi PT BISI International. Dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk tenaga ahli, serta sumber pendapatan perusahaan adalah dari penjualan benih, pupuk dan pestisida maka, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi benih dan produk mereka yang lain dari pihak-pihak yang ingin menyaingi mereka.

Salah satu orang yang sudah terjerat jaring imperialisme benih adalah Pak Tukirin. Dalam lembar Info WALHI: Kamis, 22 September 2005 yang dinyatakan oleh Siregar, Pak Tukirin (62 tahun) sangat kaget mengetahui dua anggota polisi mendadak datang menemuinya di rumah. Satu polisi yang lain menuju kebun jagung miliknya dan mengambil beberapa batang pohon jagung dan jagung yang sedang mekar. Tak lama kemudian barulah polisi menjelaskan duduk persoalan yang terjadi kepadanya. Petani Kabupaten Nganjuk yang sederhana tersebut dituduh mencuri benih induk oleh perusahaan produsen benih jagung hybrida, PT. BISI, anak perusahaan Charoen Pokphand. Konglomerasi usaha input pertanian terbesar di Asia

tersebut, juga menuduh Pak Tukirin melakukan sertifikasi liar atas benih jagung yang mereka patenkan. Pak Tukirin tidak mengerti sama sekali mengapa tuduhan semacam itu dialamatkan kepadanya. Bersama Pak Tukirin, ikut juga dilaporkan Pak Suprpto tetangganya sesama petani.

Yang dilakukan Pak Tukirin sama sekali jauh dari yang dituduhkan tersebut. Pak Tukirin memperoleh benih yang dijual bebas tersebut secara sah dari penyalur benih resmi. Hal tersebut juga dinyatakan langsung kepada penulis:

Niku anu mas...kula niku angsale benih niku nggih tumbas saking pabrik, biasane kan pabrik kathah tho persediaanane lajeng dipun jual datheng masyarakat supados pabrik mboten merugi terlalu besar, misale seupami theng pasaran regi niku seket lak drop-dropan saking pabrik niku namung wolulus ngoten.

(Itu begini mas...saya itu dapat benih itu ya beli dari pabrik, biasanya pabrik kan banyak persediaannya (di gudang) kemudian dijual kepada masyarakat supaya pabrik tidak mengalami kerugian terlalu besar, misalnya kalau di pasaran harga benih itu lima puluh ribu kalau dari pabrik itu hanya delapan belas ribu).

Kemudian Pak Tukirin mengembangkan pengetahuan mengenai budidaya jagung yang dimilikinya, agar benih jagung tersebut dapat digunakan sebagai benih. Selama ini jagung hibrida yang dipanen tidak dapat dijadikan benih untuk musim tanam berikutnya. Jika ingin menanam jagung kembali, petani membeli benih jagung. Kalaupun digunakan sebagai benih, hasilnya akan jelek. Jagung hibrida hasil panen hanya bisa dijual dan untuk konsumsi.

Pak Tukirin melakukan inovasi atas cara berbudidaya jagung dengan melakukan penyerbukan silang antar tanaman jagung. Seperti diketahui, jagung memiliki kemampuan melakukan perkawinan sendiri karena pada satu batang

jagung terdapat alat reproduksi jantan dan betina. Yang dilakukan pada Tukirin adalah menanam benih jagung BISI yang dibelinya dalam 4 jalur. Ketika jagung-jagung tersebut 3 bulan, dan mulai mengeluarkan serbuk sari, maka 3 jalur jagung dipotong serbuk sarinya. Dua jalur ini jagung betina. Satu jalur jagung tetap dibiarkan serbuk sarinya berkembang, jalur ini dia sebut jagung jantan. Dengan pengaturan ini, maka 3 jagung betina tadi akan mengalami penyerbukan silang dari jalur jantan.

Cara budidaya Pak Tukirin yang tidak biasanya tersebut, ternyata berhasil. Jagung yang dipanen dapat digunakan sebagai benih dan tumbuh dengan baik. Petani-petani lain yang mengetahui ini sangat senang karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar membeli benih. Pak Tukirin membagi pengetahuan dan benihnya tersebut kepada petani lain. Yang dilakukan Pak Tukirin sampai juga ke telinga manajemen perusahaan PT. BISI. Produsen benih jagung ini tidak senang dengan berita tersebut. Apabila ini berlanjut, maka petani tidak lagi bergantung pada benih yang dijual. Keuntungan pun bisa berkurang drastis. Petugas lapangan PT. BISI terjun ke kebun Pak Tukirin dan memperhatikan ladang jagungnya. Hingga akhirnya PT. BISI melaporkan ke polisi dengan tuduhan sertifikasi liar. Pak Tukirin juga dicecar dengan tuduhan melakukan pencurian benih induk jagung dari perusahaan dan kemudian menanamnya. Perbuatan Pak Tukirin melakukan penanaman silang, tidak terkait sama sekali dengan kegiatan sertifikasi sebagaimana didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1992. Perusahaan telah melakukan tuduhan yang tidak mendasar, dan Pengadilan telah salah menjatuhkan vonis. Melalui kutipan daftar putusan pidana

nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk, Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Pak Tukirin dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Walaupun Pak Tukirin tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut dikarenakan Pak Tukirin masih dalam masa percobaan selama satu tahun terhitung sejak putusan tersebut, namun proses hukum dan putusan tersebut telah membebani pikiran keluarga Pak Tukirin, terutama istri Pak Tukirin yaitu, Bu Aminah:

Awale riyen nggih kepikiran terus mas, pas adus ngoten nggih kepikiran. Piye lak sak wayah-wayah Bapak ditangkap polisi maneh, sampek awak niki kuru mas mikirne Bapak niku.

(Awalnya dulu ya kepikiran terus mas, ketika mandi ya kepikiran. Bagaimana kalau sewaktu-waktu Bapak nanti ditangkap Polisi lagi, sampai badan ini kurus mas memikirkan Bapak).

Proses pengadilan dilaksanakan secara tidak adil dan tidak sesuai dengan prosedural dalam KUHAP. Pak Tukirin dan Pak Suprpto selama proses persidangan tidak disediakan dan didampingi oleh pengacara, tidak mendapatkan salinan putusan dan berkas persidangan. Proses persidangan yang tidak informatif tersebut telah menghilangkan hak Pak Tukirin dan Pak Suprpto untuk melakukan proses banding. Proses hukum yang dijalani oleh Pak Tukirin dan Pak Suprpto juga membingungkan, apa yang dituduhkan pun berubah-ubah, seperti yang telah diungkapkan Pak Tukirin:

Nggih awale nika dituduh nyolong benih pabrik, lajeng berubah dados mencontoh cara budidaya pabrik.

(Awalnya dulu saya dituduh mencuri benih kemudian berubah menjadi mencontoh cara budidaya pabrik).

Hal tersebut memperlihatkan betapa petani kecil harus dihadapkan dengan sebuah perusahaan besar ketika ingin menjadi petani yang mandiri. Sedangkan pemerintah yang seharusnya membela kepentingan masyarakat luas tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemerintah khawatir hal tersebut akan mempengaruhi investasi bidang pangan di Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui bahwa sampai saat ini pemerintah masih menganut sistem *trickle down effect* (tetesan menurun) dalam usaha mensejahterakan rakyatnya.

5.5 Subsidi Pemerintah

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang. Namun terjadi pendistorsian makna pertanian yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan. Akibat dari terus meningkatnya kebutuhan pangan, pemerintah kemudian membuat peraturan-peraturan dan kebijakan tentang pangan, diantaranya yaitu surplus pangan (dalam hal ini adalah beras). Untuk mengupayakan hal tersebut pemerintah memberikan subsidi kepada petani dengan cara membeli benih dari perusahaan termasuk PT BISI International oleh PT Pertani maupun PT Sang Hyang Seri yang notabene perusahaan milik pemerintah kemudian menjual kembali kepada petani. Padahal menurut Winarno Tohir (Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan) tujuan petani untuk bertani (menanam padi) bukan untuk surplus melainkan untuk kesejahteraan (AgroFarm,

2012:38). Namun bagi perusahaan-perusahaan bidang pangan termasuk PT BISI International subsidi merupakan sumber pendapatan.

Tabel 5.7 Pendapatan PT BISI International dari Pembelian oleh Pemerintah

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
PT Sang Hyang Seri (juta rupiah)	88.000	171.600	254.539	239.636	146.343
PT Pertani (juta rupiah)	0	257.300	0	0	0
Total (juta rupiah)	88.000	428.900	254.539	239.636	146.343
Total Penjualan Bersih (juta rupiah)	889.588	1.627.821	782.125	894.865	998.656
Persentase (%)	10%	26%	33%	27%	15%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT BISI International

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa pendapatan PT BISI International dari pembelian oleh pemerintah rata-rata dalam lima tahun (2007-2011) mencapai 22% dari total keseluruhan penjualan bersih. Pada dasarnya tujuan lain dari pemberian subsidi benih dalam upaya untuk meningkatkan swasembada pangan adalah untuk mendorong penggunaan benih bermutu dan berlabel lebih luas lagi ditingkat petani, pemerintah memberikan subsidi benih kepada petani yang merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian. Kebijakan ini telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1986, pemerintah telah memberlakukan kebijakan subsidi untuk benih padi, jagung, dan kedelai (Kariyasa, 2007:305). Kebijakan tersebut pada tahun ini (2007) terus dilanjutkan, dan bahkan besaran jumlah anggaran subsidi benih yang disediakan pemerintah cukup besar, yaitu sebesar Rp 1,0 Triliun (Fokus, 2007;Kariyasa, 2007:305), sedangkan pada tahun 2006 hanya sebesar Rp 80,3 milyar. Pada tahun 2006, besaran subsidi benih yang diberikan lewat produsen benih sebesar Rp 500/kg untuk benih padi dan Rp 1.000/kg untuk benih kedelai.

Sementara untuk benih jagung hibrida dan komposit masing-masing Rp 4.750/kg dan Rp 1.000/kg.

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pada RAPBN 2012 juga disiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 41,9 triliun. Pemerintah pun menggulirkan program surplus beras 10 juta ton dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Sedangkan bentuk perhatian kepada para petani, diwujudkan melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp 675 miliar atau setara 192,8 ribu ton. Disediakan pula bantuan langsung bibit unggul sebesar Rp1,8 triliun, atau setara 185 ribu ton benih tanaman pangan (<http://www.radarbangka.co.id>).

Selama ini banyak orang yang berpendapat kebijakan pembangunan sektor pertanian dinilai salah arah dan tidak efektif. Selain alokasi anggaran yang relatif minim, hanya sekitar 2 persen APBN 2011, dibandingkan dengan jumlah petani sebanyak 60 persen total populasi, program pertanian juga hanya mengandalkan subsidi pupuk dan bibit. Salah satu orang yang berpendapat seperti itu adalah M. Husein Sawit, Sawit mengatakan bahwa masalah utama pertanian Indonesia adalah minimnya infrastruktur dan kualitas hasil panen yang rendah. Pemerintah selalu menganggap dengan subsidi masalah sektor pertanian selesai. Padahal, subsidi itu seperti memberi obat pereda nyeri, sementara saja (<http://partaimerdeka.or.id>). Kebijakan subsidi memang salah arah karena selama ini justru dinikmati pengusaha. Misalnya dalam hal subsidi gas yang, industri pupuk membeli gas dengan harga pasar dan selisihnya ditanggung pemerintah. Tetapi di lapangan, petani tetap membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Hal ini, lanjut dia, diperparah dengan kuatnya pengaruh asing dan perusahaan multinasional di bidang pertanian

dan pangan di Indonesia. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi meluas dari hulu ke hilir seperti sarana produksi pertanian meliputi benih dan obat-obatan, hingga industri pengolahan, angkutan sampai retail.

Masalah lain yang timbul dari subsidi benih oleh pemerintah adalah kualitas benih yang diberikan kepada masyarakat merupakan benih dengan kualitas yang buruk. Selain itu tidak semua petani mendapatkan benih bersubsidi tersebut secara gratis, mereka harus membeli benih tersebut dengan kisaran harga Rp 10.000,-. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Muji:

Riyen niku nateh angsal bantuan benih saking pemerintah, tapi bantuan niku boten gratis. Benih niku dipun tumbas dengan harga sedasa ewu per wadah. Tapi nggih ngoten kualitas benih niku awon, lha pas kula tingali ternyata benih niku sampun kadaluarsa.

(Dulu pernah mendapatkan bantuan benih dari pemerintah, tetapi bantuan tersebut tidak gratis. Benih tersebut saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah setiap bungkusnya. Tetapi ya begitu kualitas benihnya itu jelek, terus setelah saya lihat bungkusnya ternyata benih tersebut sudah kadaluarsa).

Dari penuturan Pak Muji tersebut seakan menegaskan bahwa sampai saat ini pun petani hanya dijadikan sapi perahan bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Penuturan tersebut juga mengindikasikan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa kemungkinan penyimpangan yang terjadi, yang *pertama* kualitas benih dari produsen pertama memang kualitas yang jelek atau kualitas dibawah standar perusahaan produsen. Perusahaan tersebut bisa saja merupakan perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN. Kemungkinan *kedua*, penyimpangan dilakukan oleh perusahaan yang membeli benih tersebut dalam hal ini adalah PT Pertani atau PT Sang Hyang Seri yang notabene merupakan perusahaan BUMN.

Buruknya kualitas benih yang dijual kepada petani menunjukkan adanya ketidaksetimbangan posisi antara produsen dan konsumen. Nilai kesetimbangan ini menurut Muhammad dan Fauroni (2002, 104) sangat penting dalam dunia bisnis, karena dalam nilai kesetimbangan ini produsen dalam mendayagunakan dan mengembangkan harta bendanya melalui produk-produknya harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan yang tidak menyebabkan kebinasaan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut seperti yang tercantum di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 195:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Sehingga penjualan produk dengan kualitas yang buruk kepada petani seharusnya tidak boleh terjadi, karena selain tidak mencerminkan nilai kesetimbangan hal tersebut juga termasuk kategori penipuan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Di dalam agama penipuan seperti itu disebut dengan *tadlis* (Muhammad dan Farouni, 2002:158) yaitu penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam konteks pemaparan Al Qur'an perilaku penipuan dalam bisnis terjadi dari akar persoalan mengurangi timbangan/takaran (QS. Ar Rahman:9) yang kemudian berkembang dengan menggunakan instrumen-instrumen lain dalam melakukan penipuan. Selain itu jual beli seperti itu juga jauh dari keberkahan Allah, seperti hadis yang diriwayatkan Hakim bin Nizam ra:

Dari Nabi SAW, beliau bersabda: Penjual dan Pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapatkan

berkah dari jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka (Shahih Muslim No.2825).

5.6 Refleksi

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu, bahwa eksploitasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kaum kapitalis untuk meningkatkan laba mereka. Pihak korporasi (perusahaan) cenderung mengeksploitasi petani melalui kontrak kerjasama serta penjualan produk yang notabene telah dimodifikasi oleh perusahaan agar petani menjadi tergantung pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Melalui kontrak kerjasama tersebut pihak manajemen dapat meminimalisasi biaya produksi (*production cost*). Dengan melakukan kontrak kerjasama, mereka bisa menghemat biaya investasi, karena mereka tidak perlu membeli atau menyewa lahan untuk media penanaman benih induk mereka. Dengan melakukan kontrak kerjasama, mereka juga bisa menghemat biaya tenaga kerja, karena mereka tidak perlu merekrut karyawan baru untuk memproduksi benih komersial yang akan mereka jual. Selain itu dengan melakukan kontrak kerjasama dengan petani mereka juga tidak perlu memikirkan biaya variabel lainnya dalam proses penanaman seperti, biaya pemupukan dan biaya pengairan. Mereka juga tidak perlu membayar gaji kepada petani ketika terjadi gagal panen.

Eksploitasi tersebut akan menjadi semakin parah tatkala pola pikir petani digiring ke arah pola pikir rasional melalui konsep *net farm income*. Untuk mendapatkan NFI yang tinggi, maka petani harus memperbesar total (atau *gross*) output dan memperkecil biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut pada akhirnya akan mengarahkan petani untuk menggunakan produk pertanian yang dihasilkan oleh perusahaan, karena selama ini ada anggapan yang secara empiris juga telah dapat

dibuktikan bahwa benih, pupuk kimia dan pestisida yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkatkan hasil panen petani. Namun, peningkatan tersebut harus dibayar mahal oleh lingkungan, karena untuk mencapai peningkatan tersebut keseimbangan ekosistem dipertaruhkan yang pada akhirnya kerusakan terhadap diri mereka (lingkungan) tidak dapat dihindari lagi. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan nilai NFI tersebut secara eksplisit petani cenderung akan mengeksploitasi lingkungan dan secara implisit perusahaan juga telah melakukan eksploitasi terhadap lingkungan melalui produk pertanian yang dijual kepada petani. Dari penjelasan tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa rasionalisasi pertanian pada akhirnya hanya akan menguntungkan perusahaan, karena melalui rasionalisasi tersebut perusahaan telah menciptakan masyarakat konsumen di bidang pertanian, terutama untuk memasarkan produk yang dihasilkannya.

Bentuk eksploitasi lain yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menguasai benih serta melakukan kerjasama dengan pemerintah. Dengan menguasai benih perusahaan dapat “mengamankan” petani dari penggunaan dan pengembangan benih lain diluar benih yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah berarti perusahaan juga telah “mengamankan” konsumen setia mereka yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan mereka. Berbagai bentuk eksploitasi tersebut memperlihatkan betapa petani kecil harus dihadapkan dengan sebuah perusahaan besar ketika ingin menjadi petani yang mandiri. Sedangkan pemerintah yang seharusnya membela kepentingan masyarakat luas tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemerintah khawatir hal tersebut akan

mempengaruhi investasi bidang pangan dan ketersediaan pangan di Indonesia dikarenakan pengimplementasian *trickle down effect* (tetesan menurun) dalam usaha mensejahterakan rakyatnya.



BAB VI

NEOLIBERALISME: HEGEMONI KORPORASI UNTUK MENGUASAI DUNIA

“Control oil and you control the nations, Control food and you control the people” (Henry Kissinger).

6.1 Pendahuluan

Pernyataan Henry Kissinger tersebut nampaknya telah mendekati kenyataan, bahkan jika kita melihat secara ekstrim pernyataan tersebut sudah terjadi. Saat ini negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan multinasional tidak hanya menguasai minyak namun sekarang sudah mulai menguasai industri pangan. Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 495 juta Are, setara 200,32 juta hektare (Ha) lahan di dunia dijual atau disewakan lintas negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menjadi incaran negara-negara berkembang dan kaya. Hal tersebut, terungkap dalam laporan *"Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South"* yang dikeluarkan oleh The Land Matrix Partnership (Anseeuw, W. et al, 2012).

Melalui doktrin liberalisme baru (neoliberalisme) dan lembaga-lembaga pendukungnya mereka berusaha “menjajah” negara-negara miskin dan berkembang. Neoliberalisme dimotori oleh ekonom asal Chicago, Milton Friedman dan ekonom asal Inggris kelahiran Austria, Friedrich A. Hayek. Keduanya memenangkan hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1976 dan 1974 (Sumodiningrat, 2009:34). Gagasan neoliberalisme tersebut menemukan momentumnya saat pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat pada era 1980-an. Di era tersebut lanjut Sumodiningrat, liberalisme klasik menemukan peranannya yang baru

yang lebih radikal. Dalam sistem ini, negara tidak lagi memberikan kompensasi apapun alasannya. Sebab menurut mereka mentalitas *welfare state* justru hanya melahirkan kelambanan dan ketergantungan. Neoliberalisme juga meyakini teori *trickle down effect*, yakni perembesan pendapatan bagi kalangan menengah ke bawah akibat pertumbuhan yang didorong melalui mekanisme pasar bebas. Pertanian yang notabene merupakan ekonomi basis juga tidak luput dari serangan neoliberalisme yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai perubahan didalam diri dan lingkungan masyarakat pertanian.

Menurut Sumodiningrat (2009:35) setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi dan mengiringi kemunculan neoliberalisme. *Yang pertama*, munculnya *multinational corporation* dengan aset lebih besar daripada kekayaan negara-negara kecil di dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut mampu menembus batas teritori negara-negara sekaligus memanfaatkan infrastruktur negara tersebut. *Kedua*, munculnya rezim-rezim internasional sebagai *surveillance system* (WTO, *World Bank*, dan IMF) untuk menjamin negara-negara patuh dan tunduk pada hukum pasar bebas. *Ketiga*, revolusi teknologi informasi dan transportasi yang dahsyat. Akibatnya terjadi arus informasi, modal, dan sumber daya manusia yang sedemikian cepat dan melampaui batas-batas teritorial negara. Dengan kondisi seperti itu mekanisme *free fight liberalisme* menemukan momentumnya. Mereka yang lemah semakin menjadi pijakan kaki mereka yang kuat.

Dan faktor yang *keempat* yang mempengaruhi dan mengiringi kemunculan neoliberalisme adalah munculnya negara-negara maju (kuat) yang menggunakan berbagai faktor terdahulu (MNC, rezim keuangan dan perdagangan, serta teknologi

informasi dan komunikasi) sebagai alat untuk menaklukkan dan menguasai negara-negara miskin dan berkembang. Salah satu instrumen yang sering digunakan negara-negara maju untuk menekan negara-negara miskin dan berkembang adalah instrumen utang luar negeri dan perdagangan bebas, penerapan *non-tariff barrier* sebagai proteksi negara maju terhadap produk-produk negara berkembang dimana salah satunya adalah penerapan standar mutu yang tinggi, serta melalui pengakuan hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Sedangkan menurut Pontoh (2005:67), neoliberalisme adalah:

Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah hanya menjalankan fungsi deregulasi bagi mekanisme pasar dan hanya untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan.

Kata *Neo* dalam neoliberalisme sebenarnya merujuk kepada bangkitnya kembali bentuk aliran ekonomi liberalisme lama yang cikal bakalnya dipicu oleh karya Adam Smith yang monumental, *The Wealth of Nations*. Adam Smith yang juga dianggap sebagai bapak mazhab ekonomi klasik atau yang lebih populer disebut dengan perumus kapitalisme modern, mempropagandakan pentingnya penghapusan intervensi negara atau pemerintah dalam mekanisme ekonomi. Smith menggunakan teorinya tentang “tangan-tangan tersembunyi” (*invisible hand*) yang menurutnya bakal mengatur dan mengorganisir seluruh relasi dan kehidupan ekonomi dan juga mendorong setiap individu untuk mencari sebanyak-banyaknya keuntungan ekonomi (Khudori, 2004:16).

Neoliberalisme pada akhirnya akan menciptakan individu-individu yang hanya berfikir untuk memaksimalkan keuntungan. Mereka beranggapan bahwa jika dorongan untuk mencari keuntungan individual adalah kapasitas yang alamiah, maka tidak boleh ada intervensi pemerintah atau monopoli negara karena hal itu hanya akan mengganggu kebebasan individu dalam kompetisi. Dari gagasan tersebut lahirlah konsep pasar bebas (*free market*), seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa konsep lain dari neoliberalisme adalah *comparative advantage* (keunggulan komparatif). Dimana menurut konsep tersebut setiap bangsa harus memaksimalkan kekayaannya bukan karena surplus perdagangan, melainkan mengambil keuntungan dari pembagian kerja (*division of labour*) internasional berdasarkan perdagangan bebas. Smith berpendapat bahwa bila sebuah negara asing dapat mensuplai kita dengan komoditi yang lebih murah dibanding yang kita buat sendiri, maka lebih baik kita membelinya dari mereka, dari sebagian hasil industri kita sendiri yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari yang lain, hal tersebut yang disebut sebagai hukum *comparative advantage* yang hingga saat ini masih banyak dipraktikkan di negara-negara di belahan dunia.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa melalui institusi Bretton Woods (IMF, World Bank, WTO), negara-negara maju dan golongan globalis neoliberal melakukan diseminasi dan “pemaksaan” kehendak atas kebijakan ekonomi di negara-negara selatan. Neoliberalisme dan globalisasi saat ini juga sudah masuk ke dalam ranah akuntansi. Dengan berbagai standard yang telah dibuat oleh para pemangku kepentingan dan melalui harmonisasi akuntansi, negara-negara di dunia akan digiring untuk memakai standard tunggal akuntansi. Tujuan dari itu

semua adalah untuk melegalkan pendapatan dan laba yang mereka peroleh, serta untuk menguasai aset yang ada di wilayah dimana mereka mengoperasikan kegiatan produksi mereka. Di bidang pertanian, penggunaan akuntansi selain konsep NFI adalah penggunaan *fair value* dan akrual basis.

Berdasarkan penjelasan di atas pada bab ini penulis akan membahas tentang pengaruh neoliberalisasi terhadap pemenuhan pangan, pembangunan ekonomi dan usaha tani di Indonesia, terutama terhadap kesejahteraan petani serta peningkatan laba korporasi melalui dominasi dibidang pertanian. Pembahasan mengenai pengaruh neoliberalisasi terhadap usaha tani di Indonesia dijabarkan melalui beberapa sub bab di bawah yang dikategorikan menjadi Politik Ekonomi Pangan dan Globalisasi: Proses Penyerahan “kekuasaan” oleh Negara kepada Korporasi; Bretton Woods Institutions (BWIs): Jalan Kesengsaraan bagi para Petani; PT BISI International dan Perusahaan Pertanian lainnya: VOC di Jaman Modern; dan Harga Pasar dalam *Fair Value*: Legalisasi Perampokan oleh Korporasi.

6.2 Politik Ekonomi Pangan dan Globalisasi: Proses Penyerahan “kekuasaan” oleh Negara kepada Korporasi

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Bahkan dalam perjalanan sejarah, pangan merupakan aspek penting bagi sebuah pasukan, masyarakat, maupun negara dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Sultan Agung dalam perlawanannya melawan VOC mengalami kegagalan karena gudang

pangannya dibakar oleh tentara VOC. Kisah lain yang tidak kalah miris yaitu kisah sedih pengikut Nabi Muhammad SAW yang memakan kulit kambing kering akibat pemboikotan oleh kaum Qurois. Masyarakat di Somalia, Ethiopia dan Kenya banyak yang meregang nyawa juga karena 20% penduduknya malnutrisi dan kekurangan pangan. Cerita-cerita tersebut dapat menjadi gambaran betapa amat berbahanya jika manusia tidak tercukupi kebutuhan pangannya.

Bagi sebuah bangsa, pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, sehingga diperlukan ketahanan pangan yang cukup kuat bagi suatu negara untuk tetap dapat bertahan dan mencapai tujuan negara. Salah satu kebijakan pangan di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, disamping peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pangan. Dalam undang-undang tersebut, ideologi ketahanan pangan tersirat hampir di seluruh isi undang-undang. Sedangkan hal yang sering disinggung dalam undang-undang tersebut adalah aspek pemenuhan dan kecukupan bahan pangan bagi masyarakat.

Menurut UU No. 7 Tahun 1996 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara-negara berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan

membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: *food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster* (Syarief et al, 1999).

Sedangkan ketahanan pangan menurut UU Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Beberapa ahli juga sepakat bahwa konsep ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesabilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut (Arifin, 2001:15). Ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Penyediaan pangan tersebut, lanjut Arifin (2001:16) dapat ditempuh melalui produksi sendiri atau melalui impor. Produksi sendiri dilakukan dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumberdaya manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal. Sedangkan impor dari negara lain dilakukan dengan cara menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor dan subsektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri. Namun sayangnya, sampai saat ini di Indonesia penyediaan pangan masih tergantung pada impor. UU No. 7 Tahun 1996 juga cenderung menitik beratkan pemenuhan dan kecukupan pangan masyarakat Indonesia dan tidak mempermasalahkan bagaimana bahan pangan itu didapat dan

dengan cara apa, termasuk ketergantungan pada impor pangan. Jika hal ini terus terjadi tidak menutup kemungkinan Indonesia akan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada produk-produk pangan impor. Keadaan tersebut juga diperparah dengan bea masuk produk pangan di Indonesia yang masih sangat rendah.

Tabel 6.1 Daftar sepuluh negara Importir Pangan Dunia

Peringkat	Negara	Impor (ribu ton)
1	Mesir	11.001,0
2	China	10.432,0
3	Indonesia	5.741,4
4	Irak	5.430,0
5	Nigeria	4.970,0
6	Philipina	4.726,0
7	Maroko	4.507,0
8	Bangladesh	3.250,0
9	Yaman	2.720,0
10	Syria	2.265,0

Sumber: FAO (2006), *Crop Prospect and Food Situation*

Seharusnya impor pangan yang cukup besar oleh Indonesia tidak terjadi, karena bagi suatu negara ketahanan pangan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia yang bermutu secara teknikal-intelektual dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus, selain itu sumber daya di Indonesia juga melimpah (sumber daya manusia dan alam). Sehingga negara harus mampu dan mau mewujudkan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan. Jika kita melihat tabel 6.1, ketahanan pangan Indonesia masih tergantung pada negara lain bahkan pada tahun 2006 Indonesia menempati urutan ketiga negara pengimpor pangan dunia. Indonesia harus merepormir *mindset* ketahanan pangan agar pembangunan pangan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Ketahanan pangan Indonesia haruslah ketahanan pangan mandiri yang menempatkan masyarakat petani sebagai subyek ketahanan pangan dengan tidak mengabaikan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan akan terancam serta negara akan mengalami ketergantungan pangan kepada asing yang pada akhirnya negara akan dapat dengan mudah dikontrol oleh kekuatan asing (negara atau korporasi asing) dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan laba mereka.

Seperti negara-negara lain di dunia, di Indonesia saat ini kebutuhan akan pangan juga sangat mendesak dikarenakan jumlah penduduk yang selalu meningkat tidak diimbangi dengan produksi tanaman pangan. Thomas Robert Malthus dalam teori kependudukannya mengatakan bahwa penduduk cenderung meningkat secara deret ukur sedangkan penyediaan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara deret hitung. Hal ini kemudian menciptakan suatu kegoncangan dan kepincangan antara jumlah penduduk dan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti bahan pangan (www.setneg.go.id). Perubahan yang tidak sebanding ini memberikan berbagai permasalahan kompleks yang memaksa otoritas kebijakan memaksimalkan strategi dalam menghadapinya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan impor benih tanaman pangan sampai dengan bahan pangan serta menggantungkan perbenihan nasional kepada perusahaan multinasional bidang pangan. Bahkan benih-benih impor yang didatangkan ke Indonesia tidak hanya didatangkan dan/atau dibuat

oleh perusahaan-perusahaan agrikultur modern dari Eropa atau Amerika yang ada di Indonesia. China yang selama ini dikenal sebagai rival Amerika juga berupaya mencengkeramkan cakar ekonominya dalam bidang pangan di Indonesia. Sekitar tahun 2002, melalui PT Bangun Persada, Long Ping Hi-Tech, sebuah perusahaan agrikultur modern di Provinsi Hunan yang sahamnya ikut diperdagangkan di sebuah bursa di China melakukan ekspor benih padi hibrida ke Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan pengembangan benih hibrida, mulai dari jagung hingga padi, dari melon hingga kapas. Seperti yang dijelaskan pada bab IV, seperti halnya PT Bangun Persada, untuk beberapa produk PT BISI International juga masih mengimpor dari luar negeri (diantaranya adalah Thailand dan China).

Sebagai negara yang menjalin hubungan internasional hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan negara dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pangan juga sudah menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia dan negara lain. Karena pada dasarnya politik luar negeri merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Perwira dan Yani, 2005:35). Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Untuk memenuhi hal tersebut salah satu yang dilakukan adalah melakukan perdagangan internasional dan investasi.

Perdagangan ke luar negeri atau ekspor-impor dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam teori klasik maupun neo-klasik yang berkaitan dengan pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Dengan meningkatnya perdagangan, diharapkan dapat menambah pemasukan devisa negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi, mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan (Dewi, 2007). Hal tersebut merupakan representasi dari teori klasik yaitu prinsip keunggulan komparatif ala Adam Smith, yang menegaskan bahwa suatu negara harus memproduksi dan mengekspor jenis-jenis barang yang biaya relatifnya rendah. Indonesia melakukan perdagangan dengan negara lain atas dasar teori tersebut, agar lebih terspesialisasi dalam produk tertentu sebagai keunggulan absolut.

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia melakukan perdagangan karena menganggap teori perdagangan neo-klasik sebagai sesuatu yang signifikan dalam beberapa hal (Todaro dan Michael P, 2000 dalam Dewi, 2007). Yang *Pertama*, perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Perdagangan akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor, yang mana jika tidak tersedia, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. *Kedua*, perdagangan juga cenderung mempromosikan pemerataan atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan domestik internasional. Hal ini berlangsung melalui suatu proses penyamaan harga-harga faktor produksi di semua negara, peningkatan pendapatan riil setiap negara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perdagangan internasional, serta memacu efisiensi pemanfaatan sumber daya dunia secara keseluruhan (misalnya, dengan meningkatkan upah relatif di negara-negara yang

kaya akan tenaga kerja dan menurunkan upah di negara-negara yang kurang tenaga kerja).

Ketiga, perdagangan dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta pengutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisiensi alias produktivitas di setiap negara. *Keempat*, jika perdagangan dunia yang bebas benar-benar tercipta, maka harga dan biaya-biaya produksi internasional akan mampu berfungsi sebagai determinan pokok mengenai seberapa banyak sebuah negara harus berdagang dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mencoba-coba mengganggu beroperasinya mekanisme pasar bebas. *Kelima*, untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pada umumnya, setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan berorientasi ke lingkungan internasional. Dalam semua kemandirian yang didasarkan pada isolasi, baik yang penuh maupun hanya sebagian, tetap saja secara ekonomi akan lebih rendah nilainya daripada partisipasi kedalam perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apapun.

Tabel 6.2 Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia

Subsektor	(US\$ 000)				
	2005	2006	2007	2008	2009*
Tanaman Pangan	-1.828.396	-2.304.299	-2.440.098	-3.178.047	-1.798.179
Hortikultura	-139.451	-289.352	-541.081	-476.942	-558.361
Perkebunan	9.140.665	12.296.997	16.588.468	22.830.613	11.918.345
Peternakan	-725.306	-801.457	-947.928	-1.204.049	-1.022.479
Pertanian	6.447.513	8.901.889	12.659.361	17.971.575	8.539.327

Keterangan: * angka kumulatif s/d September 2009

Sumber: BPS diolah Pusdatin Deptan

Naasnya, anggapan mengenai teori perdagangan neo-klasik seperti yang telah dijelaskan di atas malah menggiring Indonesia ke dalam jebakan pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari neraca perdagangan pertanian Indonesia. Dalam neraca perdagangan tersebut terlihat nilai perdagangan subsektor perkebunan selalu bernilai positif bahkan nilainya cukup besar sampai-sampai dapat menutupi nilai perdagangan negatif dari subsektor lainnya. Nilai perdagangan subsektor perkebunan Indonesia yang cukup besar tersebut tidak lepas dari peningkatan kebutuhan bahan bakar alternatif dunia serta upaya pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar alternatif (*biofuel*) tersebut yang merupakan reaksi atas terjadinya krisis energi (kenaikan harga minyak dunia). Terjadinya krisis energi dunia pada akhirnya membuat investor dan pemerintah lebih fokus pada pembangunan bidang perkebunan sebagai langkah konkrit dari pengembangan *biofuel* tersebut. Seperti yang telah kita ketahui pada tahun 2008 dunia mengalami krisis energi, pada tahun tersebut harga minyak mencapai harga tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Bahkan pada bulan Juli 2008 harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) menembus angka 147 dollar AS per barrel.

Dari tabel 6.2 di atas kita dapat melihat adanya kenaikan nilai impor tanaman pangan hampir setiap tahun. Pada tahun 2007 nilai impor pangan Indonesia meningkat sebesar \$135.799.000, sedangkan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 kenaikan nilai impor pangan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar \$737.950.000 atau meningkat sekitar 30,24% dari tahun sebelumnya. Namun hal yang sebaliknya justru terjadi pada subsektor perkebunan, subsektor

perkebunan justru mengalami kenaikan nilai ekspor setiap tahunnya (dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009). Pada tahun 2007 terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar \$4.291.471.000, kenaikan nilai ekspor tertinggi untuk subsektor perkebunan terjadi pada tahun 2008. Pada tahun 2008 nilai ekspor subsektor perkebunan mencapai \$6.242.145.000, dari nilai ekspor tahun sebelumnya sebesar \$16.588.468.000 menjadi \$22.830.613.000, sehingga pada tahun 2008 nilai ekspor subsektor perkebunan mengalami kenaikan sebesar 37,63%. Seperti yang kita ketahui bersama selama periode tahun 2007 sampai dengan pertengahan 2008, harga pangan meningkat tajam. Pada kuartal kedua tahun 2008, harga internasional gandum dan jagung mencapai puncak tertinggi, yaitu tiga kali lebih tinggi dari harga tahun 2003, dan lima kali lebih tinggi untuk beras.

Jika kita melihat data dan analisis yang telah diuraikan di atas, dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa keinginan pemerintah untuk swasembada pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri saja, tetapi lebih dari itu pemerintah ingin menjadikan pertanian sebagai salah satu komoditas utama dalam perdagangannya untuk menutup defisit neraca perdagangan subsektor pangan dan untuk meningkatkan devisa negara dari sektor pertanian. Jika dilihat dari neraca perdagangan pertanian pada tabel 6.2 nilai perdagangan pertanian Indonesia selalu bernilai positif. Namun jika kita melihat secara spesifik, nilai tersebut sebagian besar diperoleh dari subsektor perkebunan, sedangkan nilai perdagangan untuk subsektor tanaman pangan justru bernilai negatif. Hal tersebut berarti subsektor perkebunan merupakan subsektor yang mempunyai keunggulan absolut bagi Indonesia dibandingkan dengan subsektor tanaman pangan, hal tersebut juga

berarti walaupun pendapatan Indonesia dari perdagangan pertanian dapat menambah devisa negara namun kebutuhan akan pangan Indonesia masih tergantung pada negara lain.

Hal lain yang dapat diperoleh oleh pemerintah dari nilai ekspor yang sangat tinggi dari subsektor perkebunan adalah meningkatnya Produk Domestik Bruto Indonesia yang pada akhirnya oleh sebagian besar kelompok akan dianggap sebagai kemajuan ekonomi. Namun info tersebut tidak mempunyai arti dan bahkan akan menyesatkan jika dikaitkan dengan “pendapatan sebenarnya” (*real income*) yang diperoleh oleh negara, dikarenakan sebagian besar perkebunan yang ada di Indonesia dimiliki oleh pihak swasta. Sebagai contoh adalah perkebunan kelapa sawit, Creative Data for Make Investigation (CDMI) dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah area perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Total luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2005 mencapai 5.453,8 ribu hektar meningkat ditahun 2006 menjadi 6.594,9 ribu hektar, satu tahun kemudian menjadi 6.766,8 ribu hektar. Pada tahun 2008 luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 7.363,8 ribu hektar, meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi seluas 7.508,0 ribu hektar. Area perkebunan tersebut terdiri atas perkebunan petani seluas 3.314,6 ribu hektar, perkebunan pemerintah/BUMN seluas 616,5 ribu hektar, sedangkan perkebunan swasta asing maupun swasta nasional seluas 3.893,3 ribu hektar. Sejalan dengan meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit, jumlah produksi kelapa sawit pada akhirnya juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 produksi kelapa sawit seluruhnya sebesar 11.861,6 ribu ton, pada tahun 2006 meningkat menjadi 17.350,8 ribu ton.

Tabel 6.3 Jumlah Produksi Kelapa Sawit Tahun 2005-2010

Tahun (ton)	Rakyat/Public (ton)	BUMN (ton)	Swasta (ton)	Total (ton)
2005	4.500.679	1.449.254	5.911.592	11.861.615
2006	5.783.088	2.313.719	9.254.031	17.350.848
2007	6.358.389	2.117.035	9.189.301	17.664.725
2008	6.923.042	1.938.134	8.678.612	17.539.788
2009	7.247.979	1.961.813	9.431.089	18.640.881
2010*	7.774.036	2.089.908	9.980.957	19.844.901

Sumber : Kementerian Pertanian diolah oleh CDMI

Keterangan : *Prediksi

Selain itu, berdasarkan uraian tersebut kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa saat ini pembangunan perekonomian kita cenderung dikemudikan oleh keinginan korporasi. Dengan nilai aset yang fantastis dan teknologi yang canggih para investor menawarkan sebuah alternatif pilihan sumber pendanaan pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya bidang pertanian atau pangan salah satu diantaranya adalah PT BISI International. Mungkin untuk saat ini kita merasa diuntungkan, namun jika kita melihat lebih dalam sebenarnya korporasi-korporasi tersebut yang paling diuntungkan.

Tabel 6.4 Nilai Aset PT BISI International

Keterangan	**2003	*2004	*2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Aktiva (Juta Rupiah)	207.806	262.618	343.943	534.262	892.227	1.662.977	1.412.075	1.363.277
Jumlah Kewajiban (Juta Rupiah)	109.224	124.332	149.633	268.873	298.490	687.049	347.211	148.113
Jumlah Ekuitas (Juta Rupiah)	75.805	109.037	156.011	217.513	544.022	941.013	1.016.793	1.160.282

Keterangan : * Disajikan kembali

** Penggabungan laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit

Sumber : Laporan Keuangan PT BISI International

Dengan modal dan teknologi yang dimiliki, korporasi dapat dengan seandainya menentukan sektor ekonomi yang ingin mereka “beli”. Dan dengan jiwa besar pemerintah harus menerima kenyataan tersebut dikarenakan sumber pendanaan pemerintah dari dalam negeri masih sangat minim. Bahkan lebih

parahnya lagi pemerintah tidak menjadi pelayan rakyat, namun malah menjadi pelayan korporasi. Hal tersebut dapat dilihat dari fokus pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. Untuk menarik investor pemerintah mendahulukan pembangunan infrastruktur yang mempermudah mobilisasi produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi daripada membangun infrastruktur di pedesaan yang notabene merupakan prasarana utama produksi dan distribusi masyarakat pertanian. Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menarik investor agar berinvestasi di Indonesia serta sebagai bagian dari pengimplementasian teori *trickle down effect*. Namun faktanya, porsi pajak yang dibayarkan oleh korporasi kepada negara kurang dari 20% atas total laba kotor yang didapatkan oleh korporasi.

Tabel 6.5 Pajak Penghasilan Bersih PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Laba Kotor (Juta Rupiah)	399.281	829.145	341.585	367.318	416.060
Beban Pajak (Juta Rupiah)	68.822	148.554	38.909	26.139	43.014
Beban Pajak atas Laba Kotor	17,25%	17,92%	11,39%	7,12%	10,34%

Sumber: Laporan Keuangan PT BISI International

Berbagai permasalahan perekonomian di dunia, termasuk berbagai krisis pembangunan pertanian yang terjadi saat ini sebenarnya tidak lepas dari golongan kapitalis. Sejarah mencatat, melalui berbagai macam dominasi dan eksploitasi manusia terhadap manusia lain serta alam golongan kapitalis tersebut berusaha meningkatkan kapital mereka. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Subiyantoro dan Triyuwono (2004,145) yang menyatakan bahwa nilai lebih tidak dihasilkan oleh kapitalis, tetapi dicapai melalui eksploitasi pekerja-pekerjanya. Para kapitalis akan menggunakan sebagian surplus tersebut untuk konsumsi pribadi dan sebagian lagi untuk mencapai lebih banyak tenaga dan mesin-mesin. Hal tersebut dilakukan

karena mengharapkan agar mencapai hasil lebih banyak dibandingkan dengan uang yang dikeluarkannya. Pada akhirnya, hal tersebut menyebabkan timbulnya akumulasi modal secara terus menerus, dan di situlah kunci perangsang dari perkembangan kapitalis (Winardi, 1986 dalam Subiyantoro dan Triyuwono, 2004:145).

Sedangkan proses sejarah dari dominasi itu pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga periode formasi sosial yaitu, kolonialisme, neokolonialisme (era *developmentalism*) dan globalisasi (Fakih, 2004). Pada fase kapitalisme, berbagai negara di Eropa melakukan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Melalui fase kolonialisme inilah proses dominasi manusia dengan segenap teori perubahan sosial yang mendukungnya telah terjadi dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. Di Indonesia sendiri, kolonialisme terjadi selama kurang lebih tiga ratus lima puluh tahun.

Ketika era kolonialisme berakhir lanjut Fakih (2004), dunia masuk ke dalam era kolonialisme baru (neo kolonialisme/*develomentalism*). Pada era ini, dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial, dominasi dan eksploitasi terhadap negara-negara dunia ketiga tetap dilanggengkan oleh negara-negara utara. Dan pada akhir abad ke XX pertumbuhan dan akumulasi kapital dari golongan kapitalis melambat dikarenakan adanya proteksi, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat, dan sebagainya. Sehingga golongan kapitalisme membuat strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital mereka yaitu,

menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan *civil society* dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan suatu tatanan perdagangan global maka, sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan.

Namun menurut Steger (2005:17) berbagai klaim keuntungan universal yang ditawarkan dari liberalisasi pasar, yang meliputi peningkatan standar hidup global, efisiensi ekonomi, kebebasan individu dan demokrasi, serta kemajuan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya merupakan sebuah upaya penyemaian pemikiran yang tidak kritis tentang globalisasi ke alam pikiran masyarakat oleh golongan globalis neoliberal. Globalisasi juga telah melahirkan "*the winner-take-all society*" (adigang, adigung), *disempowerment*, dan *impoverishment* terhadap si lemah (Swasono, 2003:45). Dalam konteks pertanian Indonesia, *impoverishment* terjadi pada para petani, sedangkan pemenang dari kompetisi tersebut adalah perusahaan-perusahaan bidang pertanian, pangan dan retailer, termasuk PT BISI International. Melalui doktrin perdagangan bebas dan surplus pangan, pemerintah berusaha dengan keras untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dengan teknologi yang canggih perusahaan-perusahaan bidang pertanian seperti PT BISI International menawarkan suatu alternatif baru untuk menghasilkan panen yang cukup banyak. Dan pada akhirnya terjadi penggiringan oleh pemerintah kepada petani untuk memakai benih hasil produksi perusahaan bidang pertanian. Atau dengan kata lain telah terjadi pemindahan kekuasaan bidang pertanian dari pemerintah kepada perusahaan. Lebih parahnya lagi, untuk mencapai target tersebut petani dan alam

dikorbankan (seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab V). Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme.

Negara dan masyarakat yang menganut paham neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Dimana hal tersebut dapat terjadi jika pasar tersebut minim regulasi (pasar bebas). Mereka beranggapan bahwa pasar bebas itu efisiensi, dan itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika setiap negara memperhitungkan efisiensi dalam perekonomian mereka, berarti dalam kegiatan ekonomi negara tersebut harus ada yang dikorbankan untuk mencapai efisiensi tersebut. Dan dari situ akan ada pilihan, negara harus melakukan efisiensi pada sektor produksi yang notabene banyak menyerap tenaga kerja namun tidak memiliki keunggulan absolut atau sektor produksi yang sedikit menyerap tenaga kerja namun memiliki keunggulan absolut.

6.3 *Bretton Woods Institutions* (BWIs): Jalan Kesengsaraan bagi para Petani

Untuk lebih dapat bermain secara aktif dalam perdagangan internasional pemerintah memutuskan untuk bergabung dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dibentuk pada tahun 1948 yang selanjutnya menjadi *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995. Panjaitan dan Supratiwi dalam berita yang dikeluarkan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian menjelaskan bahwa pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia). Sistem perdagangan multilateral

WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, namun tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Berbagai masalah perdagangan yang terjadi diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Perdagangan” (*trade round*), sebagai upaya untuk mendorong liberalisasi perdagangan internasional (<http://www.deptan.go.id>).

Masuknya Indonesia dalam WTO sebenarnya juga menyebabkan permasalahan baru, dikarenakan Indonesia yang notabene juga menjadi anggota G-20 dan tergabung dalam *World Trade Organization* diharuskan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Bentuk konkrit dari keseriusan Indonesia menjadi pendiri sekaligus anggota WTO yaitu ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994. Namun sayangnya WTO yang seharusnya mengatur secara efektif pemberian perlindungan kepada petani kecil dan negara berkembang selama ini justru lebih senang membela negara maju. Berbagai bentuk aturan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh WTO sebenarnya adalah bagian dari liberalisasi perdagangan dunia yang hanya menguntungkan negara-negara maju dan perusahaan multinasional. Secara berat hati negara berkembang seperti Indonesia tentulah harus mengikuti aturan (*rule*) yang telah ditetapkan oleh WTO, meskipun aturan tersebut akan merugikan mereka (negara berkembang).

Salah satu perjanjian yang menguntungkan negara maju maupun perusahaan multinasional adalah persetujuan tentang pertanian atau *Agreement on Agriculture* (AoA) yang merupakan hasil dari putaran Uruguay. AoA ini pada akhirnya akan merubah sistem pertanian di negara-negara berkembang secara radikal. Dikarenakan AoA cenderung menyamakan kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang berbeda antara negara maju dan berkembang, padahal budaya di negara tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penyamaan tersebut pada akhirnya juga akan menghilangkan esensi pertanian sebagai bagian dari budaya dan petani sebagai penjaga ketersediaan pangan nasional, pusat tradisi ekonomi rakyat, kearifan lokal, dan interaksi sosial-spiritual. Lebih jauh lagi penyamaan tersebut pada akhirnya juga akan menyebabkan terjadi perdagangan yang tidak adil (*unfair*) dan tidak seimbang (*imbalance*) dimana negara maju akan menyedot kapital dari negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin termarginalnya petani gurem di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan petani di negara-negara maju menikmati berbagai macam fasilitas dari pemerintahnya, bahkan mereka menggarap lahan yang sangat luas.

Setidaknya ada tiga komponen dasar dalam AoA, yaitu dukungan dalam negeri (*domestic support*), Akses pasar (*market access*), dan persaingan ekspor. Pada kenyataannya ketiga komponen dasar dalam AoA lebih menguntungkan negara maju, hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Dewi (2007). Dewi juga menjelaskan bahwa alasan dibalik penentuan *domestic support* pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 merupakan trik dari negara-negara maju untuk memperlambat pembukaan pasar dalam negeri mereka dari produk-produk pertanian negara

berkembang. Karena periode tahun tersebut merupakan periode ketika proteksi dan subsidi yang diberikan pemerintah negara maju seperti Jepang, AS dan Uni Eropa pada sektor pertanian mencapai angka tertinggi dibanding periode sesudahnya. Hal ini berakibat pada liberalisasi yang dilakukan dengan *domestic support* menjadi tidak berarti. Klausul-klausul *domestic support* ikut menjadi modus kecurangan dengan melakukan manipulasi pemahaman bahwa dengan mengikis subsidi kepada para produsen, petani-petani kecil di dunia ketiga diasumsikan akan lebih kompetitif dan mampu menciptakan harga-harga yang melaporkan ongkos produksi yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya, pasal-pasal dalam *domestic support* hanya mengarah pada sebagian kecil dari pengurangan sejumlah subsidi dibidang pertanian.

Sementara itu, di berbagai subsidi tambahan yang dinikmati oleh korporasi agribisnis dan kepentingan perdagangan global, seperti misalnya subsidi-subsidi bagi investasi, pemasaran pupuk buatan berikut prasarananya, semua masih dibebaskan dari pengurangan subsidi. Bentuk subsidi lain yang dipraktikkan oleh negara-negara maju dengan nilai besar yaitu pembayaran langsung (*direct payment*) yang mendukung pendapatan petani, juga diloloskan dari klausul *domestic support*. Padahal ketentuan tersebut memungkinkan AS misalnya pada bulan Juni 2000 mengumumkan program peningkatan pembayaran langsung sebesar AS \$ 7,1 milyar kepada petani-petani. Dan *direct payment* tersebut selalu bertambah besar (Dewi, 2007).

Sawit (2008) juga menyatakan hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh Dewi (2007). Dalam penelitian yang dilakukannya, Sawit menjelaskan bahwa

bantuan pemerintah terhadap petani di negara OECD dalam bentuk *producer support estimate* untuk beras mencapai 78 persen, jagung 24 persen, kedelai 24 persen, gula 51 persen, daging sapi 33 persen, dan daging unggas sebesar 17 persen. Hal tersebut berarti pendapatan petani beras di negara maju yang berasal dari kegiatan usaha tani mereka sendiri hanya sebesar 22 persen. Berbagai bantuan tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya konsentrasi pangan dan perdagangan terjadi di negara maju.

Dalam *market access*, mekanisme kuncinya adalah membangun perdagangan dengan rezim tarif, pengurangan tarif dan pengikatan besarnya tarif masing-masing produk pertanian. Seluruh negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut harus mengubah pembatasan kuantitatif dan kebijakan non-tarif untuk impor pangan, menjadi tarif bea masuk biasa. Negara-negara sedang berkembang harus mengurangi bea masuk dan berbagai pajak lainnya atas barang-barang impor sebesar 24 persen. Hal ini tentu saja menyebabkan harga barang impor lebih murah dibandingkan produksi sendiri. Sedangkan komitmen subsidi ekspor dimaksudkan untuk mendisiplinkan kebijakan dan tindakan pemerintah yang menyalurkan bantuan terhadap ekspor. Pengurangan subsidi ekspor bertujuan untuk mengurangi distorsi di pasar internasional karena diasumsikan dapat memancing persaingan yang tidak sehat antara negara pemberi subsidi dan negara pengimpor.

Terdapat empat ketentuan yang berlaku dalam subsidi ekspor, yang *pertama* yaitu subsidi ekspor untuk produk spesifik tertentu harus dikurangi sesuai komitmen. *Kedua*, setiap kelebihan pengeluaran pemerintah untuk keperluan itu harus dibatasi sesuai dengan yang telah disepakati. *Ketiga*, subsidi ekspor untuk negara

berkembang dianggap konsisten dengan *Special and Different Treatment* (SDT). Dan yang *keempat*, subsidi ekspor selain dari yang harus dikurangi itu bila dilakukan maka harus diberitahukan terlebih dahulu (Khudori, 2004:76).

Selain AoA aturan lain yang juga cenderung memihak pada negara maju dan perusahaan multinasional adalah TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Salah satu pasal TRIP's yaitu 27.3(b) mensyaratkan pemberian hak paten atas jasad renik dan perlindungan paten atau sistem serupa untuk varietas tanaman. Dan sebagai bentuk kepatuhan pemerintah kepada WTO maupun TRIP's, pada akhirnya Indonesia melakukan pengerdilan terhadap kemampuan masyarakat dalam pembudidayaan benih melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya (Manzilati, 2010:16). Peraturan tersebut mulai dari pemberian paten secara langsung hingga perlindungan melalui Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang pada akhirnya menyeret Pak Tukirin dan beberapa petani lainnya ke ranah hukum.

Pengaturan paten pertama di Indonesia merupakan warisan dari Belanda yang dikenal dengan octroiwet 1910 yang berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat (Djumhana dan Djubaedillah, 2003:110 dalam Adlhiyati, 2010). Hal ini dikarenakan undang-undang ini menentukan bahwa permohonan paten di wilayah Indonesia yang diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta harus diteruskan ke octroiraad di Belanda. Tidak berlakunya undang-undang ini menyebabkan adanya kekosongan hukum, sehingga Menteri Kehakiman mengeluarkan pengumuman tanggal 12 Agustus 1953 No J.S, 5/41/4B.N.55 untuk menampung permohonan paten di dalam negeri, sedangkan permohonan paten luar

negeri ditampung melalui pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No.J.G.1/2/17 B.N.53-91.

Tahun 1984, UU paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan menghasilkan UU No 6 tahun 1989, yang berlaku efektif tahun 1991. Selanjutnya karena keikutsertaan Indonesia dalam sebuah organisasi Internasional *World Trade Organization*, dan setelah Indonesia meratifikasi *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIP's) maka, Indonesia diharuskan untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh peraturan TRIP's, sehingga Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomer 13 tahun 1997 yang merupakan revisi atas Undang-undang sebelumnya (UU No 6 tahun 1989). Selanjutnya dengan mengingat perkembangan terbaru dibidang ekonomi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi industri dan perdagangan. Undang-undang tersebut direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 yang sampai sekarang masih diberlakukan.

Dengan adanya TRIP's dan peraturan pendukung lainnya perusahaan akan terus dapat mengundang laba (invitasi laba) bagi para *stockholder* mereka. Karena setiap pihak yang ingin memakai cara budidaya ataupun memproduksi benih seperti yang mereka lakukan diharuskan membayar royalti kepada mereka. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Setiabudi dan Triyuwono (2002, 105-106) yang menyatakan bahwa suatu harta milik yang penting, walau sering terabaikan adalah bahwa para pemilik dapat secara legal menolak mengizinkan milik-milik mereka dipakai oleh orang lain. Aspek vital dari uang atau komoditas kapital sebagai milik pribadi tidak terletak dalam hak para pemiliknya untuk memakainya sekehendak

hati, tetapi untuk tidak menggunakan jika memang dikehendaki oleh pemiliknya (Heilbroner, 1991:23 dalam Setiabudi dan Triyuwono, 2002:106).

Perusahaan yang menikmati hal tersebut diantaranya adalah perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT BISI International yang notabene perusahaan multinational yang berpusat diluar negeri. Pada tahun 2008 bahkan PT BISI International membayar royalti kepada MNC tersebut sebesar Rp 76.106.000.000,- atau sekitar 161% dari gaji yang dibayarkan oleh PT BISI Internasional kepada pegawainya, serta 97,43% dari beban pajak yang dibayarkan oleh PT BISI International kepada pemerintah.

Tabel 6.6 Nilai Pembayaran Royalti PT BISI International

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Royalti (juta rupiah)	48.694	76.106	18.183	8.569	18.972
Beban Pajak (juta rupiah)	50.701	78.114	20.192	10.579	20.983
Gaji Pegawai (juta rupiah)	36.460	47.362	37.063	41.417	49.998
% Royalti terhadap Gaji	134%	161%	49%	21%	38%

Sumber: Laporan keuangan PT BISI International

Selain WTO, selama ini IMF dan Bank Dunia juga telah memainkan dengan baik perannya sebagai antek negara maju dan perusahaan multinasional. Keanggotaan di lembaga internasional tersebut terwakili dalam "saham". Dimana negara- negara Eropa memiliki saham secara keseluruhan sekitar 40%, sementara Amerika Serikat memiliki saham sekitar 17%. Dengan demikian, kepemilikan saham di dua lembaga, yaitu IMF dan Bank Dunia, pada hakikatnya dikuasai secara mayoritas oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Meskipun kepemilikan ini telah berevolusi sedemikian rupa, pada hakikatnya pengaruh mayoritas masih tetap dimiliki kelompok negara Eropa dan Amerika Serikat. Itulah sebabnya, ada semacam tradisi pada kelompok negara Barat tersebut: IMF selalu di bawah

pimpinan wakil dari Eropa, sementara Bank Dunia secara turun-temurun berasal dari Amerika Serikat.

Kedua institusi tersebut juga berhasil mengeruk keuntungan yang maksimal dari negara berkembang. Dengan menggunakan kekuatan kedudukan mereka (*position power*), mereka mengeluarkan berbagai kebijakan yang sering kali merugikan negara berkembang. Bank Dunia misalnya, sejak akhir 2006 Bank Dunia semakin sering mengeritik pemerintah Indonesia tentang kenaikan harga beras, baik terbuka maupun tertutup. Bank Dunia juga semakin aktif melobi dan menawarkan resep buat pemerintah, agar Indonesia menempuh privatisasi lembaga pangan, melepas cadangan beras nasional ke swasta, dan liberalisasi impor, serta mendorong agar swasta diperankan sebagai stabilisator harga dalam negeri. Mereka yakin sekali, pasar dapat menyelesaikan instabilitas harga, maupun kemiskinan (World Bank, 2007 dalam Sawit, 2007).

Hasil dari itu semua adalah impor beras Indonesia dari Amerika Serikat cukup tinggi diantara negara maju yang mengekspor beras ke Indonesia. Impor beras dari Amerika Serikat meningkat di era liberalisasi dan era tarif. Pada 1996, hanya 9 ribu ton, meningkat menjadi 75 ribu ton pada tahun 1999. Tahun 2001 dan 2003, adalah tahun-tahun tertinggi impor beras dari Amerika Serikat yaitu mencapai masing-masing 178 ribu dan 108 ribu ton, terbesar selama kurun waktu 1997-2007. Beras dari Amerika Serikat yang murah harganya, dipakai oleh para pedagang untuk dicampur (oplos) dengan beras lokal, sehingga menghasilkan jenis beras baru dengan harga yang lebih murah. Hal itu telah memperbesar stok Bulog, sehingga

menjadi berkurang kemampuannya untuk menyerap pengadaan beras/gabah dalam negeri.

Selama ini Bank Dunia gencar mempengaruhi sejumlah menteri ekonomi yang beraliran neoliberal. Bank Dunia juga rajin menyampaikan gagasan perubahan kebijakan beras pada berbagai forum sejak akhir 2006, baik dengan cara mengundang sejumlah ahli Indonesia ke markas mereka di Jakarta, atau mengadakan seminar di luarnya, seperti di lembaga PBB (CAPSA) di Bogor. Namun, mereka menghindari diskusi terbuka dengan masyarakat luas (*civil society*) atau dengan para pakar Indonesia di luar kubu mereka. Bank Dunia langsung menyampaikan gagasannya ke tingkat pengambilan keputusan tentang kebijakan beras ke Kantor Menko Perekonomian atau ke sejumlah menteri lain yang sealiran dengan Bank Dunia. Bahkan ada *power point* tentang kebijakan beras disiapkan oleh Bank Dunia untuk SBY (Sawit, 2007).

Apa yang disarankan oleh Bank Dunia tentunya berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi Bretton Woods lainnya. IMF misalnya, melalui *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) atau lebih populer dengan sebutan *Letter of Intent* (LoI), IMF mendikte berbagai program dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah suatu negara dalam konteks permintaan bantuan keuangan dari lembaga moneter internasional tersebut. Salah satu LoI yang sangat merugikan Indonesia adalah LoI 11 September 1998. *Indonesia Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies* yang tercantum dalam isi LoI tersebut, terutama pada poin ketiga berbunyi sebagai berikut (<http://www.imf.org>):

In order to stabilize and reduce market prices paid by the general public, BULOG is increasing substantially the quantity of rice released into the market at below market prices, and will maintain a higher level of releases until the main harvest. Also, for the first time in thirty years, we will allow private traders to import rice.

(Untuk menstabilkan harga dan mengurangi harga pasar yang dibayarkan oleh pemerintah, BULOG meningkatkan jumlah beras yang dijual ke pasar dengan harga di bawah harga pasar dan terus menjaga jumlah itu hingga masa panen berikutnya. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam tiga puluh tahun, kita akan mengizinkan pihak swasta untuk mengimpor beras).

Isi LoI tersebut secara tersirat telah menegaskan bahwa IMF telah memaksa Indonesia membuat kebijakan tidak populis yang justru merugikan petani. Penghapusan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditas pangan pun ditempuh. Diambilnya keputusan yang tidak populis tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendapatkan bantuan hutang dari IMF. Selain itu, berbagai isi LoI IMF, terutama LoI 11 September 1998 pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yaitu meliberalisasi pertanian Indonesia.

Adanya TRIP's dan peraturan pendukung lainnya (baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi Bretton Woods) juga menjadi sebuah pertanda bahwa WTO dan lembaga Bretton Woods lainnya merupakan antek negara maju dan perusahaan multinasional. Dimana segala kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO harus dapat memberi keuntungan kepada negara maju dan perusahaan multinasional. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu contoh konkrit dari keberpihakan WTO adalah pemberian paten, dimana paten hanya diberikan bagi inovasi yang dapat digunakan dalam skala industri. Padahal proses bioteknologi yang bertujuan untuk menghasilkan bibit unggul hanya dapat dilakukan melalui kearifan masyarakat tradisional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak dapat diperoleh melalui

kekuatan atas kedudukan yang diukur dengan materi, sedangkan kebebasan diukur dengan kemampuan memberikan materi kepada regulator. Semakin banyak materi yang diberikan kepada regulator, maka kebebasan yang diperoleh juga akan semakin luas. Hal tersebut juga memperlihatkan betapa kebebasan yang digaung-gaungkan oleh WTO hanya ditujukan untuk negara maju dan perusahaan multinasional. Adanya TRIP's juga menjadi penunjuk inkonsistensi WTO. Dimana disatu sisi mereka menggaung-gaungkan kebebasan, namun disisi lain mereka memberi batasan-batasan yang menjadi kartu As bagi sebagian pihak. Dan celaknya kartu As tersebut diberikan kepada negara maju dan perusahaan multinasional.

Penjelasan-penjelasan di atas menyimpulkan bahwa globalisasi merupakan sebuah jalan dan sarana bagi kaum kapitalis untuk meningkatkan pundi-pundi kapital mereka. Penjelasan-penjelasan tersebut juga menggambarkan bahwa credo kapitalisme pasar bebas yang bergaya Anglo-Amerika sudah tersebar ke seantero dunia (Heertz, 2011:38). Penyebaran credo tersebut terbantu oleh berbagai kemajuan dalam komunikasi dan media, yang menjamin bahwa berbagai gagasan dapat disebarkan dengan cepat, serta oleh adanya suatu aliran pemikiran dari lembaga-lembaga pemberi pinjaman yang berhaluan neo-liberal. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah IMF, Bank Dunia dan WTO. Lembaga-lembaga tersebut oleh Wibowo (2010:89) disebut sebagai lembaga yang bertugas untuk membuat gerak globalisasi berjalan sukses. Negara-negara di seluruh dunia, terutama di negara Dunia Ketiga dipaksa untuk menjalankan "*Consensus Washington*", sebuah kata sandi untuk mengatakan tiga kebijakan neoliberal, yaitu deregulasi, privatisasi, dan

perdagangan bebas. Dan saat ini kredo tersebut telah merasuk kedalam jiwa perekonomian Indonesia.

6.4 PT BISI International dan Perusahaan Pertanian lainnya: VOC di Jaman Modern

Ketidak berpihakan politik-ekonomi kepada petani dan lingkungan sebenarnya sudah lama terjadi, terutama di masa pemerintahan kolonial Belanda. Seperti halnya orang-orang Portugis yang mendahuluinya, tujuan awal orang-orang Belanda adalah Maluku, kepulauan rempah-rempah yang sangat mashur (Geertz, 1983:48). Namun dengan segera mereka tertarik ke Jawa, dan disitulah mereka “menumpangkan” perekonomian kolonial mereka, dan baru pada akhir abad 17 mereka kembali mengarahkan ke Indonesia luar (luar Jawa). Keadaan masyarakat pribumi pada saat itu diperparah dengan adanya sistem kolonialisme (*colonial system*) dan situasi kolonial (*colonial situation*) di negeri-negeri jajahan termasuk diantaranya adalah Indonesia. Berpangkal pada doktrin pengejaran kejayaan (*glory*), kekayaan (*gold*) dan penyebaran ajaran agama penguasa (*gospel*), gerak kolonialisme Barat pada tahap awal melancarkan kegiatan ekspansi kekuasaan teritorial di dunia baru untuk membangun dominasi (Khudori, 2005:3). Penaklukan dan penguasaan rakyat bersama sumber-sumber ekonomi tanah jajahan menjadi tujuan utama. Ekspedisi dan ekspansi kekuasaan teritorial menjadi ciri penting dari kolonialisme kuno.

Pada kisaran tahun 1602-1799 berdiri sebuah perusahaan dagang bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), VOC merupakan Perserikatan Perusahaan Hindonesia Timur atau Perusahaan Hindonesia Timur Belanda yang

didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh raja Belanda (Khudori, 2005:19). Tujuan utama dibentuknya VOC seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk “menimbulkan bencana kepada musuh dan untuk keamanan tanah air”. Yang dimaksud musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 sampai dengan Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalkan VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara. Pada tahun 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah, dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40% (<http://www.wikipedia.co.id>).

Praktik bisnis yang digunakan oleh VOC pada waktu itu adalah monopoli-monopsoni perdagangan. Sedangkan angkatan bersenjata pribadi yang dibentuk oleh VOC bertujuan untuk menjaga dan menegakkan monopoli-monopsoni perdagangan VOC agar mereka mendapatkan laba maksimal (*maximum profit*). Biaya untuk angkatan perang ditanggung oleh perusahaan (VOC). Melalui praktik monopoli-monopsoni, VOC menguasai seluruh perdagangan komoditas, termasuk komoditas utama pada waktu itu yaitu gula (Khudori, 2005:20). Apa yang terjadi pada Indonesia dimasa pemerintahan kolonial Belanda hampir sama seperti apa yang terjadi di Indonesia saat ini. *Trickle down effect* yang menjadi sandaran pemenuhan

kesejahteraan masyarakat telah membawa negara Indonesia mentasbihkan investasi sebagai sarana utama untuk melaksanakan pembangunan nasional. Naasnya, investasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pendanaan lokal, sehingga *foreign direct investment* (Penanaman Modal Asing, PMA) menjadi sebuah pilihan yang harus diterima. Hal tersebut sebenarnya memiliki risiko yang cukup besar, bahkan dapat mengembalikan keadaan masyarakat Indonesia seperti jaman penjajahan kolonial Belanda. Pertanian sebagai salah satu sektor penting bagi sebuah negara tidak luput dari perlakuan kebijakan pemerintah tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan bidang pangan di Indonesia. Mereka tidak segan-segan berinvestasi secara besar-besaran dikarenakan perekonomian Indonesia yang cukup kondusif serta peluang untuk mendapatkan keuntungan di bidang pangan yang cukup besar.

Syngenta, produsen benih dunia asal Eropa, Dupont, produsen benih jagung hibrida dengan merek dagang Pioneer, PT Bisi International Tbk, produsen benih jagung hibrida merek Bisi adalah beberapa perusahaan bidang pangan yang “bercokol” di Indonesia, disamping perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut tentulah akan sangat senang dapat berinvestasi di negeri yang terkenal dengan keagrariaannya, negeri yang pernah mengantarkan presiden keduanya (Presiden Soeharto) ke mimbar kehormatan Organisasi Pertanian dan Pangan Sedunia (FAO) pada tahun 1984 untuk memperoleh penghargaan atas keberhasilan Indonesia mengubah status dari negara importir beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras dan bahkan sempat mengeksportnya.

Tabel 6.7 Pangsa Pasar Produk PT BISI International di Indonesia

Keterangan	2008	2009	2010
Jagung	71%	62%	54%
Padi	40%	27%	24%
Sayur & Buah	36%	42%	40%
Pestisida	10%	9%	11%

Sumber: Laporan tahunan PT BISI

Perusahaan itu senang karena negeri yang memiliki jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa ini, sampai saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga peluang bagi mereka untuk meraup keuntungan dari penguasaan pasar pangan menjadi lebih besar. PT BISI International sebagai salah satu pemain dalam bisnis pangan telah membuktikan kedikdayaannya, dimana untuk beberapa produk PT BISI International telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar Indonesia.

Kebahagiaan perusahaan tersebut semakin besar dikala negeri yang terkenal kaya akan sumberdaya alamnya ini tidak memiliki cukup modal untuk membiayai penelitian-penelitian bidang pangan seperti yang telah dilakukan oleh korporasi dan negara maju. Pada akhirnya produksi pangan di negeri ini akan digantungkan kepada perusahaan-perusahaan bidang pangan dengan cara menggiring petani secara perlahan untuk menggunakan benih hibrida. Penggunaan benih jagung hibrida di Indonesia tahun 2008 masih sekitar 58,8% dari luas area tanam 4002 ribu ha. Namun hal itu akan meningkat seiring dengan usaha pemerintah untuk memopulerkan penggunaan benih hibrida, seperti halnya Thailand maupun negara-negara lainnya terutama negara-negara di Asia.

Tabel 6.8 Penggunaan Benih Jagung Hibrida di beberapa Negara Tahun 2008

Negara	Luas Area Tanam (ribuan ha)	Benih Hibrida	%
India	7600	2280	30,8
Indonesia	4002	2353	58,8
Thailand	1300	1235	95,0
Philipina	2725	1635	60,0
Vietnam	659	395	60,0

Sumber: FAO Stat 2009, diolah PT BISI International, 2010:37

Produk yang dihasilkan oleh negara maju memang cenderung mengeksploitasi lingkungan, namun tidak ada salahnya jika kita mempelajari ilmu pangan negara maju kemudian melakukan inovasi produk agar sesuai dengan lingkungan kita dan tidak merusak ekologi yang telah mapan. Sebenarnya jika kita melihat ke belakang mengenai sejarah pangan kita, apa yang dilakukan oleh VOC pada jaman penjajahan kolonial mirip dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pangan dunia termasuk PT BISI International, dimana apa yang mereka lakukan hanya untuk memaksimalkan laba mereka (*maximum profit*) dan cenderung mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada jaman dahulu VOC menggunakan berbagai cara untuk mengembangkan lembaga perdagangan Belanda dan merintangai lembaga perdagangan Indonesia. Pada saat itu Belanda berusaha dengan keras untuk membawa tanaman Indonesia memasuki dunia modern, sedangkan penduduknya tetap di dunia lama. Cara-cara untuk melaksanakan hal tersebut yaitu menjaga agar penduduk pribumi tetap dalam keadaan semula, juga membuat agar mereka menghasilkan produk untuk pasaran dunia, berupa pembentukan struktur ekonomi yang kadang disebut dengan “dua muka” (*dual*) yang secara kronis, bahkan secara intrinsik merupakan struktur yang tidak seimbang. Dalam sektor ekspor terdapat kapitalisme administratif, suatu sistem

dimana pemegang modal yaitu orang-orang Belanda, mengatur harga penjualan dan upah, mengontrol pengeluaran, dan bahkan mendiktekan proses produksi. Sedangkan dalam sektor domestik terdapat pertanian unit keluarga, industri rumah kecil-kecilan dan sedikit perdagangan dalam negeri secara kecil-kecilan atau dengan kata lain pada masyarakat kebanyakan (petani) masih berpola subsisten dimana prinsip ekonomi boleh dikatakan tidak berlaku (Boeke, 1953 dalam Geertz, 1983:49).

Hal tersebut serupa dengan apa yang dilakukan oleh PT BISI International maupun perusahaan-perusahaan lain bidang pangan, dimana mereka mengatur harga jual benih kepada petani dan juga mengatur upah yang diberikan kepada petani melalui harga beli panen dari petani dalam kontrak kerjasama. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Muji kepada penulis:

Harga beline niku nggih harga pasar ditambah tigang dasa gangsal persen mas.

(Harga belinya itu harga pasar ditambah tiga puluh lima persen dari harga pasar tersebut).

Pernyataan Pak Muji seakan menegaskan bahwa PT BISI International mempunyai posisi yang paling kuat dalam kontrak kerjasama dengan petani. Dengan melakukan pengaturan upah, perusahaan-perusahaan tersebut juga telah melakukan kontrol pengeluaran untuk operasional bisnis mereka agar lebih efisien. Selain itu secara implisit mereka juga telah melakukan kontrol terhadap biaya produksi para petani, yang membedakan adalah kontrol pengeluaran tersebut tidak dilakukan agar petani melakukan efisiensi proses produksi. Namun justru sebaliknya, para petani digiring agar mereka menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan,

dan sebagai “gantinya” para petani diberikan hasil panen yang “maksimal” dari penanaman benih hibrida tersebut.

Tabel 6.9 Laba Usaha PT BISI International

Dalam jutaan rupiah

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Penjualan Bersih	889.588	1.627.821	782.125	894.865	998.656
Beban Pokok Penjualan	490.307	798.676	440.540	527.547	582.596
Laba Kotor	399.281	829.145	341.585	367.318	416.060
Beban Usaha	161.066	254.867	167.035	180.987	234.243
Laba Usaha	238.215	574.278	174.550	186.331	181.817

Sumber: Laporan Keuangan PT BISI International

Sama halnya seperti yang dilakukan oleh VOC pada jaman dahulu, petani kontrak tanam benih dengan PT BISI International dan perusahaan-perusahaan pangan lainnya dijamin modern seperti saat ini juga didikte oleh perusahaan dalam hal produksi usaha tani. Mulai dari persiapan lahan sampai dengan proses pemanenan mereka didikte oleh perusahaan agar hasil panen petani seperti apa yang distandardkan oleh perusahaan, hal tersebut seperti yang telah dijelaskan secara lengkap oleh Azfi Manzilati dalam bukunya yang berjudul Kontrak Yang Melemahkan (Relasi Petani dengan Korporasi). Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan pengawasan proses produksi benih komersial tersebut, yang menjadi pembeda antara VOC dengan perusahaan tersebut adalah cara “invasi” mereka. Pada jaman penjajahan kolonial, VOC tidak hanya menggunakan kekuatan modal untuk menguasai daerah jajahan mereka, tetapi mereka juga menggunakan kekuatan militer. Sedangkan perusahaan-perusahaan bidang pangan menggunakan modal dan teknologi untuk melakukan “invasi” kepada sebuah negara. Dengan menggunakan modal dan teknologi ditambah dengan lobi-lobi politik, perusahaan tersebut tidak hanya akan dapat menguasai negara, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga akan dapat menguasai dunia.

6.5 Harga Pasar dalam *Fair Value*: Alat Legalisasi “Perampokan” oleh Korporasi

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pusat kapitalisme adalah identifikasi harga dan perhitungan laba rugi. Dan penilaian paling penting bagi manajer adalah apakah keputusan yang mereka buat menghasilkan keuntungan (laba) atau kerugian. Dan alat yang dapat digunakan untuk melakukan segala perhitungan tersebut adalah akuntansi. Begitu pula jika hal tersebut diberlakukan pada bidang pertanian. Dengan adanya wacana penggunaan IAS 41 berarti pertanian akan digiring ke dalam ranah usaha bisnis yang berorientasi pada profit. Hal tersebut berarti serangan liberalisme ekonomi sudah masuk ke dalam ranah akuntansi (Mulawarman, 2012:5) dan pertanian. Serangan liberalisme ekonomi dalam bentuk neoliberalisme akuntansi tersebut merupakan bagian dari proyek dan agenda besar seperti yang telah dikatakan oleh Perkins (2004:30); Rais (2008:81) sebagai Korporatokrasi. Korporatokrasi adalah berperannya aktivitas *selfish/egoism/anthropocentrism/greedy* dan *capital* yang menurut Rais (2008:30);Mulawarman (2012:5):

...terdapat di dalam pemerintahan yang dikendalikan pemilik korporasi besar sebagai sistem kekuasaan untuk mengontrol ekonomi dan politik global, dengan 7 unsur, yaitu korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, terutama Amerika dan kaki tangannya, perbankan internasional, kekuatan militer, media massa, kaum intelektual yang dikooptasi, dan terakhir, tidak kalah penting adalah elite nasional negara berkembang bermental inlander, komprador atau pelayan.

Tidak dapat dipungkiri jika akuntansi merupakan bagian terpenting dalam sebuah bisnis, terutama bagi golongan kapitalis. Hal tersebut seperti pernyataan Max Weber dalam Belkaoui (2000, 12) yang mengatakan bahwa:

Organisasi perusahaan kapitalistik rasional modern tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya dua faktor penting lain dalam perkembangannya: pemisahan bisnis dari rumah tangga...dan, yang terkait sangat dengan itu, pembukuan yang rasional.

Akuntansi juga menjadi sebuah perangkat legal bagi manajemen sebuah perusahaan untuk membagikan dividen dan mengakui laba yang diperoleh dari operasional bisnis yang dilakukan pada satu periode tertentu. Laba bersih tersebut tentunya diperoleh dari operasional bisnis yang efisien. Semakin efisien operasi perusahaan maka, laba bersih yang diperoleh juga akan semakin tinggi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada aliran dividen yang diterima oleh para *stockholder*. Pada bab V penulis telah menjelaskan tentang bahaya penggunaan *net farm income* dikalangan petani dan posisi petani dalam kegiatan usaha tani melalui pendekatan *net farm income*. Sedangkan pada bab ini penulis akan mengulas tentang *fair value* dan akrual basis.

Salah satu hal yang menarik dari IAS 41 adalah penggunaan *fair value* dan akrual basis. Bagi penulis menarik karena *fair value* dan akrual basis diberlakukan pada aset biologi. Pengukuran nilai wajar menurut IAS 41 dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Namun ketiganya masih tergantung pada *discounted factor* (Mulawarman, 2012:47), sehingga hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam. Jika *fair value* mempercayakan pembentukan harganya kepada mekanisme pasar hal tersebut berarti IAS 41 juga bagian dari konsep ekonomi neoklasik yang berbentuk akuntansi neoliberal. Dan pertanyaan yang akan timbul adalah siapa yang menentukan harga pasar?

Seperti yang kita ketahui bersama nilai wajar yang dijelaskan dalam IFRS 13 tentang *Fair Value Measurement*, nilai wajar diukur dengan menggunakan harga di pasar utama bagi aktiva atau kewajiban (yaitu pasar dengan volume terbesar dan tingkat aktivitas untuk aktiva atau kewajiban) atau, dalam hal tidak adanya pasar utama maka pasar yang dipakai adalah pasar yang paling menguntungkan bagi aktiva atau kewajiban tersebut. Kritik penulis dalam penggunaan *fair value* disamping pada pengukuran aset biologis juga lebih menitik beratkan kepada pembentukan harga pasar, karena harga pasar cenderung dipengaruhi oleh *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Penulis beranggapan bahwa dalam aktivitas penawaran dan permintaan terdapat “bahaya” distorsi dalam pembentukan harga pasar, khususnya dalam usaha tani yang notebene produk yang dihasilkan bersifat musiman. Penawaran dan permintaan merupakan model ekonomi dari penentuan harga di pasar. Hal ini menyimpulkan bahwa dalam pasar yang kompetitif, maka harga satuan untuk suatu barang tertentu akan bervariasi sampai mengendap pada titik di mana kuantitas yang diminta oleh konsumen (harga berlaku) akan sama dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen (harga berlaku), yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi keseimbangan harga dan kuantitas.

Terdapat empat hukum dasar penawaran dan permintaan, yaitu (Besanko & Braeutigam, 2005:33 dalam <http://en.wikipedia.org.id>): *pertama*, jika permintaan meningkat dan penawaran tetap tidak berubah, maka itu mengarah ke harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih tinggi. *Kedua*, jika permintaan berkurang dan pasokan tetap tidak berubah, maka itu mengarah ke harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah. *Ketiga*, jika pasokan meningkat dan permintaan tetap

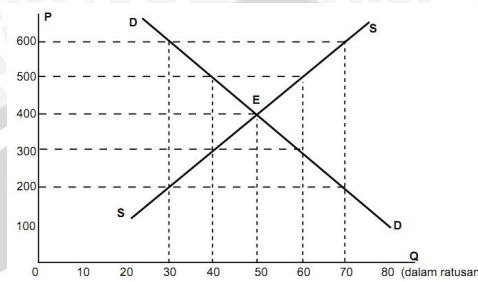
tidak berubah, maka itu mengarah ke harga ekuilibrium yang lebih rendah dan kuantitas lebih tinggi. *Keempat*, jika suplai berkurang dan permintaan tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah.

Berdasarkan keempat hukum dasar permintaan dan penawaran tersebut kita dapat membuat sebuah analisa peran (*role analysis*) perusahaan dalam melakukan efisiensi operasinya melalui pembentukan harga pasar alamiah yang diartifisialkan. Maksud dari alamiah yang diartifisialkan adalah harga pasar akan terbentuk dengan sendirinya melalui kuantitas permintaan dan penawaran (pada level petani), namun harga pasar tersebut terdistorsi akibat kooptasi perusahaan, sehingga harga yang terbentuk banyak dipengaruhi oleh perusahaan dan kaum tengkulak disamping sifat alamiah dari hasil pertanian, yaitu penawaran yang melimpah pada saat musim panen. Hal tersebut terjadi karena dengan alasan kegiatan produksi, perubahan bentuk, penyimpanan dan distribusi yang dilakukan, para agen ekonomi menetapkan margin keuntungan. Besarnya margin keuntungan yang dapat ditetapkan oleh para agen ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dari komoditas yang diperdagangkan. Nicholson (2004) dalam Prastowo *et al* (2008) menyatakan bahwa struktur pasar ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu (i) jumlah perusahaan/agen/penjual yang beroperasi di pasar tersebut; (ii) ada tidaknya hambatan bagi perusahaan/agen/penjual untuk masuk dan keluar dari pasar; dan (iii) karakteristik dari komoditas yang diperdagangkan. Struktur pasar tersebut berpengaruh terhadap kekuatan dari para agen/penjual didalamnya untuk mempengaruhi harga pasar. Secara teoritis, struktur pasar dapat berbentuk pasar

monopoli, duopoli, oligopoli, persaingan monopolistik (*monopolistic competition*), dan persaingan sempurna (*perfect competition*).

Pada struktur pasar yang bersifat monopoli lanjut Prastowo *et al* (2008), sebuah perusahaan atau agen tunggal yang menguasai pasar memiliki keleluasaan dalam penetapan harga untuk memperoleh margin keuntungan yang optimal karena agen tersebut berperan sebagai *price setter*. Sebaliknya, pada pasar komoditas yang bersifat persaingan sempurna (*perfect competition*) atau setidaknya *highly competition*, agen tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga yang terjadi di pasar karena lebih berperan sebagai *price taker* sehingga margin keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Sementara kemampuan agen/penjual untuk mempengaruhi harga pada jenis pasar duopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik berada di antara pasar monopoli dan persaingan sempurna. Kondisi pasar persaingan sempurna terlihat di level petani pada saat panen raya. Homogenitas dan melimpahnya komoditas pertanian yang akan dijual membuat petani tidak mempunyai bargaining position untuk mempengaruhi harga dan pasrah sebagai *price taker*. Sebaliknya untuk level pedagang pengumpul/tengkulak yang jumlahnya relatif sedikit cenderung membentuk pasar oligopoli sehingga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Seringkali para pedagang pengumpul atau tengkulak tersebut membentuk sebuah kartel yang dapat membuat kesepakatan dan membentuk harga pasar. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa *fair value* akan terbentuk dengan sempurna saat terjadi harga keseimbangan (E). Dimana kurva permintaan (D) dan penawaran (S) saling bertemu. Hal tersebut seperti yang digambarkan pada kurva berikut ini.

Kurva 6.1 Pembentukan Harga Keseimbangan (sebagai dasar penilaian *fair value* yang sempurna)

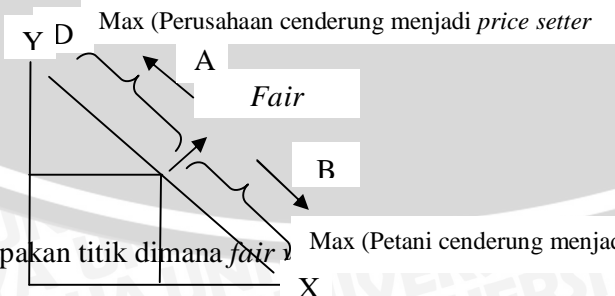


Keterangan:

- P merupakan harga yang ditawarkan
- Q merupakan jumlah yang ditawarkan
- D merupakan jumlah permintaan di pasar
- S merupakan jumlah penawaran di pasar
- E merupakan harga keseimbangan yang terbentuk

Sedangkan kekuatan pengaruh antara petani dan perusahaan dalam pembentukan *fair value* lebih mirip dengan kurva permintaan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Kurva 6.2 Kondisi Ideal Pembentukan *Fair Value* Sempurna



Keterangan:

- *FV* merupakan titik dimana *fair*
- Wilayah A merupakan wilayah dimana *fair value* akan semakin memudar dan harga pasar akan cenderung didominasi oleh perusahaan.

- Wilayah B merupakan wilayah dimana *fair value* akan semakin memudar dan harga pasar akan cenderung didominasi oleh petani.
- D merupakan garis permintaan
- X merupakan jumlah kuantitas perusahaan, teknologi yang dimiliki petani, modal yang dimiliki petani dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani (dalam hal pengembangan produk sampai dengan akses produk dan pasar).
- Y merupakan jumlah kuantitas petani, teknologi yang dimiliki perusahaan, modal yang dimiliki perusahaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan (dalam hal pengembangan produk sampai dengan akses produk dan pasar).

Sebagai contoh adalah harga panen jagung, pada saat panen raya harga jagung akan menjadi lebih murah daripada harga pada hari-hari biasa dikarenakan stok yang melimpah. Hal tersebut seperti yang telah digambarkan oleh Ibnu Taimiyah, salah satu ekonom muslim terkemuka. Ibnu Taimiyah menggambarkan kekuatan penawaran dan permintaan terhadap harga yang terbentuk, dimana jika keinginan untuk membeli barang meningkat sementara ketersediaan barang tersebut menurun, maka harga akan naik. Namun, disisi lain jika ketersediaan meningkat baik dan keinginan untuk itu berkurang, maka harga akan turun.

Bagi petani yang memiliki lahan yang luas mungkin hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah, ketika harga jagung tidak seperti yang mereka harapkan, mereka akan menjual sebagian hasil panen mereka, sesuai dengan keperluan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisa hasil panen mereka akan mereka jual ketika harga jual panen tersebut sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun bagi petani yang memiliki luas tanah yang lebih sempit mereka tidak bisa berbuat banyak selain menjual seluruh hasil panen mereka. Hal tersebut seperti pernyataan Bu Aminah.

...sak ugi panen niku regi mesti mandap, lha mangke lak petani mpun mboten gadah simpenan mindak maleh, ngoteniku terus.

(Ketika panen harga pasti turun, tetapi ketika petani sudah menjual seluruh hasil panennya harga akan naik kembali, begitu terus).

Melalui kekuatan modal (*capital power*) yang dimiliki, perusahaan dan para tengkulak akan dapat dengan mudah mengontrol pasar. Bahkan posisi mereka di mata para petani juga jauh lebih tinggi, sehingga lebih sering para tengkulak dan perusahaan mendapatkan harga penawaran yang cukup rendah seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Selain itu dengan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat tersebut, perusahaan juga menguasai segala informasi tentang harga pasar sedangkan petani mengetahui harga pasar dari pihak perusahaan, dikarenakan tidak adanya akses informasi tentang harga pasar panen mereka. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Muji ketika beliau melakukan kerjasama dengan PT BISI International.

Harga beline niku diitung saking harga pasar gudang pabrik mas. Dadose petani niku nggih tumut pabrik harga belinipun

(Harga belinya itu dihitung dari harga pasar gudang pabrik. Jadi petani itu harga belinya ikut harga pasar yang diinformasikan oleh pabrik).

Namun, hal sebaliknya justru terjadi pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. PT BISI International misalnya, setelah mereka membeli hasil panen dari para petani mereka akan mengolah kembali hasil panen tersebut untuk dijadikan benih. Mereka menjual benih mereka sesuai dengan standar harga yang telah mereka tentukan, tentunya setelah disesuaikan dengan tingkat laba yang mereka inginkan. Harga pasar bagi perusahaan-perusahaan tersebut seakan hanyalah sebagai sinyal *warning* bagi penjualan produk mereka, jika sinyal tersebut menyala mereka harus

siap menjual produk lain yang lebih kompetitif. Namun, harga yang mereka pasang bagi produk sebelumnya pada umumnya masih tetap, jikapun produk lama mereka sudah tidak laku dipasaran mereka lebih sering berhenti memproduksi produk tersebut daripada menjual dengan harga yang murah, terkecuali jika laba yang mereka inginkan sudah terpenuhi serta produk mereka sudah mendekati batas waktu kadaluarsa, mereka baru akan menjual produk mereka dengan harga yang murah. Begitu juga dengan produk-produk yang dijual oleh perusahaan pangan lainnya. Sehingga, tidak mengherankan jika mereka dapat menguasai pasar dan mendapat keuntungan yang melimpah.

Selain *fair value* dalam hal pengukuran aset biologik menurut IAS 41 juga memberlakukan prinsip akrual. Penerapan prinsip tersebut penting bagi manajemen perusahaan untuk mengakui segala aset yang dimiliki, karena pemberlakuan prinsip tersebut akan memberikan penilaian manfaat ekonomi masa depan seperti pada pengakuan aset biologi yang memungkinkan dinilai secara ekonomis dan memberikan manfaat masa depan. Atau dengan kata lain prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas sekarang), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu) (Mulawarman, 2012:52). Khusus mengenai pencatatan potensi lanjut Mulawarman, menggunakan prinsip *present value*. Prinsip *present value* ini dihitung dengan mekanisme *time value of money*, dimana mekanisme tersebut dekat dengan unsur riba.

Konsep akrual ini muncul karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan pada biaya yang telah dibayar atau pendapatan

yang telah diterima. Akuntansi lebih menekankan pada aspek substansi dari transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Penandingan biaya dan pendapatan merupakan dasar digunakannya prinsip akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konsep penandingan ini akuntansi berusaha memberikan dasar penandingan antara pendapatan dan biaya (biaya yang telah dianggap menghasilkan pendapatan tersebut dan dapat dibebankan terhadapnya) sehingga diperoleh laba yang tepat.

Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dengan arus kas difasilitasi dengan penyesuaian akrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar untuk memperoleh pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang layak, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Karenanya, penilaian merupakan bagian terpenting dari akuntansi akrual, serta mekanisme aturan dan institusi yang diciptakan untuk memastikan keandalannya. Tujuan utama akuntansi akrual adalah membantu investor menilai kinerja keuangan entitas selama satu periode pelaporan. Berdasarkan hal tersebut banyak manajemen yang menggunakan prinsip akrual untuk melakukan *earning management*. Metode akrual ini membolehkan para manajer untuk membuat *judgment* dan asumsi dalam menyusun dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan mereka. *Judgment* dan asumsi yang dibuat tersebut

tidak hanya dapat meningkatkan keinformatifan laba akuntansi tetapi juga memunculkan kemungkinan bagi manajemen untuk berperilaku oportunistis dengan perilaku ini manajer akan cenderung melakukan *earning management* (Rahman, 2005).

Selain dekat dengan nilai riba dalam dasar akrual juga mengandung unsur *gharar* dikarenakan pada sistem *accrual basis* telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang. Salah satu contoh dalam IAS 41 adalah pengakuan aset biologi, dimana aset biologi diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selisih perubahan nilai wajar dikurangi biaya menjual yang belum terealisasi ini diakui di laporan laba rugi. Pengakuan tersebut pada akhirnya mengakibatkan volatilitas kinerja keuangan yang disebabkan oleh pengakuan laba yang sebetulnya belum terealisasi. Permasalahan lain dalam penggunaan prinsip akrual adalah tidak adanya pembedaan aset biologi. Padahal, ada aset biologi yang dimiliki tapi tidak untuk dijual dan hanya digunakan untuk memproduksi aset biologi lain. Seperti misalnya sapi pejantan, ayam pejantan, atau ayam petelur. Dengan sifat yang tidak untuk dijual ini, pengukuran aset biologik semacam ini dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan mengakui selisih perubahannya di laba rugi akan sangat menyesatkan.

6.6 Refleksi

Pangan merupakan bagian terpenting dari kehidupan seluruh makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Pangan juga merupakan bagian terpenting dari pembangunan sebuah bangsa dan negara. Bagi sebuah bangsa, pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, sehingga diperlukan ketahanan pangan yang cukup kuat

bagi suatu negara untuk tetap dapat bertahan dan mencapai tujuan negara. Ketahanan pangan yang dibangun haruslah ketahanan pangan mandiri yang menempatkan masyarakat petani sebagai subyek ketahanan pangan dengan tidak mengabaikan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. Namun pada kenyataannya, ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia masih jauh dari ketahanan pangan yang mandiri, karena sampai saat ini pemerintah masih menjadikan korporasi sebagai pilar utama pembangunan ketahanan pangan, yang pada akhirnya hal tersebut justru mengancam kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. Dan lebih parahnya lagi negara akan mengalami ketergantungan pangan kepada asing yang pada akhirnya negara akan dapat dengan mudah dikontrol oleh kekuatan asing (negara atau korporasi asing) dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan laba mereka.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah (menjadikan korporasi sebagai pilar utama pembangunan ketahanan pangan) tersebut menunjukkan betapa pembangunan ekonomi yang ada merupakan sebuah bentuk pembangunan ekonomi neoklasik dimana pengusaha dijadikan motor penggerak utama ekonomi untuk memberikan efek menurun kepada masyarakat lapisan bawah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa fokus utama pembangunan ekonomi pemerintah adalah pertumbuhan, bukan pemerataan. Namun pada kenyataannya apa yang diharapkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari misalnya saja porsi pajak yang dibayarkan oleh PT BISI International kepada negara yang nilainya kurang dari 20% atas total laba kotor yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.

Selain itu pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan bidang pertanian tersebut (misal PT BISI International) juga mirip dengan apa yang dilakukan oleh VOC pada jaman penjajahan kolonial, dimana apa yang mereka lakukan hanya untuk memaksimalkan laba mereka (*maximum profit*) dan cenderung mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada jaman dahulu VOC menggunakan berbagai cara untuk mengembangkan lembaga perdagangan Belanda dan merintangi lembaga perdagangan Indonesia. Cara-cara untuk melaksanakan hal tersebut yaitu menjaga agar penduduk pribumi tetap dalam keadaan semula, juga membuat agar mereka menghasilkan produk untuk pasaran dunia, berupa pembentukan struktur ekonomi yang kadang disebut dengan “dua muka” (*dual*) yang secara kronis, bahkan secara intrinsik merupakan struktur yang tidak seimbang. Dalam sektor ekspor terdapat kapitalisme administratif, suatu sistem dimana pemegang modal yaitu orang-orang Belanda, mengatur harga penjualan dan upah, mengontrol pengeluaran, dan bahkan mendiktekan proses produksi. Sedangkan dalam sektor domestik terdapat pertanian unit keluarga, industri rumah kecil-kecilan dan sedikit perdagangan dalam negeri secara kecil-kecilan atau dengan kata lain pada masyarakat kebanyakan (petani) masih berpola subsisten dimana prinsip ekonomi boleh dikatakan tidak berlaku.

Hal tersebut serupa dengan apa yang dilakukan oleh PT BISI International maupun perusahaan-perusahaan lain bidang pangan, dimana mereka mengatur harga jual benih kepada petani dan juga mengatur upah yang diberikan kepada petani melalui harga beli panen dari petani dalam kontrak kerjasama. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh VOC pada jaman dahulu, petani kontrak tanam benih dengan

PT BISI International dan perusahaan-perusahaan pangan lainnya dijamin modern seperti saat ini juga didikte oleh perusahaan dalam hal produksi usaha tani. Mulai dari persiapan lahan sampai dengan proses pemanenan mereka didikte oleh perusahaan agar hasil panen petani seperti apa yang distandardkan oleh perusahaan.

Berbagai usaha pengerdilan petani oleh korporasi tersebut seakan menemukan momentumnya dikala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan polesan lembaga-lembaga Bretton Woods (IMF, World Bank, WTO) yang notabene lebih berpihak kepada korporasi-korporasi tersebut dan negara-negara maju. Nasib petani semakin tidak menentu dikala harga pasar yang terbentuk juga merupakan harga pasar yang telah terdistorsi oleh kaum tengkulak dan korporasi. Penggunaan harga pasar dalam konsep *fair value* untuk menentukan NFI juga menjadi sebuah konsep perampokan aset oleh korporasi terhadap para petani. Selain *fair value* dalam hal pengukuran aset biologik menurut IAS 41 juga memberlakukan prinsip akrual. Penerapan prinsip tersebut penting bagi manajemen perusahaan untuk mengakui segala aset yang dimiliki, karena pemberlakuan prinsip tersebut akan memberikan penilaian manfaat ekonomi masa depan seperti pada pengakuan aset biologi yang memungkinkan dinilai secara ekonomis dan memberikan manfaat masa depan. Atau dengan kata lain prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas sekarang), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi, menggunakan prinsip *present value*. Prinsip *present value* ini dihitung dengan mekanisme *time value of money*, dimana mekanisme tersebut dekat dengan unsur riba.

BAB VII

MEWUJUDKAN TRILOGI USAHA TANI: PERTANIAN MANDIRI, PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN AKUNTANSI YANG AKOMODATIF

7.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Melalui pendekatan *islamic political economy of accounting* dapat dilihat bahwa besaran kerusakan lingkungan selaras dengan besaran penjualan bahan penunjang pertanian kimia (pestisida dan pupuk kimia) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat pada pembahasan bab V terutama sub bab dilematik pestisida. Pestisida yang notabene menurut para pakar lingkungan sangat berbahaya (baik bagi lingkungan, petani maupun konsumen) justru menjadi penyumbang pendapatan PT BISI International terbesar kedua setelah benih. Pada kurun waktu 2007-2011 penjualan rata-rata pestisida hampir 30% dari total penjualan bersih PT BISI International. Konsep *net farm income* yang ada saat ini juga belum dapat mengakomodasi seluruh kepentingan *stakeholder*, terutama lingkungan alam. Hal tersebut dikarenakan konsep *net farm income* tidak mempermasalahkan bahaya atas *input* yang dimasukkan dalam proses produksi maupun *output* yang dihasilkan atas proses produksi tersebut. Sehingga dikhawatirkan konsep *net farm income* yang saat ini ada justru akan melanggengkan “tradisi merusak alam dan membahayakan manusia” di lingkup usaha tani.

Hasil lain yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian adalah perusahaan benih dan pestisida (perusahaan bidang pertanian) menggunakan kontrak kerjasama dengan petani untuk melakukan efisiensi produksi benih. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai keistimewaan yang diperoleh oleh perusahaan, dimana diantaranya adalah hak untuk membeli hasil panen petani (petani tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain) dan hak untuk menentukan harga beli hasil panen petani. Melalui dua hak tersebut petani secara tidak langsung “dipaksa” menyerahkan tanah dan tenaga mereka, karena melalui dua hak tersebut petani harus patuh pada aturan penanaman seperti yang telah distandardkan oleh perusahaan. Mereka tidak diperbolehkan melakukan teknik tanam dengan sistem tumpang sari, mereka juga tidak memiliki tunjangan kesehatan, gaji tetap ataupun uang sewa tanah padahal sebagian dari mereka bertani pada tanah sewaan. Berbagai hak tersebut diperoleh perusahaan dengan cara membujuk petani melalui persentase nilai pembelian hasil panen di atas harga pasar. Petani yang berfikir rasional tentunya akan memilih bekerjasama dengan perusahaan dikarenakan nilai pembelian yang besar tersebut akan memperbesar nilai *net farm income* mereka. Namun, pada kenyataannya perusahaan tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis posisi petani melalui pendekatan *net farm income* maupun distribusi *gross income* yang diperoleh perusahaan seperti yang disajikan pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Distribusi Laba Bruto PT BISI Int (2008-2011)

Keterangan	Jumlah	%
Lab a Bruto	1.954.108	100
Gaji, upah, kesejahteraan karyawan	174.316	8,92%
Royalti	121.830	6,23%
Biaya tenaga ahli	11.722	0,60%
Pajak	256.616	13,13%
Lain-lain	625.827	32,03%
Lab a Bersih Perusahaan	763.797	39,09%
Total	1.954.108	100

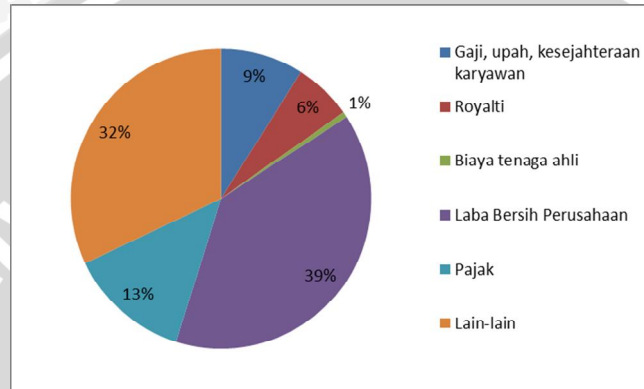
Sumber: Laporan keuangan PT BISI Int

Apa yang diperoleh perusahaan tersebut tentunya bertolak belakang dengan apa yang diperoleh oleh para petani maupun buruh langsung. Pendapatan yang diperoleh petani per bulannya tidak lebih dari Rp 1.500.000,00. Pendapatan sebesar itu menurut Pak Muji masih kuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Begitu pula dengan pendapatan yang diperoleh oleh buruh langsung, mereka hanya mendapatkan tidak lebih dari 18,58% dari besarnya royalti yang dibayarkan oleh perusahaan kepada MNC asing (kurun waktu 2008-2011). Royalti tersebut merupakan bagian dari aturan TRIP's yang telah disepakati oleh pemerintah sebagai anggota WTO. Melalui aturan tersebut perusahaan dapat menjaga sumber pendapatan mereka dan melalui aturan tersebut pemerintah dipaksa "memproduksi" aturan yang pada akhirnya menjerat petani kecil seperti Pak Tukirin.

Pola ekspansi perusahaan bidang pertanian tersebut juga seperti pola ekspansi yang dilakukan oleh VOC. Melalui pembentukan struktur ekonomi "dua muka", dimana di satu sisi perusahaan memproduksi barang dengan kualitas seperti yang telah mereka standarkan dan di sisi lain mereka menjerat petani agar tidak berkembang. Jeratan-jeratan tersebut mereka lakukan seperti yang telah dijelaskan

pada penjelasan di atas yaitu melalui aturan-aturan, kontrak kerjasama maupun produk yang mereka hasilkan. Melalui berbagai cara tersebut pada akhirnya perusahaan memperoleh distribusi kue laba yang cukup tinggi.

Grafik 7.1 Kue Distribusi Laba Bruto (2008-2011)



Dari grafik di atas kita dapat melihat distribusi laba bruto perusahaan kurun waktu 2008-2011, dimana dalam kurun waktu empat tahun perusahaan memperoleh bagian kue laba sebesar 39% dari total laba bruto yang diperoleh perusahaan. Sedangkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah kurang dari 15%. Lain-lain merupakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan selain gaji, upah, kesejahteraan karyawan, royalti, biaya tenaga ahli, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan laba bersih yang menjadi bagian *stockholders*. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur ekonomi yang saat ini ada khususnya dalam lingkup usaha tani, pekerja dan petani merupakan kaum yang termarginalkan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata lebih menguntungkan pihak pemodal. Sedangkan akuntansi yang ada saat ini lebih cenderung hanya mengakomodir kepentingan kaum pemodal. Sehingga dari kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa saran. Saran yang penulis ajukan

yaitu diwujudkan trilogi usaha tani, diantaranya yaitu pertanian mandiri, pertanian berkelanjutan dan akuntansi yang akomodatif. Melalui trilogi usaha tani tersebut diharapkan keseimbangan tata kehidupan dapat terwujud. Keseimbangan tersebut berupa hubungan baik yang terjalin diantara manusia dengan Tuhan-nya (bekerja dengan prinsip *halal* dan *thoyib*), manusia dengan manusia (tidak ada eksploitasi, produk yang aman untuk dikonsumsi), manusia dengan lingkungan (tidak ada eksploitasi, menggunakan input pertanian yang aman bagi lingkungan). Pembahasan lebih lanjut tentang trilogi usaha tani dapat dilihat pada sub bab selanjutnya.

7.2 Membangun Pertanian yang Mandiri: Institusi Penyokong Pertanian

Penyerahan pembangunan pertanian kepada pihak perusahaan sebenarnya tidak akan banyak merubah keadaan pertanian Indonesia menjadi lebih baik, untuk jangka pendek mungkin hal tersebut dapat membantu ketersediaan pangan namun untuk jangka waktu yang relatif panjang hal tersebut justru akan menjadikan Indonesia mengalami ketergantungan pangan dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya cenderung lebih menguntungkan pihak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, terutama bab V dan bab VI. Walaupun kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan petani akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani. Namun jika kita mencermati kontrak tersebut justru lebih menguntungkan pihak perusahaan daripada pihak petani. Dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki, perusahaan dapat dengan mudah “mengatur” petani, terutama dalam hal pemberian harga panen.

Penyerahan pertanian dan pangan kepada pihak swasta dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan besar juga akan membahayakan ketersediaan pangan kita. Terdapat beberapa kelompok bidang yang sangat strategis dalam pengembangan pertanian di Indonesia yang saat ini lebih cenderung dikuasai perusahaan-perusahaan besar, yaitu yang pertama bidang perbenihan, pupuk dan pestisida, kedua bidang produksi pertanian, ketiga pasca panen. Sehingga hal tersebut (ketergantungan kepada perusahaan) harus segera dikurangi bahkan dihilangkan. Karena jika pertanian dan ketersediaan pangan tergantung pada produktivitas perusahaan-perusahaan tersebut dan jika kita kembali ke konsep harga pasar, dimana harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Maka, perusahaan tersebut telah mengambil alih kedaulatan pangan, pertanian, dan pasar. Seperti yang kita ketahui bersama jika produktivitas pangan diserahkan kepada pihak perusahaan berarti perusahaan-perusahaan tersebut akan dengan mudah mengontrol ketersediaan dan harga pangan di pasaran. Lebih jauh lagi penyerahan pangan dan pertanian Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tersebut akan mengubah budaya-budaya yang telah lama ada, karena perusahaan-perusahaan tersebut tentunya akan menggunakan konsep pertanian modern dalam menjalankan operasional bisnisnya, yang merupakan bagian dari efisiensi operasi perusahaan. Sehingga jawaban untuk segala permasalahan tersebut adalah kemandirian pertanian Indonesia.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya

tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (www.wikipedia.org).

Setiap bentuk pertanian merupakan usaha untuk mengubah ekosistem tertentu sehingga dapat menaikkan arus energi ke manusia. Persawahan mencapai hal ini dengan cara mengolah kembali alam sekitar, sedangkan perladangan dengan cara meniru alam sekitar (Geertz, 1983:16). Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan. Pertanian bahkan sudah menjadi cara hidup dan budaya masyarakat. Menurut Munthe (2007) hampir 80% atau lebih penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokok, sehingga pertanian merupakan lapangan kerja yang produktif serta menyediakan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain sebagai penyedia lapangan yang produktif, sektor pertanian juga menjadi sektor ekonomi yang menjaga nilai-nilai budaya lokal. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan bertani yang berbeda-beda. Di Bali terdapat artefak subak, dimana mulai dari pengambilan air dari sungai sampai pembagian di sawah merupakan keutuhan sistem irigasi yang bersifat teknologis, religius, dan sosial (Pitana: 1993, dalam Kompas: 2006). Daerah lain yang juga masih mempertahankan kebudayaannya adalah masyarakat Cijulang, sebuah kampung kecil di kaki Gunung Salak, hanya sekitar 75 km dari Ibukota Jakarta, juga

memiliki kearifan lokal pertanian organik melalui kebudayaan “Seren Taun”. Ditengah derasnya arus globalisasi, upacara tersebut masih dilestarikan oleh warganya. Tidak heran jika sistem pertanian organik masih dapat dijumpai di kawasan yang terletak di kaki Gunung Salak ini (<http://www.mb.ipb.ac.id>). Kedua budaya dalam usaha tani tersebut hanyalah sedikit contoh adanya kebudayaan pertanian di beberapa daerah di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi pertanian di masing-masing daerah tersebut.

Untuk sistem pertanian organik secara kultural sebenarnya sudah mengakar lama di Indonesia. Bentuk teknik-teknik pertanian yang diterapkan nenek moyang sebenarnya banyak diserap menjadi beberapa teknik yang sekarang dikenal sebagai teknik pertanian organik. Keterkaitan pertanian dengan ritual budaya di Indonesia cukup kental, salah satu bentuk ritual budaya lokal di tatar Sunda (seperti yang telah penulis sebutkan) adalah acara *Seren Taun* yang merupakan wujud penghormatan dan rasa syukur dari masyarakat petani di Jawa Barat terhadap alam dan Tuhan yang telah memberikan kelimpahan rahmat-Nya melalui tanah yang subur dan hasil bumi berupa sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian (*Sikep hejo buah beti*). Serta adanya harapan dan doa agar untuk pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan dapat melimpah juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Contoh lain yaitu “*slametan*” sebelum dan sesudah proses tanam yaitu ketika melakukan panen. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar pabrik gula milik PTPN di seluruh Jawa ketika akan memulai proses giling.

Bagaimana pemerintah dapat mewujudkan kemandirian pertanian yang pada akhirnya juga akan dapat mewujudkan kesejahteraan petani tanpa menghilangkan

kearifan lokal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu kita harus mencari tahu alasan petani menerima kontrak kerjasama dimana pada kenyataannya yang paling diuntungkan dari kontrak kerjasama tersebut adalah pihak perusahaan. Selain itu kita juga harus mencari tahu berbagai permasalahan yang membelit pertanian Indonesia. Untuk mengulas kedua permasalahan tersebut penulis akan menggunakan 6 bab pada pembahasan sebelumnya sebagai acuannya.

Pada dasarnya alasan petani bergabung menjadi petani kontrak adalah sebagai berikut, *pertama* petani mendapatkan kepastian pembelian hasil panen mereka. *Kedua*, petani dapat menghemat tenaga dan waktu karena petani tidak perlu memipil dan menjemur hasil panen mereka. *Ketiga*, harga beli hasil panen oleh pihak perusahaan lebih tinggi daripada jika petani melakukan pertanian mandiri (pertanian untuk keperluan konsumsi/bukan untuk keperluan produksi benih). *Keempat*, adanya kemudahan dalam pemerolehan modal (pinjaman) dari pihak perusahaan. Dan *kelima*, adanya transfer ilmu pengetahuan oleh perusahaan. Berbagai keuntungan itulah yang menyebabkan petani menerima posisi mereka sebagai pihak yang harus menerima segala kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dari penjelasan di atas poin penting yang diperoleh adalah bahwa untuk pembangunan pertanian Indonesia paling tidak dibutuhkan empat institusi utama, dimana keempat institusi tersebut harus saling mendukung satu sama lainnya dalam hal mewujudkan program pembangunan pertanian. Institusi-institusi tersebut diantaranya adalah yang *pertama* institusi yang bertugas sebagai stabilisator harga hasil pertanian (terutama harga panen mereka) dan penjamin terjualnya hasil panen

petani kapanpun petani ingin menjual hasil pertanian mereka, institusi tersebut dapat diwakili oleh BULOG atau pada tingkat yang lebih kecil pemerintah perlu memperkuat dan meningkatkan peran koperasi unit desa (KUD). Hal tersebut karena seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, harga produk pertanian akan selalu turun disaat terjadi panen raya yang pada akhirnya pendapatan yang diterima oleh petani menjadi relatif sedikit. Hal tersebut juga diperparah dengan melonjaknya harga-harga penunjang pertanian seperti pupuk dan benih ketika musim tanam tiba. Sehingga dengan adanya BULOG atau koperasi tersebut, sedikit banyak akan membantu petani dalam hal jaminan harga, kepastian pembelian, serta kemudahan mendapatkan informasi mengenai distribusi penjualan hasil panen. Hal tersebut seperti konsep *Al Hisbah* di jaman Rasul sampai dengan jaman keemasan Islam. Dimana saat itu terdapat aturan yang jelas bahwa pasar tidak dapat dibebaskan sepenuhnya, tetapi pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan pengendalian harga (Mulawarman, 2012:50).

Muhammad dan Fauroni (2002) juga menyatakan hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh Mulawarman (2012:50). Muhammad dan Fauroni (2002:113) menyatakan bahwa dalam implementasinya walaupun dalam pasar bebas terkesan adanya kebebasan antar kompetitor dalam memasarkan komoditas yang dimilikinya, tetapi bukan berarti kebebasan yang tiada terbatas. Karena pada dasarnya suatu transaksi atau perjanjian bisnis walaupun secara nyata berhubungan dengan sesama tetapi pada hakikatnya merupakan perjanjian dengan masyarakat, negara bahkan Allah. Dan hal tersebut merupakan aksioma kebebasan dan pertanggungjawaban.

Dan dengan landasan itu pula maka dalam sistem bisnis Islam menolak prinsip *laissez faire* dan konsep *invisible hand* (Mihammad dan Fauroni, 2002:114).

Dikarenakan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh BULOG dan koperasi dimasing-masing daerah, terutama dalam hal pembelian hasil panen maka, BULOG dan koperasi dapat berperan sebagai *adviser* (penasehat) bagi petani dalam memberikan informasi koperasi atau perusahaan di daerah lain yang dapat membeli hasil panen mereka dengan harga yang layak (setiap daerah tentunya memiliki jumlah panen dan kemampuan membeli hasil yang berbeda-beda, sehingga dapat dilakukan pembelian dan atau penjualan silang).

Kedua, institusi yang bertugas menjamin pasokan kebutuhan penunjang pertanian seperti pupuk dan obat penanggulangan hama. Selain menjamin ketersediaan pupuk, institusi ini juga bertugas sebagai penyelaras harga eceran tertinggi di tingkat pengecer. Namun sebaiknya institusi ini memproduksi produk mereka dengan bahan baku alami sebagai bahan baku utama dan sebisa mungkin menghindari bahan baku yang berasal dari bahan kimia. Atau dengan kata lain produk-produk yang mereka hasilkan adalah produk organik. Yang menjadi permasalahan adalah, produk penunjang pertanian organik tersebut tidak akan laku dipasaran jika masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan penunjang pertanian yang berasal dari bahan kimia. Sehingga peraturan yang memuat tentang pertanian kimia diperlukan agar penggunaan bahan penunjang pertanian yang berasal dari bahan kimia dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Tujuan dari penggunaan bahan baku organik adalah selain untuk menjaga kelestarian lingkungan hal tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap perusahaan swasta asing. Karena pada umumnya perusahaan-perusahaan swasta asing tersebut lebih memilih memproduksi bahan penunjang pertanian non-organik dikarenakan pembuatan bahan penunjang non-organik yang cukup sulit, selain itu bahan penunjang pertanian non-organik juga dapat menjadikan petani tergantung pada produk tersebut. Untuk produksi pupuk mungkin hal tersebut masih dapat dipenuhi, selain itu saat ini juga sudah mulai bermunculan perusahaan-perusahaan yang memproduksi pupuk organik. Sebenarnya untuk pertanian subsistem pestisida nabati sudah dapat dilakukan. Namun untuk pertanian yang cakupan wilayahnya luas masih diperlukan penelitian lebih lanjut, agar pestisida nabati dapat digunakan secara masal.

Sebenarnya jika dilihat dari konsep dan prinsip Penanggulangan Hama Terpadu (PHT), pestisida nabati mempunyai banyak keuntungan/keunggulan. Menurut Stoll (1995) dalam Sarjan (2009) dibandingkan dengan pestisida sintetik pestisida nabati mempunyai sifat yang lebih menguntungkan yaitu: (a) mengurangi resiko hama mengembangkan sifat resistensi, (b) tidak mempunyai dampak yang merugikan bagi musuh alami hama, (c) mengurangi resiko terjadinya letusan hama kedua, (d) mengurangi bahaya bagi kesehatan manusia dan ternak, (e) tidak merusak lingkungan dan persediaan air tanah dan air permukaan, (f) mengurangi ketergantungan petani terhadap agrokimia dan (g) biaya dapat lebih murah.

Ketiga, institusi yang bertanggungjawab menjamin ketersediaan modal bagi petani. Kredit pertanian merupakan salah satu kebutuhan penting bagi mayoritas

petani di sejumlah negara, terutama di negara berkembang yang berbasis pertanian. Kelangkaan kredit pertanian dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan petani khususnya bagi petani gurem. Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, pemerintah telah banyak mengimplementasikan program kredit untuk petani. Walaupun demikian, efektivitas dan keberlanjutannya serta peranannya masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga institusi yang menjamin ketersediaan modal bagi petani mutlak diperlukan. Sebenarnya institusi seperti itu sudah dimiliki oleh negara, institusi tersebut misalnya adalah bank. Namun saat ini pihak perbankan belum maksimal memerankan peran mereka sebagai lembaga intermediasi, dikarenakan skim kredit mereka yang sangat luas.

Di Indonesia belum ada lembaga keuangan sekelas perbankan yang fokus pada pembiayaan sektor pertanian, seperti halnya Bank Exim yang bertujuan menunjang kebijakan Pemerintah untuk mendorong program ekspor nasional. Institusi lainnya adalah BKD (Badan Kredit Desa), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), USP (Usaha Simpan Pinjam) dan lain-lain. Namun berbagai institusi pendukung dalam lingkup kecil tersebut belum bisa bekerja secara maksimal dan profesional dikarenakan tidak adanya suatu sistem yang terintegrasi yang mempunyai satu tujuan yang sama dengan berbagai langkah yang sama juga. Berbagai institusi kecil tersebut masih cenderung berjalan sendiri-sendiri, padahal untuk membangun sektor ekonomi yang besar dibutuhkan juga kekuatan yang besar. Sehingga institusi-institusi kecil tersebut pastinya juga memerlukan suatu pengelolaan organisasi yang “pas” dengan sokongan modal yang “pas” juga. Dan jawaban dari itu semua adalah bank yang secara khusus menangani masalah pertanian, baik dari sisi kredit maupun

penyimpanan uang hasil pertanian para petani, seperti halnya Malaysia yang telah memiliki Bank Pertanian Malaysia sejak tahun 1969. Yang perlu digaris bawahi dari operasional bank pertanian adalah bank pertanian sebaiknya tidak memberlakukan birokrasi yang berbelit-belit, karena pada umumnya petani kurang suka dengan proses birokrasi yang begitu panjang. Selain itu, suku bunga kredit yang rendah, jaminan serta cicilan yang tidak memberatkan juga perlu diberikan.

Keempat, adalah institusi yang memberikan penyuluhan dan berbagai pengetahuan tentang pertanian, terutama cara budi daya benih dan pengelolaan lahan yang baik serta pengetahuan-pengetahuan lain tentang pertanian. Pada ranah ini peran dinas pertanian beserta seluruh penyuluhnya perlu dimaksimalkan. Mereka mereka perlu dipacu untuk memberikan suatu ilmu baru kepada petani, tidak hanya menyalurkan bantuan kepada kelompok tani yang sebenarnya mereka (para penyuluh) terkadang juga melakukan suatu “manipulasi” kepada petani. Karena yang diperlukan petani tidak hanya bantuan dalam hal materi saja, akan tetapi juga bantuan berupa ilmu pengetahuan. Pemerintah juga dapat mengembangkan kemampuan petani (seperti Pak Tukirin) melalui program kerjasama penelitian antara petani, dinas pertanian dan LIPI atau lembaga-lembaga lain yang mengurus masalah pengembangan dan penelitian pertanian. Dalam ranah ini dinas pertanian juga dapat menjadi institusi yang memberikan informasi mengenai harga terbaru dari komoditas pertanian (selain BULOG dan Koperasi) agar petani dapat mengetahui informasi terkini tentang harga panen mereka, karena selama ini petani masih sangat kesulitan mengakses harga terkini dari komoditas pertanian yang pada akhirnya petani mempercayakan harga kepada tengkulak atau pihak perusahaan.

7.3 Kedaulatan Tanah, Air dan Benih bagi Petani

Permasalahan lain yang dihadapi petani selain masalah-masalah yang merupakan penunjang untuk mewujudkan pertanian yang mandiri (seperti yang telah penulis jelaskan di atas) adalah masalah perbenihan, air dan tanah yang merupakan kebutuhan pokok dalam lingkup usaha tani. Pertanian “asli”, atau dalam arti negatif sering disebut pertanian tradisional terbentuk dari tiga unsur dasar yaitu benih, tanah, dan tenaga dalam suatu bingkai budaya. Walaupun ketiga unsur dasar pertanian tersebut berinteraksi secara triangular dalam suatu bingkai budaya, namun budayalah yang memberi bentuk atau pola diantara ketiga unsur dasar tersebut. Salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak boleh bernilai nol, karena jika ada yang bernilai nol, maka resultannya juga akan bernilai nol. Artinya, tidak ada realisasi kegiatan pertanian jika misalnya unsur tenaga kerja tidak ada, walaupun benih (untuk ditanam) dan tanah (untuk ditanami) tersedia (Sitorus, 2006).

Tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia, tumbuhan, hewan dan beberapa makhluk hidup lainnya seperti organisme hidup di atas tanah. Manusia memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sedangkan makhluk hidup lainnya memperoleh bahan makanan sesuai dengan rantai makanan yang mereka lalui. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terpisahkan dari keberadaan tanah. Dalam Al Quran Surat Yaasiin, Ayat 33 Allah berfirman:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Tanah mempunyai makna yang sangat strategis pula karena di dalamnya terkandung tidak saja aspek fisik akan tetapi juga aspek filsafat sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan-keamanan dan hukum. Secara filosofi, bahkan masyarakat Jawa pada umumnya memiliki falsafah: *sedhumuk bathuk senyari bumi, pecahing dodo, wutahing ludira, thumekaning pathi*, dimana bila diterjemahkan secara bebas bermakna segumpal tanah itu memiliki kedudukan yang sangat strategis, sangat berarti, yang dengan segala daya upaya akan dipertahankan termasuk pertumpahan darah, bahkan nyawa akan dikorbankan demi mempertahankan hak milik atas tanah. Sehingga tidak mengherankan jika dalam satu dekade terakhir sering terjadi sengketa tanah yang berakhir dengan pertumpahan darah.

Dari berbagai literatur yang penulis baca dan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dimana pada tahap akhir penulis melakukan visualisasi atas pendapatan petani, dapat ditarik kesimpulan bahwa luas kecilnya kepemilikan lahan oleh petani menentukan kesejahteraan yang diperoleh oleh petani. Dari penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa salah satu penyebab utama terbelitnya petani dalam lingkaran kemiskinan adalah masalah kepemilikan lahan. Sehingga untuk meningkatkan taraf hidup petani dan juga untuk menjaga pasokan pangan dibutuhkan tambahan lahan bagi petani. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kemal (2012), Kemal (2012) menggunakan data BPS tahun 2003 untuk menghitung tambahan lahan pertanian untuk setiap petani di Indonesia. Menurut perhitungan Kemal (2012) saat ini (2003) setidaknya ada sekitar 59,1 juta rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah tersebut diperkirakan rumah tangga pertanian sekitar 30 juta. Dimana jumlah rumah tangga

petani gurem sekitar 54 persen dari total keseluruhan jumlah rumah tangga pertanian. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui setidaknya ada sekitar 16 juta petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Idealnya penguasaan lahan pertanian oleh setiap rumah tangga petani adalah 2 hektar. Maka perlu penambahan lahan untuk petani rata-rata 1,5 hektar. Saat ini luas lahan pertanian di Indonesia baru sekitar 19,81 juta hektar. Untuk mencapai jumlah ideal masih dibutuhkan penambahan lahan pertanian sekitar 24 juta hektar. Jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti maka neraca perdagangan pertanian subsektor tanaman pangan akan terus mengalami neraca perdagangan negatif, selain itu pertanian “asli” Indonesia juga akan terancam keberadaannya.

Masih banyaknya masyarakat miskin, terutama masyarakat pertanian yang disebabkan karena mereka tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar menandakan pemerintah belum sepenuhnya patuh terhadap hukum. Karena dasar hukum pengelolaan alam Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana di dalam teks asli UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut seakan menegaskan bahwa kepentingan rakyat lebih tinggi kedudukannya daripada kepentingan korporasi maupun penguasa. Pembaharuan bidang agraria tersebut juga diperkuat oleh peraturan-peraturan lain, seperti UUPA Tahun 1960, UU 56 Prp Tahun 1960 serta peraturan-peraturan lainnya. Dari peraturan-peraturan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakekat pembaruan agraria adalah upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang sehingga tidak ada konsentrasi

berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang.

Aspek penting kedua setelah tanah adalah air, air merupakan sarana penting bagi kehidupan. Seperti yang kita semua ketahui sekitar 70 persen wilayah yang ada di dunia berupa wilayah perairan. Di dalam tubuh kita sekitar 60 persennya juga berupa air. Bahkan proses awal penciptaan manusia berasal dari air, hal tersebut seperti yang ditegaskan dalam Al Quran Surat Al Furqan Ayat 54:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Pentingnya kebutuhan akan air juga pastinya dirasakan oleh petani, terutama untuk mengairi lahan pertanian mereka baik untuk menyiapkan lahan pertanian maupun untuk mengairi tanaman mereka.

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS. An Nahl:11)

Namun, suplai air yang berlebihan juga akan menyebabkan banjir yang pada akhirnya juga akan merusak tanaman petani, sehingga diperlukan pengelolaan air yang baik agar sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan dan perawatan sarana irigrasi mutlak diperlukan agar pengairan yang ada dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk menampung air berlebih juga perlu dibangun kolam penampungan oleh petani. Kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada agar Allah tidak menurunkan bencana kepada kita (baik banjir maupun kekeringan).

Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. (QS. Saba':16)

Pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, terutama kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi ketersediaan air di Indonesia. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2004. Dimana UU tersebut secara substansi membolehkan adanya privatisasi dan eksploitasi atas sumber-sumber air oleh korporasi. Disamping itu pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit juga perlu dihentikan agar kerusakan hutan tidak menjadi semakin parah, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada iklim dan cadangan air tanah. Pengelolaan hutan dan air oleh korporasi pada kenyataannya justru hanya akan menguntungkan korporasi. Hal tersebut seperti penjelasan Saragih (2010), Saragih (2010) menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi (BPPE), Jateng, Wilayah Solo, antara Februari hingga Mei 2004 PT Tirta Investama mengeksploitasi air tanah sebanyak 30.000 meter kubik (30 juta liter) hingga 40.000 meter kubik (40 juta liter) per bulan. Jika seluruh air baku dipergunakan untuk memproduksi AMDK dengan estimasi harga terendah Rp 1.300, maka perusahaan itu bisa memasarkan AMDK senilai Rp 30 milyar hingga Rp 42 milyar per bulan.

Sedangkan aspek ketiga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kedaulatan benih oleh petani. Benih merupakan modal dasar terpenting bagi usaha pertanian dan produksi bahan pangan dunia. Sehingga yang harus "menguasai" benih adalah pelaku utama pertanian, yaitu petani. Bukan korporasi-korporasi besar

yang hanya memikirkan laba bagi *stockholder* dan kepentingan pribadi manajemen. Paten benih oleh korporasi seakan juga menegaskan bahwa mereka lah yang menciptakan makhluk hidup dan jika pihak lain akan memproduksi benih tersebut harus seijin mereka. Padahal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup di dunia ini termasuk tumbuh-tumbuhan yang berasal dari biji-bijian (benih).

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?(Q.S Al An'aam:95).

Selain itu jika kedaulatan benih kepada petani tidak diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan keadaan pertanian dan petani Indonesia akan menjadi semakin lebih buruk lagi. Pemerintah seharusnya memaknai swasembada pangan secara lebih luas agar keinginan pemerintah tersebut tidak serta merta mengorbankan kepentingan petani. Keinginan swasembada pangan oleh pemerintah bukan berarti harus meminggirkan posisi petani sebagai pemulia benih. Keinginan swasembada pangan oleh pemerintah seharusnya menempatkan petani sebagai pelaku utama pemulia benih.

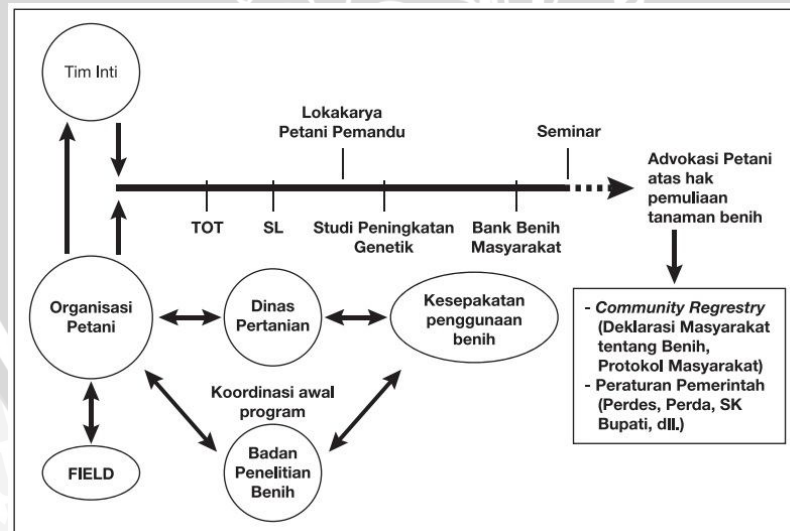
Dengan menjadikan petani sebagai pelaku utama pemulia benih, diharapkan ketergantungan pertanian dan petani kepada perusahaan menjadi semakin kecil. Hal tersebut karena, selain dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap benih perusahaan, kemandirian petani dalam benih juga dapat mengurangi ketergantungan petani pada penggunaan bahan pendukung pertanian lainnya seperti pupuk kimia dan pestisida yang notabene dapat merusak lingkungan, karena pada umumnya perusahaan membuat benih yang telah didesain agar benih tersebut tergantung pada

bahan pendukung pertanian lainnya seperti yang telah dilakukan oleh PT BISI International melalui *bundling strategy*-nya. Hal tersebut juga dipertegas oleh Teori Kesejajaran Sadjad (Sadjad *et al.*, 2001 dalam Sitorus, 2006) dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa benih merupakan penentu utama produktivitas, dalam arti semua unsur dasar lain dan faktor-faktor (sarana) produksi tergantung pada kualitas benih. Kualitas benih akan menentukan kualitas terapan teknologi dan manajemen atau dengan kata lain kualitas benih juga menentukan banyaknya asupan pupuk atau obat lainnya bagi pertumbuhan benih tersebut.

Memberikan kedaulatan benih kepada petani juga berarti memberikan jaminan atas terjaganya keanekaragaman hayati dalam hal perbenihan. Karena dengan memberikan kedaulatan benih kepada petani berarti pemerintah telah memperkuat hubungan kekeluargaan antar petani, karena pada umumnya para petani akan *urun rembug* untuk mendapatkan benih yang sesuai dengan lingkungan sekitar, bahkan lebih jauh lagi mereka juga dapat saling tukar menukar benih yang sesuai dengan daerah mereka. Benih yang dikembangkan atau dimuliakan oleh petani dan pemulia tanaman juga dapat memperbaiki tanaman budi daya. Contohnya adalah munculnya varietas dengan tingkat adaptasi tinggi. Karena itu, pengelolaan benih merupakan isu utama bagi petani dan menjadi elemen kunci untuk mengatasi tantangan dalam merespon beragam kondisi dan kebutuhan petani, meningkatkan produksi, dan mencapai keamanan pangan. Dan hal tersebut dapat dicapai jika seluruh elemen bersatu dan saling mendukung terwujudnya kemandirian pertanian terutama dari pihak pemerintah. Seperti yang telah dilakukan oleh Lesman (Lestari Mandiri) sebuah LSM yang bekerjasama dengan petani di Kabupaten Boyolali, Jawa

Tengah melalui Forum Pengelola Pembenuhan. Dalam forum tersebut petani dan LSM bersama-sama melestarikan benih lokal, salah satunya adalah melalui diskusi-diskusi dalam pertemuan kelompok, maupun diskusi antar kelompok yang dirancang dalam Lokakarya Standardisasi Benih. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati dalam perbenihan adalah dengan cara mendirikan bank benih seperti yang telah dilakukan oleh warga Ubud, Kabupaten Gianyar bersama dengan Yayasan IDEP. Di bank benih, masyarakat yang menghasilkan benih dapat menyimpan dan meminjam benih. Selain itu juga tersedia contoh-contoh pembenuhan yang bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Upaya menjaga dan memuliakan benih oleh petani secara lebih lengkap dilakukan oleh Yayasan *Farmers Initiative Ecological Livelihood and Democracy* (FIELD). Secara garis besar proses pemuliaan benih bersama petani dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 7.1 Strategi Program Pemuliaan Benih



Sumber: Sutarya dan Munthaha, 2007

Bagan di atas merupakan bagan strategi program yang dilakukan oleh Yayasan *Farmers Initiative Ecological Livelihood and Democracy* (FIELD).

Bersama dengan *Participatory Enhancement of Diversity of Genetic Resources in Asia* (Pedigree), pada tahun 2002 Yayasan FIELD memulai Program Pemuliaan Tanaman Berbasis Keanekaragaman Hayati melalui Sekolah Lapangan (SL) Petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan segala keterbatasan, terutama peraturan yang membatasi mereka (Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman/UUPVT yang berpihak pada kepentingan bisnis) mereka berhasil memuliakan varietas tanaman unggul. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan dari hasil kerja keras petani (misalnya benih petani dipatenkan oleh suatu perusahaan benih), masyarakat Desa Jengkok kemudian sepakat membuat deklarasi pada tanggal 31 Juli 2007, yang menyatakan galur baru mereka adalah milik masyarakat Jengkok. Deklarasi tersebut merupakan komitmen untuk menegaskan bahwa pemuliaan tanaman adalah hak petani berikut hasil yang mereka dapat. Cara ini ditempuh agar petani mampu melindungi haknya dari kepentingan industri benih. Mereka juga berkomitmen untuk tidak memperjualbelikan benih hasil persilangan petani.

7.4 Pertanian Berkelanjutan: Kehidupan untuk Generasi Selanjutnya

Kemandirian pertanian yang diwujudkan tidak akan ada artinya jika hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini saja. Oleh karena itu kemandirian yang dibangun haruslah kemandirian yang juga memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk mengenal pertanian yang telah ada dan untuk mengembangkannya sesuai dengan perkembangan jaman tanpa menghilangkan budaya dan merusak ekosistem yang telah mapan. Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti *Bhinneka*

Tunggal Ika secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bak untaian zamrud di khatulistiwa, dan juga sumber daya budaya (*cultural resources*) yang bergam coraknya (Koentjaraningrat, 1988; Hardjono, 1991; Nurjaya, 2006:1).

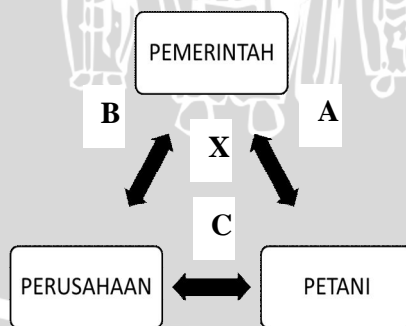
Temuan-temuan yang diulas pada bab sebelumnya seakan menegaskan bahwa berbagai ragam budaya, sumber daya alam dan ekosistem tersebut saat ini keberadaannya terancam. Pembangunan pertanian yang bias untuk memacu produksi khususnya tanaman pangan telah berdampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Di beberapa daerah di Jawa, petani menggunakan pupuk secara berlebihan, seperti urea, TSP, dan SP-36, sehingga menimbulkan residu zat kimia di dalam tanah dan air. Demikian pula penggunaan pestisida yang berlebih pada beberapa komoditas pangan telah menimbulkan resistensi dan resurgensi berbagai hama dan penyakit. Padahal di dalam Al Quran Allah telah berfirman:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash : 77)

Apa yang dilakukan oleh petani dan pihak lainnya tentunya mengancam kelestarian alam dan lingkungan yang pada akhirnya juga akan mengganggu kelangsungan kehidupan generasi selanjutnya. Selain itu apa yang dilakukan oleh petani dan pihak lainnya jika disandingkan dengan ayat di atas dikhawatirkan juga

akan cenderung menjurus ke perbuatan *dzalim*, *dzalim* terhadap alam maupun generasi selanjutnya. Sehingga dibutuhkan paradigma baru pembangunan pertanian, baik mengenai arah, strategi maupun kebijakan, agar berbagai masalah yang muncul dapat dipecahkan. Hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam lingkaran invitasi laba dimana melalui kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak mereka menekan pihak lain yang memiliki kekuasaan lebih kecil dari mereka yang pada akhirnya terdapat pihak yang tereksplotasi dimana salah satunya adalah alam. Invitasi laba merupakan suatu usaha pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara mengundang pihak lain untuk bekerjasama dengan mereka, dimana kinerja pihak lain tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada perolehan laba pihak pengundang. Dalam invitasi laba ini pihak pengundang tidak akan dapat menghasilkan laba yang maksimal jika mereka tidak mengundang pihak tertentu untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Proses terjadinya invitasi laba akan digambarkan pada gambar 7.2 berikut.

Gambar 7.2
Proses Invitasi Laba-Proses Degradasi Lingkungan



Keterangan:

- A) Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan bidang pertanian kepada petani, mulai subsidi benih hingga pupuk kimia demi tujuan swasembada pangan. Demi meningkatkan pendapatan, pada akhirnya petani menggunakan pupuk dan pestisida yang berbahaya baik bagi kesehatan petani, konsumen maupun kelestarian lingkungan.

- B) Pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada perusahaan mulai dari kemudahan investasi, kemudahan dalam peraturan hingga pemberian akreditasi pemerintah dari Institute of Certification on Quality System untuk melakukan *self-labeling* pada produknya seperti yang telah diberikan kepada PT BISI International. Sedangkan pihak perusahaan memproduksi berbagai bahan pertanian yang notabene mengancam kelestarian lingkungan demi memaksimalkan laba mereka.
- C) Perusahaan melakukan kerjasama dengan petani untuk memproduksi benih komersial mereka. Petani diharuskan menggunakan teknik penanaman perusahaan. Dengan alasan pendapatan yang lebih tinggi petani menerima tawaran tersebut. Perusahaan menjual produk mereka yang berbahaya kepada petani. Sedangkan petani menggunakan produk berbahaya tersebut ketika melakukan kegiatan usaha tani. Baik perusahaan maupun petani sama-sama menggunakan produk tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan laba mereka.
- D) X adalah lingkungan alam, sosial-budaya, maupun religi masyarakat.

Pada bagan 7.2 di atas walaupun pemerintah dapat menjadi pihak pengundang, namun berdasarkan analisis kasus yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya perusahaan bidang pertanian yang cenderung lebih besar kemungkinannya menjadi pihak pengundang, sedangkan pihak yang diundang adalah pemerintah dan petani. Bagan 7.2 di atas juga memperkuat pernyataan Hartaty (2007), dimana hartaty menjelaskan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial karena pertanian dengan input luar tinggi atau *high external input agriculture* (HEIA) menjadi semakin jelas pada saat sekarang ini. Pada saat yang sama, banyak komunitas petani kecil yang tidak diuntungkan, dipaksa untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia bagi mereka secara sangat intensif sehingga terjadi degradasi lingkungan. Padahal Allah telah memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah untuk *isti'mar* (memakmurkan bumi), seperti yang tercantum dalam Q.S Hud Ayat 61.

....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).

Kata isti'mar (memakmurkan bumi), secara etimologis bermakna kekekalan, zaman yang panjang, dan sesuatu yang tinggi, dan secara lesikal bermakna panjang usia, banyak harta, menghuni, memanjangkan usia, membangun dan mengurus sesuatu dengan baik (Thobroni, 2011:115). Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia diberi tugas untuk menghuni, membangun, mengurus bumi dengan baik sepanjang jaman agar generasi selanjutnya juga dapat memanfaatkan dan memakmurkan bumi. Jika hal tersebut dihubungkan dengan pertanian maka konsep pertanian modern yang selama ini kita kenal cenderung menyimpang dari tujuan penciptaan manusia karena pertanian modern cenderung bersifat eksploitatif terhadap lingkungan. Sehingga petani, pemerintah maupun perusahaan perlu merubah paradigma usaha tani mereka agar kelestarian lingkungan dapat terjaga, dan jawaban atas hal tersebut adalah pertanian berkelanjutan.

Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam serta perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (*Food and Agriculture Organization*, 1989). Pembangunan pertanian, kehutanan, dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan hewan, tidak merusak lingkungan, serta secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima (Saptana dan Ashari, 2007). Dari pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan

sebuah pola pertanian yang menempatkan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang telah mapan sebagai kunci utama keberhasilannya.

Melalui pertanian berkelanjutan diharapkan akan timbul paradigma baru dalam kegiatan usaha tani. Salah satu paradigma yang dapat dipakai untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan adalah “Ekologi Budaya” seperti yang diintrodusir oleh Sitorus (2006). Dengan paradigma baru tersebut pertanian akan dikembalikan kepada makna sebenarnya yaitu sebagai kegiatan budidaya (bukan hanya kegiatan tanam-menanam untuk mencari keuntungan), pertanian juga akan dikembalikan kepada bentuk dasarnya yaitu pertanian organik. Paradigma baru tersebut juga akan mengembalikan posisi benih, tanah, dan tenaga sebagai komponen utama pertanian. Ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan berinteraksi secara triangular dalam satu bingkai budaya, kemudian budaya akan memberi bentuk atau pola pada interaksi ketiga unsur tersebut. Budaya akan merumuskan bagaimana benih harus dihubungkan dengan tanah dan bagaimana tenaga harus berperan dalam hal itu. termasuk dalam hal pemilihan jenis benih yang cocok dengan sifat dan ciri tanah tertentu, atau mengubah sifat dan ciri tanah agar cocok dengan jenis benih tertentu (Sitorus, 2006).

Pertanian berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan, pertanian berkelanjutan juga harus segera diwujudkan. Bila pertanian berkelanjutan ini benar-benar dapat diwujudkan diharapkan segala permasalahan lingkungan usaha tani dapat segera diatasi. Bila pertanian berkelanjutan benar-benar dapat diwujudkan diharapkan generasi-generasi selanjutnya dapat mengenal, menghargai dan melestarikan serta mengembangkan teknik-teknik budidaya pertanian yang lebih baik dan ramah

terhadap lingkungan. Dan bila pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan keamanan pangan bagi konsumen dan kesehatan kerja bagi petani dapat diwujudkan yang pada akhirnya akan dapat terwujud suatu keharmonisan dalam kehidupan ini, dimana alam menyediakan berbagai sumber daya dan manusia mengelolanya secara arif dan bijak.

7.5 Akomodasi Kemandirian Petani dan Pertanian Berkelanjutan ke dalam Akuntansi

Konsep *income* seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar dan IAS 41 menunjukkan bahwa usaha tani hanya dipandang sebagai sebuah bisnis yang dihitung berdasarkan untung rugi. Hal tersebut terlihat dari pengertian pertanian menurut IAS 41. Pertanian menurut IAS 41 adalah pengelolaan oleh entitas atas perubahan biologis dan pemanenan aset biologis untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Perubahan biologis tersebut meliputi proses penanaman (pertumbuhan), degenerasi, produksi (pemanenan), dan penambahan aset biologis secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian berdasarkan konsep IAS 41 diukur berdasarkan ukuran ekonomi, yang berarti kegiatan atau pengeluaran kas yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi sebaiknya tidak dimasukkan dalam kegiatan pertanian. Walaupun dimasukkan maka akan mengurangi pendapatan petani (*revenue*) dan pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan bersih petani (*Net Farm Income*).

Lebih jauh lagi konsep *net farm income* (NFI) yang diintrodusir oleh Agromisa Foundation maupun pakar agroekonomi cenderung mengeksploitasi

lingkungan dan manusia (petani). Hal tersebut terlihat dari analisis posisi petani dalam kontrak kerjasama melalui pendekatan *net farm income*, seperti yang telah dijelaskan pada bab V. Dari berbagai masalah yang terdapat dalam IAS 41 terutama pada konsep *net farm income*, *fair value* maupun akrual basis diperlukan konstruksi baru yang dapat mengakomodasi berbagai budaya yang terkandung dalam kegiatan usaha tani karena budayalah yang memberi bentuk atau pola pada interaksi unsur dasar pertanian tersebut (tanah, benih dan tenaga). Konsep laba yang digunakan juga seharusnya dapat mengakomodasi segala kepentingan di setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan usaha tani agar invitasi laba-proses degradasi lingkungan tidak terjadi.

Pertanian menurut penulis bukanlah sekedar mencari untung/rugi, pertanian menurut penulis lebih cenderung sebagai cara hidup masyarakat pedesaan. Sehingga pertanian tradisional di Indonesia berbeda dengan pertanian yang dijelaskan dalam IAS 41, karena pertanian tradisional di Indonesia merupakan sebuah pertanian yang bertumpu pada hukum alam. Pola-pola yang ada di dalam hukum alam tersebut digunakan petani untuk menjalankan kegiatan pertanian agar tercipta suatu keharmonisan antara masyarakat (dalam hal ini petani) dengan alam. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Julian Steward, beliau mengatakan bahwa kesalingtergantungan antara pola-pola kebudayaan dan hubungan organisme lingkungan hidup tampak jelas dan sangat penting (Geertz, 1983:7). Sehingga tidak mengherankan jika selama melakukan kegiatan pertanian tradisional biasanya petani juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi-sosial-spiritual. Melihat begitu dominannya budaya dan lingkungan dalam kegiatan usaha tani seharusnya

fiqh yang digunakan untuk merumuskan konsep pendapatan bukanlah *fiqh muammalah*, tetapi *fiqh* yang dapat mengakomodasi keberlanjutan lingkungan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Dan *fiqh* yang sesuai dengan itu semua adalah *fiqh* lingkungan-sosial seperti yang dijelaskan oleh Mahfudz (1994), dimana *fiqh* tidak hanya dipelajari secara tekstual saja tetapi juga secara kontekstual.

Dalam Islam akuntansi merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Dimana tujuan utama dari kegiatan akuntansi bukanlah sebagai alat hitung menghitung untuk mencari untung semata, melainkan sarana untuk menghitung setiap kekayaan yang dimiliki untuk membayar kewajiban yang dilekati (zakat). Lebih jauh lagi Triyuwono (2006) telah mengajukan konsep metafora amanah yang kemudian diturunkan menjadi realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan organisasi bisnis (dan sosial) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teologikal (Triyuwono 1997;2000a dalam Triyuwono, 2006:346). Dengan fungsi tersebut manusia memiliki tugas mulia, yaitu: menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non-materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Dengan metafora amanah yang diturunkan menjadi metafora zakat tersebut organisasi bisnis orientasinya tidak lagi *profit* atau *stockholder oriented*, tetapi mengarah kepada zakat, *environment* dan *stakeholder* yang menjadi kriteria ukuran kinerja perusahaan.

Bagi umat Islam, kegiatan di dalam bidang pertanian merupakan cara yang mudah untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah *Subkhanahu wa Ta'ala* di samping mendapat manfaat atau pendapatan yang halal dari hasil penjualan hasil pertanian. Bahkan dalam hadis riwayat Al Bukhari dijelaskan bahwa “*Tiada seorang Muslim pun yang bertani atau berladang lalu hasil pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang melainkan bagi dirinya daripada tanaman itu pahala sedekah*”. Sedangkan menurut sejarah Islam, setelah Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* tiba di Madinah, Baginda telah menggalakkan usaha pertanian agar ditingkatkan. Bumi Madinah ketika itu memang subur dan perlu dimanfaatkan dengan lebih giat. Dalam hubungan ini, kaum Muhajirin yang berhijrah bersama Baginda disarankan supaya bekerjasama dengan kaum Ansar yaitu penduduk asal Madinah di dalam kegiatan usaha pertanian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dan melihat begitu pentingnya sektor pertanian maka penulis menyarankan penggunaan konsep *shari'ate value added* (SVA) dalam penghitungan *shari'ate net farm income* (konsep laba/rugi syariah di bidang pertanian). Karena konsep tersebut lebih dekat dengan nilai-nilai syariah yang notabene menjadi hukum dasar dalam kegiatan usaha. Konsep SVA merupakan cerminan konsep metafora zakat, karena *shari'ate value added* (SVA) adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual atau non-material. Prinsip *tazkiyah* adalah bentuk keseimbangan dari substansi SVA, yaitu *zakat*. Sehingga *zakat* menjadi simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. *Tazkiyah* merupakan konsep yang ditawarkan Islam yang tidak hanya dipahami

secara normatif sebagai proses penyucian diri manusia secara terus menerus. *Tazkiyah* merupakan konsep antitesis sifat perkembangan yang menjadi dasar semua nilai kapitalisme untuk mewujudkan keinginan dan hasrat egosentris manusia serta memuaskan sifat *selfish* manusia. Sehingga dengan melakukan penyucian tersebut manusia diharapkan akan menjadi lebih baik (dalam hal akhlak maupun perbuatan).

Melalui konsep *shari'ate value added* setiap apa yang diperoleh dari kegiatan usaha tani tentulah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh agama karena konsep *shari'ate value added* lebih dekat dengan *Shariate Enterprise Theory*. *Shariate Enterprise Theory* adalah sebuah konsep yang dibangun dari tiga basis dasar akuntansi syariah, yaitu tazkiyah, tawhid dan mahabbah (Mulawarman 2009;2012:28). Sehingga tidak akan terjadi eksploitasi terhadap pihak-pihak tertentu baik petani maupun lingkungan, karena segala perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik tunggal, yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang ditegaskan Al Quran:

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. (QS. An Nisaa':126)

Konsep *shari'ate value added* juga menunjukkan hakikat diri manusia yang juga merupakan bentuk akuntabilitas manusia. Menurut perspektif syariah, hakikat manusia menurut Triuwono (2004) berpandangan pada dua hal. *Pertama*, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas dan terikat. Ini berarti bahwa manusia mempunyai kebebasan yang penuh dalam mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam dirinya, namun pada saat yang bersamaan ia secara moral harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Pandangan ini tentunya berbeda dengan modernisme

yang melihat hakikat manusia pada dua sifat antagonistik-yaitu terikat (*determinime*) (pasif) dan bebas (*voluntary*) (aktif) dan saling meniadakan.

Kedua, manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat atau kapasitas “Ketuhanan” dan “Kemakhlukan” yang dengannya, manusia diutus ke bumi untuk menciptakan dan menebarkan kesejahteraan atau kebaikan untuk seluruh makhluk. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua tindakannya harus dikonfirmasi dengan kapasitas “Ketuhanan” yang dimiliki, yang terutama adalah “hati nurani”. Oleh karena itu, suatu hal yang logis bila manusia tersebut adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dalam tindakan konkret dan abstrak serta sekaligus mengingatkan diri pada “hati nurani” agar segala tindakannya selalu berpijak niali “Ketuhanan”, yaitu nilai-nilai etika (Triyuwono dalam Subiyantoro dan Triyuwono, 2004:204). Dan jika dikaitkan dengan pertanian, maka kegiatan usaha tani yang dilakukan tidak boleh bersifat eksploitatif, baik kepada petani maupun lingkungan. Karena dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akherat yang keseluruhannya mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah (Qaradhawi, 2007:7).

Sedangkan untuk konsep *fair value* secara umum penulis tidak mempermasalahkan penggunaannya selama harga yang digunakan adalah harga pasar atau harga jual saat ini yang tidak terdeviasi atau dengan kata lain harga jual tersebut merupakan harga jual wajar dan bukan harga jual dalam keadaan likuidasi. Selain itu harga pasar yang terbentuk juga merupakan harga pasar murni yang tidak terkooptasi oleh korporasi. Sehingga dari kesimpulan tersebut penulis beranggapan bahwa agar terbentuk suatu harga pasar yang *fair* (adil) diperlukan campur tangan

pemerintah atau dengan kata lain pemerintahlah yang menentukan harga pasar atas hasil panen petani, tentunya harga tersebut tidak merugikan petani. Sedangkan untuk akualisasi aset biologi sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam laporan rugi laba karena hal tersebut akan menyebabkan volatilitas laporan keuangan terutama akualisasi aset biologi yang tidak untuk dijual. Selain itu akualisasi aset biologi yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi tersebut juga bersifat *gharar*, padahal di dalam Al Quran Surat Luqman Ayat 34 Allah telah berfirman.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Akualisasi aset biologi yang tidak untuk dijual maupun untuk dijual menurut penulis dapat dilakukan selama perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan neraca (dimasukkan kedalam aset maupun persediaan). Akualisasi juga dapat dilakukan pada pencatatan hutang-piutang. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari konsep kehati-hatian dalam pembayaran zakat. Untuk akualisasi hutang-piutang di dalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 282 Allah berfirman.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha tani, untuk laporan laba rugi konsep pengakuan yang digunakan adalah *cash basis*, *cash basis* yang dimaksud penulis adalah hasil panen yang telah diterima atau dilakukan oleh petani (tidak harus dalam bentuk uang). Karena zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen tersebut. Selain itu konsep *cash basis* juga sesuai jika digunakan dalam perhitungan bagi hasil. Sedangkan untuk hutang-piutang dan aset biologi lainnya yang masuk ke dalam aset maupun persediaan dapat dilakukan pengakuan secara akrual. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pembayaran zakat.

7.6 Refleksi

Akuntansi sebagai ilmu yang tidak bebas nilai tentunya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Demikian pula dalam pembangunan akuntansi pertanian, tentunya juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan pertanian. Lingkungan pertanian sendiri juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan (baik pemerintah maupun perusahaan), sehingga antara pertanian dan akuntansi seharusnya masing-masing dibuat regulasi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk bidang pertanian, pertanian yang dibangun haruslah pertanian yang mandiri yang disokong oleh institusi-institusi yang berhubungan (langsung maupun tidak) dengan bidang pertanian.

Pertanian yang dibangun juga haruslah pertanian yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga diperlukan kemauan pemerintah untuk menjamin kedaulatan tanah, air dan benih kepada petani. Karena hal tersebut secara

langsung akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh petani. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa penggunaan benih hibrida, pupuk kimia, dan pestisida serta keikutsertaan kontrak kerjasama dengan perusahaan oleh petani dikarenakan adanya keinginan petani untuk meningkatkan hasil panen mereka yang pada akhirnya juga akan meningkatkan laba bersih mereka. Sehingga dengan memberikan tambahan tanah, ketersediaan air dan juga pemberian hak pemuliaan benih kepada petani diharapkan, pola pertanian yang merusak lingkungan dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Sedangkan konsep *income* yang sesuai dengan pola pertanian yang ramah lingkungan menurut penulis adalah konsep *shari'ate value added*. Karena dalam konsep *shari'ate value added* tersebut kepentingan seluruh *stakeholder* dapat diakomodir, mulai dari kepentingan produsen, konsumen, pekerja, pemerintah sampai dengan lingkungan. Konsep tersebut juga lebih dekat dengan nilai-nilai syariah yang notabene menjadi hukum dasar dalam kegiatan usaha. Konsep SVA merupakan cerminan konsep metafora zakat, karena *shari'ate value added* (SVA) adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual atau non-material. Akualisasi aset biologi yang tidak untuk dijual maupun untuk dijual menurut penulis dapat dilakukan selama perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan neraca (dimasukkan kedalam aset maupun persediaan). Akualisasi juga dapat dilakukan pada pencatatan hutang-piutang. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari konsep kehatia-hatian dalam pembayaran zakat.

Dan untuk untuk laporan laba rugi, konsep pengakuan yang digunakan adalah *cash basis*, *cash basis* yang dimaksud penulis adalah hasil panen yang telah diterima atau dilakukan oleh petani (tidak harus dalam bentuk uang). Karena zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen tersebut. Selain itu konsep *cash basis* juga sesuai jika digunakan dalam perhitungan bagi hasil. Sedangkan untuk hutang-piutang dan aset biologi lainnya yang masuk ke dalam aset maupun persediaan dapat dilakukan pengakuan secara akrual. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pembayaran zakat.

7.7 Batasan Penelitian

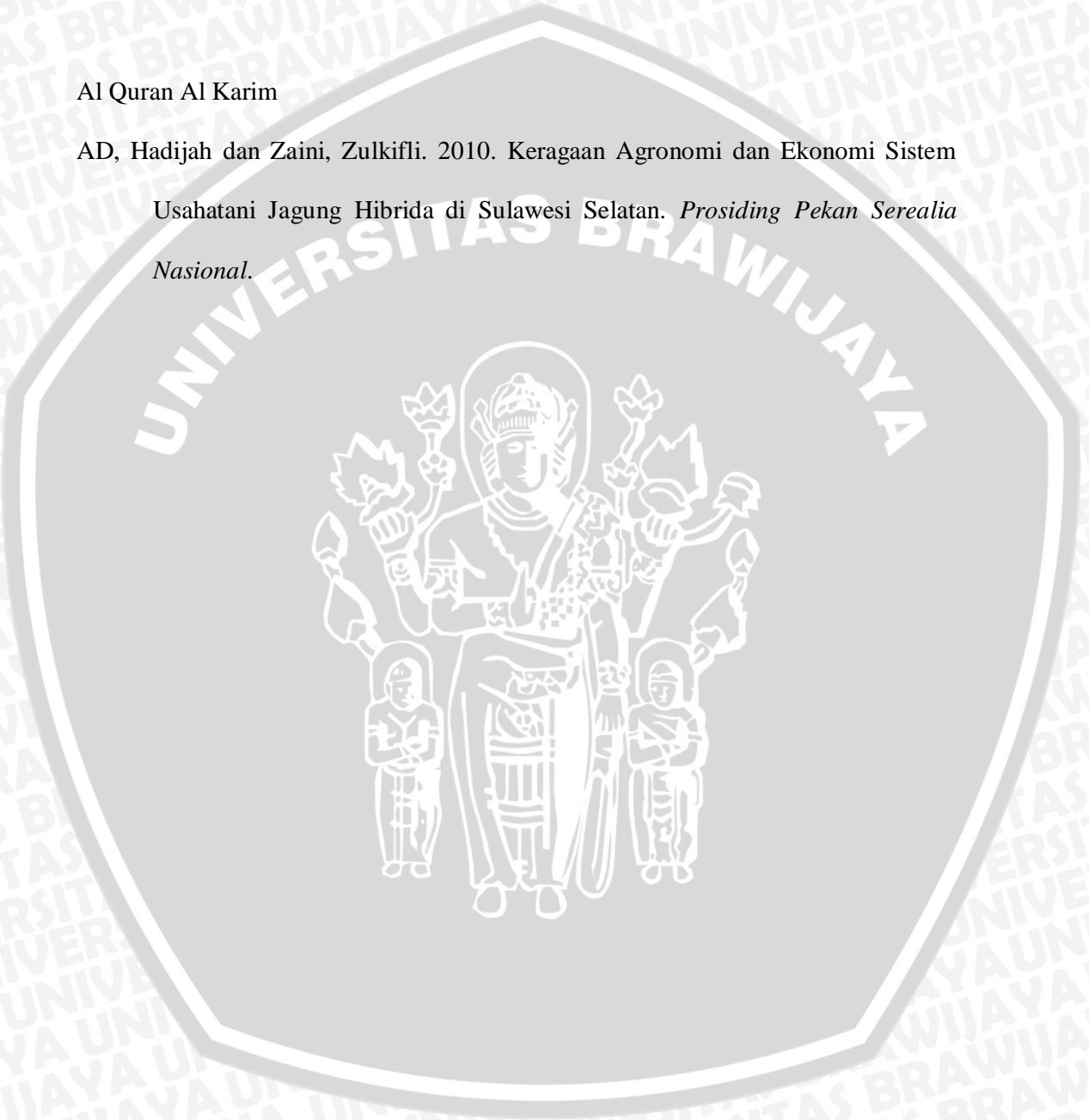
1. Oleh pihak perusahaan peneliti tidak diijinkan melakukan penelitian langsung di lingkungan perusahaan sehingga peneliti tidak dapat membandingkan argumen yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dengan argumen yang dikeluarkan oleh petani.
2. Keterbatasan waktu penelitian dan pengetahuan penulis, sehingga pembahasan dan penyelesaian masalah yang penulis sarankan masih bersifat sangat teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

AD, Hadijah dan Zaini, Zulkifli. 2010. Keragaan Agronomi dan Ekonomi Sistem

Usahatani Jagung Hibrida di Sulawesi Selatan. *Prosiding Pekan Serealia Nasional*.



Adlhiyati, Zakki. 2010. Produk Rekayasa Genetika (Gmo/Genetically Modified Organism) Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman. Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 6 April 2012.

Andrianto, Jati dan Irianto, Gugus. 2008. *Akuntansi & Kekuasaan: [dalam konteks] Bank BUMN Indonesia*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang-Aditya Media Publishing.

Anseeuw, W. *et al.* 2012. Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South: Analytical Report based on the Land Matrix Database Number 1: April 2012. *The Land Matrix Partnership*

Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia (Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi)*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama (Penerbit Erlangga).

Ashadi, Ridho Saiful. 2007. *Imperialisme Benih di Ladang Jagung*. Salam, 20 September 2007. Halaman 14-15.

Badan Bimas Ketahanan Pangan. 2001. *Program Kerja Pengembangan Kewaspadaan Pangan*. Jakarta. Departemen Pertanian.

Belkaoui, Ahmed Riahi. *Accounting Theory, 4th ed: Teori Akuntansi*. 2000. Terjemahan Marwata dkk. Jakarta: PT Salemba Empat.

Belkaoui, Ahmed Riahi. *Accounting Theory, 4th ed: Teori Akuntansi*. 2001. Terjemahan Marwata dkk. Jakarta: PT Salemba Empat.

Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Braun, Joachim von. 2008. *Agriculture for Sustainable Economic Development: A Global R&D Initiative to Avoid a Deep and Complex Crisis*. Charles Valentine Riley Memorial Lecture Capitol Hill Forum, Washington D.C., February 28, 2008

Chariri, Anis dan Nugroho, Firman Aji. 2009. Retorika Dalam Pelaporan *Corporate Social Responsibility* : Analisis Semiotik Atas *Sustainability Reporting* Pt Aneka Tambang Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang 4-6 November

Cooper, DJ dan Sherer, MJ. 1984. The Value Of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economy Of Accounting. *Accounting, Organization And Society*. Vol. 9, No. 34. pp 207-232.

Dewi, Ita Mutiara. 2007. Kelaparan Dan Pembangunan: Studi Kasus India.

IQTISHODUNA. September, ISSN 1829-524X

Fakih, Mansour. 2004. Neoliberalisme Dan Globalisasi. *Ekonomi Politik Digital*

Journal Al-Manär Edisi I. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

FAO. 2006. Statistical Appendix. *Crop Prospects and Food Situation*. No. 1 April

2006

Geertz, Clifford. 1963. *Involusi Pertanian*. Terjemahan oleh S. Supomo. 1983.

Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Gietema, Bart. 2006. *AgroSource 4: Farm Accounting*. Wageningen, Netherland:

Digigrafi.

Hansen, Don R dan Mowen, Maryanne M. 2009. *Managerial Accounting: Akuntansi*

Manajerial. Terjemahan Deny Arnos Kwary. Jakarta: PT Salemba Empat.

Harahap, Sofyan safri. 1995. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Teori Akuntansi: Laporan Keuangan*. Jakarta: PT

Bumi Aksara.

Harahap, Sofyan Syafri. 2003. *Teori Akuntansi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Hardinsyah *et al.* 2002. *Modul Ketahanan Pangan 03. Analisis Kebutuhan*

Konsumsi Pangan. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG)

Institut Pertanian Bogor dan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan (PPKP)

Badan Bimas Ketahanan Pangan, Deptan.

Hartaty, Anny. Pertanian Organik Sebagai Solusi Alternatif Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. *Prosiding Seminar Nasional*. Penyunting, Muryanto [et al.]. Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, 2007.

Hartley, Shirley Foster. 1972. *Population Quantity vs. Quality*. New Jersey. USA: Prentice-HALL, Inc., Englewood Cliff.

Haryadi, Bambang. 2011. Analisis Laba (Rugi) PDAM dalam Perspektif Political Economy Of Accounting (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum BTM). *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Heertz, Noreena. 2003. *Penjajahan Kapitalisme: Runtuhnya Negara & Virus Jahat Konsumerisme*. Terjemahan Dindin Solahudin. 2011. Bandung: Nuansa.

Helmi, Alfian. *Politik Pangan Indonesia: Renungan Hari Pangan Dunia*.

<http://politik.kompasiana.com/2011/10/16/politik-pangan-indonesia-renungan-hari-pangan-dunia/>. diakses tanggal 7 Maret Pukul 06.49 WIB

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4319&Itemid=29, diakses tanggal 7 maret 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>. Diakses 8 Maret 2012

IASB. 2011. *International Accounting Standards IAS 41: Agriculture*.

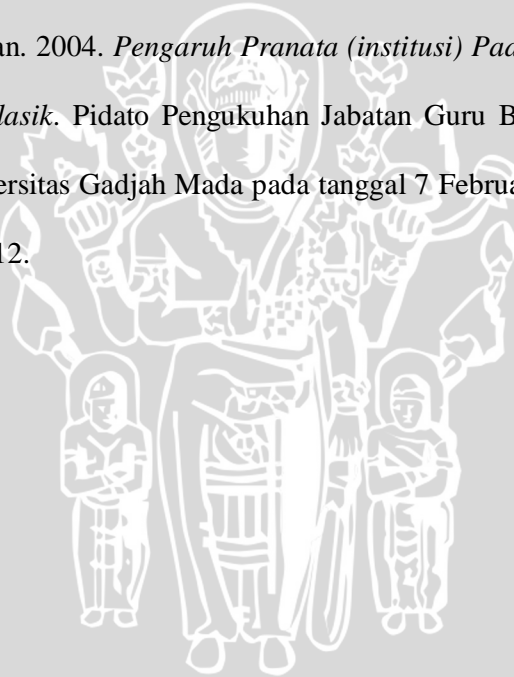
Ikhsan, Arfan dan Suprasto, Herkulanus Bambang. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Iqbal, Muhammad. 2008. Tinjauan Teoritis dan Implementasi Manajemen Pertanian Kontrak. *Jurnal Ekonomi*. XIII (1). Maret 2008. pp 71-83.

Kariyasa, Ketut. 2007. Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian Benih Bersubsidi. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 4, Desember, halaman : 304-319

Karseno, Arief Ramelan. 2004. *Pengaruh Pranata (institusi) Pada Penerapan Teori Ekonomi Neoklasik*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 Februari. Diakses tanggal 20 Februari 2012.

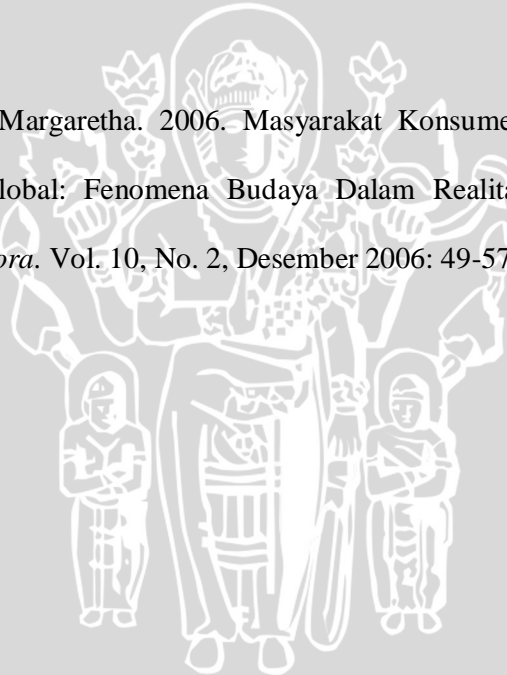


Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.

Khudori. 2005. *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Kruniasih, Ichwani dan Paramita, Sipri. 2006. Penggunaan Pestisida dalam Pengendalian Hama Terpadu Petani Sayuran di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Agros*. Vol. 8, No. 1. Januari, halaman: 103-115

Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial. *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 10, No. 2, Desember 2006: 49-57.



Kuyek, Devlin M. 1999. *Yang Diuntungkan Dari Bisnis Racun: Industri Pestisida*.

Terjemahan Nila Ardhanie. 1999. Solo: Yayasan Duta Awam.

Laporan Keuangan PT BISI International Tahun 2008

Laporan Keuangan PT BISI International Tahun 2009

Laporan Keuangan PT BISI International Tahun 2010

Laporan Keuangan PT BISI International Tahun 2011

Laporan Tahunan PT BISI International Tahun 2007

Laporan Tahunan PT BISI International Tahun 2008

Laporan Tahunan PT BISI International Tahun 2009

Laporan Tahunan PT BISI International Tahun 2010

Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS

Manzilati, Asfi. 2011. *Kontrak yang Melemahkan: Relasi Petani dan Korporasi*.

Malang: Universitas Brawijaya Press.

Miftahulhaq, 2012. Agama Dan Penyelamatan Lingkungan .

<http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/artikel-agama-dan-penyelamatan-lingkungan--detail-246.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhammad dan Fauroni, R. Lukman. 2002. *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mulawarman, Aji Dedi. 2012. *Rintisan Menuju Akuntansi Pertanian Syariah: Keluar dari Penjara Neoliberalisme dan Fiqh Perdagangan*. Malang: Badan Publikasi dan Penerbitan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Munthe, Hadriana Marhaeni. *Modernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Harmoni Sosial. September 2007, Volume II, No. 1

Nawangasasi, Hanning *et al.* 2010. Pro Kontra Fair Value, Kebaikan dan Keburukan

Fair Value Sebagai Dasar Pengukuran Aset.

<http://seminarakuntansi.warsidi.com/2010/05/pro-kontra-fair-value-kebaikan-dan.html>. Diakses tanggal 3 Mei 2012.

Nurjaya, I. Nyoman. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS).

Panjaitan, Iskandar dan Supratiwi, Ratna Juwita. *World Trade Organization (WTO)/Organisasi Perdagangan Dunia*.

<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>. Diakses tanggal 5 Mei 2012.

Perkins, John. 2004. *Confession of an Economic Hit Man: Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Terjemahan Tirtaatmaja, Herman dan Karyani, Dwi. 2005. Jakarta: Abdi Tandur.

Perwira, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakary.

Pitana. 1993. *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Editor: Jusuf Sutanto dan Tim. Cetakan Pertama. 2006. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Pontoh, Coen Husein. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book.

Prastowo, Nugroho Joko *et al.* 2008. *Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas Dan Implikasinya Terhadap Inflasi*. Bank Indonesia. Working Paper: WP/07/2008

Qaradhawi, Y. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Penerbit Al-Kautsar. Jakarta

Rais, Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press

Rahman, Aulia Fuad. 2005. Akuntansi Akrua: Suatu Kesempatan Berperilaku Oportunistis. *Lintasan Ekonomi*. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah FE UB.

Salvatore, Dominick. *Managerial Economics: Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*). Terjemahan Ichsan Setyo Budi. 2005. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Santosa, Purbahayu Budi. 2008. Relevansi dan Aplikasi Aliran Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No 1, hal. 46-60

Saptana dan Ashari . 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. *Jurnal Litbang Pertanian*. 26(4), 2007.

Saragih, Henry. 2010. Catatan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan SPI: Korporatisasi Pertanian telah Meminggirkan Pertanian Rakyat. *Serikat Petani Indonesia*.

Sarjan, Muhammad. 2009. *Perlindungan Tanaman Dari Serangan Hama Melalui Pendekatan Teknologi Non-Kimiawi Sintetis: Peranannya untuk mencapai keamanan pangan di Era Globalisasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Mataram Tanggal 12 Pebruari 2009 di Mataram.

Sawit, M. Husein. 2007. Usulan kebijakan beras dari bank dunia: resep yang keliru. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 5 (3). September 2007. pp 193-212.

Sawit, M. Husein. 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 6 (3). September 2008. pp 199-221

Setiabudi, Hendry Y dan Iwan Triyuwono. 2002. *Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Siregar, Chairil N. 2007. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 12 Tahun 6, Desember. Halaman 285-288

Siregar, P. Raja. 2005. Pak Tukirin: Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau. *Lembar info WALHI*: Kamis, 22 September 2005. Diakses pada www.pergerakankebangsaan.org pada tanggal 28 April 2012

Sitorus, MT Felix. Paradigma Ekologi Budaya untuk Pengembangan Pertanian Padi (Pertanian Sebagai Interaksi Berinti Budaya antara Benih, Tanah da Tenaga). *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No.03, September 2006: 167-184.

Stamboel, Kemal Azis. 2012. *Rakyat Miskin Desa Tunggu Reforma Agraria*. AgroFarm. Tahun II, Edisi 21. Januari-Februari 2012. Halaman 30-31.

Sugiyanto, FX. 2007. *Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan*. Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro pada tanggal 7 Juli 2007. Semarang: Badan Penerbit Undip

Sukahar, Djoko Su'ud. 2012. *Kloning. Itu Jawaban untuk Pasokan Pangan Masa Depan. Tanpa Itu Rasanya Muskil Sektor Pangan Tercukupi. Apalagi Kenaikan Jumlah Penduduk yang Tinggi dengan Konversi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian yang Membabi-Buta. Adakah ini akan Kembali Diserahkan Kepada Asing?*. AgroFarm. Tahun II, Edisi 21. Januari-Februari 2012. Halaman 7.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sutarya, Endang dan Dwi Munthaha. 2007. *Bermula dari Benih Menuju Kemandirian Petani*. Salam, 20 September 2007.

Steger , Manfred B. 2005. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Jogjakarta: Lafadl Pustaka

Suseno, Franz Magnis. 1993. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia.

Subiyantoro, Eko. B dan Triyuwono, Iwan. 2004. *Laba Humanis: Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Malang: Bayumedia Publishing.

Swasono, Sri-Edi. 2003. *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Syarief *et al.* 1999. *Membenahi Konsep Ketahanan Pangan Indonesia. Pembangunan Gizi dan Pangan Dari Perspektif Kemandirian Lokal*. Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dan Center For Regional Resource Development & Community Empowenment. Bogor

Taba, Andi Husni *et al.* 2007. Evaluasi Penyuluhan dan Analisis Usaha Tani Penggunaan Pestisida Nabati Babadotan (*Ageratum Conyzoides*) Pada Hama Wereng Coklat (*Nilaparvata lugens* Stal). *Jurnal Agrisistem*, Vol. 3 No. 2. Desember, halaman 95-101.

Thobroni, Ahmad Yusam. 2011. *Fikih Kelautan: Perspektif Al Quran tentang Pengelolaan Potensi Laut*. Jakarta: Dian Rakyat

Tinker, A. M. 1980. Towards A Political Economic Of Accounting: An Empirical Illustration Of The Cambridge Controversies. *Accounting, Organization And Society*. Vol. 5, No. 1, pp 147-160.

Tobing, Maryani Cyccu. 2009. *Keanekaragaman Hayati Dan Pengelolaan Serangga Hama Dalam Agroekosistem*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Entomologi Pertanian pada Fakultas Pertanian, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Medan, 10 Oktober. Diakses tanggal 23 Maret 2012.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tuanakotta, Theodorus M. 1986. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wibowo, I. 2010. *Negara Centeng : Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

www.litbang.deptan.go.id. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung. Diakses tanggal 18 April 2012

_____, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009) Tentang Penyajian Laporan Keuangan. 2009. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

_____, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2007) Tentang Aset Tetap. 2007. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

- _____, Rancangan Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. *Kementerian Pertanian*. 2009. Diakses tanggal 26 Maret 2012.
- _____, SFAC No. 6 Elements of Financial Statements. 1985. Financial Accounting Standards Board.
- _____, SFAC No. 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information. 1980. Financial Accounting Standards Board.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- _____, Menanggung Untung dari Petani Miskin.
http://www.infogoe.com/article/2008/09/02/menanggung_untung_dari_petani_miskin. Diakses 18 April 2012



—, Dominasi perusahaan benih multinasional.

<http://desasejahtera.org/artikel/14-dominasi-perusahaan-benih-multinasional.html>. Diakses 22 April 2012

—, 2012. *Target Surplus Beras Dicitir*. AgroFarm. Tahun II, Edisi 21. Januari-Februari 2012. Halaman 37-39.

—, 29 April 2012. Pemerintah Pilih Batasi BBM Ketimbang Naikkan Harga. Radar Bangka. <http://www.radarbangka.co.id/berita/pdf/nusantara/2084>. Diakses tanggal 29 April

—, Kebijakan Pertanian Salah Arah. <http://partaimerdeka.or.id/component/content/article/60-berita/934-kebijakan-pertanian>. Diakses tanggal 29 April 2012

—, *Investasi Asing di Sektor Kelapa Sawit*. <http://www.cdmione.com/services.php>. Diakses tanggal 25 Mei 2012.

—, *Penawaran dan Permintaan*. http://en.wikipedia.org.id.mk.gd/wiki/Supply_and_Demand. Diakses tanggal 22 Mei 2012.

—, 2008. *Seren Taun: Bentuk Aktualisasi Sosial Budaya Dalam Pertanian Organik*.

<http://www.mb.ipb.ac.id/artikel/view/id/c40328bd1d27b8379ba516d033b29a3c.html>. Diakses tanggal 4 Juni 2012.

—, International Monetary Fund. 1998. *Letter of Intent of the government of Indonesia*. Publication.

<http://www.imf.org/external/np/loi/091198.htm>. Diakses tanggal 16 Maret 2012.



LAMPIRAN 1

PAK SUPARDI (45 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Bertani sejak tahun 1985) (22 April 2012)

- V : Tiyang tani niku sing dipingini napa mawon?
- S : nggih sing dipingini terutama nggih niku hasil ingkang kathah, sing kedua niku cara bibite niku sampun ngantos larang², yang sedang². Soale bibit jagung niku nek satu kilo niku mencapai tujuh puluh satu kilo. Kalau dijual hanya tiga ribu itu kan jauh berbeda, maksudnya gitu. Dan disamping itu seperti pupuk juga ya jangan sampai terlalu mahal. Ini kan selalu naik terus, ini sudah naik sepuluh ribu satu sak, jadi lima puluh kilo sudah naik sepuluh ribu. Dampaknya mau naik BBM, ternyata BBM ndak jadi naik, tapi ternyata pupuk itu tetep naik tidak mau turun, ya itu seperti yang jenisnya urea.
- V : Benih jagung hibrida kalih lokal niku eco pundhi?
- S : Nggih sekeco hibrida, hibrida saking pertanian, lha nek lokal niku lak ditanem hasile mboten maksimal. Dados ragate niku sami, tapi hasile mboten sami, cuma beda benihnya. Lak nek lokal kan otomatis kurang apik lak neke hibrida saking pertanian kan apik, tapi yo kuwi regane satu kilo tujuh puluh ribu (Pioneer niku).
- V : Pernah tanem BISI?
- S : BISI nggih pernah, kalau BISI niku sekarang harganya itu empat puluh ribu (BISI-2), kalau Pioneer tujuh puluh ribu.
- V : Sabine jenengan niku kinten² pinten hektar?
- S : Yang saya tanami sekarang sekitar dua ratus ru, dua ratus ru niku sekitar seperempat hektar.
- V : Niku butuh benih jagung hibrida pinten kilo?
- S : Lha neke kalihat² ru niku butuhe niku neke hibrida niku sekitar enam kilo. BISI-2 empat puluh ribu, lak Pioneer niku sekitar tujuh puluh ribu (P-21)
- V : Bertani menggunakan benih hibrida dengan bertani menggunakan benih lokal niku biayanipun sami mawon?
- S : Nggih ragate sami, cuma bentene hanya rego bibit. Lak hibrida niku kan regane mahal tapi sudah maksimal hasilnya. Pokoke mboten diserang kalih hama, wereng trus keputihen ngoteniku.
- V : Revolusi hijau dimulai sekitar tahun 80 an, sebelum tahun 80 an kalih sesudah tahun 80 an ngantos sekarang niku wonten bentene napa mboten masalah hama niku?
- S : Nek bentene nek tahun² sekarang niku lebih parah lebih sulit, hama itu lebih banyak sekali, banyak obat juga banyak hama atau penyakit, kalau dulu itu obat itu hanya murah² gitu saja sudah selesai, kalau sekarang ndak. Sampai ratusan, tujuh puluh, seratus, seratus dua puluh, seratus dua puluh lima itu obat untuk menanggulangi hama napa penyakit itu.
- V : Menurut jenengan pertanian itu napa?
- S : yang pertama kita itu kan bekerja, bekerja itu niatnya dengan ibadah, kalau prasarana petani untuk mencari keuntungan yang lebih banyak itu hanya untuk menunjang ibadah. Kalau kita bertani hasilnya banyak akhirnya beribadahnya akan tenang karena hasilnya juga banyak, tapi kalau hasilnya

itu tidak banyak kan ibadahnya juga kacau kalau kita itu belum beriman. Tapi kalau kita sudah beriman kita kan sudah berpasrah kepada Allah.

- V : Dadose bertani niku mboten namung untung rugi nggih?
- S : Nggih lak miturut kulo nggih terutama kan kita itu manusia itu diwajibkan untuk bekerja, bekerja niku nggih mencari keuntungan, mencari keuntungan niku damel menyongsong ibadah, supaya biar tenang lah. Soalnya kalau ibadah itu kalau ekonominya goyah akhirnya ibadahnya juga ikut goyah kalau tidak benar2 beriman.
- V : Dadose tujuan utamane niku ibadah nggih?
- S : Nggih, ibadah yang pertama kan kita bekerja kan untuk prasarana kehidupan, kehidupan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akherat. Akhirnya itu juga ditunjang dengan beribadah.
- V : Jenengan kan bertani, tapi nggih dados pegawai negeri, kagem jenengan bertani niku namung sampingan napa nggih sampingan tapi..nek bertani niku wonten perasaan ayem ngoten lho celak kalihan alam, napa2?
- S : lha lak menurut kula,,,kula niki nggih pegawe...tapi nek pertanian niku memang sudah bakat saya mulai dari kecil. Dadine saya tidak bisa meninggalkan untuk bertani, niku yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu melihat tanaman yang lebih hijau, baik itu di dalam hati itu biar ayem gitu lho kalau melihat tanaman yang lebih hijau2 di hati ayem.
- V : Wonten perbedaan napa mboten jika kita merawat tanaman dengan hati...dengan merawat tanaman tanpa menggunakan hati?
- S : Nggih yang pertama merawat dengan hati, dengan hati itu sebetulnya kita harus berdoa, tapi kalau dari segi awam kito meniko kedah damel penelitian. Dados tiap hari menika kedah dipun teliti dospundhi gerak2i tanduran, maksudte wonten penyakit napa mboten niku nggih kedah diteliti, niku ingkang nomer kalih.
- V : Dadose intinipun memperlakukan tumbuhan niku nggih kados kita memperlakukan atau merawat makhluk hidup yang lain nggih?
- S : Nggih, sama saja.
- V : Wonten kasih sayang nggih?
- S : Nggih, nggih wonten, dados sampung nggresah mawon, dados seupami tanduran niku awon menika sampun nggresah, nggih kita pertama pasrah kepada Allah, yang kedua kita harus berusaha .

PAK TUKIRIN (BIN MARUJI) (23 April 2012)

Vaisal : Jenengan kan matur, jenengan pengen bertani kados tahun 60 an, bertani kados tahun 60 an niku kados pundi?

Tukirin: niku ngeten, pokokipun usaha pertanian niku kersane mboten begitu kathah ngangge pupuk kimia ngoten lho, dadose petani niku mawi organik ngoten. Dadose tahun 60 an mboten mawi kimia kan saget gesang taneman niku, nggih saget nyekapi kluarga ngoten lho maksud kula.

Vaisal : Keuntungan kalih kerugian menjalin kerjasama kalih pete niku napa?

Tukirin: Nek keuntungane nggih niku, gampilane rodok ngringkes tenaga, maksudte umpaminipun pun panen mboten usah mepe. Nek kerugian nipun kadang2 mboten saget nyumerapi kerjasamane niku, gampangane namung angsal

saran saking PPL ngoten lho. Dadose saking pabrik dos pundhi kan mboten mangertosi.

Vaisal : Biaya, waktu, tenaga untuk menanam bibit lokal kalihan bibit hibrida niku sami napa mboten?

Tukirin: Nek rumangsa kulo nggih sami mawon lokal kalih hibrida niku sami mawon biaya nipun. Cumake nek theng hibrida sing damel persiapan benih niku keuntungane niku jagung lanang ken mbabat niku damel pakan lembu niku saget.

Vaisal : Lak benih hibrida damel konsumsi niku sami napa mboten biaya, waktu, tenaga kalihan seupami tanem jagung lokal?

Tukirin: Lak hibrida damel konsumsi niku meh sami mawon, soale nggih diraka utawi diladoni ingkang sae ngoten persiapane kangge tanem benih ngoteniku sami mawon.

Vaisal : Jenengan sebagai petani niku pengene dos pundi?

Tukirin: Nek kangge petani, mungguhe kula niku pokoke sing penting niku petani pados pupuk niku gampang lajeng harga pertanian imbang laiha harga pupuk utawi harga bahan bakar kangge nguripi desel niku pokoke pun imbang ngoten pun sae damel kula. Dados mboten saget ngantos perbedaan tebih ngoten.

Vaisal : Pas melakukan kerjasam aklihan pete bisi riyen niku penyuluhan dilakukan theng pundhi?

Tukirin: Pas pelaksanaan rumiyen penyuluhan dilaksanakan theng saben2 dados PPL niku langsung nangani theng sawah2 niku, umpaminipun jabut sekar kirang sae dikontak napa dihubungi kalihan PPL niku.

Vaisal : Lha pas dikumpulaken untuk rundingan melakukan kerjasama dengan pete niku theng pundi?

Tukirin: datheng kelompok tani, gampangipun petani2 lajeng dihubungu wonten kelompok tani.

Vaisal : Riye wonten pernyataan napa mboten lak hasilnya bagus akan mendapatkan hadiah, lak wonten hadiah berupa napa?

Tukirin: Niku sak rehne mpun pelaksanaan hasil panen lajeng PPL ngendika nomer setunggal angsal hadiah ngoten, tapi berupa napa niku mboten angsal penjelasan. Rumiyen singjelas niku berupa selep pipil. Sing dapet sing terbaik nomer satu saha nomer dua. Per kelompok tani.

Vaisal : Alasan jenengan berhenti melakukan kontrak kerjasama niku napa?

Tukirin: Anu..dangu2 mboten pati menguntungkan ngoten, lajeng kula pikir2 mandiri niku.

Vaisal : Mboten menguntungkane niku kados pundi?

Tukirin: Kadang2 kan jagunge wonten sing bule utawa pethak ngoteniku kan mboten menguntungkan, mangke hasilipun utawi mutunipun kan kirang sae.

Vaisal : Seupami wonten pilihan kerjasama kalih pete napa mboten niku jenengan milih pundi?

Tukirin: Mungguh taksih wonten kerjasama malih niku kula nggih berusaha kerjasama malih, kersane meningkatkan pengetahuan ngoteniku, dos pundi mutune mangke ngoten. Lak masalah penghasilan hampir sama.

Vaisal : Riyeu niku kan seumpami wonten jagung ingkang tingginipun mboten sami disuruh motong, seupami niku mboten dipotong dos pundi?

Tukirin: Niku karepe PPL kedah dibucali, amergi mangke lak mboten dibucal ngganggu kanan kirinipun, mangke kan otomatis nek jagung nonjol niku sekare mengke nek ndawah teng nggene jagung estri kan otomatis kan mempengaruhi, mboten kados srampak ngoten lho. Mengke lak damel benih mboten srampak ngoten lho.

Vaisal : Laporan theng Walhi niku tirose wonten potongan Rp 500 per kilogram, niku napa?

Tukirin: Nek soal jabut bunga memang seupami kasep utawi tledor ingkang jabut niku pancen wonten kerugian. Timbangane mangke petani mboten dipundut utawi dirugikan mangke dipendet pete nanging radi dirugikan ngoteniku.

Vaisal : Bertani menurut jenengan niku napa?

Tukirin: Pokoke nyambut damel kangge kluargi niku tlaten lan sabar insya Allah saget berhasil. Umpaminipun kadang2 wonten kendalanipun mengke terus diotak-atik kan saget.

Vaisal : Bertani menurut jenengan niku bertani biasa napa?

Tukirin: Lak kanggene kula niku sedaya niku umpaminipun berjalan lancar, sae niku bersyukuripun datheng Gusti Alloh nggih malah langkung sae, langkung nemen ngoten niku kanggene kula niku, mboten koke namung bertani berhasil mpun cekap mboten ngoten. Pokokipun umpami tanduran kanan kirinipun sae napa malih lak kalih tangga tepalih niku mungkin kurang berhasil niku saget omong2an amrih apike dos pundi ngoten kula malak langkung sae. Dadi syukuripun datheng Gusti Alloh luweh nemen malahan.

Vaisal : Wonten perbedaan napa mboten pak bertani biasa kalihan bertani damel kasih sayang?

Tukirin: Nggih tiyang niku berusaha mas, tanaman niku kadang2 nggih disayang diramut niku nggih sae, tapi seupami mboten kados angen2 niku dibalekaken datheng Gusti Alloh, lek cara kula ngoten. Lek kasih sayang kalih taneman niku nggih dipun sukani soale kersane angsal imbal balike ingkang sae ngoten.

BU AMINAH (53 Tahun) / ISTRI BAPAK TUKIRIN (23 April 2012)

Aminah : Kulo kadang2 lek sumek, nggih teng saben ngingeti tanduran sing empane seger2, ledu2 nggih ruemen ngoten lho, empane kados pundhi ngoten lho theng manah, kados tomo ngoten lho theng manah niku, kadang2 ngoteniku. Mulakne kulo pinten dinten pindah ngoteniku lajeng theng saben, kadang2 minggu mboten ngeteraken anak kulo ngoteniku, injing ngoteniku nggih ningali mubeng kalih jalan2 theng saben ngoteniku

Vaisal : Panjenengan niku ngrencangi bapake theng saben napa namung sekedar kirim?

Aminah : Kula neke bapake theng saben ngoteniku theng griyo damel sarapan lha mangke terus theng saben nggih ngrencangi bapake niku, kadang2 nggih ngicir, ngrabuk nggih kula rencangi.

Vaisal : Dadose lak ngobati tanaman niku damel obat2an alami nggih?

Aminah : Nggih

Vaisal : Obat2an alami niku napa mawon bu?

Aminah : Nggih kados gadung, niku mangke diperes lajeng toyanipun damel nyemprotne, niku lak uler ngoteniku nggih saget dipun basmi, terus tobo kadang2 nggih ngoteniku, trus rabuk ngoteniku biasane nggih ndamel kaleh rencang2 ngoteniku, sing rabok kangge semprotan niku

Vaisal : Pupuke niku biasane jenengan kalihan bapake kathah damel pupuk kandang napa pupuk kimia?

Aminah : Sing kathah niku pupuk kandang mas, dadose damel pupuk kandang niku, kompos lajeng dipun campur kalih urea sekedhik lajeng dipun semprot kalih organik niku, ditutup malih kalihan kompos niku, ngantos sekawan sap ngoteniku. Dadose damel ngrabuk gandum niku nggih iju, nggih sae niku damel nguripne, nggih mboten patos kinging hama ngoteniku mas gandumipun. Pantun napa niku nggih sering disukani ngoteniku kalih bapake sak derenge tandur dipun sawuraken lajeng dipun luku.

Vaisal : Ibu niku lak bertani ngoteniku napa kados ngopeni anak piyambak?

Aminah : Nggih, nak kulo kaleh tanaman niku rumangsa kulo lek sajake kirang ngoteniku dospundi amrih lemune, amrih ijone dospundi ngoteniku kados ngopeni anak2 theng griyo ngeteniki lho. Upami ngeteniki amrih waras, amrihe lemu ngoten kan enten theng griyo umpamine ngopeni anak2 ngoteniku. Kan coro anune nggih butuh kasih sayang tho mas, coro tanduran nho piye amrih anune ngoteniku kan nggih butuh ngoteniku, dadose nggih seneng ngoteniku theng taneman.

Vaisal : Seupami mboten diberi kasih sayang ngoteniku kadang2 hasile nggih elek nggih?

Aminah : Nggih, wong gandum niku nggih mas, coro sing cilik2 niko upami diopeni saget bongoh niku nggih tongkole saget uageng2 ngoten. Lha mangek nek mboten diopeni, diumbarne, kasarane namuk dirabuk, nggih alit2 mas, tebone mboten saget ageng2, dadose damel nguripne niku kedah disukani rabuk lan kasih sayang kersane tebone kawet alit ageng, mangke lak ageng wohe nggih sae.

Vaisal : Pas panjenengan ngrabuk ngoteniku wonten rasa nggrundel napa mboten?

Aminah : Mboten, nggih pikirane namuk pripun nyuwun kalihan Gusti Allah, mugi2 diparingi sae, mugi2 diparingi normal tandurane, mboten wonten risiko napa2, mugi2 diparingi hasil ingkang sae ngoten, theng manah niku ngoteniku.

Vaisal : Dadose theng manah niku berdoa supados hasile sae ngoten?

Aminah : Nggih

Vaisal : Sebagai istri seorang petani pengene jenengan kados pundi?

Aminah : Pingin kula niku nggih mas, coro anu nho petani wes kangelan nanem, trus...nggih angen2e niku lak pas panen niku mbok nggiho nggih, regine niku mboten usah mandap, sak ugi panen niku regi mesti mandap, lha mangke lak petani mpun mboten gadah simpanan mindak maleh, ngoteniku terus. Sing kula pingini niku nggih e...petani niku mbok nggih disukani regi ingkang pas kersane gadah turahan lah...ngoten lho. Dadose upami panen lak regine niku sae kan enak. Sakniki kan napa2 sae reginipun...lha jagung niku reginipun kok panggah theng ngandap piyambak. Lha sing mesti niku jagung

niku kan upami reginipun tumut2 kados lintune kan petani niku kan radi angsal turahan lah, gampile ngoten. Umpami wonten turahan kan saget damel napa2 kan mboten kados nemen2 ngoten lho mas.

Vaisal : Pas tander niku biasane rata2 pupuk, benih ngoteniku mahal2 nggih bu?

Aminah : Nggih..pupuk niku nggih mahal, trus mesti mundak ngoteniku, trus benih niku nggih ngoten, upami dereng usume ngoten lak benih sing theng toko niku namung seket ngoten, mangke lak pun usum rame ngoteniku nggih ngantos seket gangsal, seket sanga ngoteniku sing jenise pioneer ngoteniku.

Vaisal : Pas panen reginipun panen dos pundi bu?

Aminah : Pas panen niku reginipun murah...lha niki regi gandum nem likur niku pun kawet nika mboten wonten mundake, tak sih panggah mawon. Lha tirose jagung gunung panen, amber ngoteniku. Asline jane nggih panggah ngoteniku, angger mulai panen mandap..mandap...ngoteniku. Dadose nggih namuk pas2an ngoteniku sak ugi panen nek tiyang tani biasa2 ngoten nggih pun mboten angsal bagian mas.

PAK MUJI (19 Mei 2012)

Vaisal : Benih dari perusahaan itu gratis atau dibeli?

Muji : Kalau dulu beli, sekarang ini gratis karena banyak persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, sekarang kan banyak perusahaan seperti Monsanto, Pioneer itu gratis jadi BISI ikut gratis.

Vaisal : Benih dari perusahaan itu gratis mulai tahun berapa?

Muji : Benih gratis itu kira-kira sudah dua tahun ini

Vaisal : Proses penanaman sama dengan jagung pada umumnya atau tidak?

Muji : Tidak sama, kalau jagung yang dari perusahaan itu sangat sulit. Kalau penanamannya itu sama, Cuma pemeliharannya agak sulit karena harus tepat waktu pada saat pemupukan, dangir, harus tahu waktu cabut bunga, semuanya harus tepat waktu kalau tidak tepat waktu nanti hasilnya jelek.

Vaisal : Kalau masalah pendapatan lebih banyak dari pete atau bertani sendiri?

Muji : Kalau enaknya itu kerjasama dengan pete, sebab petani gak susah, kalau panen tidak perlu menjemur. Kedua, panen langsung diambil, kan gak perlu ngedos, jemur, itu keuntungannya. Kalau sudah ditentukan misalnya hari kamis akan diambil, hari selasa kita sudah panen supaya hari kamis itu barang sudah ada di rumah.

Vaisal : Penghasilannya itu lebih banyak bekerja dengan pete atau mandiri?

Muji : Kalau hasilnya itu lebih banyak dengan pete. Kalau per seperapatnya (tanah kira-kira seratus lima puluh ru) itu kira-kira kalau ditanam sendiri ya 2,5 juta (kalau dikering). Kalau dipabrik itu bisa lebih, lebihnya karena harganya tinggi, selisihnya kira-kira ya satu juta lah.

Vaisal : Biaya selama proses tanam itu ditanggung siapa?

Muji : Ya...yang naggung petani. Cuma kalau perusahaan ini hanya sekedar, sekedar memberi pinjaman. Misalnya, per seperempatnya itu pinjaman ya tiga ratus ribu, tetapi obat-obatan itu dikasih gratis, seperti mamigro itu tanah seperempat ya diberi seperempat kilo.

Vaisal : Dari perusahaan itu fasilitasnya apa saja?

Muji : Obat-obatan, bibit gratis sama pinjaman saja

Vaisal : Seupama terjadi gagal panen siapa yang menanggung kerugian? Kemudian seupama hasil panen yang diperoleh lebih rendah dari pinjaman itu bagaimana?

Muji : Pembayaran pinjamannya itu nanti ditangguhkan, maksudnya besok kalau panen lagi pembayarannya dipotong.

Vaisal : Jadi seupama terjadi gagal panen itu yang nanggung tetap petani?

Muji : Iya, yang nanggung tetap petani, pinjaman tersebut tetap harus dibayar.

Vaisal : Tanah yang bapak pakai itu tanah sendiri atau tanah sewa?

Muji : Tanah Sewa

Vaisal : Trus dari pihak perusahaan memberikan uang sewa tanah tersebut atau tidak?

Muji : Nggak...kita pribadi menyewa sendiri, dan perusahaan hanya memberikan benih, obat sama pinjaman gitu aja.

Vaisal : Alasan bapak mengikuti kontrak kerjasama dengan pete itu apa saja selain uang yang didapat lebih tinggi?

Muji : Yang didapat itu satu, kita itu tidak susah dalam pemasaran hasil panen. *Kedua*, untungnya itu juga relatif lebih tinggi, Cuma pemeliharaannya agak sulit. Cuma ketika kita pengangkutan hasil panen ada potongan untuk upah kuli. Upah kuli tersebut ditanggung oleh petani.

Vaisal : Bapak kan bekerjasama dengan pete, seupama hasil panen tersebut dijual ke pihak lain itu bagaimana?

Muji : Dari perusahaan itu tidak memperbolehkan. Sedangkan petani sendiri menurut apa yang disepakati karena petani tidak berani melanggar, kita itu maunya jujur. Sebab kalau dilaporkan itu kita juga bisa kena sanksi, apalagi saat ini benih diberikan secara gratis oleh perusahaan.

Vaisal : Biasanya sanksinya itu berupa apa pak ketika petani menjual ke pihak lain?

Muji : Oh...itu tidak diutarakan mas sama pihak perusahaan. Karena selama ini nggak ada perjanjian tertulis, tapi itu bisa dilaporkan. Yang berwajib yang tahu.

Vaisal : Ketika melakukan cabut bunga ada ganti rugi pak?

Muji : Nggak ada, jagung lanangnya itu dijawab itu tanpa ada ganti rugi. Jagung lanang itu kan fungsinya juga hanya untuk penyerbukan, kalau dipanen isinya juga sedikit.

Vaisal : Pertanian menurut bapak itu apa?

Muji : Yang jelas bertani itu berinteraksi dengan alam, sebab alam yang memberikan hasil dan kesejahteraan bagi petani, kesejahteraan petani. Jadi kalau petani mau panen itu harus menghormati alam. Kalau dulu itu *diwiviti*, *dislameti* supaya kita selamat, kalau jaman dulu petani itu sangat erat hubungannya dengan alam dan Tuhan. Mulai dari mau tanam sampai panen.

Vaisal : Kalau sekarang masih dilakukan tidak.

Muji : Sebagian masih dilakukan mas.

Vaisal : Alasan petani sudah tidak melakukan ritual seperti itu apa pak?

Muji : Sekarang kan jamannya sudah modern mas, jadi sebagian petani terutama petani muda itu merasa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut.

Vaisal : Bertani dijamin dahulu dan sekarang ada bedanya tidak pak?

Muji : Ada...kalau dulu itu pupuk kandang sudah bisa...hubungannya dengan alam baik...kalau sekarang adanya penyakit-penyakit yang meraja lela terhadap tanaman itu karena banyaknya insektisida dan pupuk kimia...padahal kebanyakan pupuk kimia dan isektisida itu kurang bagus untuk kesehatan. Makanya orang dahulu itu umurnya panjang mas.

Vaisal : Proses terjadinya kontrak itu bagaimana?

Muji : Petani dikumpulkan ke satu ketua kelompok...nanti diberi penyuluhan...petani mau menanam jenis apa...nanti sama petugas diberi pengarahan.

Vaisal : Kerugiannya melakukan kontrak kerjasama itu apa?

Muji : Kalau harganya tinggi petani tidak diberitahu, tapi ketika harga turun harganya diturunkan. Karena harga yang dipakai itu harga gudang, jadi petani tidak tahu informasi yang sebenarnya. Selain itu terkadang pembayarannya itu telat mas...telatnya pernah sampai tiga minggu...padahal petani kan butuh modal untuk bertani lagi.

Vaisal : Keinginan petani itu apa?

Muji : Pengennya petani itu jagung yang mudah ditanam, hasilnya bisa maksimal, harganya juga tinggi. Harga pupuk murah, harga BBM juga murah. Karena petani juga menggunakan diesel untuk mengairi sawahnya. Jangan mendatangkan jagung atau hasil pertanian dari luar negeri yang pada akhirnya harga jagung petani lokal jadi murah. Padahal pupuk mahal, BBM mahal tetapi pemerintah maunya harga panen murah terus petani bagaimana?

Vaisal : Tanah bapak sekarang kan setengah bau, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga belum?

Muji : Belum bisa mas, belum bisa mencukupi. Tanah setenga bau itu belum bisa mencukupi, sekarang saja untuk sewa tanah saja dua juta satu tahun, itu kalau sewa di tanah milik pemerintah. Itu kalau sewa di tanah milik masyarakat bisa lebih mahal lagi, bisa sampai dua setengah juta setahun. Jadi petani itu kecipratan ya hanya sedikit untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak, untuk sewa lahan, biaya menggarap.

Vaisal : Ketika melakukan kerjasama dengan pete, bapak itu bisa menerima penghasilan bersih berapa?

Muji : Sekitar tiga setengah juta mas. Dengan waktu tanam sekitar 110 hari. Jadi untuk setiap bulannya menerima sekitar satu juta mas. Itu kalau hasilnya maksimal kalau hasilnya tidak maksimal itu ya tidak bisa menghasilkan segitu. Itu kalau dalam keadaan bagus.

PAK IMAM/PENGALAMAN PERTAMA MELAKUKAN KONTRAK KERJASAMA(9 Juni 2012)

Vaisal : Tanah yang bapak garap itu tanah bapak sendiri atau sewa?

Imam : Saya disini hanya sebagai buruh tani mas.

Vaisal : Yang bapak tanam kan jagung kontrak kerjasama, bapak mendapatkan bagian berapa pak?

Imam : Wah...kula manut juragan mas...tirose juragan niku mangke manut rencang-rencange. Seupami rencange angsal saking perusahaan seratus tiganng dasa gangsal dari harga pasar nggih tumut rencange...

PAK SARIM (9 Juni 2012)

Vaisal : Jenengan nateh tumut kontrak kerjasama penanaman jagung kalihan pete napa mboten pak?

Sarim : Nggih...nateh mas...namung ping setunggal

Vaisal : Menapa kok mboten tumut kerjasama kalihan pete, napa mboten menguntungkan?

Sarim : Nggih...asline menguntungkan tapi lama kelamaan mboten menguntungkan.

Vaisal : Mboten menguntungkane dos pundhi pak?

Sarim : Lha pete niku riyen mbayar panen kula pernah telat ngantos tigang minggu, padahal kula nggih butuh modal damel tani maleh, sak lintune niku kula nggih butuh yatra dhamel nyukupi kebutuhan keluarga kula.

Vaisal : Seupami wonten tawaran maleh kerjasama kalihan pete, jenengan purun mboten?

Sarim : Kula niku tipe tiyang ingkang kanji mas, dadose seupama sekali ati kula dipun larani nggih kula ragu badhe tumut maleh. Sak lintune niku asline niku bertani kontrak kalihan mboten niku sami mawon. Mung bentene, lak kontrak niku mboten usah mipil kalihan mepe. Tapi kan lak bertani kontrak mboten saget bertani sistem tumpangsari, lak bertani mandiri kan saget. Lha niku saben kula kula tanemi pantun, terus sebagian kula tanemi jagung, lha ngandhape jagung taksik kula tanemi dele. Bertani jagung medura niku nggih luweh menguntungkan mas. Regine niku nggih kacek kalihan jagung-jagung hibrida teng pasaran. Regi jagung medura niku lebih inggil ketimbang jagung-jagung biasa niku.



LAMPIRAN 2

Foto 1 Wawancara dengan Pak Tukirin dan Bu Aminah



Foto 2 Kuncup Bunga yang Harus Segera Dicabut



Foto 3 Pak Muji Ketika Melakukan Proses Cabut Bunga



Foto 4 Pak Imam Ketika Melakukan Proses Cabut Bunga



Foto 5 Jagung Usia 14 Hari Milik Petani Kontrak



Foto 6 Jagung Pak Pardi (Merk Pioneer, Jenis P21)



Foto 7 Pak Karim Ketika Membersihkan Potongan Jagung Muda Jenis P21 Yang Tidak Dapat Dipanen



Foto 8 Direktur IMF Michel Camdessus dan Presiden Suharto saat Penandatanganan LoI 11 September 1998

